18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang
2018

Universitas Bina Darma

PROSIDING
Seminar Nasional
IQRA

Indonesia Qualitative Researcher Association

Wahana Pariwisata & Komunikasi Antar Bangsa

Editor :
Rahma Santhi Zinaida, M.I.Kom

Palembang, 2017

ISBN 978-979-3877-37-2

PROSIDING

ASIAN GAMES 2018
WAHANA PARIWISATA DAN KOMUNIKASI ANTAR BANGSA

SEMINAR NASIONAL INDONESIA QUALITATIVE RESEARCHER ASSOCIATION (IQRA) KE-1

PALEMBANG, 19-20 SEPTEMBER 2017

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

1.Asian Games 2. Komunikasi Pariwisata 3. Budaya

ASIAN GAMES 2018
WAHANA PARIWISATA DAN KOMUNIKASI ANTAR BANGSA

PENULIS
Pemakalah Seminar Nasional IQRA Ke 1

PENYUNTING / EDITOR :
Rahma Santhi Zinaida, M.IKom

RANCANG SAMPUL DAN TATA LETAK :
Dwi Maharani, M.I.Kom

REVIEWER :
Prof. Hj.Isna Wijayani, M.Si.,Ph.D
Dr. Hj. Ir. Ratu Mutialela Caropeboka, M.Si

PENERBIT :
Universitas Bina Darma
Jl. A.Yani No 3 Plaju, Palembang
Telp.0711-515582
http://binadarma.ac.id

Edisi Pertama
Cetakan I, September 2017

Pengantar

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma Palembang

Dengan mengucap syukur pada Allah Swt, karena kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus berkarya dan bersama sama memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Pertama-tama saya selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma Palembang sangat berbahagia dna bersyukur telah diberi kepercayaan menjadi tuan rumah Rakernas IQRA ke-1 dan Seminar Nasional dengan Tema Asian Games Sebagai Wahana Pariwisata dan Komunikasi Antar Bangsa, pada tanggal 19-20 September 2017. Tema yang diangkat oleh panitia kali ini sangat menarik karena terkait dengan persiapan Indonesia di kota Palembang dalam memasuki persaingan Global, dengan akan diadakannya kegiatan Asian Games 18 tahun 2018 mendatang.

Dalam meyelenggarakan kegiatan ini IQRA (Indonesia Qualitative Researcher Association) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma ,bersinergi dengan ASPIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi) KOrwil Sumsel dan acara tersebut akan di adakan di Hotel Swarna Dwipa dan kampus Universitas Bina Darma.

Menurut Bogdan&Taylor,1975 penelitian Kualitatif sendiri adalah proses penelitian yang bertujuan mengumpulkan, mendeskrisikan, menganalisis data deskriptif berupa: tulisan, ungkapan dan perilaku manusia yang diamati;Tidak bertujuan menguji teori/hipotesis, namun menyusun, mengembangkan teori/hipotesis dan mendeskripsikan kenyataan sosial; Mengumpulkan, menganalisis bukti empirik (data) secara sistematik untuk memahami dan menjelaskan kehidupan sosial yang dikaji secara mendalam;Data yang dikumpulkan yang berupa angka, melainkan kata-kata, kalimat, ungkapan panjang (walau data numerik tidak diharamkan), dan;Fokus: Subjective meaning, makna-makna, simbol, deskripsi kasus khusus atas berbagai kehidup sosial yang dalam pelaksanaannya sering menimbulkan kebingungan dan berbeda pandang bagi yang biasa menggunakan penelitian kuantitatif. Ada perbedaan yang perlu disamakan dalam mempersepsi penelitian kualitatif. Oleh karena itu Momentum ini menjadi penting bagi kita karena sebagai perguruan tinggi menjadi salah satu pusat rujukan akademis yang juga memiliki tanggung jawab yang besar

Untuk menjawab tantangan dalam penelitian kualitatif. Dengan seminar ini diharapkan muncul suatu metode, cara, model, teori atau hasil penelitian yang inovatif dalam kajian kualitatif. Yang semuanya Asian Games sebagai

perhelatan olahraga kelas dunia dapat dikaitkan sebagai pariwisata dan komunikasi antar bangsa. Disamping itu akan terjadi temuan-temuan baru penelitian kualitatif bidang komunikasi budaya, sastra, media, sejarah, politik, ekonomi dan ilmu sosial dari perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia. bertukar pikiran dan pandangan dalam menangani berbagai isu yang terkait dengan hubungan antar bangsa.

Akhirnya, kami mengucapkan Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini dan kepada panitia yang telah bekerja keras untuk meyukseskan penyelenggaraan acara ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Mewakili keluarga besar Universitas Bina Darma kami memohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kepada para peserta yang datang dari berbagai perguruan tinggi kami mengucapkan ribuan terima kasih semoga tidak merasa asing berada di bumi sriwijaya. Bersama-sama kita bertekad untuk membangun kehidupan penelitian kualitatif ditengah maraknya perkembangan dunia.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti Rakernas dan Seminar Nasional. Semoga prosiding ini bermanfaat untuk penulis dan pembacanya.

Wassalamualaikum Wr Wb,

Prof. Dra. Isnawijayani,Msi, Ph.D

DAFTAR ISI

MAKNA BUDAYA MEMAYU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI KERATON KANOMAN CIREBON 1 - 16

KESENJANGAN SOSIAL DAN RENDAHNYA KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN HERBERT MARCUSE 17 - 32

KUALITAS PELAYANAN PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI RUMAH SAKIT DR SUYOTO JAKARTA 33 - 49

TRIAL BY THE PRESS DI ERA KEBEBASAN PERS (Studi Deskriptif Kualitatif Pemberitaan pada Surat Kabar Fokus Pantura) 50 - 69

KONSTRUKSI REALITAS WARGA PENGHAYAT ALIRAN KEBATINAN PERJALANAN 70 - 81

POLITIK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY (Strategi Pengembangan Objek Wisata Situ Bagendit Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat) 82 - 106

KOMUNIKASI SIMBOLIK RIDWAN KAMIL PADA PEMBANGUNAN SKYWALK DI KOTA BANDUNG 106 - 119

POLA KOMUNIKASI MULTIKULTURAL ETNIS LOKAL DAN ETNIS TIONGHOA DI KALANGAN MAHASISWA KOTA PALEMBANG 120 - 132

PENGARUH RADIO DAN TELEVISI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENJAGAAN LINGKUNGAN DAN ALAM SEKITAR BAGI TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 133 - 143

KOMPETENSI KEMAMPUAN KRITIKAL TERHADAP MEDIA SOSIAL PADA SISWA SMAN 1 PATUK GUNUNG KIDUL 144 - 156

TENAGA KERJA PROSUMSI DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL DAN REZIM WAKTU KAPITALIS : ESENSI DAN IMPLIKASI 157 - 168

KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU TERHADAP KESADARAN MEREK 169 - 178

SENI SEBAGAI MEDIA PEMBAURAN BUDAYA TIONGHOA DAN SUNDA DI KOTA BANDUNG 197 - 196

PROSES ADAPTASI BUDAYA SUKU WALESI DALAM MENGHADAPI KEJUTAN BUDAYA DI KOTA JAYAPURA PAPUA 197 - 206

KOMUNIKASI TERAPEUTIK KONSELOR DALAM MENANGANI ORANG DENGAN LUPUS (ODAPUS)
(Studi Kasus di Syamsi Dhuha Foundation Bandung) 207 - 217

GASTRODIPLOMACY KULINER DAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KREATIF PADA MASYARAKAT KOTA PALEMBANG 218 - 229

METODE KUALITATIF DALAM PENELITIAN HUKUM 230 - 237

MAKNA BUDAYA MEMAYU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI KERATON KANOMAN CIREBON

1 Aghnia Dian Lestari, 2 Dedet Erawati,
3 Dikhorir Afnan, 4 Endah Nurhawaeny Kardiyati
1, 2 Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon, Jawa Barat
3 Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat
4 Mahasiswa Doktoral Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan MasyarakatUniversitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
E-mail: 1 aghniacahya55@gmail.com,2 deblume@gmail.com,
3 dik.gassela@gmail.com4 endah_nk@yahoo.com

Abstract : Indonesia as a developing country has the human resources potential. In the context of indigenous peoples, in truth, the nation had developed a way to survive by creating a system of values, lifestyles, the institutional and legal system in line with conditions local community. The experience of interacting closely with nature has provided in-depth knowledge for groups of indigenous peoples in the management of local resources.In a study entitled "The Meaning of Culture Memayu the Indigenous Community Empowerment in Keraton Kanoman Cirebon" The researchers used a qualitative methodology through semiotic approach by digging denotative, connotative, and myth. In collecting the data, researchers gather information through interviews with the triangulation of data as the primary data source that is used as a material for analysis is based on observations in the field. The results of this study found that the data in a sense of a cultural tradition "Memayu" contains denotative (real meaning) that "bebersih". The term "Memayu" there is also a connotative meaning (meaning or a group of words that are based on feelings or thoughts that arise or incurred on the speaker and the listener, which is pretty or ayu. It is concluded that the term "Memayu" in mythology serves to express and justify for the values prevailing in the society that is the belief that is present in the ritual "Memayu" is.

***Keywords**: Culture, Memayu, Keraton Kanoman*

Abstrak : Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai sumber daya manusia yang sangat potensial. Dalam konteks masyarakat adat,sejatinya bangsa ini telah lama mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi masyarakat setempat. Pengalaman berinteraksi secara ketat dengan alam telah memberikan pengetahuan mendalam bagi kelompok-kelompok masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya lokalnya.Pada penelitian berjudul "Makna Budaya Memayu dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat diKeraton Kanoman

Cirebon"ini peneliti menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan semiotika dengan cara menggali makna denotatif, konotatif, dan mitos. Dalam pengumpulan data, peneliti menggali informasi melalui wawancara mendalam dengan triangulasi data sebagai sumber data utama yang dijadikan bahan untuk kemudian dianalisis berdasarkan observasi di lapangan.Hasil penelitian ini didapati data bahwa dalam sebuah makna dari suatu tradisi budaya "Memayu"mengandung makna denotatif (maknasesungguhnya) yaitu bebersih.Pada istilah "Memayu"juga terdapat makna konotatif(makna atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara dan pendengar, yaitu cantik atau ayu.Kesimpulan penelitian ini adalah istilah "Memayu"secara mitologi berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai yang berlakudi masyarakat yaitu kepercayaan yang hadir dalam ritual itu "Memayu"tersebut.

***Kata Kunci**: Budaya, Memayu,Keraton Kanoman*

PENDAHULUAN

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat karena kebudayaan mencangkup semua hal yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat yaitu; pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh masyarakat karena kebudayaan itu sendiri diperoleh dari proses belajar pada lingkungan juga hasil pengamatan langsung. Kebudayaan juga mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam, sekaligus memberikan tuntunan untuk berinteraksi dengan sesamanya.Dalam artian alam dan interaksi antar sesama manusia harus seimbang dalam budaya masyarakat.

Keraton Kanoman Cirebon adalah salah satu tonggak sejarah Kota Cirebon dan berkembangnya agama Islam di Cirebon yang memiliki peninggalan benda-benda dan bangunan bersejarah. Pada tradisnya Keraton Kanoman memiliki kegiatan ritual Kesultanan Kanoman pada setiap tahunnya, kegiatannya memiliki beberapa prosesi, yaitu pembacaan Babad Cirebon, Bubur Sura, Ngalus, Damel Lilin Ageng, Ngerik, Damel ukup, Memayu Keraton, Ngapem dan Tawurji, Mipis Pertami, Latian Gamelan, Damel Bumbu Kebuli, Banjir Asin, Banjir Kuning dan Awu, Pelal Alit, Nyiram Pacara dan Mungkus Slawat Ageng, Pelal Ageng/Panjang Jimat, Selametan Buang Takir dan Tumpengan.Didalamnya terdapat makna-makna sebagai bentuk penghormatan dan pengetahuan tersebut sekaligus dapat dinyatakan bahwa kegiatan ritual Kesultanan Keraton Kanoman merupakan wadah berlangsungnya interaksi sosial. Dengan demikian, manusia perlu menjalankan fungsi sosialnya dengan melakukan interaksi dengan manusia lainnya, komunikasi menjembatani budaya beserta perangkatnya melalui interaksi dengan proses komunikasi.

Berdasarkan pada asumsi tersebut, penulis bermaksud mengungkapkan sebuah budaya yang bisa dikatakan sebuah budaya yang abstrak, berupa gagasan-gagasan manusia, pengetahuan tentang hidup, pandangan hidup yang menyangkut nilai-nilai dan norma budaya melalui interaksi hidup manusia dan simbol-simbol yang digunakan dalam berbudaya sehingga budaya bukan hanya sekedar fenomena, atau bukan sekedar kebiasaan yang lazim, melainkan tertata dengan rapih dan penuh makna didalamnya bukan hanya sekedar insting, melainkan melalui proses pendidikan dengan cara-cara tertentu menurut kebudayaan.

Salah satu dari kegiatan ritual kesultanan Kanoman yaitu, Memayu Keraton.Memayu Keraton adalah sebuah pemeliharaan bangunan-bangunan keraton oleh para Abdi Dalem dari berbagai daerah yang jumlahnya hampir ratusan orang, membersihkan seluruh area Keraton untuk keperluan Panjang Jimat/Muludan.Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui penelitian ini, yaitu makna apa sajakah yang terkandung dalam Memayu sebagai budaya tradisi di Keraton Kanoman Cirebon dengan menggunakan analisis semiotika.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Tentang Makna

Pemahaman tentang kebenaran dalam kehidupan manusia diperoleh karena manusia memaknai ruang dan waktu. Makna bersifat intersubyektif karena ditumbuh-kembangkan secara individual, namun makna tersebut dihayati secara bersama, diterima, dan disetujui oleh masyarakat.

Pengertian makna atau maksud yang disampaikan melalui kata, frase, dan kalimat oleh seseorang terkadang salah dimengerti oleh orang lain karena makna disampaikan dalam macam-macam gaya bahasa sehingga makna itu samar-samar, penting, dan sukar dipahami (Hurford, Heasley, dan Smith, 2007:1). Menurut Sugono (2009:368), makna adalah amanat, moral, nilai, pelajaran, signifikansi substansi, takwil. Menurut Riemer (2010:12), makna adalah suatu bagian dunia yang memberikan penjelasan atau arti dari kata.

Unsur pokok yang tercakupdalam makna, yaitu (1) makna adalah hubungan antara bahasa dan dunia luar, (2) penentuan hubungan terjadi karen adanya kesepakatan

para pemakai, serta (3) perwujudan makna itu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling mengerti.

2) Makna Sistem Sosial Budaya Indonesia

Sosial dalam arti masyarakat, budaya/kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sistem sosial budaya Indonesia sebagai totalitas tata nilai, tata sosial dan tata laku manusia Indonesia yang meupakan manifestasi dari karya, rasa, dan cipta di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hubungan ini, pengertian sistem budaya mencakup dua segi kehidupan manusia.

a. Segi Kemasyarakatan, yaitu pergaulan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan dan solidaritas.
b. Segi Kebudayaan, yaitu totalitas cara hidup yang menifestasinya tampak di dalam tingkah laku yang terlembagakan. Hakikat budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung dan penggerak kehidupan. Fokusnya berupa nilai, norma religius, ekonommi atau nilai sosial budaya lainnya, seoerti ilmu pengetahuan dan teknologi (Ranjabar, 2013:71).

3) Tentang Budaya

Budaya pada hakikatnya berhubungan dengan cara manusia hidup atau sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat. Manusia belajar berpikir, merasa, pergaulan, kebiasaan, nilai, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Apa yang orang-orang lakukan, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka hidup dan berkomunikasi, merupakan respon-respon terhadap fungsi-fungsi dari budaya mereka. Kata budaya merupakan bentuk majemuk kata budi-daya yang dapat diartikan bahwa di dalamnya mencangkup cipta, karsa dan rasa.Sebenarnya kata ‘budaya’ hanya dipakai sebagai singkatan dari kata kebudayaan.

Secara formal atau budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap.Makna, hirarki, agama, waktu, serta objek-objek

materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya merupakan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-tindakan pengemasan diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu. Budaya juga berkenan dengan sifat-sifat dari objek-objek materi yang memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.Objek-objek seperti rumah, alat dan mesin yang banyak digunakan dalam industri pertanian, jenis-jenis transportasi, menyediakan suatu landasan utama bagi kehidupan sosial (Ranjabar, 2013:28-32).

4) Memayu

Memayu adalah salah saturitual pemeliharaan bangunan-bangunan keraton oleh para Abdi Dalem dari berbagai daerah yang jumlahnya bisa mencapai ratusan orang, membersihkan seluruh area Keraton untuk keperluan Panjang Jimat/Muludan, merenovasi atam rumbia beberapa bangunan untuk dikembalikan sesuai aslinya/semula. Syukuran Selametan, dilaksankan setelah selesai prosesi Memayu dengan menyajikan tumpeng bogana, wajit komplang, wedang kopi, wedang bajigur, bogis koci dan lain-lain untuk para Abdi Dalem yang telah melaksanakan Memayu di 7 titik, yaitu Lumpang Alu Watu, Sitihinggil, Langgar, Gedong Pusaka, Pendopo Jinem, Bangsal Witana dan Gedong Jimat.

5) Masyarakat dalam Budaya

Dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap orang melihat, mempergunalakan, bahkan kadang-kadang merusak kebudayaan. Masyarakat adalah orang atau manusia yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, keduanya tak dapat dipisahakan dan selamanya merupakan dwitunggal. Tak ada masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan sebaliknya, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya, walaupun keduanya secara teoritis dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah (Ranjabar, 2013:28).

Intinya, masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan dalam usaha-usaha pemenuhan kebutuhannya. Terikat sebagai suatu satuan sosial melalui perasaan solidaritas oleh karena latar belakang sejarah, politik, dan kebudayaan, yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.Manusia itu bergaul dan hidup bersama dalam jangka waktu yang relatif lama, manusia selalu berkembang dan akan timbul manusia baru. Manusia itu juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan akan perasaaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu timbullah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia di dalam kelompok tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Moleong, 2007:4).Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.Penelitian kualitatif mengasumsikan bahwa perilaku dan makna yang dianut sekelompok manusia hanya dapat dipahami melalui analisis atas lingkungan alamiah (natural setting) mereka.

Berikut adalah akar yang menjadi penelitian kualitatif, yaitu latar alamiah yang menjadi keutuhan dalam penelitian, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan

penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua pihak: peneliti dan subjek penelitian. (Moleong, 2007:27).

Teori yang digunakan adalah Semiotikayang berasal dari bahasa Yunani, semion yang berarti tanda (sign), bermula dari kajian tentang bahasa, dan kemudian berkembang menjadi kajian kebudayaan.Semiotika adalah studi tentang tanda-tanda dan proses tanda (semiosis), indikasi, penunjukan, kemiripan, analogi, metafora, simbolisme, makna dan komunikasi.

Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data (Kriyantoro, 2008:91). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan/literatur, yaitu teknik pengumpulan data sumber-sumber tertulis yaitu dari buku-buku, arsip, internet dan sumber-sumber tertulis lainnya.
2. Studi Lapangan, yang terdiri dari:

a) Observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke Keraton Kanoman Cirebon.
b) Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.
c) Dokumentasi, yaitu bahan berupa visual misalnya foto.

PEMBAHASAN

Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan yakni melalui teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam (depth interview) dan studi kepustakaan.Wawancara mendalam tersebut dilakukan pada tanggal-tanggal berikut: 16 Maret dan 22-25 Mei dan 2-4 Juni 2014 terhadap tiga orang yang dijadikan sebagai informan kunci (key informan) yang dianggap mengetahui seluruh rangkaian kegiatan Kesultanan Keraton Kanoman. Adapun key informan yang dimaksud antara lain:

1. Pangeran Patih Muhammad Qodiran, sebagai wakil dari Sultan Kanoman XII, Sultan Raja Muhammad Emirudin.
2. Ratu Raja Arimbi Nurtina ST, sebagai Juru Bicara Keraton Kanoman.

3. Pangeran Kumisi, sebagai orang yang dipercaya dalam Kegiatan Ritual Kesultanan Keraton Kanoman Cirebon khususnya Memayu.

Adapun dua orang yang dijadikan informan pendukung, yang dianggap sebagai pengamat bahkan ikut terlibat di rangkaian kegiatan Memayu pada Ritual Kesultanan Kanoman Cirebon, diantaranya adalah:

a. Abdi Dalem, sebagai masyarakat turun-temurun keraton yang terlibat dalam kegiatan Ritual Kesultanan Keraton kanoman Cirebon khususnya Memayu yaitu Bapak Aridi sebagai orang yang dipercaya untuk menjadi juru kunci pada bangunan Lumpang Alu.
b. Budayawan sebagai orang yang berkecimpung di kebudayaan atau orang yang paham akan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang pada masa lampau, yaitu Bapak Heri sekaligus sebagai ketua Sanggar Sekar Pandan.

   Roland Barthes yang mempelajari bagaimana manusia memaknai suatu hal berpendapat bahwa memaknai berarti memaknai objek-objek, tidak hanya membawa informasi dalam hal objek-objek tersebut hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi system terstruktur dari tanda.Pada bahasannya Barthes, pemaknaan suatu kalimat terdiri dari tataran pertama yang disebut dengan denotatif dan tataran kedua konotatif.

Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotatif dan konotatif dalam pengertian secara umum serta denotatif dan konotatif yang dimengerti oleh Barthes. Dalam pengertian umum, denotasi biasanya dimengerti dengan makna yang sesungguhnya. Proses signifikasi yang secara tradisional disebut sebagai denotasi yang mengacu kepada penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang terucap. Pada kerangka Barthes, konotatif identik dengan mitos, yang berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu.

Kegiatan ritual Kesultanan Keraton Kanoman Cirebon dilaksanakan pada bulan Islam yaitu pada bulan Asyura/Muharram terdapat pembacaan Babad Cirebon dan Bubur Sura, bulan Sapar terdiri dari Ngalus, Damel Lilin Ageng, Ngerik, Damel Ukup, Memayu Keraton dan Ngapem dan Tawurji, bulan Mulud terdiri dari Mipis Pertami,

Latihan Gamelan, Damel Bumbu Kebuli, Banjir, Banjir Asin, Banjir Kuning dan Awu, Persiapan Prosesi Pelal Alit, Nyiram Pacara dan Mungkus Slawat Ageng, prosesi persiapan Pelal Ageng/ Panjang Jimat, bulan Rajab membaca Babad Isra Mi'raj, Bulan Sya'ban pembacaan Babad Nishfu Sya'ban, bulan Ramadhan terdapat Khatam Awal dan Khatam Akhir, bulan Syawal terdiri dari Sholat Ied, Pisowanan dan Gebeg Syawal (ziarah), bulan Kapit terdapat kegaiatan Nadran (sedekah laut) dan terakhir di bulan Raya Agug/ Dzulhijjah melaksanakan Sholat Ied dan Grebegan Qurban.

Sebelum puncak ritual Memayudilaksanakan, terdapat beberapa kegiatan didalamnya, seperti:

1. Ngalus atau Tradisi Tirakat Ngalus Sapar yang dilaksanakan pada tanggal 1 Sapar sampai dengan 11 Mulud. Dalam kegiatan ini masyarakat Keraton menghindari makan nasi, daging, ikan, umbi-umbian dan tanaman lain yang merambat ditanah, kecuali tepung beras dan terigu. Dari tradisi ini muncullah makanan khas yang dinamakan dengan serabi.
2. Damel Lilin Ageng atau Damel Suluh Malem Busir lan Putih yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Sapar, pada pukul 08.00–16.00 WIB. Pada rangkaian Pelal Ageng Panjang Jimat Muludan Keraton Kanoman yang dimulai pada tanggal 15 Sapar, kegiatan diawali pembuatan lilin oleh para Ratu Bangsawan (keturunanPatriliner) keraton dengan pakaian khusus kebaya dan Kain Lancar Batik Keraton, Lilin yang akan dibuat (secara manual tanpa cetakan) berbahan Malem, Busir dan Putih, lawe sebagai sumbunya, serta dalam prosesi pembuatannya, sang pembuat harus selalu membaca Sholawat dari awal proses hingga selesei. Lilin ini merupakan lambang "pelita", yang akan lahir menerangi alam dan jalan kehidupan, beragama menuju islam yang sempurna. Bertempat di Tritisan Bangsal Pejimatan dalem Keraton kanoman selama tiga hari.
3. Ngerik atau Ngerik Bakal Boleh Jimat dilaksanakan pada tanggal 15 Sapar pada pukul 08.00-16.00 WIB. Proses pembuatan boreh (lulur pewangi) yang akan dipakai oleh seluruh Keluarga Keraton dan masyarakat yang mendapatkannya (dibagikan pada saat Pelal Alit dan Pelalageng Panjang Jimat) bahan-bahan yang digunakan adalah kayu cendana, gaharu, rasamala, laka, dewandaru yang dikerik sedemikian rupa dengan alat pecahan beling dan dilakukan oleh Ratu Bangsawan

Keraton yang sedang dalam keadaan suci dari dua hadast. Disertai iringan Sholawat hingga proses pembuatan selesai. Prosesi ini dilaksanakan di Tritisan Bangsal Pejimatan Dalem Keraton Kanoman.

4. Damel Ukup atau Damel Dupa Paukupan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 24 Sapar pada pukul 08.00-16.00 WIB. Proses pembuatan dupa wangi yang berfungsi sebaga pengharum ruangan, dengan bahan dari kayu cendana, gaharu, rasamala, lemo, laka, dewandaru. Dengan proses pembuatan dengan cara dicincang menjadi serpihan halus kemudian direndam dengan kinca atau air gula merah dan disangrai, setelah matang kecoklatan dicampur dengan menyan Jawa, menyan India dan menyan Arab.
5. Memayu Keraton atau Memayu dilaksanakan pada tanggal 25 Sapar pada pukul 06.00-15.00 WIB. Ritual pemeliharaan bangunan-bangunan keraton oleh para Abdi Dalem yang berasal dari berbagaidaerah yang jumlahnya bisa mencapai ratusan orang, kegiatannya yaitu membersihkan seluruh area Keraton untuk keperluan Panjang Jimat/Muludan, merenovasi atap rumbia beberapa bangunan untuk dikembalikan sesuai aslinya/semula. Khususnya pada bangunan Lumpang Alu, setelah semua bersih kemudian pihak keraton mengadakan Syukuran Selametan dengan melakukan doa bersama dengan para ulama-ulama besar, kemudian setelah itu menyajikan tumpeng bogana, wajit komplang, wedang kopi, wedang bajigur, bogis koci dan lain-lain untuk para Abdi Dalem yang telah melaksanakan Memayu di 7 titik, yaitu Lumpang Alu Watu, Sitihinggil, Langgar, Gedong Pusaka, Pendopo Jinem, Bangsal Witana dan Gedong Jimat.
6. Ngapem dan Tawurji atau Damel Apem yang dilaksanakan pada Rabu terakhir Bulan Sapar 09.00 WIB dan 10.00 WIB. Makan tradisi dengan tepung beras, tape ragi, gula merah dan blondo. Sebagai bentuk syukur setelah melalui berbagai cobaan di bulan Sapar. Setelah didoakan maka Apem dibagikan kepada para Famili, Mager Sari sebagai hidangan pengobeng/pekerja Tawurji. Ritual sedekah dan sebagai penghormatan terhadap Syekhsiti Jenar, sesuai tradisi turun temurun yang telah dilangsungkan selama berabad-abad.

Makna Denotatif dari istilah Memayu

Makna denotatif atau makna yang tampak dari istilah Memayu tersebut adalah ritual bebersih.Dimana seluruh masyarakat keraton terutama para Abdi Dalem yang merupakan masyarakat turun-temurun keraton membersihkan sebagian bangunan keratin. (Wawancara dengan Pangeran Patih Qadiran, 23 Mei 2014: 17.15).Memayu itu melakukan renovasi pada atap rumbia di beberapa bangunan agar kembali seperti semula. (Wawancara dengan Ratu Raja Arimbi, 22 Mei 2014: 15.20).Memayu itu memperbaiki bangunan yang telah kusam.(Wawancara dengan Pangeran Kumisi, 25 Mei 2014:11.15).

Memayu adalah istilah Jawa yang didalamnya melakukan kegiatan bebersih dan mengganti atap bangunan yang sudah rusak.Memayu acara kumpul keseluruhan abdi dalem.Memayu ibarat pemegaran,bersih-bersih lingkungan sekitar keratin. (Wawancara dengan Bapak Aridi (Abdi Dalem), 4 Juni 2014:08.30).

Memayu itu kegiatan upacara bebersih keraton dan mengingat roh para leluhur agar tidak lupa.Memayu kegiatan berdoa kepada leluhur dengan membersihkan pemakaman dan bangunan-bangunan yang ada dikeraton sebagai rasa cinta kita.Menanamkan agar kita selalu suci dan bersih.(Wawancara dengan Bapak Heri (Budayawan sekaligus Ketua dari Sanggar Sekar Pandan), 2 Juni 2014:22.05).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa makna denotatif dalam makna istilah Memayu tersebut adalah salah satu rangkaian pada kegiatan ritual Kesultanan Keraton Kanoman yaitu bebersih keratonyang dilakukan oleh masyarakat keraton atau biasa disebut dengan para Abdi Dalem.Sebelum memulai kegiatan ritual selanjutnya yaitu pada kegiatan pada bulan Mulud, masyarakat keraton melakukan kegiatan bebersih keraton yang biasa disebut Memayu.Pada kegiatan Ritual Memayu keraton awalnya dilakukan dengan mengganti atap-atap keraton yang telah rusak dan diganti dengan yang yang baru. Menyisihkan pohon-pohon atau taman liar yang tumbuh disekitar keraton. Jadi, pada intinya Memayu adalah bebersih keraton. Sesuai dengan apa yang dikatakan pada peta Roland Barthes bahwa tanda denotatif terdiri atas penanda dan petanda. Dengan kata lain penanda adalah bunyi yang bermakna atau bahsa yang dikatakan atau didengar sedangkan petanda adalah gambaran mental, pikiran atau konsep. Makna denotatif dari Memayu adalah:

Penanda: Memayu

Petanda : Bebersih Keraton

Makna Konotatif dari Istilah Memayu

Setelah membahas makna denotatif dari istilah Memayu, pada tahap kedua terdapat makna konotatif. Pengertian kontatif disini adalah makna yang tidak nampak atau makna tambahan. Makna istilah Memayu dalam makna konotatifnya adalah:

Memayu bisa dikatakan sebagai suatu generasi. Maksudnya turun temurun yang dilakukan pada setiap tahunnya. (Wawancara dengan Pangeran Patih Qadiran, 23 Mei 2014: 17.15).Memayu sendiri adalah meng-ayu-ayu atau ayu yaitu mempercantik.Baikmempercantik diri kita atau jiwa kita, dengan sesama manusia sekaligus dengan sang pencipta yaitu Allah SWT.(Wawancara dengan Ratu Raja Arimbi, 22 Mei 2014: 15.20).Makna yang tak terlihat dari Memayu itu memuliakan.Memayu dari penggalan kata ayu, berarti bagus, mulia-memuliakan, supaya cantik.Jadi jika memuliakan atau memperbagus sesuatu, berarti kita memuliakan diri sendiri, yang pada akhir timbal baliknya untuk diri kita sendiri, memuliakan tempat yang kita muliakan, kita sendiri yangmendapatkan kemuliaan-Nya.Ada balasannya/setimpal.(Wawancara dengan Pangeran Kumisi, 25 Mei 2014:11.15).

Adapun makna khias dari Memayu adalah selametan dengan berdoa bersama. (Wawancara dengan Bapak Aridi (Abdi Dalem), 4 Juni 2014:08.30).Penggalan kata memayu mempercantik diri, memperindah, ganti sirab atau atap bangunan yang setiap satu tahun harus diganti, harus direhab dari atas, intinya sebagai pengingatleluhur. Kemudian terdapat tradisi bagi-bagi tumpeng atau nasi Bogana,artinya saboga-bogana (seadanya/tidak berlebihan), syukuran makan bersama.Kemudian Tawurji setelah makan bersama simbol beramal kepada yang berhak, tujuannya agar kita dibiasakan untuk beramal.(Wawancara dengan Bapak Heri (Budayawan sekaligus Ketua dari Sanggar Sekar Pandan) 2 Juni 2014:22.05).

Inti dari makna denotatif dari Memayu adalah:

Penanda: Memayu

Petanda : Ayu yang berarti cantik, baik cantik dalam kondisi bangunan keraton, maupun cantik dalam diri kita sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan diatas bahwa, makna konotatif atau makna tambahan dari istilah Memayu adalah generasi-generasi yang melakukan suatu tradisi yang pada rangkaian kegiatannya melakukan perbaikan atau rehab, meng-ayu-ayu (mempercantik), mbagusi (memperbagus) bangunan agar cantik dan bagus kembali, yang menurut keyakinan kita adalah sesuatu yang mulia (bangunan mulia), jika kita memuliakan sesuatu dengan jiwa yang bersih dan hati yang mulia niscaya diri kitapun akan dimuliakan oleh yang kita muliakan yaitu Allah SWT dengan cara melakukan kegiatan Memayu tersebut.

Mitos dari Istilah Memayu

Maknaistilah Memayu adalah sebuah tradisi budaya yang dipercaya oleh pihak dan masyarakat keraton. Mempercayai apa yang telah mereka lakukan dengan cara bebersih atau mempercantik bangunan dan lingkungan keraton, dianggap sebagai bentuk kemuliaan terhadap Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan Allah alangkah lebih baik jika menata hidup kita agar tetap bersih dalam kehidupan, baik dari kita maupun pada sosial dan kepada sang pencipta. Alangkah baiknya tidak hanya bangunan dan lingkungan sekitar keraton, melainkan jiwa kita dibersihkan agar kembali suci, yaitu dengan melakukan kegiatan Memayu. Berdoa agar tetap dijaga. Pemaknaan dari Memayu sendiri adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan yang kuat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Asalkan tujuannya ikhlas dan keyakinannya benar, Insya Allah semuanya berkah atas segala ketentuan Allah SWT. (Wawancara dengan Bapak Aridi (Abdi Dalem), 4 Juni 2014:10.30).

Setelah semua kegiatan selesai, pihak keraton bersama para Abdi Dalem beserta masyarakat yang ikut menyaksikan kegiatan ini melaksanakan syukuran selametan, yaitu berdoa bersama dengan tujuan berterimakasih/ bersyukur kepada Allah SWT. Dengan menyebut para kanjeng Rasul, Ulama-ulama besar, para Wali, para Sultan, karena beliau yang telah mengenalkan kita kepada agama Islam dengan pembacaan surat Al-Fatihah.

Syukuran Selametan pada Kegiatan Ritual Memayu

Selesai berdoa bersama yang dipimpin oleh Pangeran Patih Qodiran, masyarakat dibagikan nasi tumpeng. Nasi tumpeng yang satu ini berbeda, namanya nasi Bogana. Nasi tersebut dilengkapi dengan rempah-rempah alam, dan didalamnya terdapat berbagai macam tumpukan lauk pauk. Sesuai dengan kepercayaannya, nasi tersebut dipercaya memberi keberkahan pada keturunan keluarga dan kesuburan pada sawah petani.

Menurut Tremmel (dalam Endraswara,2013:30) keselamatan adalah kondisi dimana pada suatu suasana yang mampu melampaui harapan dan komitmen total agama. Keselamatan, juga disebut sebagai jawaban agama utama yang diberikan kepada kondisi manusia. Keselamatan dalam agama biasanya dikaitkan dengan tempat seperti Surga, dan sering diantipasi pada suatu hal yang belum datang/ terjadi. Hal ini merupakan suatu hal yang dilakukan manusia secara sadar, yaitu semacam harapan yang terjadi disini dan sekarang.

Salah satu pengunjung ritual “Memayu”, Surni mengaku mengikuti tradisi “Memayu” dan mendapatkan keberkahan, keselamatan dari Nasi Bogana. Keyakinan serupa datang dari Yati (Kapringan, Indramayu) yang selalu menghadiri tradisi Memayu di Keraton Kanoman disetiap tahunnya. Ia meyakini keberkahan Nasi Bogana. “Saya percaya, Nasi Bogana yang sudah didoakan sultan raja dapat memberikan keberkahan sesuai dengan apa yang kita butuhkan,” ujarnya.

Pihak Keraton membagikan Nasi Bogana kepada Masyarakat

Demikian merupakan mitos dari makna istilah Memayu di Keraton Kanoman Cirebon.Mitos merupakan suatu sistem pemaknaan tataran kedua atau konotatif.Sesuai denga pendapat Roland Barthes mengenai mitos yang dipampatkan dengan ideologi, karena baik di dalam mitos ataupun ideologi, hubungan antara penanda konotatif dan petanda konotatif terjadi secara termotivasi (Sobur, 2003:71).Ideologi ada selama kebudayaan ada, dan itulah sebabnya Barthes berbicara tentang konotatif sebagai suatu ekspresi budaya.

KESIMPULAN

1. Pada makna denotatif atau pengertian dalam arti yang sebenarnya, makna Memayu adalahsalah satu kegiatan ritual yang memiliki arti bebersih. Pada arti harfiahnya. Memayu sendiri bertujuan untuk membersihkan sebagian keratin sesuai arahnya, yaitu uludan bangsal. Didalam ritual ini terdiri dari kegiatan membersihkan bangunan-bangunan keraton, mengganti atap keraton yang rusak oleh para Abdi Dalem. Khususnya penggantian atap rumbia yang terbuat dari alang-alang pada bangunan Lumpang Alu. Abdi Dalem adalah masyarakat turun-temurun keraton yang dipercaya untuk melakukan kegiatan Memayu. Abdi Dalem berkisar ratusan orang, yang berada di wilayah III Cirebon. Tugas meraka adalah membersihkan bagian-bagian keratin sesuai dengan porsinya. Maksudnya, tidak semua abdi dalem berhak untuk membersihkan bagian keraton, karena sudah ada tugasnya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Setelah seluruh

bangunan telah dibersihkan, diadakanlah acara selametan dikeraton. Kegiatan ini dilakukan agar seluruh masyarakat keratin diberikeselamatan baik didunia maupun di akhirat.

2. Makna konotatif atau makna khiasan dari istilah Memayu adalah mempercantik. Berdasarkan penggalan kalimat dari Memayu atau MengAyu-Ayu yaitu mempercantik seluruh bagian dibangunan keratin Kanoman. Selain itu mempercantik jiwa kita. Ganti sirab atau atap bangunan yang setiap satu tahun harus diganti, harus direhab dari atas, intinya mengingat luhur kita
3. Pemaknaan dari istilah Memayu (mitos) adalah suatu kegiatan memuliakan Allah SWT dengan membersihkan/memuliakan bangunan-bangunan sejarah pada masa Islam dahulu, berharap apa yang kita muliakan agar bertimbalbalik dengan apa yang telah kita lakukan. Pemaknaan dari Memayu sendiri adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan yang kuat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jika yakin, kita akan mendapatkan berkah yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tetapi semua balik lagi oleh ketentuan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Endraswara, Suwardi. 2013. Memayu Hayuning Bawana. Yogyakarta: PT. Buku Seru.

Hurford, James., Heasley, Brendan., and Smith, Michael. 2007. Semantics a Course Book. Second ed. New York. Cambridge Press.

Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kriyantono, Rachmat. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi organisasi. Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana Penada Media Group.

Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sobur, Alex. 2003. Semiotika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____. 2004. Analisis Text Media. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soelaeman, Munandar. 2002. Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.

Ranjabar, Jacobus. 2013. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Sugono, Dandy. 2009. Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Mizan.

Riemer, Nick (2010). Introducing Semantics. New York: Cambridge University Press.

KESENJANGAN SOSIAL DAN RENDAHNYA KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN HERBERT MARCUSE

Andi Amrullah,Lc., M.E.I
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta
Email : amrullah80@gmail.com

Abstrak : Tingkat kesejahteraan yang masih minim bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ditandai dengan angka kemiskian yang cukup tinggi. Menurut data BPS, pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesiamencapai 28,01 juta orang (10,86 persen).Pengalihan makna kerja dari aktivitas berdimensi humanis ke dalam dimensi ekonomis, humanisasi ke dehumanisasi, berakar dalam gerak nalar.Permasalahan yang terjadi di Indonesia bukan hanya faktor kesejahteraan yang rendah, namun juga faktor ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi. Faktor ketimpangan ini disebabkan tidak seimbangnya jumlah orang-orang yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, dengan masyarakat miskin yang ada dibawah. Jumlah mereka yang sangat kaya sangat sedikit, namun menguasai hampir sebagian besa sumberdaya yang ada di Indonesia. Permasalahan yang diangkat adalah terkait dengan faktor kesejahteraan masyarakat serta kesenjangan ekonomi yang terjadi. Kedua permasalahan ini harus ditangani dengan serius agar tidak terjadi permasalahan sosial. Pada tulisan ini penulis mencoba untuk menggunakan pendekatan pemikiran Herbert Marcuse untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan dan kesenjangan ini. Penulisan makalah ini memiliki tujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan rendahnya kesejahteraan dengan pendekatan teori pemikiran Herbert Marcuse.

Keyword: *Kesenjangan, Kesejahteraan, Pekerja, Marcuse*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara besar secara geografis dan juga demografis penduduknya. Bentangan daratan yang terdiri dari gugus kepulauan begitu luas terdiri dari banyak pulau. Selain itu, demografi penduduknya juga sangat banyak dan beragam, dan menempati posisi sebagai salah satu negara yang jumlah penduduknya besar di dunia. Namun kebesaran nama tersebut diiringi dengan berbagai tantangan yang cukup

besar juga. Salah satu tantangan Indonesia saat ini adalah terkait permasalahan kesejahteraan penduduknya yang masih kurang dan banyak harus dibenahi.

Tingkat kesejahteraan yang masih minim bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ditandai dengan angka kemiskian yang cukup tinggi. Menurut data BPS, pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesiamencapai 28,01 juta orang (10,86 persen). Jumlah ini sangat besar dengan standarisasi miskin yang cukup rendah yaitu rata-rata penghasilan dibawah 24 dolar atau 300 ribu rupiah perbulan (https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229).

Data ini semakin buruk jika standar kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah dinaikkan sedikit saja. Menurut menteri sosial, Khofifah, menyatakan bahwa Jumlah orang miskin di Indonesiamencapai 40 persen atau sekitar 96 juta jiwa dari total penduduk 240 juta jiwa jika mengacu pada standar kemiskinan dengan pengeluaran US$ 1,5 per kapita per hari, 45 Dolar perbulan atau setara kira-kira 600 ribu rupiah (http://www.beritasatu.com/nasional/225288-mensos-pengeluaran-us-15-per-hari-jumlah-penduduk-miskin-96-juta.html).

Nampak sekali bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya pendapatan perkapitanya setiap bulan dan juga jumlah penduduk yang berpendapatan kecil. Standar kemiskinan yang digunakan pemerintah juga sangat ambigu, karena membuat seolah-olah masyarakat miskin terlihat sedikit. Hal ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mengelabui informasi tingkat kemiskinan secara umum. Terlihat jika standar kemiskinan sedikit saja dinaikkan menjadi 1,5 dolar per hari, jumlah penduduk Indonesiahampir setengahnya miskin. Hal ini menjadi koreksi bagi kesejahteraan hidup masyarakat.

Masyarakat secara umum memperoleh taraf kesejahteraan dengan bekerja. Di Indonesia, masyarakatnya memiliki unit pekerjaan bermacam-macam dan berbeda antara satu dengan lainnya. Memiliki pekerjaan dan beraktivitas merupakan hak mendasar setiap warga negara. Pekerjaan merupakan kebebasan individu. Namun demikian, dalam sistem kapitalisme kini, pekerjaan semakin diidentikkan dengan keterkungkungan di mana manusia menjadikannya sebagai arena lomba untuk mencari uang sebanyaknya.

Pemiskinan dan penyempitan makna kerja dalam kapitalisme menampilkan momen historis dan berkarakter ideologis. Pengalihan makna kerja dari aktivitas berdimensi humanis ke dalam dimensi ekonomis, humanisasi ke dehumanisasi, berakar dalam gerak nalar. Perubahan konsep kerja mengungkapkan peralihan dari nalar teoritis ke nalar instrumentalis. Secara ideologis, penyimpangan dan pemiskinan makna kerja berlangsung hebat tatkala positifisme bersinergi dengan kapitalisme dan menguasai panggung sejarah (Saeng, 2012 : 118)

Perubahan makna kerja dan proses kerja dalam masyarakat kapitalisme dinyatakan dalam sistem pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan proses pemisahan aneka macam aktivitas produksi ke dalam berbagai bidang yang terbatas dan khusus. Kemudian masing-masing bidang diatur dan dikelola secara otonom menurut tata cara dan aturan yang khas pula. Pembagian kerja membawa imbas pada kehidupan kaum pekerja. Mereka dipisahkan oleh keahlian, pekerja mengerjakan satu bagian tertentu saja, dalam dunia perburuhan, istilah kerja diganti dengan profesi dan eksistensi buruh diperhitungkan sejauh profesionalitas pada suatu bidang. Dalam dunia kapitalis, profesionalitas kerja diarahakan pada pencapaian keuntungan dan keunggulan. Dengan bekerja secara profesional, diharapkan buruh mampu memacu peningkatan produksi dan mencegah kerugian. Kandungan kebebasan dalam profesionalitas sudah lenyap. Pembagian kerja dan pola hubungan sosial seperti ini menjelma sebagai sarana yang mengekang dan menjerumuskan ke dalam lautan sengsara dan ketidakadilan (Saeng, 2012 : 118).

Hegel menunjukkan bahwa rasionalitas masyarakat dan warisan budaya suatu bangsa diukur oleh sejauh mana kebebasan dan kesederajatan dihidupi warga. Kebebasan dan kesetaraan merupakan dua prinsip dan ukuran wajib untuk menilai proses dan praksis perwujudan individu. Suatu aspek hakiki dari perwujudan diri dinyatakan dalam dan melalui mekanisme kerja. Kerja menentukan dan mengungkapkan hakikat manusia dan bentuk masyarakat. Kerja merupakan aktivitas hidup, kegiatan sadar dan bebas untuk emwujudkan seluruh kemampuan diri. Kerja memantulkan semua potensi dan penanda eksistensi manusia (Saeng, 2012 : 116).

Marcuse berpendapat bahwa pengertian kerja dalam konsep Marx diambil dan diolah dari gagasan Hegel. Bagi Marx maupun Hegel, makna kerja melampaui

persoalan kelangsungan hidup atau mencari sesuap nasi. Kerja merupakan momen dan aktivitas untuk menumbuhkan dan mengolah kodrat universal manusia. Kodrat universal manusia terletak pada universalitas, sifat yang umum, keseluruhan. Gagasan dan gambaran, talenta dan keinginan terungkap dan terwujud dalam hasil karya, tatkala manusia mampu mengubah benda alam kedalam wujud tertentu sesuai dengan pikiran dan keinginan. Dengan demikian, kerja merupakan cermin yang memancarkan hakikat, segenap potensi dan sekaligus berfungsi sebagai sarana objektifikasi manusia dalam sejarah. Realisasi hakikat terlaksana hanya jika manusia hidup dan berada sebagai makhluk yang bebas, keberadaan dalam dimensi universal dalam semua aspek. Kebebasan dalam pengertian Hegel mengacu pada nalar sebagai hukum pertama dan utama yang mengatur semua perilaku dan aktivitas. Manusia bebas adalah aktor yang berlaku sebagai subjek atas semua perbuatannya menurut hukum nalar (Saeng, 2012 : 116).

Bila prinsip kebebasan diamini sebagai ukuran untuk memahami dan menilai aktivitas kerja dalam masyarakat kapitalis, kita langsung menemukan makna dan praksis yang bertolak belakang. Dari praksis yang sedang berlangsung, tampak jelas bahwa kerja sudah dialihgunakan sebagai instrumen, momen, dan wilayah pengontrolan, penindasan dan pengisapan daripada sarana, kesempatan dan aktiftas pembebasan dan penyentosaan. Kapitalisme mengubah kerja dari tanda dan medium perwujudan semua daya dan talenta menjadi ruang peluang dan alat ekspolitasi demi modal dan keuntungan (Saeng, 2012 : 117).

Kerja direduksi menjadi aktivitas dan sarana ekonomi. Tujuan kerja tidak lain adalah untuk membuat sebagian masyarakat menjadi instrumen produksi yang terkadang menihilkan faktor kesejahteraannya. Masyarakat pekerja dituntut untuk kerja lebih untuk memproduksi dan menambah nilai ekonomi sekelompok masyarakat yang lain. Sehingga masyarakat yang dijadikan sebagai alat, terabaikan faktor kesejahteraannya.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia bukan hanya faktor kesejahteraan yang rendah, namun juga faktor ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi. Faktor ketimpangan ini disebabkan tidak seimbangnya jumlah orang-orang yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, dengan masyarakat miskin yang ada dibawah. Jumlah

mereka yang sangat kaya sangat sedikit, namun menguasai hampir sebagian besa sumberdaya yang ada di Indonesia.

Hal ini ditandai dengan koefisien rasio gini yang cukup tinggi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).Menurut BPS Indeks Gini Ratio pada Maret 2016 adalah 0,397. Ini sebagai pertanda tingkat ketimpangan di Indonesiaberada dalam kategori rendah (<0,4). Kategori sedang ada pada angka 0,4-0.5 dan ketegori ketimpangan tinggi atau parah bila lebih dari 0,5 (https://www.bps.go.id/QuickMap?id=0000000000).

Koefisien rasio gini yang tinggi menyebabkan sangat rentannya terjadi konflik antar kelas masyarakat. Ketimpangan hidup antara si miskin dan si kaya sangat terlihat dengan jelas, sehingga akan dengan mudah memicu konflik sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Ketimpangan ekonomi tersebut secara tidak langsung merupakan akibat dari pembagian kerja dan profesionalitas sehingga masyarakat terpecah ke dalam kelas-kelas sosial. Pembagian kerja mengubah cara pekerja menjalin relasi dengan sesama dan produk. Hubungan sosial dinilai, diukur dan kemudian direduksi menjadi hubungan ekonomi, hubungan pemilik modal dan karyawan, tuan dan budak, produsen dan kosumen. Nilai individu ditentukan dan diperhitungkan hanya dari sudut kemampuan berproduksi dan membeli, memiliki dan mengonsumsi. Masyarakat pun terbagi ke dalam dua kelas sosial yang saling berhadapan, kelompok berpunya dan papa, penguasa dan jelata, pemberi kerja dan pencari kerja, kaum kapitalis dan massa proletariat (Saeng, 2012 : 120).

Fakta bahwa aspek ekonomi menentukan secara dominan interaksi sosial membuktikan bahwa semesta hubungan sosial berkarakter materialis. Karakter materialis merupakan fakta historis yang bermakna tunggal. Sehingga semua relasi dalam masyarakat, segenap aktfitas kebudayaan, sistem nilai dan moral ditentukan dan dicirikan oleh nilai-nilai material atau proses dan hasil produksi.

Marcuse berpendapat bahwa ciri materialis sekaligus memuat dan mengungkapkan fakta kritis, dalam artian bahwa hubungan antarpribadi dalam masyarakat yang dinilai dari sudut ekonomi belaka merupakan hubungan palsu. Kepalsuan ini memberikan ruang bagi kritik, perbaikan dan perubahan radikal.

Marxisme berusaha menyingkapkan kepalsuan tersebut dengan menampilkan proses dominasi dan eksploitasi yang berlangsung secara sistematis dan kontinu terhadap individu dalam seluruh aktivitas dalam hubungan produksi (Saeng, 2012 : 121).

Pembagian kerja menurut keahlian merupakan perbudakan gaya baru yang sangat ilmiah dan rasional. Hidup dan interkasi antarpribadi dihambat, dikontrol dan dibatasi secara sitematis lewat pembagian kerja dan profesionalitas. Setiap pekerja dikurung secara ilmiah dalam bidang keahlian dan ruang kerjanya, sedangkan di luar kompetensi tersebut dia berada diluar hitungan dan tanpa guna.

Yang dituntut dalam dunia kerja kapitalis adalah ketaatan buta terhadap segala norma, kebijakan, tradisi yang telah digariskan secara sepihak. Kemampuan bekerja diukur berdasarkan kuantitas waktu kerja yang dihabiskan dan kualitas produk yang dihasilkan. Kerja berubah dari aktivitas multidimensi ke satu dimensi, kegiatan yang menyenangkan dan didambakan menjadi beban hidup yang menjemukan dan dibencikan. Kerja dialihfungsikan dari proses aktualisasi dan realisasi kepada proses represi, eksploitasi dan negasi atas individu.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat adalah terkait dengan faktor kesejahteraan masyarakat serta kesenjangan ekonomi yang terjadi. Kedua permasalahan ini harus ditangani dengan serius agar tidak terjadi permasalahan sosial. Pada tulisan ini penulis mencoba untuk menggunakan pendekatan pemikiran Herbert Marcuse untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan dan kesenjangan ini

Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini memiliki tujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan rendahnya kesejahteraan dengan pendekatan teori pemikiran Herbert Marcuse.

PEMBAHASAN

Menghindari Alienasi Kerja

Salah satu faktor yang menjadi permasalahan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat adalah karena masyarakat kelas pekerja di Indonesia telah teralienasi dalam bekerja. Makna bekerja yang seharusnya membuat manusia semakin humanis malah sebaliknya, menjadikan manusia semakin tidak humanis. Manusia masuk ke dunia kerja yang malah nampak seperti masuk ke tampat pembuangan. Kerja sudah identik dengan penindasan dan pengasingan. Orang yang bekerja, oleh Marx dinilai mengasingkan dirinya dikarenakan sistem pekerjaan manusia kini menggiring individu untuk masuk zona alienasi. Menurut Marx, alienasi terjadi dengan dua hal. Pertama, alienasi atau keterasingan manusia dengan produk hasil kerjanya.

Pada hal ini, manusia sebagai pekerja mengalami keterasingan karena ia dipisahkan dari hasil kerjanya sendiri. Sistem kerja mengehndaki adanya profesionalitas di mana setiap individu mengerjakan bagian masing-masing untuk menghasilkan suatu benda atau produk. Satu pekerja hanya dibolehkan untuk memegang dan mengerjakan satu parsial proses saja. Pada akhirnya, pekerja merasa terasing dari produk yang telah berwujud sempurna. Produk tersebut memiliki nilai yang tinggi, otonom, dan dipuja oleh pekerja yang membuatnya. Inilah alienasi antara pekerja dengan produk (Saeng, 2012 : 122)

Kedua, alienasi hubungan pekerja dengan aktivitas yang dilakukan. Pembagian kerja menyebabkan keterasingan pada pekerja itu sendiri. Sistem dalam dunia kerja menerapkan profesionalitas di mana setiap orang dibagi atas bidang pekerjaan masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya. Profesionalisme semacam ini menjauhkan pekerja dari aktivitas pekerjaannya. Individu pekerja hanya mengetahui apa yang dikerjakannya saja di mana hal itu hanya merupakan satu unit kerja dari keseluruhan aktivitas kerja sesungguhnya. Sementara penguasa kerja memahami dan memiliki kendali atas semua unit kerja.

Profesionalitas merupakan alat yang menjauhkan individu dari peluang untuk berkontrak, bekerja sama dan membangun kekuatan dan pergerakan yang mengancam penguasa. Profesionalitas merupakan sarana dan momen alienasi, kerugian, ancaman

dan bahaya daripada peluang, keuntungan dan keadilan. Profesionalitas merupakan kesadaran palsu yang ditanamkan dan diciptakan sistem kaum kapitalis guna mengelabui dan menutup mata kelas pekerja mengenai praktik penguasaan, penindasan dan pengekangan. Semua sudah diprogramkan, diindoktrinasi, dan dirasionalkan sedemikian rupa sehingga seolah menjadi kesadaran dan kebutuhan alami setiap pekerja. Orientasi dasar pembagian kerja dan profesionalitas menurut kaum kapitalis berdasar atas kepentingan hasil produksi, pengembalian modal dan keuntungan. Penghargaan dan kecintaan terhadap bakat, keahlian dan kecakapan maupun harkat dan martabat manusia tidak menjadi hal yang menarik bagi kapitalis.

Pembagian kerja berdasarkan tugas dan keahlian merupakan sarana kontrol dan instrumen pengisapan yang paling mujarab. Sebagai sarana kontrol, pembagian kerja dan profesionalitas mengurung para pekerja dari rekan kerjanya yang lain. Sesama pekerja dibuat saling bersaing dalam bidang pekerjaannya. Rasa saling bersaing menyebabkan pekerja memberikan kemampuan dan berusaha ekstra agar posisinya dalam pekerjaan tetap aman. Upaya bekerja secara keras dan maksimal ini hanya menjadi sarana menyelamatkan diri dari ancaman pemecatan semata daripada upaya untuk menunjukkan kemampuan dan superioritas diri. Pembagian kerja juga memecah manusia ke dalam kelompok dan unit sosial. Dunia diubah dari komunitas milik semua yang senasib dan serasa menjadi ajang penuh kasta jabatan dan saling bermusuhan. Segelintir orang memiliki dan menikmati semua, sementara banyak yang lainnya bersusah-payah dan berebut dalam mengais untuk kesejahteraan hidupnya (Saeng, 2012 : 123)

Proses alienasi dan perbudakan semakin sempurna dengan adanya sistem pengupahan. Upah awalnya dinilai sebagai imbalan, pengakuan dan penghargaan atas pekerjaan buruh. Padahal upah sejatinya merupakan pernyataan bentuk pemaksaan dan pemerasan. Keputusan mengenai jumlah upah menjadi hak mutlak pemegang modal di mana buruh hanya bisa menerima begitu saja upah yang digariskan. Sisi keadilan dalam hal pengupahan tidak didapati oleh para buruh (Saeng, 2012 : 124)

Marx menilai bahwa relasi sosial yang didominasi oleh ekonomi menindas, memeras dan mengeruk akan membawa akibat logis yang menistakan kemanusiaan. Konsekuensi tersebut terungkap dalam proses reifikasi di mana sistem kapitalis

menghubungkan manusia satu dengan lainnya melalui beraneka barang yang mereka pertukarkan. Status semua individu, standar kehidupan, pemenuhan kebutuhan, kebebasan ditentukan oleh nilai seluruh barang yangada pada mereka. Nilai barang disimbolkan melalui uang dan uang menjadi kriteria utama dalam hidup dan relasi antarmanusia. Nilai dan aktivitas kerja direduksikan pada sejauh mana para kerja sanggup bekerja dan menghasilkan uang. Segaris dengan Marx, Marcuse menjelaskan kembali sifat intensional dalam relasi sosial yang bersumber pada nilai tukar komoditi antarindividu sebagai totalitas hubungan yang objektif.

Kerja mengalienasikan manusia dari diri sendiri, dari hasil produksi dan dari sesama. Realitas yang lebih mengenaskan adalah pembalikan urutan peran dalam dunia ciptaan; benda mati, produk, dan teknologi sebagai subjek; sedangkan manusia menjadi objek dan sasaran yang dikuasai. Proses pembendaan menjurus manusia pada sasaran dan sarana belaka. Kerja adalah palagan yang menandai perbudakan tanpa akhir (Saeng, 2012 : 126)

Konsep Kerja dan Nilai Teori Nilai

Degradasi peran individu dalam dunia kerja berlangsung secara terus-menerus akan tetapi anehnya tidak ada perlawanan apapun terhadap aksi represif dan eksploitasi ini. Beragam persoalan serupa berlangsung dalam proses kerja dan mencuat dalam perubahan makna produk. Dehuminasi dan komersialisasi manusia dalam dunia kerja inilah yang diringkas oleh Marx dalam teori nilai kerja.

Kerja menghasilkan produk. Dalam sistem kapitalis, produk berperan sebagai barang dagangan, dan komuditi merupakan nilai guna yang dapat dipertukarkan dengan komuditi lainnya di pasar. Nilai guna merupakan sarana untuk memenuhi aneka keperluan hidup pihak lain. Sebagai nilai guna, komuditi senantiasi menunjukan dimensi sosial produk, dalam arti sebagai upaya memenuhi nilai kebutuhan individu atau masyarakat secara umum. Kebutuhan individu merupakan penggalan dari semesta kebutuhan masyarakat yang mesti terjamin. Nilai guna disalurkan secara otomatis sesuai dengan daya beli dan kebutuhan melalui pertukaran komuditi antarindividu. Proses produksi ditujukan untuk menghasilkan komuditi, nilai guna tetap tinggal

sebagai prasyarat utama. Prasyarat demikian timbul dari eksistensi hubungan produksi yang membentuk mata rantai dan ketergantungan timbal balik (Saeng, 2012 : 127)

Kuantitas tenaga terpakai diukur dan nilai oleh waktu kerja buruh, sehingga kekhasan setiap pekerjaan secara teoritis terletak pada durasi atau jam kerja. Dengan begitu, kerja diubah total dari aktivitas produksi komuditi dengan nilai guna kepada aktivitas penciptaan nilai tukar dan nilai lebih yang didapat melalui selisih keuntungan antara jumlah barang yang dihasilkan dengan dan durasi kerja yang harus dibayar oleh pemilik modal. Perubahan konsep kerja yang dicirikan oleh durasi kerja melahirkan dua jenis kerja yang berbeda, kerja kongkret yang khusus, dan kerja abstrak yang universal. Kerja konkret merupakan aktivitas yang khusus menghasilkan produk dan kekhususan tersebut berhubungan langsung dengan nilai guna (tukang, petani, nelayan, dan hasil kerjanya).

Kerja konkret mempertahankan dan meneruskan begitu saja aktivitas dan nilai yang telah ada. Seorang tukang kayu bekerja untuk menghasilkan meja dan kursi tanpa dimotivasi terlebih dahulu oleh perhitungan nilai jual. Sang tukang kayu dalam aktivitas pertukangan itu tidak menciptakan nilai baru bagi produk yang dihasilkan. Kerja abstrak, merupakan aktivitas produksi untuk menciptakan entitas bersama bagi produk. Entitas bersama berarti kepemilikan bersama yang digunakan sebagai tolak ukur bagi nilai tukar produk. Penciptaan entitas bersama merupakan aksi penciptaan nilai baru dan kreasi nilai yang terlaksana dalam strategi produksi dan sewaktu produk dibawa ke pasar dan dapat dipetukarkan sebagai barang dagangan (Saeng, 2012 : 129-130)

Relasi produsen dengan konsumen talah dikondisikan oleh beragam citra dan nilai tambah. Pertukaran barang antara buruh dan majikan sudah ditentukan dan diputuskan lebih dahulu dalam bentuk kontrak kerja. Kaum Marxist meyakini bahwa kontrak kerja lebih memperlihatkan kesenjangan, pemerasan, dan penidasan daripada kesamaan dan keadilan antara buruh dan pemilik modal. Dengan ini maka, penilaian mayoritas yang meyakini bahwa kontrak kerja mengungkapkan dan mewujudkan kebebasan, kesederajatan, dan keadilan dalam dunia kerja merupakan hal yang jelas-jelas keliru. Ketimpangan posisi dan daya tawar menawar antara kedua pihak muncul dari sumber ekonomi, kekuasaan sosio-politik, dan status sosial. Mengharapkan

majikan tunduk pada budak, pmilik modal kepada pekerja sama dengan mengharap bulan turun ke bumi.

Ketimpangan daya tawar-menawar melahirkan pemkasaan kehendak. Secara manusiawi dan rasional, kaum buruh lebih memilih untuk tetap bekerja walaupun dalam situasi tidak manusiawi, asalkan memperoleh upah, dairpada memimpikan gaji yang tinggi namun menjadi pengangguran sepanjang hari. Bagi buruh, menganggur berarti tiada aktivitas tukar-menukar komuditi. Tanpa tukar menukar produk sama dengan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Menganggur berarti dapur tidak ngebul. Dalam situasi demikian buruh terpaksa menerima kontrak kerja yang ditawarkan. Dari telaah kritis dan rinci ini, dapat dilihat kemudian disimpulkan dengan tegas bahwa kontrak kerja jauh dari asas keadilan, kesedrajatan, dan kebebasan. Malah, kontrak kerja merupakan format baru penjajahan dan pemerasan, instrument yuridis untuk melestarikan praktik ketidakadilan dan eksploitasi manusia oleh sistem kapitalisme (Saeng, 2012 : 134)

Kembali pada analisis kritis Marx, sistem kapitalis mendorong masyarakat bergerak maju melalui perkembangan kontradiktif dari berbagai faktor yang menyokong. Kapitalis mencirikan aktivitas masyarakat yang sangat bernuansa dialektis. Dari kenyataan ini tersingkap jelas bahwa bagunan masyarkat kapitalis merupakan perpaduan dealektis dari berbagai pertentangan. Kekayaan didapat lewat pemiskinan, kebebasan dengan penguasa, kemajuan melalui pembatasan, kekuasaan lewat pembasmian lawan, kesejatrahan, kelimpahan, dan kekayaan dengan pengerukan dan pengurasan tanpa batas semua sumber alam. Kini, beracam ragam dampak turunan dari prinsip dasar dan prinsip operasional sistem kapitalis bermunculan ke permukaaan secara terang-terangan. Konflik kepentingan, kekerasan, pelanggaran, kontroversi, dan relasi penuh intrik bertambah instens, kartel dalam kelompok mofioso menjamur, kontras antara segelintir orang kaya-berkuasa dan rakyat miskin jelata terpampang di depan mata dan sudah menjadi pemandangan sehari-hari (Saeng, 2012 : 134-135)

Kesadaran Palsu Kebebasan dan Ilmu Pengetahuan Tentang Kesejahteraan

Dalam era demokrasi di Indonesia, hal yang sangat dikedepankan adalah masalah kebebasan dalam banyak aspek. Masyarakat yang pro demokrasi diberikan banyak ruang dalam peraturannya untuk bertindak bebas sesuai kehendaknya. Namun pasti tetap dalam kerangka peraturan yang ada. Kebebasan yang diagung-agungkan oleh mereka para pejuang demokrasi ternyata memiliki efek samping yang tidak disadari. Hal ini yang menjadi kritik Marcuse mengenai kebebasan yang sesungguhnya merupakan bentuk lain dari pengekangan.

Marcuse melukiskan bagaimana kebebasan bisa menjadi alat dominasi dalam masyarakat modern yang begitu toleran terhadap oposisi-oposisi yang berkembang di dalamnya. Oposisi dalam masyarakat tidak dapat diegah ataupun dihambat, tetapi diberikan keleluasaan untuk menyampaikan protes-protesnya karena hal ini dianggap mampu menjadi penyeimbang sistem dan memiliki efek dalam menstabilkan sistem itu sendiri. Namun demikian, kebebasan tidak hanya diandalkan untuk meredam oposisi-oposisi, namun juga mampu mengintegrasikan oposisi ke dalam sistem.

Masyarakat modern saat ini diajarkan untuk menyerap segala bentuk oposisi atau perlawanan tanpa melukai dirinya sendiri, sehingga kekuatan penentang dalam masyarakat modern tidak perlu di hantam, namun perlu dijinakkan secara halus, yaitu dengan cara memanipulasi kebutuhan-kebutuhan. Kritik yang muncul akan dengan mudah dialihkanmenjadi barang konsumsi yang menarik, dalam bentuk hiburan-hiburan dan sensasi-sensasi. Dengan kondisi semacam ini, masyarakat dicegah untuk menjadi kritis terhadap sistem itu sendiri. Oposisi didalam sistem akan senantiasa dibiarkan sejauh mereka tidak menjadi oposisi terhadap sistem. Perlawanan terhadap sistem tentu tidak akan dibiarkan dan sistem kontrol teknologis yang telah tersusun rapih akan segera membereskan dan membuatnya menjadi lelucon (Puspowardoyo & Seran, :156)

Kondisi kekinian Indonesia memang sedang hidup di alam demokrasi. Demokrasi yang cnderung bebas (liberal) menjadi peredam daya kritis masyarakat saat ini. Masyarakat yang kritis dalam negara ini akan segera sangat mudah diantisipasi dengan cara memberikan stimulan-stimulan yang mampu menjadi penyenang hati mereka. Sehingga masyarakat akan menjadi lupa bahwa sebenarnya sistem yang bebas inilah yang sebenarnya harus dikritisi. Selagi masyarakat tidak mengkritisi kebebasan

itu sendiri, maka meraka akan senantiasa dibiarkan menikmati kebebasannya. Karena ketika masyarakat menikmati kebebasannya, maka secara tidak langsung mereka sudah kehilangan daya kritisnya.

Selain itu disisi lain, pada kondisi kekinian bagi mereka yang menentang kebebasan atau sistem demokrasi liberal yang sedang berlangsung, maka pemerintah akan melakukan segala upaya untuk membungkam kelompok masyarakat tersebut, sehingga mereka akan dibungkam atau malah menjadi bahan "bully" di tengah kehidupannya.

Selanjutnya, Marcuse juga berpendapat bahwa selain kebebasan, maka ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya dapat membebaskan manusia dari tuntutan bekerja keras, ternyata menjadi sistem penguasaan total di masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjelma di dalam industri telah memproduksi barang konsumsi secara berlimpah sehingga sebenarnya wacananya walfare state (negara sejahtera) telah terwujud dan dengan jalan itu manusia dapat merealisasikan kebahagiaan dan kebebasannya.

Akan tetapi kebahagian dan kekebasan tersebut tidak jadi terwujud karena ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya mengabdi pada manusia, malah mengendalikan manusia itu sendiri. Manusia yang mengagung-agungkan ilmu pengetahuan (pendidikan) dan teknologi tanpa disadari ditelan oleh kekuasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sistem total yang merangkum berbagai kehidupan manusia (Puspowardoyo & Seran, 2016:156).

Teknologi yang maju membuat produksi akan barang akan terus berjalan dan membuat masyarakat dalam kondisi ketercukupan. Manusia yang telah berkecukupan akan menikmati kondisinya tanpa harus memproduksi sesuatu dan kondisinya telah berubah menjadi konsumen. Sebagai konsumen, masyarakat mendapatkan apa yang dikehendaki sesuai dengan manipulasi iklan dan promosi yang ada, dan kondisi seperti ini akan membuat masyarakat ketergantungan. Teknologi terus menerus akan memproduksi prodaknya dan masyarakat akan selalu ketergantungan dengan produk yang dihasilkan, sehingga hal ini membuat masyarakat dikontrol dan dikekang oleh teknologi. Para kapitalis akan mengontrol masyarakat dengan terus mempromosikan dan mengiklankan berbagai produk agar masyarakat menjadi ketergantungan. Sehingga

pada titik ini teknologi telah mampu menjadi pengontrol pemikiran dan daya kritis masyarakat modern.

Menumbuhkan Kesejahteraan dan Mendekatkan Kelas Sosial

Dalam masyarakat dan manusia satu dimensi, jalan keluar yang masih tersisa untuk menggapai kebebasan dan meraih kebahagiaan hidup hanya bertumpu pada pencerahan nalar. Marcuse berpendapat bahwa tanpa manusia, kondisi objektif hanya akan tinggal sebagai prasyarat semata. Fakta dan kondisi apa pun memiliki arti dan kegunaan hanya jika manusia mengerti dan sanggup memanfaatkan dengan maksimal. Manusia tetap tinggal sebagai aktor utama dan faktor kunci dalam perubahan. (Saeng, 2012 : 144)

Lalu selanjutnya menurut Marcuse, persoalan akan selesai bukan dengan penghapusan kerja yang secara otomatis akan menghapuskan kelas-kelas sosial. Namun yang menjadi permasalahan adalah kesempatan kerja yang tidak teralienasi sebagai basis untuk kembali melahirkan masyarakat. Bukan berarti orang tidak harus bekerja lagi, melainkan bahwa mereka masyarakat lebih baik mengerjakan sesuatu yang lain, yang berguna bagi hidup dan relasi (sosial) yang lain. Kepada mereka diberikan cakrawala dan nilai yang berbeda dan bahwa mereka bisa hidup dengan moralitas yang berbeda pula. Kerja mustahil dihapus, karena menjadi cermin yang memantulkan jati diri individu. Namun kapitalisme yang memanipulasi kerja untuk kepentingan ekonodi dan manipulasi ini yang harus dihentikan. (Saeng, 2012 : 145)

Bagi Marcuse, solusi kesejahteraan bagi masyarakat adalah mengembalikan hakikat dan fungsi kerja kedalam aktivitas yang memanusiakan dan menggembirakan. Bila kerja dijadikan sebagai aktivitas hakiki sebagai perwujudan wahana untuk mengenal minat dan bakat, maka kerja tetap menjadi bagian integral hidup manusia. Dengan demikian yang harus diubah adalah konsep dan praksis kerja. Pemahaman dan praksis kerja sebagai aktivitas yang dipaksakan diganti dengan aktivitas yang dikehendaki, dari pemerasan menjadi pemanusiaan (Saeng, 2012 : 146)

KESIMPULAN

Salah satu faktor yang menjadi permasalahan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat adalah karena masyarakat kelas pekerja di Indonesia telah teralienasi dalam bekerja. Kerja menghasilkan produk. Dalam sistem kapitalis, produk berperan sebagai barang dagangan, dan komuditi merupakan nilai guna yang dapat dipertukarkan dengan komuditi lainnya di pasar. Nilai guna merupakan sarana untuk memenuhi aneka keperluan hidup pihak lain. Sebagai nilai guna, komuditi senantiasi menunjukan dimensi sosial produk, dalam arti sebagai upaya memenuhi nilai kebutuhan individu atau masyarakat secara umum.

Nilai guna disalurkan secara otomatis sesuai dengan daya beli dan kebutuhan melalui pertukaran komuditi antarindividu. Proses produksi ditujukan untuk menghasilkan komuditi, nilai guna tetap tinggal sebagai prasyarat utama. Kontrak kerja jauh dari asas keadilan, kesedrajatan, dan kebebasan. Malah, kontrak kerja merupakan format baru penjajahan dan pemerasan, instrument yuridis untuk melestarikan praktik ketidakadilan dan eksploitasi manusia oleh sistem kapitalisme

Bagi Marcuse, solusi kesejahteraan bagi masyarakat adalah mengembalikan hakikat dan fungsi kerja kedalam aktivitas yang memanusiakan dan menggembirakan. Bila kerja dijadikan sebagai aktivitas hakiki sebagai perwujudan wahana untuk mengenal minat dan bakat, maka kerja tetap menjadi bagian integral hidup manusia.

Lalu selanjutnya menurut Marcuse, persoalan akan selesai bukan dengan penghapusan kerja yang secara otomatis akan menghapuskan kelas-kelas sosial. Namun yang menjadi permasalahan adalah kesempatan kerja yang tidak teralienasi sebagai basis untuk kembali melahirkan masyarakat. Bukan berarti orang tidak harus bekerja lagi, melainkan bahwa mereka masyarakat lebih baik mengerjakan sesuatu yang lain, yang berguna bagi hidup dan relasi (sosial) yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Poespowardojo, T.M.S. & Seran, A. (2016). Diskursus Teori-Teori Kritis : Kritik atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer. Jakarta : Kompas.

Saeng, Valentinus. (2012). Herbert Marcuse, Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global. Jakarta : PT Gramedia

https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229

https://www.bps.go.id/QuickMap?id=0000000000

http://www.beritasatu.com/nasional/225288-mensos-pengeluaran-us-15-per-hari-jumlah-penduduk-miskin-96-juta.html

KUALITAS PELAYANAN PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI RUMAH SAKIT DR SUYOTO JAKARTA

Bella Nabilla dan Retnowati WD Tuti
FISIP-Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email : Bellanabilla02@gmail.com / retnowatiwdtuti@yahoo.com

Abstract : Background, the number of complaints against the service process BPJS also revealed the mass media, such as: Social Security Agency (BPJS) Health is still often confronted with various problems of everyday life, including patients with difficult to find space ICU, PICU, NICU and Bubble. In addition, patients BPJS often told to buy drugs, blood, pay administration and so forth, yet again faced the problem regionalization referral. In terms of membership registration BPJS Health, which requires registration activation period of 14 days and had the whole family in Card Family with the same class, the transition of membership and Edabu, including the payment of dues is also the system of the family. (RRI.co.id, Friday 21 October 2016). According to the preliminary observations of researchers (July 2015), the problem is revealed that the patient was not served very well, which is a long wait for the drug in pharmacies BPJS, spend money for drug stocks empty and seek to pharmacies that have not cooperated with BPJS, responsiveness of health workers less, excess patients who came while RS shortage of human resources. Problem Formulation: How Quality of Patient Services BPJS in dr. Suyoto Jakarta; Objective: To analyze the quality of patient services of BPJS at the hospital Suyoto Jakarta; Knives of analysis: Services Theory Denhardt and Denhardt (2003), prinsp in the measurement of quality of service: 1) Confinience, 2) Security, 3) Reliability, 4) Personal Attention, 5) Problem-Solving Approach, 6). Fairness 7) Fiscal Responsibility, 8) Citizen influence. Methods: Discriptive. Approach Research: Qualitative. Data Collection Techniques: observation, interview, and documentation. Informants techniques: purposive for service personnel (5), informants from the community with the Accidental (5 people). Data Analysis Techniques: analytical models of Bogdan, and test the validity of the data using Triangulation techniques from Moleong. Conclusion: Quality Service BPJS Patient at Hospital dr. Suyoto Jakarta is quite good. In view of the indicator Confinience ensure BPJS straightforward. Security indicator people believe the officer did not make a mistake in giving the drug, the state of the building is still viable and not harmful. Personal Attention Indicator clerk patiently responding to questions of society. Indicators Problem Solving Approach officers answered their complaints in case of trouble directly handled it well. Fairness Indicators airport attendant does not distinguish between class or status in society. Indicators Fiscal Responsibility people believe the government is using public money responsibly. Influence Citizen: nothing. RS dr.Suyoto Jakarta already provides a suggestion box and indoor public complaints in the PR department. But indicators Reliability number of service personnel is still inadequate, but its officials have been working in accordance with the applicable SOP in hospitals and work in accordance with their respective duties.

***Keywords**: Quality, Service*

AbstraK : Latar Masalah, banyaknya keluhan terhadap proses pelayanan BPJS juga diungkap media massa, seperti: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih sering dihadapkan pada berbagai permasalahan sehari-hari, diantaranya pasien sulit mencari ruang perawatan ICU, PICU, NICU dan Ruang Isolasi. Selain itu, pasien BPJS sering disuruh membeli obat, darah, membayar administrasi dan lain sebagainya, belum lagi dihadapkan masalah regionalisasi rujukan. Sementara dari sisi pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu pendaftaran memerlukan masa aktivasi 14 hari dan harus seluruh keluarga di Kartu Keluarga dengan kelas yang sama, transisi kepesertaan dan Edabu, termasuk dalam pembayaran iuran juga sistem satu keluarga.(RRI.co.id, Jumat 21 Oktober 2016). Menurut hasil pengamatan awal peneliti (Juli 2015), masalah yang diungkap bahwa pasien merasa tidak dilayani dengan baik, yaitu lama tunggu obat di apotik BPJS, keluarkan uang karena stok obat kosong dan mencari ke apotik yang belum bekerjasama dengan BPJS, daya tanggap petugas kesehatan yang kurang, berlebihnya pasien yang datang sedangkan RS kekurangan SDM. Rumusan Masalah: Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Pasien BPJS di RS dr. Suyoto Jakarta; Tujuan Penelitian:Untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Pasien BPJS di RS dr Suyoto Jakarta. Pisau analisis: Teori Pelayanan Denhardt dan Denhardt (2013), prinsip dalam pengukuran kualitas pelayanan: 1) Kemudahan, 2) Keamanan, 3)Keandalan, 4) Perhatian Personal, 5) Pendekatan Pemecahan-Masalah, 6) Kejujuran, 7) Tanggungjawab Fiskal, 8) Pengaruh Warga Negara. Metode Penelitian : Diskriptif. Pendekatakan Penelitian: Kualitatif. Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Informan: Purposif bagi petugas pelayanan (5 orang), informan dari masyarakat dengan Accidental (5 orang). Teknik Analisis Data: model analisis dari Bogdan, dan uji keabsahan data menggunakan Teknik Triangulasi dari Moleong. Kesimpulan: Kualitas Pelayanan BPJS di Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta cukup baik. Di lihat dari indikator Kemudahan, pelayanan BPJS tidak berbelit-belit. Indikator Keamanan masyarakat percaya petugas tidak melakukan kesalahan dalam memberi obat, keadaan gedung masih layak dan tidak membahayakan. Indikator Perhatian Personal petugas sabar menanggapi pertanyaan masyarakat. Indikator Pendekatan Pemecahan Masalah petugas menjawab keluhan masyarakat apabila terjadi kesulitan langsung menanganinya dengan baik. Indikator Keadilan petugas melayani tidak membedakan golongan atau status masyarakat. Indikator Tanggung Jawab Fiskal masyarakat percaya pemerintah menggunakan uang publik secara bertanggungjawab. Pengaruh Warga Negara: belum ada. RS dr.Suyoto Jakarta sudah menyediakan kotak saran dan ruangan pengaduan masyarakat di bagian Humas. Namun indikator Keandalan jumlah petugas pelayanan masih kurang memadai, tetapi para petugas nya sudah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku di RS dan bekerja sesuai dengan tupoksi nya masing-masing.

***Kata Kunci**: Kualitas, Pelayanan*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan kesehatan tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu "Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis." Negara wajib memenuhi amanah Undang-Undang Kesehatan tersebut. Disebut Negara berarti tidak hanya Pemerintah saja, melainkan juga pihak

rakyat/masyarakat dan pihak swasta ikut ambil bagian dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Salah satu ukuran pelayanan kesehatan yang baik tercermin dari tidak adanya keluhan pasien atas pelayanan yang diberikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sikap dapat dipercaya petugas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran berkomunikasi, ramah tamah dalam melayani pasien serta memberikan harapan akan kesembuhan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan (Azwar, 1997 : 50).

Oleh karena itu perlu perhatian serius dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu sehingga tidak ada anggapan bahwa orang miskin dilarang sakit (Kompasiana, 17 Juni 2015). Atas dasar itu, pemerintah mengambil kebijakan strategis untuk menggratiskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sejak januari 2005 program ini menjadi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PJPKM) Yang populer dengan nama Askeskin. Pada tahun 2008 program askeskin ini di ubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), kemudian namanya menjadi BPJS sejak tahun 2011.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan atau BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia (UU No24 Tahun 2011 tentang BPJS). Banyaknya keluhan terhadap proses pelayanan BPJS juga diungkap media massa, seperti: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih sering dihadapkan pada berbagai permasalahan sehari-hari, diantaranya pasien sulit mencari ruang perawatan ICU, PICU, NICU dan Ruang Isolasi. Selain itu, pasien BPJS sering disuruh membeli obat, darah, membayar administrasi dan lain sebagainya, belum lagi dihadapkan masalah regionalisasi rujukan. Sementara dari sisi pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu pendaftaran memerlukan masa aktivasi 14 hari dan harus seluruh keluarga di Kartu Keluarga dengan kelas yang sama, transisi kepesertaan dan Edabu, termasuk dalam pembayaran iuran juga sistem satu keluarga.(RRI.co.id, Jumat 21 Oktober 2016)

Menurut hasil Pengamatan awal pada saat magang di bulan Juli tahun 2015 di Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta memperoleh hasil dari pengamatan, yaitu masalah

utama yang sangat kompleks mengenai BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta mengenai masalah pelayanan. Pasien merasa tidak dilayani secara optimal, masih harus mengeluarkan uang lagi karena stok obat kosong dan mencari ke apotik yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ketidakpuasan pelayanan dapat berasal juga dari lamanya waktu tunggu obat di apotik BPJS. Permasalahan yang kemudian terjadi adalah membludaknya pasien yang datang berobat sedangkan Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta kekurangan sumber daya manusia dalam menangani pasien. Sehingga hal ini berdampak pada daya tanggap yang kurang maksimal dari pemberi layanan kepada pasian yang datang. Atas dasar permasalahan tersebut penelitian ini dilakukan untuk mendapat jawaban bagaimana kualitas pelayanan pasien BPJS di RS dr Suyoto Jakarta.

Rumusan Masalah Penelitian:

1. Bagaimanakah Kualitas Pelayanan pasien pengguna BPJS di Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta?
2. Apa keluhan yang di sampaikan pasien pengguna BPJS kepada Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta dan bagaimana proses penanganan nya?

Tujuan Penelitian :

1. Untuk menganalisis kualitas pelayanan Pasien BPJS di Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta.
2. Untuk mengetahui keluhan yang disampaikan pasien BPJS kepada Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelititian Terdahulu

Berikut di bawah ini dikemukakan beberapa hasil penelitian tentang Kualitas Pelayanan dari Peneliti luar Negeri yang disajikan dalam bentuk tabel.

No	Judul dan Pengarang	Perumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
01	*Implementing Change by Continuous Learning : The Public Service Reform Programs in Tanzania* oleh Issa	Bagaimana Reformasi Pelayanan publik di Tanzania	*Case Study; participant observation* dan *documentary review*	1. Pelayanan publik dan institusinya merupakan bagian integral dari proses perubahan dan adaptasi; 2. Stabilitas politik dan kontinuitas kebijakan

				memungkinkan melakukan reformasi Pelayanan publik untuk menciptakan jalan yang dapat dirunut yang dicirikan dengan perubahan bertahap.
02	*Service Quality in the Public Service,* oleh Munhurrun, Bhiwajee dan Naidoo	Bagaimana kualitas Pelayanan publik *Front Line Employee* (FLE) dan persepsi pelanggan mengenai kualitas pelayanan di Mauritius	Metode Survey dengan teknik SERVQUAL	1. Departemen Pelayanan publik gagal memenuhi ekspektasi pelanggan 2. Training pada FLE 3. Pekerja dan pelanggan tidak memiliki perbedaan signifikan dalam opini tentang gap persepsi dengan ekspektasi organisasi publik
03	*Renewing the Holy Grail on uman Motivation in the Delivery of Public Service: Evidence from Ghana's Local Government Service,* oleh Antwi.	bagaimana reformasi sektor publik telah mempengaruhi motivasi dan efektivitas pekerja pelayan sipil dalam menjalankan pelayanan pada pem lokal	studi kasus ; kuesioner	*New Public Management* berjalan, kepemimpinan sektor publik berharap untuk bertindak dan berperilaku sebagai *entrepreneur* sektor privat
04	*Is There Any Change in the Public Service Values of Different Generations of Pub. Adm?* oleh Omurgonulsen & Oktem	Bagaimana nilai Pelayanan publik khususnya etika Pelayanan publik antara dua generasi yang berbeda distrik.	Metode penelitian menggunakan metode survey empiris	Temuan riset ini menunjukkan pola tradisional dan pola nilai yang kurang lebih konsisten untuk gubernur dan gubernur distrik
05	*Strategies to Improve Client Service: Exemplars in the Canadian Federal Government,* olehSomerville & Elliot	Bagaimana menerapkan strategi khusus pada organisasi pelayanan di Canada	Case study	Tidak memberikan dukungan kepada hipotesis yang sering diasumsikan bahwa Pelayanan publik tradisonal direndahkan oleh munculnya nilai-nilai bisnis
06	*Citizen Involvement and Performance Management in Special-Purpose Governments di* Negara Bagian Texas, oleh Tanya Haeikkila *(2007)*	1. pemahaman Pelayanan publik melalui partisipasi publik yanglebih berkualitas dan menguntungkan	Penelitian kuantitatif menggunakan studi komparatif dengan desain *methods multiple data collection*.	Model keputusan Pelayanan publik sangat ditentukan akuntabilitas dan responsivitas yang transparan dalam tatanan *governance*.Kadar empiris pelayanan sangat ditentukan partisipasi warga
07	*Service Quality in Malaysian Public Service: Some Findings* oleh AGA.Ilhaamie	bagaimana kualitas Pelayanan publik oleh organisasi publik yang dinilai oleh pelanggan eksternal dengan menggunakan SERVQUAL ?	**Metode** diskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	Kualitas Pelayanan publik cukup baik. *Tangibles* adalah dimensi yang paling penting. *Perception* memiliki nilai terendah .

08	*ICT for Improved Public Service Delivery in Papua New Guinea,* olehR D Pathak, Rafia Nazi, Gourmet Singh, RFI Smith	Apakah penerapan E-Governance dalam Pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan		Ada kebutuhan mendesak untuk merapkan ICT di PNG untuk menggunakan e-governance di semua lembaga publik.
09	*Parkinson's law and the New Public Management? Contracting Determinants and Service-Quality Consequences In Public Education in Texas,* oleh Laurence J. O'Toole, Jr. and Kenneth J. Meier	Bagaimana sistem kontrak tetap menjadi pilihan dalam Pelayanan publik untuk Bagaiman meningkatkan kinerja birokrasi pelayanan ? dengan tiga tahun menjadi time series nya.	Teknik *"Pooled cross-sections of time series"*,	Pencapaian kesejahteraan rakyat melalui penerapan Pelayanan publik,. dengan Model Kontrak dalam Pelayanan publik untuk peningkatan Kinerja birokrasi penyelenggara Pelayanan publik. S*aat ini adalah era kontrak (the age of the contract).*

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (Disertasi WD Tuti, Retno, 2013)

Penelitian terdahulu tersebut secara umum antara lain membahas reformasi pelayanan publik; kualitas pelayanan publik; etika pelayanan publik; partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; e-governance, kontrak pelayanan, dan jenis perizinan. Aspek-aspek penelitian tersebut di atas perlu dilakukan penelitian lanjutan, terutama penelitian yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan pelayanan oleh BPJS. Di era reformasi saat ini, perspektif tersebut semestinya telah berubah menuju perspektif pemberdayaan masyarakat. Namun dengan terdapatnya fenomena kualitas pelayanan publik yang masih rendah, timbul pertanyaan apakah perspektif pemerintahan daerah tersebut telah mengalami perubahan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan nilai dan pemahaman SDM pelaku pelayanan publik masih menjadi hambatan yang harus diatasi dalam mencapai tujuan dari reformasi pelayanan publik. Hal ini sebagaimana dinyatakan Munhurrun, Bhiwajee & Naidoo, (2010), Antwi

(2009), Omurgonulsen & Oktem (2009) dalam beberapa penelitiannya. Selain pemahaman SDM pelaku pelayanan publik, pemahaman masyarakat juga memainkan hal yang penting khususnya dalam membangun persepsi mengenai pelayanan publik itu sendiri. Hal ini sebagaimana dinyatakan AGA. Ilhaamie (2010) .

Hambatan-hambatan tersebut pada dasarnya dapat diatasi dengan menetapkan strategi pelayanan publik secara khusus sesuai dengan karakter organisasi dan melibatkan patisipasi masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Somerville & Elliot (2009) dan Tanya Haeikila (2007). Selain itu perlu dikembangkan strategi yang mampu menciptakan sistem pengendalian secara efisien dan efektif, salah satunya melalui pengembangan IT sebagaimana dinyatakan R D Pathak, maupun pengembangan model kontrak Laurence J. O'Toole, Jr. and Kenneth J. Meier. (2004)

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu ditunjukan bahwa pemahaman SDM dan masyarakat menjadi kunci penting dalam pelayanan publik. Dalam penelitian tersebut, diupayakan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai relevansi antara perilaku SDM itu sendiri dengan kualitas pelayanan, Dalam penelitian ini, didalami setidaknya dari sisi : 1). Kenyamanan; 2). Keandalan; 3). Pengaruh warga; 4). Keadilan; 5). Perhatian pribadi; 6). Pendekatan pemecahan masalah, 7). Pertanggungjawaban Keuangan; Fiscal; dan 8),Keamanan, untuk dilihat relevansinya dengan konteks pelayanan publik oleh BPJS melalui RS Suyoto di Jakarta. Hal tersebut yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Pelayanan Publik

Menurut Devrye (1994:8) dalam Wiryatmi (Disertasi, 2004), terminologi pelayanan berasal dari kata service, yang mengandung dua pengertian di dalamnya, yakni ….. *the attendance of an inferior upon a superior atau to be useful*. Pengertian pertama mengandung unsur ikut serta atau tunduk dan pengertian kedua mengandung suatu kebermanfaatan atau kegunaan. Pengertian kedua tersebut sejalan dengan pendapat Davidow Uttal yang memberi pengertian lebih luas, yaitu " what ever enhances customer satisfaction. Dengan demikian, dikatakan bahwa pelayanan merupakan suatu usaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan. Kottler dalam Fandy Tjiptono (2000), pelayanan adalah setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah akan menentukan tercapainya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa publik. Sasaran manajemen pelayanan adalah kepuasan. Meskipun sasaran pelayanan publik itu sederhana, namun pencapaiannya memerlukan kesungguhan kriteria dan syarat-syarat yang seringkali tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, setiap organisasi penyedia jasa pelayanan haruslah memperhatikan kualitas pelayanannya. Hanya dengan pemberian pelayanan yang berkualitaslah, kepuasan pelanggan dapat diwujudkan. Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk meng¬imbangi harapan pelanggan.

Pakar lainnya, Gronroos dalam Fandy Tjiptono (2005:14-16) menyebutkan, bahwa terdapat tiga kriteria pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu : outcome related, process related, dan image related criteria. Ketiga kriteria tersebut dapat dijabarkan menjadi enam unsur pelayanan berkualitas, yakni:

1).Profesionalism and skills merupakan outcome-related criteria, pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa, karyawan, sistem operasional, dan sumber daya fisik, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah pelanggan secara profesional

2).Attitudes and behavior, pelanggan merasa karyawan perusahaan menaruh perhatian terhadapnya dan berusaha membantu dalam memecahkan masalah secara spontan dan senang hati (termasuk process-related criteria).

3).Accesisbility and flexibility, pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, kerja, karyawan dan sistem operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelayanan dapat melakukan akses dengan mudah. Selain itu juga dirancang dengan maksud supaya dapat bersifat fleksibel dalam menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan (termasuk process-related criteria);

4).Reliability and trusworthiness (termasuk proses-related criteria, dimana pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi, pelanggan dapat mempercayai segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya);

5).Recovery (pelanggan menyadari jika ada kesalahan atau apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari pemecahan yang tepat (termasuk process-related criteria);

6).Reputation and credibility, kriteria ini merupakan imaged-related criteria). Pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya.

Muara dari Pelayanan publik berkualitas tersebut adalah, menurut Schanaars seperti dikutip Harbani Pasolong (2007:144), adalah terciptanya kepuasaan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya: hubungan antara pelanggan dengan instansi menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembeli (pemakaian) ulang, terciptanya loyalitas dari pelanggan serta terbentuknya rekomendasi dari mulut ke mulut yang kesemuanya menguntungkan perusahaan.

Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam penelitian pemasaran adalah model yang dikembangkan oleh, Parasuraman, Zethithamal dan Berry adalah SERVQUAL (Service Quality).

1. Tangible (bukti fisik), yaitu fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
2. Reliabity (keandalan); kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan
3. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap
4. Assurance (jaminan), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para pegawai bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan
5. Emphathy, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan.

Selain itu, untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, sesuai dengan paradigma the New Public Service, menurut Denhardt & Denhardt, pemerintah perlu memperhatikan delapan prinsip pelayanan yang bermutu, yakni:

1. Convenience :ukuran yang menunjukkan tingkat sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat diakses dan tersedia dengan mudah oleh warga;
2. Reliability : menilai tingkat sejauh mana pelayanan pemerintah dapat disediakan secara benar dan tepat waktu;
3. Personal attention : mengukur sejauh mana pelayanan pemerintah dapat diinformasikan oleh aparat dengan tepat kepada warga dan aparat bisa bekerja sama dengan mereka untuk membantu memenuhi kebutuhannya:
4. Citizen influence : mengukur sejauh mana warga merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi mutu pelayanan yang diterima dari pemerintah.
5. Fairness : ukuran untuk menilai sejauh mana warga percaya bahwa pemerintah telah menyediakan pelayanan dengan cara yang adil bagi semua orang ;
6. Problem-solving approach : mengukur tingkat sejauh mana aparat pelayanan mampu menyediakan informasi bagi warga untuk mengatasi masalahnya ;
7. Fiscal Responsibility : ukuran untuk menilai sejauh mana warga percaya bahwa pemerintah telah menyediakan pelayanan dengan cara menggunakan uang publik dengan penuh tanggung jawab ; dan
8. Security : ukuran yang menunjukkan tingkat sejauh mana pelayanan yang diberikan menjadikan warga merasa aman dan yakin bila menggunakannya;

Untuk mengevaluasi sistem pemberian pelayanan, menurut Hirschman (1970) dalam Paraons (2001) dapat dilihat dari apakah warga masyarakat puas dengan barang dan jasa yang diberikan oleh sistem birokrasi, yakni sejauh mana respons yang diberikan oleh warga masyarakat terhadap ketidakpuasan tersebut. Hirschman mengemukakan adanya 3 (tiga) bentuk respons yang dapat diambil oleh warga masyarakat atas pelayanan yang tidak sesuai dengan harapannya, yakni: exit, voice, dan loyalty. Tanggap rspons exit dilakukan ketika konsumen tidak puas dengan pelayanan barang atau jasa yang diperolehnya dengan jalan mencari alternatif pelayanan dari perusahaan atau organisasi lainnya. Akan tetapi, apabila pelayanan itu bersifat monopoli seperti pelayanan perizinan, respons exit (menghindari) semacam ini tidak akan mungkin dilakukan karena tidak ada pilihan lain dari warga untuk memperoleh perizinan tersebut. Perizinan merupakan monopoli Pemda. Namun warga masyarakat dapat menggunakan bentuk respons kedua yakni voice ketika merasa bahwa pelayanan

yang diterimanya tidak sesuai dengan harapannya. Respons voice (bersuara) dapat dilakukan melalui keluhan-keluhan atau komplain terhadap birokrasi pelayanan apakah langsung kepada birokrasi pelayanan atau saluran-saluran bersuara lainnya seperti melalui Komisi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, media massa, dan lain-lainnya. Menurut Hirschman, bersuara bagi warga masyarakat atau konsumen ini adalah, bertujuan untuk mengubah praktek, kebijakan dan output dari perusahaan yang produk atau jasanya mereka beli, atau mengubah organisasi tempat mereka berada (Hirschman dalam Paraons, 2001). Sementara loyalty (loyalitas) adalah merupakan bentuk kesetiaan terhadap birokrasi yang memberikan pelayanan, meskipun seorang warga masyarakat memiliki kemampuan untuk "exit". Masyarakat mungkin beralasan bahwa jika setiap orang" keluar dari pelayanan, masyarakat secara keseluruhan, termasuk dirinya, akan bertambah buruk kinerja pelayanan dan karenanya mereka memilih opsi voice ketimbang opsi exit dan tetap loyal terhadap service provider.
Menurut pendapat Hodgetts dan Casio dalam Azwar, (1996: 36), jenis pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu:

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian : Tempat Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta beralamat di Jalan Veteran No. 178 Bintaro, Jakarta Selatan. Waktu Penelitian dimulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan November 2016.
Teknik Pengumpulan Data :

1. Observasi

   Obyek yang diamati yaitu dari mulai proses registrasi peserta BPJS, ruang periksa dokter, ruang ICU, ruang administrasi, apotek, dan toilet. Sampai dengan hasil pelayanan yang diperoleh oleh Pasien BJS di Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta.

2. Wawancara

   Instrumen pengumpulan data yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah pedoman wawancara yang telah disusun sesuai dengan indicator dari kualitas pelayanan menurut Denhardt and Denhardt (yang diwawancara 10 orang)

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang dirujuk peneliti, seperti : Laporan Tahunan RS, catatan Keluhan Pasien, catatan jumlah Pasien di Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta; Standar Operasional Pelayanan RS; Brosur RS Suyoto; Foto pelaksanaan pelayanan BPJS; Alur Pelayanan RS Suyoto, 6) Struktur Organisasi RS Suyoto.

Teknik Penarikan Informan,

5 pasien pengguna BPJS serta pegawai yang berwenang dengan obyek yang diteliti.

Teknik penarikan informan menggunakan 2 teknik yaitu: 1). Teknik Purposif , Informannya adalah Kepala Bagian Urusan Umum Rumah Sakit, Apoteker, Petugas tempat pendaftaran pasien, Kepala Perawat Rumah Sakit dan Petugas BPJS Rumah Sakit; 2). Teknik Penarikan Accidental: para pasien/keluarga pasien

Teknik Analisis Data

Patton, 1980 (dalam Lexy J. Moleong 202:103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

a) Reduksi Data

Mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menginformasikan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfkir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lain sebagainya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja sekanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data merupakan suatu usaha untuk menyusun sekumpulan informasi

yang telah diperoleh dilapangan, untuk kemudian data tersebut disajikan secara jelas dan sistematis sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengujain kebenaran terhadap kebenaran terhadap data yang diperoleh dari penelitian. Dalam menguji keabsahan data dapat digunakan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalahteknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Paton dalam Moleong, 2010: 330). Hal itu dicapai dengan jalan:

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pasien BPJS di RS dr Suyoto cukup baik. Secara rinci dapat dlihat per indikator yaitu : Kemudahan, masyarakat serta pegawai tidak ada kesulitan karena letaknya yang strategis berada di pinggir jalan utama, serta pelayanan nya tidak berbelit-belit.

Keamanan, masyarakat sudah percaya petugas Rumah Sakit tidak melakukan kesalahan dalam hal pemberian obat. Keadaan gedung Rumah Sakit masih layak dan tidak membahayakan pasien. Keandalan, jumlah petugas pelayanan masih kurang memadai,khususnya di bagian petugas apotik dan jumlah dokter spesialis.

Perhatian Personal, petugas Rumah Sakit ramah dan sopan, serta apabila ada pasien yang mengalami kesulitan segera ditangani dengan baik.

PendekatanPemecahan Masalah, petugas mampu menjawab dan membantu masalah yang di hadapi oleh pasien. Apabila mengalami kesulitan segera ditangani. Keadilan, pelayanan di Rumah Sakit Dr. Suyoto tidak membedakan golongan atau status mayarakat. Dilayani sesuai dengan nomor antrian.

Tanggung Jawab Fiskal, masyarakat mau membayar iuran sesuai dengan kelasnya artinya masyarakat percaya ada timbal balik sarana dan prasarana yang nyaman dari Rumah Sakit. PengaruhWarga Negara, tidak signifikan pengaruhnya, namun sudah tersedia kotak kritik dan saran di Rumah Sakit, serta adanya ruangan bagian humas untuk pengaduan keluhan pasien, sedikit pasien yang mengadu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan BPJS di Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta cukup baik. Namun pada indikator Pengaruh Warga Negara di Rumah Sakit dr.Suyoto Jakarta tidak ada pengaruh karena masyarakat tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan RS. Serta pada indikator Keandalan jumlah petugas pelayanan masih kurang sehingga dapat mempengaruhi daya tanggap petugas.

Saran

1. Perlu penambahan jumlah petugas di beberapa bagian seperti, di bagian Apotik. Karena kurangnya petugas jadi tidak sesuai dengan banyaknya jumlah pasien BPJS yang harus dilayani,menjadikan waktu tunggu obat yang begitu lama.
2. Perlu tambahan lagi beberapa dokter spesialis karena jumlah nya masih kurang, sementara jumlah pasien BPJS banyak yang membutuhkan dokter spesialis.
3. Perlu penambahan stock persediaan obat agar tidak terjadi lagi masyarakat mengeluh obat yang sering kosong.

4. Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana. Dengan peningkatan kebersihan, khususnya di bagian toilet Rumah Sakit yang nampaknya masih belum cukup bersih.

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Gde Muninjaya. Manajemen mutu pelayanan kesehatan, 2011, Jakarta: kedokteran EGC

A.F. Stoner James, DKK, Manajemen, 2006, Edisi Indonesia, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta

Antwi, Renewing the Holy Grail on uman Motivation in the Delivery of Public Service: Evidence from Ghana's Local Government Service,

.Abdul Majid, Suharto. Customer Service Dalam Bisnis Jasa Transportasi, 2009, Jakarta: Rajawali Press

Andri Kristanto. Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya, 2003, Penerbit :Gava Media, Jakarta

Atep Adya Barata. Dasar – Dasar Pelayanan Prima, 2003, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Azwar, A. Pengantar Administrasi Kesehatan, 1997, Bina Rupa Aksara, Jakarta

Chatab, Nevizond. Profile budaya organisasi: Mendiagnosis budaya dan merangsang perubahannya, 2006, Bandung: Alfabeta

Denhardt, Janet V. dan Robert B. Denhardt. Pelayanan Publik Baru: Dari Manajemen Steering Ke Serving, 2013 (Terjemahan), Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, 2005, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Somerville & Elliot, Strategies to Improve Client Service: Exemplars in the Canadian Federal Government

e-Journal llmu Administrasi Negara, 3 (5), 2015: 1668-1682 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org

Fandy Tjiptono. Strategi Pemasaran, 2007, Edisi ke dua, penerbit Andi, Yogyakarta

Hirschman, AO. 1970. Exit, Voice and Loyality: Responses to Decline in firm

Organizations, and States Cambridge : Harvard University Press

Hardiyansyah, Dr. Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, 2011, Gava Media. Yogyakarta

Issa, Implementing Change by Continuous Learning : The Public Service Reform Programs in Tanzania

Jones, Gareth R. 2001. Organizational Theory Text and Cases (Third Edition). New Jerse, America: Printice Hall Internasional, Inc

Kasmir. Manajemen Perbankan, 2006, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide, 2005, Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass

Laurence J. O'Toole, Jr. and Kenneth J. Meier, Parkinson's law and the New Public Management? Contracting Determinants and Service-Quality Consequences In Public Education in Texas,

Munhurrun, Bhiwajee dan Naidoo, Service Quality in the Public Service

Mardalis. Metode Penelitian. Suatu Pendekatan Proposal, 1999, Jakarta: PT Bumi Aksara

Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif, 2010, Remaja Rosdakarya, Bandung

Mulyadi, Akuntansi Manajemen, 2001, : Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta

Ndraha, Taliziduhu. Budaya organisasi, 2003, Jakarta: Rineke Cipta

Parasuraman, Zethimal, dan Berry, 2003. ServQual.

Pasolong, Harbani. Teori Administrasi Publik, 2007, ALFABETA.

Patton dalam Lexy J Moleong 2004., Penelitian Kualitatif, Jakarta

Ratminto & Atik Septi Winarsih. Manajemen Pelayanan, 2006, Jakarta: Pustaka Pelajar

Rewansyah, Asmawi. Reformasi Biro dalam Rangka Good Governance, 2010, Jakarta, CV Yusaintanas Prima

Saifudin, Abdul Bari Dkk. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, 2007, Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo

Sinambela, Litjan Poltak, dkk. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi, 2011, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 2009, CV.Alfabeta: Bandung

Sunarto,Pengantar Manajemen, 2006, Bandung: CV Alfabeta

Sutopo dan Suryanto, Adi. Pelayanan Prima, 2006, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Tjiptono, Fandy. Service Quality Satisfaction,2005, Yogyakarta, Alfabeta Yogyakarta

Usman. Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, 2006, Jakarta : PT Bumi Akasara

Wijaya, Tony. Manajemen Kualitas Jasa, 2011, Cetakan Kedua. Jakarta Barat: PT.INDEKS.

Wirman Syafri.Studi Tentang Administrasi Publik, 2012, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

Disertasi

Wiryatmi, Endang Trilestari, 2005. Model Kinerja Pelayanan Publik dengan Pendekatan System Thingking dan System Dynamics-Studi Kasus Pelayanan Publik di Kota Bandung, Program Pascasarjana-Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

WD Tuti Retnowati, 2013. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bogor. Program Doktor Ilmu Administrasi Publik. Univ Brawijaya Malang

Tanya Haeikkila, 2007, Citizen Involvement and Performance Management in Special-Purpose Governments di Negara Bagian Texas

AGA. Ilhaamie, 2010, Service Quality in Malaysian Public Service: Some Findings, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 1, No. 1, June

R D Pathak; Rafia Naz; Gurmeet Singh, RFI Smith, ICT for Improved Public Service Delivery in Papua New Guinea by Journal JOAAG, Vol 5 No 1, 2010

Media :

RRI.co.id, Jumat 21 Oktober 2016

Kompasiana, 17 Juni 2015

Dokumentasi :

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

TRIAL BY THE PRESS DI ERA KEBEBASAN PERS (Studi Deskriptif Kualitatif Pemberitaan pada Surat Kabar Fokus Pantura)

1 Dedet Erawati, 2 Dikhorir Afnan, 3 Aghnia Dian Lestari
1, 3 Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon, Jawa Barat
2 Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat
E-mail: 1 deblume@gmail.com, 2 dik.gassela@gmail.com, 3 aghniacahya55@gmail.com

Abstract : Can not be denied, for nearly two decades after the reformation, cases of code violations that do unscrupulous journalists still widely heard. Every year, the Press Council received hundreds of complaints regarding violations of the press. The phenomenon of "wartawan bodrek" or "wartawan amplop" taste is not foreign to our ears. Hard to argue if dirty practices like this have no correlation with "security" news. In the context of an idealistic and independent press, disgraceful act that way will certainly tarnish the good name of the press and press agencies themselves, even very likely undermine the pillars of democracy. In a study entitled Trial By The Press in the Age of Freedom of the Press, researchers using a qualitative descriptive methodology, which analyzes the attitudes and opinions of key informants, then tries to gather and present the data, so it can provide a fairly clear picture of the object under study. The results of this study, researchers found misperception journalist Pantura focus on the substance of the meaning of freedom of the press. The conclusion of this study is an absolute that journalists-especially in areas-should continue to be fostered and developed competencies. Much more important than it is the duty mission and upholding truth and social responsibility in the community.

Keywords*: trial by the press, freedom of the press, mass media*

Abstrak : Tak bisa dimungkiri, selama hampir dua dekade pascareformasi, kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum wartawan masih santer terdengar. Setiap tahun, Dewan Pers menerima ratusan pengaduan menyangkut pelanggaran pers. Fenomena "wartawan bodrek" atau "wartawan amplop" rasanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sulit dibantah jika praktik-praktik kotor seperti ini tidak ada korelasinya dengan "pengamanan" pemberitaan. Dalam konteks pers yang idealis dan independen, perbuatan tak terpuji seperti itu tentunya akan mencoreng nama baik insan pers maupun lembaga pers itu sendiri, bahkan sangat mungkin meruntuhkan pilar demokrasi. Pada penelitian berjudul Trial By The Press di Era Kebebasan Pers ini, peneliti menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yakni menganalisis sikap dan pendapat key informan, kemudian berusaha mengumpulkan dan menyajikan data, sehingga

dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini, peneliti menemukan adanya mispersepsi jurnalis Fokus Pantura atas substansi makna kebebasan pers. Kesimpulan penelitian ini adalah menjadi mutlak bahwa jurnalis-khususnya yang berada di daerah-daerah-harus terus dibina dan dikembangkan kompetensinya. Jauh lebih penting dari itu adalah kewajibannya mengemban misi kebenaran dan menjunjung tinggi norma serta tanggung jawab sosial di masyarakat.

***Kata Kunci**: trial by the press, kebebasan pers, media massa*

PENDAHULUAN

Para pengamat media berpendapat, media massa tidak mungkin berdiri statis di tengah-tengah, ia akan bergerak dinamis di antara pusaran-pusaran kepentingan yang sedang bermain. Kenyataan inilah yang menyebabkan bias berita di media massa adalah sesuatu yang sulit dihindari. Dengan kata lain, media berada pada posisi yang mendua, dalam pengertian bahwa ia dapat memberikan pengaruh-pengaruh "positif" maupun pengaruh "negatif". Tentu saja, atribut-atribut normatif ini bersifat sangat relatif, bergantung pada dimensi kepentingan yang diwakili.

Mengutip pernyataan John McManus (1994) dalam Market Driven Journalism, surat kabar atau televisi hanya akan dapat bertahan hidup jika isinya dapat diterima pasar atau bernilai jual tinggi. Berita atau laporan mengenai fakta yang bernilai jual tinggi tentu juga akan menarik bagi investor atau pedagang saham. Inilah yang disebut dengan pendekatan pasar atau kendali pasar (market driven journalism).

Di sisi lain, disebut dengan pendekatan professional driven journalism. Jurnalisme dengan kendali profesional hanya tunduk pada kaidah-kaidah dan norma jurnalistik yang berlaku umum. Dalam ranah profesional, ukuran nilai sebuah laporan fakta atau berita sangat dipengaruhi idealisme kewartawanan serta etika profesinya dan teori jurnalistik yang pernah diperolehnya.

Sementara Tjahjo Kumolo dalam situs pribadinya tjahjokumolo.com, pers sejatinya berada pada posisi yang strategis dalam informasi massa. Karenanya, kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah negara. Dalam iklim kebebasan pers, kata Tjahjo, pers bahkan mempunyai peran lebih kuat dari tiga pilar demokrasi lainnya-eksekutif, legislatif, dan yudikatif-yang berpotensi melakukan abuse of power. Demokrasi akan berkembang dengan baik jika pers juga

berkembang dengan baik. Karena itu, pers harus menjaga hati nurani untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

Selama hampir dua dasawarsa pascareformasi, kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum wartawan masih santer terdengar. Setiap tahun, Dewan Pers menerima ratusan pengaduan menyangkut pelanggaran pers. Fenomena wartawan bodrek atau wartawan amplop rasanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sulit dibantah jika praktik-praktik kotor seperti ini tidak ada korelasinya dengan "pengamanan" pemberitaan. Dalam konteks pers yang idealis dan independen, perbuatan tak terpuji seperti itu tentunya akan mencoreng nama baik insan pers maupun lembaga pers itu sendiri, bahkan sangat mungkin meruntuhkan pilar demokrasi.

Selain persoalan moral, dorongan untuk melakukan praktik tercela ini juga dipicu akibat tidak adanya jaminan kesejahteraan dari perusahaan pers tempat mereka bekerja. Sehingga mereka harus bisa survive "menafkahi" dirinya sendiri. Gaji wartawan-terutama di daerah-memang sangat memprihatinkan. Sekadar contoh, di Cirebon rata-rata gaji wartawan dibayar berdasarkan kuantitas berita yang terbit, bukan berdasarkan kelayakan upah minimum. Padahal sharing profit tiras koran dan kue iklan di satu perusahaan pers bisa mencapai miliaran rupiah per tahun.

Bicara soal pertumbuhan media massa di tanah air, secara umum cukup signifikan. Itu ditandai dengan banyaknya media-media baru berbasis online, meski di saat bersamaan ada ribuan media massa (terutama cetak) yang terpaksa gulung tikar. Sayang, menjamurnya media-media baru ini tidak dibarengi dengan semangat idealisme dan profesionalisme pada diri setiap jurnalis. Akibatnya, praktik nakal oknum wartawan tak mampu dibendung bahkan cenderung dibiarkan. Tidak jarang kita menyaksikan suguhan berita-berita yang tidak utuh atau bahkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Parahnya lagi, sering dijumpai perilaku insan pers yang terjebak dalam praktik trial by the press akibat terburu-buru mengambil sikap dari sebuah pemberitaan.

Adanya gap antara kebebasan pers sebagai kondisi yang ideal di era reformasi dengan praktik unethic trial by the press inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka memberikan gambaran terkait dengan kinerja jurnalistik pewarta di daerah, dalam hal ini wartawan pada surat kabar Fokus Pantura.

TINJAUAN PUSTAKA

Trial by The Press atau peradilan pers dengan penggunaan media yang bersifat publikasi massa adalah sebuah istilah bentuk peradilan yang dilakukan dengan melalui penulisan atau pembicaraan dari satu sisi pihak secara bias. Biasanya dilakukan dengan bantuan publikasi secara luas secara sadar dengan tidak membeberkan keseluruhan fakta yang ada. Dengan demikian menjadikan penulisan atau pembicaraan tersebut tidak lagi berimbang sehingga berakibat penulisan atau pembicaraan tersebut bagaikan sebuah putusan pengadilan bagi para pihak terkait tanpa adanya hak melakukan pembelaan (https://id.wikipedia.org/wiki/Trial_By_Press).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat kesatu disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sirikit Syah menyatakan bahwa freedom of the press (kebebasan pers) adalah kata yang sering diucapkan di Indonesia di era reformasi ini. Sebagian besar yang mengungkapkannya tidak sungguh-sungguh memahami maknanya. Ada yang mengira bahwa kebebasan pers itu mutlak. Bahkan pelaku pers sendiri mengira demikian. Kesalahpengertian ini dapat membahayakan. Seperti yang terjadi sekarang, kalau media massa sering mencap/menjuluki kelompok massa tertentu sebagai “anarki”, maka sesungguhnya media massa sendiri telah melakukan “anarki”, antara lain dengan mencap “anarki” secara membabi buta dan tanpa dasar (hanya mengutip kecaman seorang narasumber, tanpa investigasi kebenaran stigmatisasi tersebut).

Ungkapan freedom of the press, kata Sirikit Syah, bukan karya asli bangsa atau masyarakat Indonesia, melainkan dikutip dari Amandemen Pertama Konstutusi AS:

"Congress shall make no law… abridging the freedom of speech, or of the press", yang artinya "Kongres dilarang menciptakan undang-undang/hukum yang membatasi kebebasan berbicara dan kebebasan pers". Jadi, semangat freedom of the press ini sebetulnya sangat khas Amerika (mengingat sejarahnya, Amerika adalah sebuah negara yang lahir karena cita-cita kebebasan). Hal ini bahkan tidak terdapat di Inggris atau negara maju lainnya. Meskipun tampaknya memiliki pers bebas, banyak sekali peraturan yang membatasi pers Inggris. Dalam sebuah seminar di Oxford tentang Humans's Right and the Freedom of the Press, Toby Mendel, ahli hukum dari lembaga Article 19 berpendapat bahwa Indonesia lebih memiliki kebebasan pers daripada Inggris dan banyak negara lain.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni menganalisis sikap dan pendapat key informan kemudian berusaha mengumpulkan dan menyajikan data, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas obyek yang diteliti terkait kasus yang akan dikaji.

Moleong dalam Cahyati (2009:79) menyatakan, penelitian kualitatif adalah penelitan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sample. Bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Dengan kata lain, penekanannya adalah kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono dalam Cahyati, 2009:79).

Seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu studi kasus, penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionisme simbolik, perspektif ke dalam, etnometodologi, The Chicago School,

fenomenologi, interpretatif, ekologi, dan deskriptif (Bogdan dan Biklen dalam Cahyati, 2009:83).

PEMBAHASAN

1) Profil Surat Kabar Fokus Pantura

Nama Perusahaan : PT. Media Pantura Group

Alamat : Jl. Olahraga Kompleks Perum BKKPR No.I.3, Kel. Karanganyar – Kab. Indramayu Jawa Barat

Tahun Berdiri : 22 April 2017

Legalitas :

- Akta pengesahan pendirian perusahaan oleh Notaris Bambang Haryanto, SH (Akta nomor 23 tanggal 22 April 2017)
- Nomor AHU-0019528.AH.01.01.TAHUN 2017
- NPWP: 81.908.145.6-437.000; tanggal 03 Mei 2017
- Dikukuhkan sebagai PKP (pengusaha kena pajak) pada tanggal 10 Mei 2017

2) Jangkauan

Pantai utara (pantura) Jawa yang meliputi wilayah Cilegon hingga Banyuwangi Jawa Timur menjadi target pasar secara khusus bagi pengembangan sirkulasi surat kabar Fokus Pantura.

3) Ukuran dan jenis kertas

- Panjang : 57,8 cm
- Lebar : 32 cm
- Jenis kertas : Outline Paper
- Jumlah halaman : 16 halaman (warna dan hitam putih)

Gambar 1

Dalam istilah jurnalistik, trial by the press adalah penghakiman sendiri yang dilakukan pers tanpa adanya keputusan final dari hakim atau tidak menghargai asas praduga. Peradilan dengan penggunaan media yang bersifat publikasi massa adalah sebuah istilah bentuk peradilan yang dilakukan dengan melalui penulisan atau pembicaraan dari satu sisi pihak secara bias.

Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan trial by the press:

Pasal 5 UU Republik Indonesia 40/1999 Tentang Pers;

1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah,
2) Pers wajib melayani hak jawab,
3) Pers wajib melayani hak tolak.

Pasal 4 ayat 3 UU. No. 14/70 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

"Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang disebut dalam undang-undang."

Pasal 8 UU. No. 14/70 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

"Setiap orang yang disangka, ditangkap ditahan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

Menurut pasal 24 UUD 1945 dimana disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut UU, maka tidak ada pemberian kekuasaan di luar kehakiman dalam menghakimi seseorang. Jadi, penghakiman oleh pers merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi, dan hakim yang profesional tidak akan terpengaruh oleh tanggapan pers yang bebas.

Salah satu contoh kasus trial by the press yang paling fenomenal adalah kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Hal ini disebut oleh Anggota Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo bahwa dalam memberitakan kasus pembunuhan Mirna, sebagian media massa cenderung melanggar presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah dan trial by the press atau melakukan penghakiman sendiri.

> *"Kasus Jessica itu seharusnya dibuktikan dulu di pengadilan. Ini pengadilan saja belum,masih tahap penyidikan polisi, sudah cenderung trial by press. Media cenderung melakukan penghakiman, penghukuman," kata Stanley kepada wartawan.Asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Untuk itu, media jangan terburu-buru menghakimi seseorang sebagai tersangka, padahal belum mendapat keputusan bersalah dari pengadilan. Terkait hal ini, wartawan tidak boleh melakukan trial by the press karena tindakan itu bersifat menghakimi sendiri atau menarik kesimpulan tanpa keputusan yang pasti dari hakim. Tindakan itu tidak membeberkan fakta secara keseluruhan sehingga menjadikan penulisan atau pembicaraan tersebut tidak lagi berimbang.

(https://indonesiana.tempo.co/read/69392/2016/04/08/lenditrigondo/media-jangan-terburu-buru-menghakimi).

Dalam sajian berita di surat kabar Fokus Pantura, peneliti juga mendapati sejumlah pemberitaan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan trial by the press. Di antaranya adalah pemberitaan pada edisi Rabu, 26 Juli 2017 dan Kamis, 3 Agustus 2017.

Gambar 2

HARIAN UMUM
FOKUS PANTURA
CALON BUPATI CIREBON PERIODE 2017-2022
PRO PERUBAHAN KABUPATEN CIREBON
"Kerja Ikhlas Untuk Rakyat Cirebon"
H. RAKHMAT, SE
Bendungan Kuningan Tenggelamkan Lima Desa
Persoalan Ganti Rugi dan Relokasi Untuk Warga Masih Belum Ada Kejelasan
PDI Perjuangan Indramayu Dukung

(Fokus Pantura Edisi Rabu, 26 Juli 2017)

Bendungan Kuningan Tenggelamkan Lima Desa

Persoalan Ganti Rugi dan Relokasi untuk Warga Masih Belum Ada Kejelasan

INDRAMAYU – Bendungan Kuningan yang berada di Desa Randusari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Indramayu diyakini akan membantu kebutuhan air di saluran irigasi seluas 3.000 hektare. Meski begitu, proses ganti rugi dan relokasi warga di lima desa yang terkena dampak dari bendungan tersebut hingga kini belum ada kejelasan.

Proses pembanguan bendungan yang diinisiasi sejak 2013 silam itu ditargetkan selesai pada 2018. Pembangunan bendungan diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan, sumber air baku, dan sebagai pembangkit listrik. “Rencananya ini akan kami isi atau impounding dan selesai pada akhir 2018 nanti,” kata Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ni Made Sumiarsih.

Diakuinya, hingga saat ini progres pembangunan bendungan dengan luas genangan 221,59 hektare telah mencapai 48% dan optimis bisa selesai pada akhir 2018. Bendungan yang terletak di Desa Randusari itu memiliki volume tampungan total sebanyak 25,955 juta meter kubik. Dengan rincian volume tampung efektif 23,050 juta meter kubik serta volume tampungan mati sebagai sedimen mati 2,4 juta meter kubik.

"Bendungan dengan nilai konstruksi kontrak tahun jamak Rp464 miliar dibangun oleh dua kontraktor yang bekerja sama, yakni PT Wijaya Karya Tbk (persero) dan PT Abipraya Brantas (persero) dan akan dimanfaatkan untuk empat hal," jelas Sumiarsih.

Anggota Komisi IV Mindo Sianipar menambahkan, apabila bendungan Kuningan selesai manfaatnya akan menjadi sumber air bagi daerah irigasi Cileuweung seluas 1.000 hektare dan daerah irigasi Jengkelok seluas 2.000 hektare. Di samping itu, memberi manfaat bagi pengendalian banjir, baku mutu 300 liter per detik dan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 500 kilowatt.

Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Menurutnya, bendungan Kuningan sangat diperlukan guna menampung air permukaan. Mengingat Jabar potensi air hujan capai 80 miliar meter kubik tiap tahun. Tetapi baru tertampung sekitar 6 miliar meter kubik. Sisanya terbuang percuma ke laut. Karena itu, pemanfaatan bendungan diperlukan untuk irigasi, penyedia air baku, dan PLTA.

Daerah genangan bendungan Kuningan sendiri meliputi lima desa dan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Cibeureum (Desa Randusari, Desa Kawungsari, dan Desa Sukarapih) dan Kecamatan Karangkencana (Desa Tanjungkerta dan Desa Simpayjaya). Dari 3.000 hektare lahan irigasi yang mendapat manfaat dari bendungan. (rmol.co.id/EMKA)

Ulasan:

1) Tenggelamkan Lima Desa

   (Pada judul tersebut tampak sangat bombastis, "tenggelamkan lima desa" yang dalam persepsi peneliti mengandung konotasi ada lima desa yang tenggelam akibat bendungan tersebut. Padahal jika membaca isi beritanya, sama sekali tidak dijelaskan adanya bencana atau potensi bencana yang mengakibatkan lima desa di wilayah Kuningan Jawa Barat itu tenggelam. Pemuatan judul yang bombastis namun tidak sesuai fakta di lapangan bisa berakibat pada kegaduhan dan kecemasan di masyarakat).

2) Persoalan ganti rugi dan relokasi untuk warga masih belum ada kejelasan

(Dalam isi berita tersebut sama sekali tidak dijelaskan proses ganti rugi yang menurut pewarta tersebut menuai persoalan. Begitu juga dengan proses relokasi yang menurut wartawan Fokus Pantura belum ada kejelasan. Peneliti menilai ada kontraproduktif pada pemuatan berita tersebut dengan judul/subjudul yang dimuat).

Gambar 3

2 PASUNDAN FOKUS PANTURA

Dishub Subang Tindak Tegas Truk Aqua

2000 Lebih Warga Terima Dana PKH

Seringnya kecelakaan kendaraan pengangkut air mineral yang lebihi tonase.

(Fokus Pantura Edisi Rabu, 26 Juli 2017)

Dishub Subang Tindak Tegas Truk Aqua

Seringnya Kecelakaan Kendaraan Pengangkut Air Mineral yang Melebihi Tonase

SUBANG – Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Jawa Barat menegaskan, supaya kendaraan pengangkut mematuhi aturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya. “Jangan coba-coba melanggar tonase yang sudah ditetapkan,” tegas Kadishub Subang, Rona Mairansyah, Selasa (25/7).

Dikatakan Rona, “Kita akan tindak lanjuti keluhan masyarakat atas seringnya kecelakaan kendaraan pengangkut air mineral yang melebihi tonase,” tandasnya. Terkait hal tersebut, Bupati Subang, Imas Aryumningsih memerintahkan pihaknya supaya melakukan ekspos di depan rapat Forkopinda. Untuk menjelaskan detail teknis temuan-temuan yang sudah dilakukan dalam sidak maupun uji petik kepada perusahaan angkutan air mineral.

"Dalam rapat Forkopinda nanti insya Allah akan dikeluarkan kebijakan prorakyat sesuai harapan rakyat," imbuh Rona. Di antaranya ialah mengganti truk besar menjadi truk kecil dan membatasi tonase supaya tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Diharapkan kendaraan yang digunakan berdomisili di Subang. Supaya pajaknya masuk Subang, KIR-nya dilakukan di Subang sehingga pengawasan Dinas Perhubungan bisa lebih kuat lagi.

"Ketika tidak uji layak, kita tidak kasih buku sehingga mereka tidak bisa beroperasi," katanya. Selama ini, lanjut Rona, domisili kendaraan yang digunakan angkutan air mineral di luar Subang. "Sehingga ketika ada pelanggaran tidak punya wewenang untuk menindaknya," kata Rona lagi.

Secara terpisah, perusahaan angkutan yang diwakili Safety Management PT. TSF, John Abi mengatakan, sesuai dengan yang dibahas pihaknya ingin memenuhi keinginan masyarakat. "Tetapi kita juga mempertimbangkan bisnis kami. Mungkin kami akan menyatukan harapan sehingga masyarakat tidak dirugikan, bisnis kami juga tetap jalan," katanya. (Ahya Nurdin)

Ulasan:

1) Truk Aqua

(Pada judul tersebut tampak jelas pencantuman nama salah satu produk air mineral kemasan. Seharusnya, penyebutan nama merek ditulis dengan inisial untuk menghindari jeratan hukum terkait dengan pencemaran nama baik. Terlebih lagi dalam konten berita tersebut sebetulnya hanya mengangkat isu terkait dengan truk bermuatan yang melebihi tonase. Ketidakcermatan awak redaksi surat kabar Fokus Pantura ini membuktikan bahwa pewarta tidak memahami tentang kode etik jurnalistik).

2) membatasi tonase supaya tidak melebihi batas yang telah ditentukan

(Pewarta tidak secara rinci menjelaskan angka batasan tonase yang dilarang Dinas Perhubungan sehingga mengaburkan pemahaman pembaca terhadap kebijakan tentang aturan muatan truk angkutan umum).

3) perusahaan angkutan yang diwakili Safety Management PT. TSF

(Pewarta secara gamblang menyebut truk angkutan tersebut adalah milik perusahaan Safety Management PT. TSF. Sementara pada judul berita tersebut

pewarta justru mendiskreditkan perusahaan air mineral "Aqua" yang dianggap telah melakukan pelanggaran terkait dengan angkutan yang melebihi tonase).

Gambar 4

FOKUS PANTURA

CIREBONAN

13

Khusus Jumat, Keraton Buka Museum Sunan Gunung Jati

Diduga Ada Anggaran Ganda Dalam Pungutan Sekolah

LSM KAB nilai pungutan tersebut diluar batas kewajaran

(Fokus Pantura Edisi Kamis, 3 Agustus 2017)

Diduga Ada Anggaran Ganda dalam Pungutan Sekolah
LSM KAB Nilai Pungutan tersebut di Luar Batas Kewajaran

CIREBON – Ketua LSM Komunitas Anak Bangsa (LSM KAB), Koharudin menilai pungutan kepada siswa didik senilai Rp2,120,000 untuk siswa kelas XI yang dilakukan SMKN 1 Kedawung di luar batas kewajaran. Terlebih lagi dalam surat yang diedarkan rinciannya yakni diproyeksikan pengedakan gedung diduga kuat adanya anggaran ganda, hal itu mengingat adanya kucuran dana alokasi khusus (DAK) yang kewenangan saat ini SMA dan SMK berada pada Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat. "Saya menilai ada indikasi soal anggaran yang sama antara anggaran sekolah dengan anggaran yang dibiayai Disdik provinsi," ujar Koharudin, Rabu (2/8).

Lebih jauh, dalam rincian pungutan tersebut di antaranya adanya pengembangan sarana sekolah, prakerin, sumbangan pembayaran guru honorer, dan tata usaha serta bangunan pengedakan dan lain-lain dengan nilai Rp2,1 juta adalah sebagai adanya kekuasaan kepala sekolah dengan membuat kerajaan kecil dengan tujuan

memperkaya diri sendiri. “Kita akan laporkan ke Dinas Pendidikan provinsi, diduga kuat provinsi telah mengucurkan dana DAK provinsi 2017,” bebernya.

Di tempat terpisah, adanya pungutan liar yang dilakukan SMKN 1 Kedawung, ditanggapi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Sumber, M Hendra. Pihaknya siap menindaklanjuti jika temuan dan dugaan penyelewengan baik gratifikasi maupun dugaan double anggaran. “Investigasi akan kita lakukan termasuk semua yang didanai oleh keuangan negara kita akan tanyakan,” tegas Hendra melalui pesan singkatnya.

Terpisah, orang tua siswa kelas XI SMKN 1 Kedawung mengaku kaget dan kecewa dengan adanya selebaran pungutan senilai Rp2 juta lebih yang memberatkannya. “Saya pengen mengadu, tapi takut anak saya di-buly oleh pihak sekolah, tolong saya,” pinta ibu dua anak itu.

Dalam selebaran rincian pungutan itu, dibebankan kepada siswa, dengan rincian cukup besar. Dirinya merasa keberatan jika bangunan pengedakan, peningkatan mutu, sumbangan pembayaran guru honerer dan staf tata usaha dibebankan kepada siswa. “Katanya ada dana BOS, masih saja begini,” keluhnya.

Sampai berita ini dimuat, pihak sekolah SMKN 1 Kedawung belum memberikan keterangan resmi, bahkan saat hendak dimintai keterangan, Kepala SMKN 1 Kedawung, H. Fuad mendadak menjauh dan lebih memilih menghindar. (Hadi)

Ulasan:

1) di luar batas kewajaran

(Pewarta tidak mendeskripsikan secara jelas ukuran batas kewajaran yang dimaksud, sehingga menimbulkan ambiguitas, subjektivitas, dan pengaburan data).

2) adanya kekuasaan kepala sekolah dengan membuat kerajaan kecil dengan tujuan memperkaya diri sendiri

(Tampak sekali pewarta melakukan pengadilan pers seolah-olah kepala sekolah telah berkuasa bak rezim otoriterian. Kekuasaan seperti apa sehingga kepala sekolah dianggap telah membangun kerajaan kecil?. Bukti apa yang bisa menguatkan bahwa kepala sekolah tersebut sedang memperkaya diri sendiri?

Padahal tuduhan terkait dengan pungutan sekolah itu sendiri belum dapat dibuktikan kebenarannya).

3) orang tua siswa kelas XI SMKN 1 Kedawung mengaku kaget dan kecewa dengan adanya selebaran pungutan senilai Rp2 juta lebih yang memberatkannya

(Tidak disebutkan siapa nama orang tua siswa tersebut, sehingga akurasi sumber berita disanksikan).

4) pihak sekolah SMKN 1 Kedawung belum memberikan keterangan resmi, bahkan saat hendak dimintai keterangan, Kepala SMKN 1 Kedawung, H. Fuad mendadak menjauh dan lebih memilih menghindar

(Sebuah berita dapat dikatakan berimbang ketika pewarta sudah dapat mengonfirmasi kedua belah pihak (cover both side) yang berseteru/berkonflik. Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan konfirmasi atau klarifikasi dari pihak yang tertuduh, pewarta/tim redaksi sebaiknya menunda pemuatan berita tersebut sampai data yang dibutuhkan benar-benar lengkap dan akurat. Upaya pencarian kebenaran atas fakta di lapangan sangat penting ditanamkan pada diri setiap wartawan).

Dari hasil wawancara dengan sejumlah wartawan Fokus Pantura, didapati keterangan bahwa mereka tidak begitu memahami hakikat kebebasan pers dan rambu-rambu jurnalistik yang ada pada kode etik jurnalistik yang di dalamnya juga tersirat larangan melakukan peradilan pers (trial by the press).

Hadi, memaknai kebebasan pers sebagai kebebasan yang seluas-luasnya tanpa perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah dan rambu-rambu kode etik jurnalistik.

“Kami dikejar deadline. Kalau ada narasumber yang sulit dikonfirmasi, biasanya kami lakukan esok harinya setelah berita dimuat. Sebab kalau harus selalu menunggu konfirmasi dari narasumber, kami bisa ketinggalan isu dengan media yang lain. Belum lagi kalau narasumbernya enggan memberikan keterangan atau sulit ditemui,”
kata Hadi, wartawan Fokus Pantura.

Wartawan senior Fokus Pantura, Agung Solehudin menjelaskan, proses reportase salah satunya dilakukan dengan cara mengikuti isu yang sedang hangat di masyarakat. Bisa juga berdasarkan penggalian data yang informasinya diperoleh dari masyarakat.

"Dalam kondisi tertentu, penggalian isu bisa dilakukan atas inisiatif wartawan itu sendiri atau berdasarkan arahan dari pimpinan redaksi melalui rapat proyeksi yang dilakukan setiap pagi. Biasanya, agenda setting direkonstruksi di forum ini," ujar Agung.

Loebby Loqman mengemukakan, secara konstitusional masih menjadi permasalahan antara kebebasan pers dengan batasan untuk tidak terjadi trial by the press apabila semata-mata dilihat sejauh mana pemberitaan pers dapat mempengaruhi jalannya suatu proses peradilan. Dan bila dilihat dari pihak seseorang yang menjadi obyek pemberitaan, permasalahannya akan menjadi lain, yaitu sejauh mana diri orang tersebut telah terlanggar hak asasinya
(https://www.library.ohio.edu/indopubs/1994/10/30/0003.html).

Apabila terjadi penghakiman oleh pers, kata Loqman, banyak negara memberikan sanksi dengan dasar telah melakukan kejahatan proses peradilan. Dengan demikian media massa yang melakukan trial by the press harus mempertanggungjawabkan melalui peradilan. Dalam kaitan ini, katanya, menurut hukum Anglo Saxon klasifikasi trial by the press selalu dapat dilihat melalui putusan pengadilan.

Masih menurut Loqman, berbeda dengan negara yang menganut sistem kodifikasi, untuk menentukan kapan suatu perbuatan termasuk trial by the press haruslah ditentukan unsur-unsurnya terlebih dulu, namun justru unsur tersebut sulit dirumuskan. Jadi, tambah Loqman, trial by the press dianggap sebagai salah satu jenis contempt of court, di mana dapat merupakan pemberitaan sebelum, selama atau sesudah adanya putusan pengadilan. Pemberitaan sebelum sidang perkara, mungkin saja merupakan opini, akan tetapi apabila opini tersebut sudah mengarah pada kesalahan tersangka, ini yang dimaksudkan sebagai trial by the press.

Demikian juga dengan pemberitaan selama pemeriksaan di sidang pengadilan masih berlangsung memungkinkan adanya trial by the press. Sedangkan pemberitaan yang salah, yang terjadi oleh salah penafsiran terhadap suatu putusan pengadilan dapat pula dianggap trial by the press. Dalam mengantisipasi ini, maka Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 1977 mengadakan Karya Latihan Wartawan di mana dikatakan bahwa untuk menghindari trial by the press hendaknya mempunyai sikap seimbang antara hukum dan sikapnya terhadap tersangka. Untuk menghindari masalah ini para

jurnalis Indonesia sepakat menggunakan asas praduga tak bersalah sebagai kesepakatan profesinya dalam suatu pemberitaan.

William L. Rivers dalam bukunya "Mass Media and Modern Society 2nd Edition" menulis beragam pendapat terkait kritik terhadap media massa di Amerika. Media sebagai sistem bukan individu pelakunya, kata dia, membawa pesan yang sama seperti kritik sebelumnya, yakni kinerja media memang perlu terus dibenahi. Dorongan ke arah itu harus selalu dilancarkan karena persoalannya memang besar dan kompleks.

Perbaikan kinerja, kata Rivers, tidak akan tercipta hanya dengan peningkatan pendidikan para insan media, atau pembinaan kesadaran atas tanggung jawab mereka. Kita juga tidak bisa lagi mengasumsikan bahwa pertukaran gagasan secara bebas akan berlangsung jika unit-unit komunikasi besar dipecah menjadi banyak unit yang lebih kecil. Sebelum kita dapat merumuskan solusi yang realistis, terlebih dahulu kita harus memahami sistem komunikasi dalam konteks historis dan kontemporer. Menurut Pahmo Wahyono (http://listyancampus.blogspot.com/2015/05/trial-by-press.html), trial by the press dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Pers yang bebas menghakimi seseorang. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan pasal 24 UUD 1945, Maka kekuasaan kehakimandilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya menurut undang-undang. Karena itu tidak ada pemberian kekuasaan di luar kehakiman dalam menghakimi seseorang. Jadi penghakiman oleh pers merupakan suatu pelanggaran terhadap konstitusi.
2. Pers yang bebas ikut campur atau mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hakim yang profesional dalam karirnya tidak akan terpengaruh oleh tanggapan pers. Tetapi jika pemberitaan pers mempengaruhi jalannya suatu proses pengadilan, maka hal itu merupakan suatu masalah yang sifatnya konstitusional. Karena di satu pihak kebebasan pers harus dihormati, di pihak lain kebebasan pers ini jangan sampai menghakimi tersangka (https://www.library.ohio.edu/indopubs/1994/10/30/0003.html).

Di beberapa negara bila sampai terjadi penghakiman oleh pers, maka media tersebut akan mendapatkan sanksi dengan dasar telah melakukan contempt of court (kejahatan terhadap proses peradilan). Ini berarti media massa tersebut dianggap telah melakukan trial by the press dan harus dipertanggungjawabkan melalui peradilan.

Jika salah satu fungsi media adalah sebagai sarana kritik terhadap kekuasaan dan kontrol sosial, maka kalangan pers juga harus dengan lapang dada bersedia menerima kritik dari siapa pun dan dalam bentuk apapun. Otokritik bahkan diperlukan sebagai sebuah sikap bijaksana agar kehidupan pers di masa mendatang dapat tampil lebih dewasa, profesional, dan bermartabat.

Tanggung jawab seorang jurnalis sangat besar karena jurnalis merupakan mediator antara sumber berita dan masyarakat luas. Akurasi merupakan satu hal penting dalam kerja seorang jurnalis. Lemahnya akurasi sebuah pemberitaan dapat menyebabkan tidak tepatnya penggunaan data, fakta, dan nama, sehingga melahirkan kesalahan yang pada akhirnya masyarakat juga yang dirugikan karena menerima informasi yang salah.

Menurut Saur Hutabarat (Suryawati, 2011), pers yang ingin terus hidup menghadapi tantangan zaman perlu mengindustrikan idealismenya, yakni menjalani bisnis pers yang sarat dengan kreativitas dan misi maupun visinya demi kepentingan publik. Pers senantiasa harus mampu menjembatani kepentingan ruang privat dan ruang publik. Idealisme wartawan di tengah industri pers senantiasa diuji, karena pers yang hanya mencari keuntungan besar justru akan ditinggalkan publik yang semakin cerdas.

Tentu saja, hanya pers yang mengemban, memiliki, dan memperjuangkan idealisme yang bersentuhan erat dengan kepentingan bangsa dan mendapat dukungan segenap lapisan masyarakat yang akan berumur panjang. Dari idealisme yang kokoh, pers akan memiliki kepribadian terpercaya yang dihargai serta disegani siapa pun.

Dalam jurnalisme, cover both side tidak bisa ditawar-tawar lagi. Prinsip ini wajib dipegang teguh oleh setiap jurnalis. Karena pada hakikatnya khalayak ingin memperoleh informasi dan interpretasi tentang peristiwa serta arah kejadian yang benar, lengkap, dan akurat, serta tidak apriori apalagi memihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian tersebut di atas, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejatinya, seorang jurnalis dalam melakukan kerja jurnalistiknya mengemban misi yang mulia, yakni mencari kebenaran.

2. Seorang jurnalis harus memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dipunyai oleh orang umum lainnya, apakah itu diperoleh dari hasil pendidikan atau pelatihan yang diperolehnya.
3. Seorang jurnalis harus menjalankan kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis dan normatif dalam suatu bentuk aturan main, dan perilaku ke dalam kode etik.
4. Seorang jurnalis harus memiliki tanggung jawab profesi (responsibility) dan integritas pribadi (integrity) yang tinggi.
5. Sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pengkajian dan pengembangan kehidupan pers, Dewan Pers seharusnya tidak melulu hanya melayani pengaduan masyarakat dan menggelar persidangan terhadap pelanggaran pers.

Saran

1. Bagi peneliti lain yang interes dengan kajian ilmu jurnalistik, dapat melanjutkan penelitian ini dengan lebih memfoksukan pada aspek idealisme seorang jurnalis yang harus berusaha keras menggali kebenaran dan menyampaikan informasi kebenaran itu kepada publik meskipun dengan berbagai risiko.
2. Sebagai seorang profesional, jurnalis harus terus mengasah kompetensinya melalui berbagai pendidikan maupun pelatihan.
3. Selain menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, seorang jurnalis juga harus memiliki komitmen moral kode perilaku (code of conduct) dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku by profession dan by function yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan dan pedoman bagi profesi bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut.
4. Menjadi jurnalis harus berani bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap publik, klien, pimpinan, organisasi perusahaan, penggunaan media umum/massa dan hingga menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya.
5. Dewan Pers mestinya juga proaktif memperjuangkan hak-hak dasar wartawan. Dewan Pers perlu berperan sebagai mediator antara jurnalis dengan perusahaan pers. Sehingga ketika terjadi sengketa antara wartawan dengan perusahaan pers,

tidak cukup hanya ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan atau Serikat Pekerja Pers saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Tesis:

Cahyati, Witri. Strategi Komunikasi Pemasaran Industri Jilbab Cicalengka, tesis

Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif

Rivers, William et al. 2003. Media Massa & Masyarakat Modern

Suryawati, Indah. 2011. Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori & Praktik

Syah, Sirikit. 2011. Rambu-Rambu Jurnalistik: Dari Undang-Undang hingga Hati Nurani

Website:
(https://id.wikipedia.org/wiki/Trial_By_Press)

(http://listyancampus.blogspot.com/2015/05/trial-by-press.html)

(https://www.library.ohio.edu/indopubs/1994/10/30/0003.html)

(https://www.library.ohio.edu/indopubs/1994/10/30/0003.html)

(https://indonesiana.tempo.co/read/69392/2016/04/08/lenditrigondo/media-jangan-terburu-buru-menghakimi)

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 14/70 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

KONSTRUKSI REALITAS WARGA PENGHAYAT ALIRAN KEBATINAN PERJALANAN

GayesMahestu
BINUS UNIVERSITY
Binus Alam Sutera Campus Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 21,
Alam Sutera, Panunggangan, Kota Tangerang, Banten
Email : gayesmahestu@gmail.com / gayesmahestu@binus.ac.id

Abstract : Phenomenon of the minority communities who has non-religious beliefs but Aliran Kebatinan are oftentimes be the stigma in society. It is also experienced by community of Penghayat Kebatinan Perjalanan that combines the concept of God, Pancasila, and cultural values to its teachings. Try to understand motif, self concept, & meaning 'ngelampahi', used qualitative method with phenomenology approach to find how they construct reality. This paper is expected to extend the thoughts-related repertory about dogma in society and also can generate effectiveness especially in communication.

Abstrak : Fenomena masyarakat minoritas yang memiliki keyakinan bukan agama tetapi Aliran kebatinan seringkali menjadi stigma di masyarakat. Hal ini juga dialami oleh penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan yang menggabungkan konsep KeTuhanan, Pancasila, dan nilai-nilai budaya dalam ajarannya. Penulis mencoba memahami motif, konsep diri, & makna 'ngelampahi' menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menjelaskan realitas yang mereka konstruksikan. Jurnal ini diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat diluar subjek terkait dogma di masyarakat dan juga dapat menghasilkan efektivitas terutama dalam sisi komunikasi.

Kata kunci : Aliran Kebatinan, Kepercayaan, Pancasila, Konstruksi realitas, Fenomenologi

PENDAHULUAN

Aliran Kebatinan Perjalanan merupakan aliran kepercayaan yang menyertakan konsep Negara pada ajarannya, konsep Negara yang dimaksudkan di sini adalah Pancasila, falsafah bangsa Indonesia. Sebagai aliran kepercayaan, Aliran Kebatinan Perjalanan tidak memiliki buku tertentu sebagai kitab sucinya dan lebih menitikberatkan ajaran pada tindakan. Dikatakan yang menjadi selogannya yaitu "Tidak akan ada kenyataan yang melebihi dari perbuatan".

Penganut Aliran Kebatinan Perjalanan disebut warga penghayat, dan Aliran Kebatinan Perjalanan menyatakan diri bukan suatu aliran agama, seperti disebutkan dalam buku pedoman dasarnya, 'Perjalanan' adalah perbuatan sadar atas dasar keyakinan yang mutlak, bahwa untuk mewujudkan segala cita cita dan atau usaha apapun baik yang bersifat keyakinan kebatinan haruslah dengan menjalaninya (ngelampahi). Seuraian diantara pangkal cita cita/ keinginan dengan terwujudnya tujuan akhir itu terbentanglah "antara" jarak yang harus ditempuh dan dijalani. (Pedoman Dasar/ Pedoman Rumah Tangga Aliran Kebatinan Perjalanan. Aliran Kebatinan Perjalanan. 2005)

Kepercayaan merupakan sesuatu yang religius dan mendasar bagi umat manusia. Masyarakat pada umumnya berpandangan bahwa kepercayaan identik dengan kata agama. Agama sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Sedangkan Agama yang dianut oleh masyarakat adat yang biasa disebut dengan agama asli nusantara atau agama adat direduksi menjadi aliran kepercayaan. Akantetapi kata "Aliran Kepercayaan" pada masyarakat umum memiliki konotasi 'sesat'

Sebetulnya di Indonesia kebebasan beragama ini telah sejak lama dikumandangkan, dhal ini dapat dilihat pada Pancasila sila pertama yakni 'Ketuhanan Yang Maha Esa' disini tidak menyinggung satu agama tertentu, tetapi lebih kepada konsep Ketuhanan yang seolah sederhana tetapi memiliki kedalaman makna yang sangat luas, dan dari sini juga negara sebetulnya menjunjung toleransi dalam keparcayaan. Akantetapi, dalam kenyataannya masih terdapat diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kepercayaan diluar agama, karena bagi sebgaian masyarakat Indonesia 'Ketuhanan' masih dipandang sebgai 'beragama'.

Adanya penolakan dari masyarakat terhadap orang-orang atau kelompok yang memiliki kepercayaan berbeda, menandakan adanya hambatan dalam komunikasi. Masyarakat cenderung berpikiran negatif atau berburuk sangka terhadap aliran kepercayaan yang berada di luar Agama yang diakui di Indonesia. Dalam perjalannya aliran kepercayaan atau untuk sebagian orang disebut budaya spritual telah banyak

mengalami goncangan dalam hal memperjuangkan pengakuan keberadaanya dari masyarakat dan negara.

Budaya spiritual yang ada dalam berbagai aliran kebatinan, kejiwaan, maupun kerohanian merupakan bentuk usaha manusia menuju integrasi kembali dari nilai-nilai asli yang terdesak oleh modernisasi. Kehidupan moderen membuat manusia tertekan jiwanya, menuntut kesibukan besar tanpa mempedulikan nilai-nilai manusiawi. Akibatnya manusia menjadi terasing dalam struktur rohani asasinya dan membutakan rasa, emosi, simpati yang ada pada diri manusia. Seluruh kemudaratan peradaban sekarang dengan ekses-ekses negatifnya dicerminkan secara positif dalam kebatinan, sehingga dapat dikatakan bahwa kelahiran berbagai aliran kebatinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan bentuk kritik terhadap berbagai macam perubahan di masa sekarang. (Rosyid, 2004)

Kepercayaan yang merupakan bagian dari kekayaan khasanah bangsa, memiliki nilai prestisus yang tinggi. Bangsa Indonesia yang memiliki kekhasan karena keberagamannya. Idealnya hal tersebut dapat menjadikannya bangsa yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap keberagaman. Termasuk didalamnya perbedaan kepercayaan. Seharusnya kepercayaan dapat dijadikan sebagai tali perekat untuk hidup dalam perdamaian dan kesatuan.

Kepercayaan masyarakat yang hidup dan berkembang di setiap etnis, suku, marga, desa merupakan kebudayaan lokal yang dapat memberikan dan mencerminkan ciri bagi daerah setempat. Kepercayaan-kepercayaan masyarakat dengan unsur-unsur yang melekat di dalamnya terkandung nilai-nilai peradaban manusia, dapat menjadi pendukung upaya pembentukan kepribadian dan jatidiri bangsa. Sebagai salah satu unsur kebudayaan lokal, kepercayaan masyarakat dapat menjadi perekat bagi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Rosyid, 2004)

Disarikan dari Aneka Ragam Khasanah Budaya Nusantara VI (1995) dewasa ini perkembangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipandang sebagai warisan kekayaan rohaniah yang bukan agama yang dalam kenyataannya merupakan bagian dari kebudayaan bangsa yang hidup dan dihayati serta dilaksanakan oleh sebagian rakyat Indonesia sebagai budaya spiritual. Warisan tersebut berupa ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang beraneka ragam. Apabila ajaran yang beraneka ragam itu terdapat konsepsi tentang Ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusiaan, alam, pengamalan, kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari dan juga metode pendekatan diri kepada Tuhan. Metode pendekatan diri kepada Tuhan ini sering pula diistilahkan dengan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semedi, sujud, manembah, manekung dan lain-lain.

Seperti juga yang disarikan dari jurnal yang ditulis oleh Nicola Colbran (2010) bahwa kebebasan beragama atau kepercayaan membutuhkan negara turut campur mengatur, dan bertindak adil terhadap semua pengikut agama, disini agama apapun. Negara tidak dapat bertindak secara parsial terhadap satu kelompok dan diskriminatif terhadap kelompok lain. Lanjutnyalagi bahwa sebaiknya negara tidak lagi menggunakan istilah ‘mayoritas & ‘minoritas’ agama ‘diakui & tidak diakui’ atau agama ‘utama dan agama sempalan’ dalam hukum atau pengambilan keputusannya karena hal ini akan secara tidak langsung sudah menunjukan secara jelas perbedaan kekuatan antara kedua kelompok tersebut.

Dalam tulisan ini peneliti tidak bermaksud melihat fenomena warga penghayat dari konteks diperbandingkan dengan agama, namun tertarik melihat warga penghayat dari segi komunikasi, sebagai individu yang unik menjalani pengalaman sebagai pribadi yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Metodelogi sebagai salah satu aspek dari ilmu pengetahuan, mengkaji berbagai aspek dan langkah – langkah mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Konsekuensinya kualitas kebenaran yang dihasilkan akan tergantung pada kualitas prosedur kerja yang ditempuh. Apabila semua criteria dan persyaratan prosedur kerja terpenuhi, maka akan dapat diraih kebenaran dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Mien Hidayat : seminar jurusan humas, fakultas Komunikasi Unpad, 16 april 2008)

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengungkapkan realitas intersubjektif warha penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan. Fenomenologi adalah ilmu yang dibedakan dari sesuatu yang sudah menjadi, atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan fenomena, atau studi tentang fenomena. Dengan kata lain, fenomenologi mempelajari fenomena yang tampak didepan kita, dan bagaimana penampakannya (Kuswarno, 2009)

Fenomenologi dianggap paling sesuai karena mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep –konsep penting dalam kerangkan intersubjektivitas, dan adanya pandangan bahwa pemahaman dunia kita terbentuk oleh hubungan dengan orang lain. Hal ini dirasa paling sesuai untuk mengkaji bagaimana penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan memaknai ajarannya sebagai salah satu bagian dari dirinya memandang dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti mencoba menganalisis aktivitas sosial melalui pengamatan langsung atas individu dalam situasi dan kondisi yang alami dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan penafsiran bagaimana individu menciptakan dan memelihara dunia mereka. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melaui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi dan komunikasi (Mulyana, 2002).

Seseorang cenderung menilai dirinya sendiri sebagaimana dirinya menilai bagaimana orang lain menilainya. Inilah yang disebut dengan konsep diri. Menurut Sullivan (dalam Rakhmat, 2008:101) konsep diri seseorang dipengaruhi orang lain dan kelompok rujukan. Dalam mengkaji hal tersebut digunakan teori interaksi simbolik karena menurut James Lull (dalam Creswell, 1998) makna merupakan apa yang penting atau berarti bagi seseorang, makna tidak melekat dalam bentuk-bentuk simbolis, melainkan dikonstruksikan oleh orang-orang yang menginterpretasikan lingkungan simbolis sesuai dengan orientasi, kepentingan, dan kompetensi mereka sendiri.

Motif, Konsep Diri dan Makna Ngelampahi

Kehidupan sehari-hari menampilkan realitas obyektif yang ditafsirkan oleh individu, atau memiliki makna-makna subyektif. Di sisi lain, kehidupan sehari-hari merupakan suatu dunia yang berasal dari pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan individu, dan dipelihara sebagai yang "nyata" oleh pikiran dan tindakan itu. Dasar-dasar pengetahuan tersebut diperoleh melalui obyektivasi dari proses-proses (dan makna-makna) subyektif yang membentuk dunia akal sehat (intersubjektif) (Berger&Luckmann, 1990).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa realitas secara intersubjektif pada warga penghayat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok penghayat turunan dan penghayat non-turunan. Pada penghayat turunan proses pengenalan terhadap ajaran Kebatinan Perjalanan didapatkan semenjak dikenalkan oleh orang tua atau keluarganya terhadap ajaran. Karena disadari atau tidak, prilaku yang ditampilkan atau norma yang diajarkan kepada warga penghayat turunan dalam keseharian merupakan bagian representasi ajarannya. Sedangkan pada penghayat non-turunan proses pengenalan ajaran berlaku terbalik bahwa ajaran yang diterima semenjak kecil adalah ajaran yang memiliki tata cara berbeda dengan ajaran Kebatinan Perjalanan, dan cenderung memiliki pandangan yang sama dengan masyarakat pada umumnya mengenai realitas sebagai seorang penghayat aliran kebatinan, bukan agama.

Setelah proses pengenalan terhadap ajaran berlangsung pula proses pembentukan kepercayaan yang terdiri dari tiga unsur rasa, rumasa dan tumarima. Rasa merupakan tahap awal pada saat pengenalan terhadap ajaran, merasakan keberadaan ajaran Perjalanan, kemudian setelah itu muncul rumasa, yang secara tidak disadari menghasilkan pembenaran terhadap ajaran Kebatinan Perjalanan kemudian yang terakhir tumarima terjadi ketika diri menyadari dan menerima secara sukarela ajaran Aliran Kebatinan Perjalanan. Disana kemudian muncullah alasan – alasan menjadi penghayat.

Proses pembentukan kepercayaan pada realitas warga penghayat dipengaruhi interaksi yang terjadi dengan keluarga, masyarakat dan sesama warga penghayat. Interaksi dengan keluarga dapat menciptakan pembentukan nilai – nilai dan norma dalam kehidupan. Interaksi dengan sesama warga penghayat menghasilkan pemahaman pendalaman mengenai ajaran Aliran Kebatinan Perjalanan. Sedangkan interaksi dengan masyarakat, seorang penghayat akan dihadapkan dengan kaum mayoritas yang mungkin memberikan sikap persetujuan, netral atau penolakan mengenai keberadaan warga penghayat.

Keseluruhan interaksi tersebut menghasilkan tiga golongan penghayat yaitu penghayat sebagai sesepuh, sebagai pengurus organisasi dan sebagai penghayat baru. Ketiga golongan warga penghayat tersebut memiliki motif yang berbeda-beda. Sesepuh memiliki kecenderungan motif hidup rukun dalam berbangsa dan bernegara, penghayat

sebagai pengurus organisasi memiliki motif mempertahankan kebudayaan dan pada warga penghayat baru memiliki motif ketenangan batin dalam hidup.

Seseorang sebagai warga penghayat kebatinan Perjalanan yang memiliki motif berbeda – beda itu, ketika melalui interaksi dengan masyarakat seringkali dihadapkan pada dilema. Dilema terjadi ketika warga penghayat yang merupakan kaum minoritas berada pada lingkungan masyarakat umum yang merupakan kaum mayoritas. Ketika diri tidak ingin terungkap karena ketakutan akan penolakan dari kaum yang lebih besar akan menghasilkan konsep diri negatif sedangkan untuk warga penghayat yang telah terbuka menerima segala bentuk penerimaan, sikap netral tau penolakan sekalipun memiliki konsep diri yang positif sebagai seorang penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan.

Berbicara mengenai konsep diri menurut Meltzer, Bernard N dalam Kuswarno 2009 menurut pandangan Interaksi Simbolik, secara sosial seseorang dapat melakukan tindakan kepada dirinya sendiri, seperti juga kepada orang lain. Dia dapat memuji dirinya, menyalahkan dirinya atau mendorong dirinya sendiri; ia dapat membagi dirinya dengan dirinya sendiri, dapat menghukum dirinya oleh dirinya sendiri dan seterusnya. Dengan kata lain, seseorang dapat menjadikan dirinya sebagai objek tindakannya sendiri. Diri (the self) terbentuk dengan cara yang sama seperti objek, melalui "definisi" yang dibuat bersama orang lain.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa realitas kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan yang tertib dan tertata walaupun bersifat memaksa, namun ia hadir dan tidak jarang dipermasalahkan oleh individu. Selain itu realitas kehidupan sehari-hari pada pokoknya merupakan realitas sosial yang bersifat khas (dan individu tidak mungkin untuk mengabaikannya), dan totalitas yang teratur-terikat struktur ruang dan waktu, dan obyek-obyek yang menyertainya (Samuel, 1993). Masyarakat sebagai kenyataan subyektif menyiratkan bahwa realitas obyektif ditafsirkan secara subyektif oleh individu. Dalam proses penafsiran itulah berlangsung internalisasi. Internalisasi adalah proses pemahaman atau penafsiran yang langsung dari peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna (Sukidin, 2002).

Kemudian proses pembentukan realitas tadi akan menghasilkan suatu tindakan yang disebut dengan ngelampahi. Bagaimana ngelampahi ini dimaknai oleh warga penghayat dibentuk melalui proses interaksi, pembentukan kepercayaan, motif dan

konsep diri seseorang. Dunia intersubjektif warga penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan yang dipahami sebagai hubungan transendental karena mengusung hubungan diri dengan Tuhan. Pada realitas yang terjadi hubungan vertikal ini menitik beratkan prilaku pada hubungan horizontal atau linier dengan sesama hidup. Hubungan linier ini harus dijaga karena dianggap merupakan bagian dari sumembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta.

Diri yang telah diberikan kuasa Tuhan atau disebut kasipatan kemudian mendasari warga penghayat berorientasi dalam kekinian kehidupan duniawi dengan prilaku yang menjadi titik utama dalam membentuk hakikat diri sebagai seorang manusia seutuhnya. Hal itu pula yang memberikan makna bagi kata ngelampahi. Jadi ngelampahi dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan perwujudan dari ajaran – ajaran pada Aliran Kebatinan Perjalanan. Perwujudan ini diproyeksikan dengan cara yang berbeda pula sesuai dengan motif dan konsep diri yang dimiliki warga penghayat, hal tersebut yang kemudian dipahami sebagai pengalaman sadar dari seorang warga penghayat. realitas dibentuk berdasarkan pada apa yang dialami dan dimakanai.

Secara ringkas dapat dilihat dari model berikut mengenai konstruksi realitas yang dibentuk oleh warga penghayat :

Model Konstruksi Realitas Warga Penghayat

Sumber : Dunia Intersubjektif Warga Penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan
Tesis Universitas Padjajaran Bandung 2012, Gayes Mahestu

Dari model konstruksi realitas tersebut secara garis besar dapat disimpulkan bahwa realitas dibentuk dari interaksi. Tahapan awal kognitif terjadi karena interaksi yang dilakukan baik itu dengan keluarga, sesama warga penghayat dan masyarakat kemudian interaksi intens dan mendalam mennguatkan afeksi hingga pada tahapan behavioral. Melalui proses internalisasi dalam proses pembentukan kepercayaan dan interaksi lahirlah kelompok – kelompok warga penghayat yang memiliki motif yang beragam memilih peran sebagai bagian dari warga penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan.

Jika menurut Schutz terdapat dua fase tindakan in-oder-to motive (Um-zu-Motiv), yang merujuk pada masa yang akan datang, dan tindakan because motive (Weil-Motiv) yang merujuk pada masa lalu. Realitas warga penghayat tidak

menjelaskan adanya motif sebelum atau sesudah. Mereka hanya memandang motif saat ini muncul sebagai seorang penghayat. Melalui penetrasi antara proses pembentukan kepercayaan dan pembentukan motif, realitas objektif dari masyarakat yang menjadi kaum mayoritas yang bisa saja menunjukan pandangan positif, netral atau bahkan negatif terhadap warga penghayat akan menghasilkan konsep diri. Seorang warga penghayat memiliki konsep diri postif ketika warga penghayat menerima diri sepenuhnya sebagai kaum minoritas, tidak menyalahkan. Sedangkan konsep diri negatif muncul ketika warga penghayat belum menerima diri sepenuhnya sebagai penghayat masih terdapat penolakan dalam diri mengenai kebenaran bahwa terdapat perbedaan dalam dirinya dengan masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah di jabarkan pada uraian sebelumnya mengenai Konstruksi realitas hidup warga penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan yang meliputi di dalamnya motif, konsep diri sebagai seorang warga penghayat, dan makna ngelampahi ajarannya. Maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut

Motif seorang menjadi seorang penghayat ditemukan dibagi menjadi tiga kelompok penghayat yaitu sesepuh yang memiliki kecendrungan motif hidup rukun, adil sejahtera dalam hidup bernegara. Kemudian warga penghayat yang merupakan bagian dari pengurus organisasi memiliki kecendrungan motif mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan, dan yang terakhir warga penghayat baru kecendrungan memiliki motif pemenuhan terhadap diri atau pencarian diri. Pada prosesnya motif yang muncul berasal dari dilandasi proses pembentukan kepercayaan yang terdiri dari tiga unsur rasa, rumasa, tumarima sebagai bagian dari ajaran Aliran Kebatinan Perjalanan.

Berbicara konsep diri ditemukan bahwa terdapat dua golongan yaitu Penghayat turunan yang merupakan penghayat yang memiliki keluarga atau kerabat seorang penghayat. Sedangkan untuk penghayat non-turunan adalah seseorang yang sebelumnya pernah atau tidak memiliki kepercayaan juga sama sekali tidak memiliki keluarga atau kerabat seorang penghayat akantetapi dengan ketertarikannya sendiri menjadi

penghayat. Terjadinya interaksi antara keluarga, sesama warga penghayat dan masyarakat yang dapat menghasilkan konsep diri baik itu positif maupun negatif.

Konsep diri postif muncul ketika warga penghayat menerima diri sepenuhnya sebagai kaum minoritas. Konsep diri positif ditandai dengan sikap terbuka mengenai jati diri sebagai penghayat kepada masyarakat sekitar, tidak ada rasa khawatir sebagai penghayat, menjalankan ajaran dengan berorientasi ke luar/ terhadap orang lain/ lingkungan sekitar, tidak menjalankan ritual agama/ kepercayaan lain, terlibat aktif dalam acara yang diadakan oleh Aliran Kebatinan Perjalanan, tidak peduli pandangan masyarakat luar terhadap penghayat.

Sedangkan konsep diri negatif muncul ketika warga penghayat belum menerima diri sepenuhnya sebagai penghayat masih terdapat penolakan dalam diri mengenai kebenaran bahwa terdapat perbedaan dalam dirinya dengan masyarakat pada umumnya. Konsep diri negatif ditandai dengan sikap tertutup mengenai jati diri sebagai penghayat kepada masyarakat luar, terdapat rasa khawatir sebagai penghayat, menjalankan ajaran dengan berorientasi ke dalam / diri sendiri, masih menjalankan ritual agama/ kepercayaan lain, terlibat pasif dalam acara yang diadakan oleh Aliran Kebatinan Perjalanan, peduli pandangan negatif masyarakat luar sebagai penghayat.

Warga penghayat memaknai ngelampahi ini tidak terlepas dari diri sebagai penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan. Ajaran ajaran yang diungkapkan secara disadari atau tidak menjadi acuan yang membantu menjelaskan bagaimana proses tersebut membantu memaknai ajarannya. Ajaran seperti : pembentukan jiwa, sembilan pangawasa Gusti, cegahan M-7, dan 4 unsur pembentuk diri menjadi titik pusat bagaimana warga penghayat harus memproyeksikan ngelampahi dalam hidupnya. Pada aktualisasinya makna ngelampahi ini memiliki fokus yang berbeda – beda yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan pemahaman diri terhadap realitas. Makna ngelampahi tersebut seperti hidup membantu sesama, taat terhadap aturan pemerintah, hidup jujur, hidup dengan benar, prilaku dan nurani harus sejalan, berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti orang lain, dan menjadi seseorang yang memiliki banyak solusi.

Hasil penelitian tersebut diharapkan akan menjadi salah satu rujukan yang menunjukan keragaman bangsa Indonesia sehingga terbentuk pandangan baru yang dapat mengikis pandangan negatif yang sebelumnya dilekatkan terhadap penghayat kebatinan pada umumnya. Melihat suatu perbedaan bukan sebagai perusak hubungan tetapi sebagai sesuatu yang dapat menjalin hubungan antar manusia yang lebih solid dan saling menghargai. Tulisan ini juga diharapkan menjadi landasan bagi penelitian lanjutan terutama dibidang ilmu komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Berger, Arthur Asa. 1984. Signs in Contemprary Culture. New York : Longman

Berger Peter L. dan Thomas Lockman., 1976. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York. Doubleday Books.

Basrowi. Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Surabaya: Insan Cendekian

Creswell, John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions. London: Sage Advertising.

Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni Dan Film.2005. Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Kuswarno, Engkus. 2009. Metodelogi Penelitian Kualitatif "fenomenologi". Bandung: Rosdakarya.

Lull, James. 1998. Media, Komunikasi Kebudayaan. (edisi terjemahan A.Setiawan Abadi), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Muhammad Idrus, 2007. Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Yogyakarta : UII. Press

Mulyana, Deddy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rakhmat, Jallaludin. 2001. Psikologi Komunikasi. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rosyid, Harun Nur dkk.2004.Pedoman Pelestarian Kepercayaan Masyarakat (Jakarta: Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Schutz, Alfred. 1967. The Phenomenology of the Social World. Terjemahan George Walsh dan Frederick Lehnert. Illinois: Western University Press.

DAFTAR RUJUKAN LAIN

Aliran Kebatinan Perjalanan. 2005. Pedoman Dasar/ Pedoman Rumah Tangga Aliran Kebatinan Perjalanan. DMP Perjalanan

Aliran Kebatinan Perjalanan. 2005. Budaya Spiritual. DMP Perjalanan

UU No.1 PNPS/1965

TAP MPR No.IV/1978

Bajari Atwar, Fenomenologi sebagai Tradisi Penelitian Kualitatif, diakses pada 11 April 2011 dari Atwarbajari.wordpress. com.

Colbran, Nicole. Realities and challenges in realising freedom of religion or belief in Indonesia. The International Journal of Human Rights.vol 14, Issue 5, 2010. DOI : 10.1080/13642980903155166. Diakses pada 12 januari 2015 dari http://Tandfonline.com

Hidayat, Mien. Makna dan Pemaknaan Aplikasi dalam Penelitian. Disampaikan pada Seminar Jurusan Humas. Fakultas Komunikasi Unpad. 16 april 2008

R. Hardawiryana, SJ (Penerj), (1993), Dokumen Konsili Vatikan II, Dokumentasi dan Penerangan KWI & Obor. diakses 3 Januari 2011dari http://www.interfidei.or.id

Rekap diskusi yang digelar di Gedung Dewan Pers, di bilangan Kebon Sirih, Jakarta Rabu pagi, 11 November 2009. Diakses 1 Maret 2010 dari http://anbti.org/content/masyarakat-adat-dalam-rantai-diskriminasi

POLITIK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY

(Strategi Pengembangan Objek Wisata Situ Bagendit Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)

Dr. Hasan Mustapa, M.Si
Alumni SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Fungsional Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Direktur Mushthafawi Innovative Learning and Education [Mile] Institute
mustafahasan53@yahoo.com
hmustafa396@gmail.com

Abstrak : Situ Bagendit merupakan satu objek wisata di Kabupaten Garut yang memiliki potensi untuk dijadikan ikon bagi pariwisata Kabupaten Garut. Dalam keadaan normal pengunjung kawasan wisata dengan luas sekitar 125 ha ini mencapai 400 hingga 600 orang perbulan yang datang dari wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Kenyataannya, ketertarikan wisatawan domestik ke Situ yang terkenal dengan legenda Nyi Endit-nya ini tidak didasarkan eksotisme yang didasari kualitas pengelolaan, melainkan sebagai destinasi komplementer dan alternatif terakhir daripada objek wisata lain yang lebih mahal dan lengkap fasilitasnya seperti Water Boom Sabda Alam Cipanas Tarogong, Darajat Pass Pasirwangi, Kampung Sampireun Samarang.Pertanyaan utama studi ini ialah bagaimana politik pembangunan pariwisata daerah Situ Bagendit dalam perspektif civil society. Hal ini akan dijelaskan secara mendalam melalui beberapa pertanyaan detil seperti: (a) Sejauhmana peran pemerintah (negara) dalam meningkatkan kualitas pembangunan pariwisata daerah Situ Bagendit?; (b) Adakah strategi marketing yang dilakukan pelaku pasar yang terlibat dalam pengelolaan Situ Bagendit?; (c) Sudah efektifkah peran organisasi publik seperti LSM dan NGO dalam mereorganisasi pembangunan pariwisata Situ Bagendit?; (d) Adakah tokoh (pribadi) yang berperan dalam mengedukasi dan mengimprovisasi masyarakat agar memiliki sense of belonging terhadap Situ Bagendit?Sesungguhnya, melalui peran pemerintah dan pasar yang efektif serta partisipasi publik dan pribadi yang produktif, maka secara struktural dapat terjadi penguatan bagi pembangunan pariwisata daerah termasuk pada objek wisata Situ Bagendit.Landasan teoretis yang digunakan dalam makalah ini adalah konsep Civil Society yang diutarakan oleh Janoski (1998: 12) yang menyatakan bahwa gagasan masyarakat madani bertumpu pada diskursus yang intensif antara empat ranah yakni negara, pasar, publik dan pribadi/swasta.Dalam makalah ini, untuk memperjelas pemahaman tentang pernyataan utama, maka dielaborasi melalui beberapa konsepsi tentang politik pembangunan serta pariwisata daerah dengan berbagai variasinya. Sehingga didapatkan hubungan baik yang bersifat korelasional maupun relevansi antara politik pembangunan yang positif dengan kemajuan pariwisata daerah melalui tinjauan pelaksanaan masyarakat sipil yang efektif.Dalam makalah ini ditemukan bahwa peran negara sangat efektif dengan mendelegasikan kepemilikan dari pusat ke kabupaten bagi pengelolaan Situ Bagendit. Berbeda dengan itu, pada ranah pasar terlihat kurang berkontribusi. Belum ditemukan usaha produktif ranah publik bagi pengembangan objek wisata ini. Demikian pula, kesadaran pribadi

untuk mengembangkan potensi wisata ini sehingga go internasional masih rendah.Banyak objek wisata yang memiliki potensi alam luar biasa, hanya menjadi kawasan wisata biasa dan tidak menjadi daya tarik dunia internasional. Padahal, di era teknologi informasi ini. Setiap potensi wisata dapat menjadi ikon daerah yang mampu bersaing dalam skala internasional. Salah satu strateginya ialah dengan politik pembangunan yang produktif dalam sinergitas antara negara (pemerintah melalui Dinas Pariwisata, Disperindag, Dinas pasar UMKM), pasar (investor), publik (LSM, lembaga kemahasiswaan, institusi sosial kemasyarakatan) dan pribadi/swasta (tokoh masyarakat, sarjana atau akademisi).

***Kata Kunci**: politik pembangunan, pariwisata daerah, civil society*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup signifikan bagi peningkatan ekonomi suatu negara yang secara tidak langsung berpengaruh juga pada citra positif sebuah negara. Setiap negara yang dapat menjamin keberlangsungan sektor pariwisata akan berdampak bagi peluang keterlibatan negara tersebut dalam event strategis di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan demikian, bidang pariwisata perlu dikelola secara serius oleh sebuah negara sehingga dapat memberikan dampak positif baik bagi lingkungan, masyarakat sehingga dapat menjaga keberlangsungan pariwisata itu sendiri serta peningkatan daya tarik regional terhadap suatu bangsa (Huybers & Bennett, 2003).

Pengembangan pariwisata Jawa Barat merupakan satu sektor industri strategis potensial setelah Bali dan DKI disebabkan beberapa faktor seperti posisi strategis Jawa Barat sebagai overlandnya Jawa dan Bali bagi wisatawan Yogya-Bali dengan destinasi Jakarta dan sebaliknya dengan ditunjang oleh aksesibilitas yang baik. Di samping itu, objek wisata Jawa Barat lebih variatif ketimbang beberapa destinasi wisata di Jakarta yang didominasi unsur laut (Maryani, 2004). Dalam hal ini, Situ Bagendit termasuk salah satu destinasi wisata di Kabupaten Garut yang berpotensi menjadi unggulan baik dalam skala Provinsi maupun nasional. Pembangunan pariwisata dapat berjalan secara berkesinambungan apabila terjadinya sinergitas yang produktif antara pemerintah daerah (local government), perusahaan pariwisata (tourism enterprises) serta komunitas local (local community) (Brokaj, 2014).

Research Questions

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: " Bagaimana politik pembangunan pariwisata daerah dalam perspektif civil

society". Hal ini akan diperdalam lebih lanjut melalui pertanyaan rincian berikut: (a) Sejauhmana peran pemerintah (negara) dalam meningkatkan kualitas pembangunan pariwisata daerah Situ Bagendit?; (b) Adakah strategi marketing yang dilakukan pelaku pasar yang terlibat dalam pengelolaan Situ Bagendit?; (c) Sudah efektifkah peran organisasi publik seperti LSM dan NGO dalam mereorganisasi pembangunan pariwisata Situ Bagendit?; (d) Adakah tokoh (pribadi) yang berperan dalam mengedukasi masyarakat agar memiliki sense of belonging terhadap Situ Bagendit?

Thesis Statement

Sebagai salah satu kawasan wisata tirta di Jawa Barat yang dikunjungi wisatawan domestik mencapai sepuluh ribu pada periode Januari hingga Maret 2017, posisinya sebagai tujuan wisata masih bersifat komplementer dan bukan destinasi utama atau favorit. Salah satu faktor minornya nilai kompetitif eksotisme area ini karena kurang dilibatkannya publik dan pribadi dalam tata kelola, pelayanan serta marketing. Padahal, melalui peran pemerintah dan pasar yang efektif serta partisipasi publik dan pribadi yang produktif, maka secara struktural dapat terjadi penguatan politik bagi pembangunan pariwisata daerah termasuk pada objek wisata Situ Bagendit.

TINJAUAN PUSTAKA

Penguatan Civil Society

Banyak pengertian yang dikaitkan dengan term civil society. Ada yang mengaitkannya dengan masyarakat sipil. Dalam dimensi sosio-religi, istilah ini sering dipadankan dengan gagasan masyarakat madani. Di masyarakat Barat yang cenderung mapan dalam berdemokrasi, diskusi tentang civil society ini tidak muncul, kendati secara substansial berbagai unsurnya sudah terbentuk secara mapan. Sementara di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, revitalisasi konsep dan penguatan gerakan masyarakat madani (civil society) mencuat kembali sejak akhir dekade 1980-an sebagai alternatif utama bagi pembentukan kondisi transisi menuju demokrasi. Upaya penguatan masyarakat sipil ini terjadi di beberapa negara Eropa Timur, Amerika Latin dan negara berkembang lainnya. Tujuan gerakan revitalisasi ini tiada lain agar masyarakat dapat mandiri dan bebas dari intervensi berlebihan negara serta dapat

melakukan kontrol terhadap negara (state) yang biasanya otoriter di saat terjadinya ketidakefektifan fungsi masyarakat politik (political society) (Abdillah, 2011).

Dilihat dari pendekatan budaya dan politik, terdapat tiga perspektif dalam melihat gagasan masyarakat sipil, yakni: perspektif budaya, perspektif politik, dan perspektif kombinasi (Kamil, 2013). Mewakili perspektif pertama, Alexis de Toqueville, Adam Ferguson, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa civil society dibangun melalui beberapa elemen seperti civility (keberadaban), fraternity (persaudaraan), trust (kepercayaan) di antara kelompok sosial, toleransi, dijunjung tingginya HAM, akuntabilitas, keterikatan pada hukum. Perspektif kedua ialah perspektif politik, aspek vertikal (struktural). Ryaas Rasyid serta Robert Hefner menekankan unsur yang harus ada dalam penegakkan civil society di antaranya: masyarakat mandiri, dalam batas tertentu mampu menunjukkan dirinya sendiri, cenderung membatasi intervensi ke dalam realitas yang telah diciptakan sebagai ruang kegiatannya, dikontraskan dengan regimist Islam dan uncivil state. Selanjutnya, perspektif kombinasi. Ralf Dahdendorf, Affan Gafar, Paulus Wirutomo sebagai representasi perspektif ini menjelaskan unsur pembangun civil society seperti: space atau ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela, yang hubungannya dikembangkan atas dasar toleransi dan saling menghargai satu sama lain (Kamil, 2013).

Selain itu, dilihat dari distribusi peran negara dan publik, civil society dapat dipetakan ke dalam empat makna, yakni: a) Merujuk pada bidang lain selain negara. Pandangan ini digagas oleh Hegel dan Karl Marx (Marx, 1967 [1843], 1976); b) Diskursus intensif antara empat ranah: negara, pasar, publik, dan pribadi/swasta. Hal ini dikemukakan Janoski (Janoski, 1998); c) Penekanan pada perilaku negara dalam kaitannya dengan kewarganegaraan, dan dengan menentukan apakah negara maju mengedepankan mekanisme sipil yang efektif atau lembaga yang mencegah individu atau kolektif dari korban dan penyalahgunaan. Model ini diajukan oleh Antonio Gramsci (1971); d) Interaksi pelbagai kelompok sukarela dengan bidang lain. Hal ini mengandung pengertian umum untuk semua ilmu-ilmu sosial sebagaimana terlihat dalam karya-karya Lipset (1981), Cola (1997), atau Habermas (1996,1989).

Gerakan kemanusiaan universal menghendaki terpenuhinya kebutuhan manusia secara adil, merata dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks negara, setiap pemerintah

dalam sebuah negara diharapkan mampu menjawab setiap aspirasi masyarakat baik terkait infrastruktur sosial, jaminan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan lain sebagainya. Dalam konteks kontemporer, kecenderungan arah kebijakan hendaknya selalu memokuskan perhatian pada kepentingan sesama manusia dalam wujud masyarakat sipil (civil society). Berbagai ide civil society signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam memberi ruh perjuangan bagi oposisi terhadap otoritarianisme rezim penguasa Orde Baru pada pertengahan tahun 1990-an. Kekuatan ini menjelma dalam berbagai bentuk mulai dari demonstrasi, seminar, dan sejumlah pressure yang dilakukan oleh LSM, organisasi sukarela maupun mahasiswa akhirnya mampu melengserkan rezim Soeharto sebagai simbol bangkitnya kembali "keberadaban" (civilization) (Bakti A. F., 2012).

Istilah civil society dipahami dengan interpretasi yang berbeda. Nurcholish Madjid beserta simpatisannya (modernis dan neo-modernis), lebih melihat aspek legitimasi historis dalam membuktikan bahwa masyarakat madani (civil society) memang merupakan ajaran Islam. Menurutnya, masyarakat madani telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad, al-Khulafa al-Rashidin, dan beberapa khalifah pada masa Umayyah dan Abbasyah, dan mengeritik sejumlah monarki dan rezim totaliter dalam sejarah Islam. Sementara AS Hikam dari kelompok tradisionalis lebih melihat konteks sejarah Indonesia serta pemikir Barat dan Timur Tengah, seperti Gramsci, Marx, Habermas, Mohammed Arkoun, Abd al-Jabiri, Hassan Hanafi, dan Nasr Hamid Abu Zaid. Mereka bertujuan membangun pemahaman tentang makna dan penerapan istilah. Kelompok ini lebih senang mengartikan 'civil society' sebagai 'masyarakat sipil' (Bakti A. F., Demokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Masyarakat Madani di Indonesia, 2012). Sementara itu, dalam paradigma sosial politik Islam, ada dua kata kunci untuk menghampiri konsep masyarakat madani (civil society), yakni kata 'ummah' dan 'madinah'. Ummah merujuk pada satu perkumpulan masyarakat yang ikatannya didasarkan pada komitmen moralitas, etnis, dan keagamaan. Madinah yang berarti kota memiliki akar kata yang sama dengan tamaddun yang berarti peradaban. 'Madinah' juga merupakan kata-benda-tempat dari kata 'dīn' (agama). Dengan demikian, cita-cita ideal Islam adalah terwujudnya suatu masyarakat kosmopolitan yang berperadaban tinggi-sebagai struktur fisik dari umat Islam (Syamsuddin, 2000).

Term "Madani" merujuk pada kota Muhammad (Medina City), negara-kota ideal Islam. karenanya, muncul pendapat bahwa istilah masyarakat sipil bukanlah konsep baru dalam Islam. Beberapa intelektual mencoba membandingkan istilah madaniyyah dengan term polis-Yunani dan menemukan kesamaan konseptual. Jadi madina dan madani yang secara semantik terkait erat, dan tidak seperti arti polis. Kata-kata ini juga mengacu pada negara. Medinat memiliki akar kata yang sama dengan madina, juga digunakan dalam bahasa Ibrani modern, seperti di Medinet lsrael, dan memiliki konotasi agama dan hukum, seperti yang disebutkan dalam Talmud (Bakti A. F., Paramadina and its Approach to Culture and Communication: An Engagement in Civil Society, 2004). Konsep masyarakat sipil atau masyarakat madani pada dasarnya bertumpu pada realitas masyarakat yang plural sehingga diperlukan pemahaman yang arif agar segala perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan.

Dalam studi ini, pendekatan civil society yang digunakan ialah pemaknaan yang digunakan Janoski (Janoski, 1998) yang menyatakan bahwa civil society merupakan diskursus intensif antara empat ranah yakni: negara, pasar, publik, dan privat (swasta). Di era reformasi ini, penegakan masyarakat sipil di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam ranah negara, praktik money politics para calon legislatif, alhi-alih berorientasi kepada kepentingan rakyat, justru malah melahirkan tindakan pragmatis koruptif yang berujung pada upaya mempertahankan kedudukan melalui aneka koalisi kolutif. Hal ini memperlemah check and balances oposisi karena proses kritik terhadap pemerintah yang berkuasa (rulling government) oleh partai tidak berjalan secara terorganisir dan teratur. Di ranah pasar, para penguasa pasar mendominasi dunia politik. Suara massa yang menentukan proses politik dapat dikendalikan dengan kekuatan modal. Di ranah publik, perjuangan demokrasi melalui pelbagai organisasi non pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, dan kelompok keilmuan masih berjalan sendiri-sendiri dan sporadik, dan terjebak dalam kepentingan kelompok. Seringkali mereka justru dimanfaatkan lembaga eksekutif untuk pengalihan isu, atau terjebak dalam politik bagi-bagi kue kementerian. Di ranah pribadi, nampaknya harus puas di level kritisisme, yang sayangnya, pesona para pribadi kritis ini, acapkali dimanfaatkan untuk meningkatkan popularitas media. Di kemudian hari, sangat memungkinkan bagi para akademisi untuk mengisi ruang kosong di dunia politik dan pemerintahan di Indonesia, salah satunya melalui peran yang

memberikan pencerahan dari luar (outbreeding) bagi lembaga political society (Bakti A. F., Komunikasi Politik "Sang Presiden yang Terlupakan", 2017).

Pembangunan Pariwisata dalam Semangat Otonomi Daerah

Dalam penerapannya, politik senantiasa mendahulukan pelbagai tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) ketimbang tujuan personal atau komunal tertentu (private goals). Politik juga memperlihatkan aktivitas partai politik sebagai representasi kegiatan individu. Karenanya, ide politik mencakup beberapa dimensi seperti: negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy, beleid), pembagian (distribution), dan alokasi (allocation). Secara historis pula, politik dimaknai sebagai seni mengatur dan mengurus negara serta ilmu kenegaraan dengan cakupan kebijaksanaan, kenegaraan atau pemerintahan. Politik juga merupakan berbagai aktivitas dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan pelbagai tujuan dari sistem itu serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Pengambilan keputusan terkait apakah tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari sejumlah pilihan tujuan tersebut (Budiarjo, 2008).

Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah pusat maupun level provinsi bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan sektor ini. Karena kegiatan pariwisata utama terjadi di tingkat lokal, maka pemerintah daerah hendaknya memiliki strategi antisipasi bagi dampak sosio-ekonomi maupun bio-fisik dari sektor ini. Karenanya, perlu dilakukan telaahan pada beberapa aspek seperti bagaimana pemerintah daerah dilibatkan dalam pengembangan pariwisata dalam sebuah negara sehingga dapat ditentukan peran presisi bagi peran pemerintah daerah dalam rangka mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan untuk memberikan solusi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah (Ogechi & Igbojekwe, T.t.).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah pedesaan menimbulkan tantangan yang sangat besar, terutama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pengakuan dan keterlibatan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Perkembangan pariwisata bergantung pada dua faktor utama: (a) masyarakat tuan

rumah dan populasinya dan (b) wisatawan itu sendiri dan aktivitas mereka (Eze-Uzoamaka, 2006). Karena lalu lintas turis biasanya menuju area destinasi yang ramah, orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi dan tempat acara harus ramah. Untuk alasan inilah, beberapa negara menjadikan pariwisata daerah menjadi prioritas dalam kebijakan pariwisata nasional. Dalam ekowisata berbasis masyarakat perlu disadari bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stake holders) merupakan jantung pengelolaan pariwisata. Penduduk lokal umumnya akan menerima pariwisata jika menghasilkan tunjangan sosial budaya dan sosio-ekonomi serta lingkungan yang dilindungi (Ghaderi & Henderson, 2012). Oleh karena itu, keterlibatan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi sangat penting bagi pengembangan pariwisata (Petersen, 2010).

Pada dasarnya, pariwisata berkelanjutan bukanlah bentuk wisata khusus atau tertentu sehingga semua bentuk pariwisata hendaknya berusaha untuk lebih berkelanjutan Koeksistensi pemangku kepentingan (stake holders) termasuk satu faktor yang menentukan karakteristik tujuan wisata (Aas, Ladkin, & Fletcher, 2005) yang meliputi: berbagai level pariwisata (internasional, nasional, regional dan lokal); pengembang pariwisata dan pengusaha, industri pariwisata operator; praktisi bisnis non-pariwisata dan masyarakat luas, termasuk kelompok masyarakat lokal, kelompok masyarakat adat dan penghuni lokal (Simpson, 2001).

Sebagai satu strategi pembangunan pariwisata, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi satu agenda utama bagi peningkatan pembangunan ekonomi regional beberapa negera berkembang termasuk Indonesia . yang signifikan yang dapabaru-baru ini muncul sebagai isu utama dalam agenda pembangunan industri pariwisata di banyak negara berkembang (Tosun, 2001). Geliat promosi sektor pariwisata di sejumlah negara berkembang mengingat besarnya potensi yang bisa dikembangkan seperti peningkatan devisa dan pendapatan pemerintah, peningkatan pendapatan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja (Sharpley, 2000). Dalam rangka pengembangan potensi wisata bagi penciptaan lapangan kerja serta nilai kompetitifnya, sejumlah otoritas lokal dan nasional mengadopsi pariwisata berkelanjutan dalam agenda mereka.

Salah satu problem dalam pesatnya perkembangan industri pariwisata ialah munculnya berbagai dampak yang tidak diinginkan pada sejumlah destinasi wisata seperti lingkungan dan masyarakat, di mana jika tidak diantisipasi, dapat mengancam

baik kelayakan ekonomi masyarakat tuan rumah, negara, maupun pembangunan pariwisata itu sendiri (Huybers & Bennett, 2003). Kurang matangnya strategi perencanaan dapat mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan pengembangan pariwisata (Jamieson & Noble, 2000). Ketidakberhasilan pembangunan pariwisata di sejumlah daerah telah melahirkan kesadaran kritis untuk memikirkan ulang secara radikal terhadap konsep pembangunan tradisional terutama dalam hal tujuan dan metode yang ingin dicapai (Harris, 2000). Beberapa faktor muncul sebagai tantangan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di antaranya terkait prioritas kebijakan ekonomi nasional, struktur administrasi publik, kemunculan isu lingkungan, komersialisasi, dan struktur sistem pariwisata internasional (Tosun, 2001). Karenanya, sangat penting untuk memahami peran, tanggung jawab dan manfaat dari ketiga pemangku kepentingan yang paling penting bagi tujuan wisata berkelanjutan, yakni: pemerintahan daerah, perusahaan pariwisata dan masyarakat lokal (Brokaj, 2014).

Dalam negara yang menganut sistem kesatuan, terdapat problematika dalam aktualisasi relasi Pusat-Daerah. Hal ini dialami oleh beberapa negara bekembang. Persoalan mendasar ialah bagaimana mengurangi kewenangan pemerintah pusat yang terlampau besar, konsentrasi pengambilan keputusan yang berpusat, yang kemudian menyebabkan kinerja birokrasi publik menjadi inefisien dan tidak efektif. Dinamika masalah ini mengerucut pada wacana hingga keputusan politik untuk melakukan desentralisasi (Adnan, 2001). Pelaksanaan otonomi daerah (otda) diatur melalui Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, UU tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 ayat 6 UU tersebut disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi kebijakan otda mensyaratkan dua ide dasar, yakni desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi lebh condong pada wilayah politik, sementara dekonsentrasi cenderung lebih administratif. Desentralisasi mencerminkan pelepasan kekuatan pemerintah pusat sebagai struktur komando formal yang dialihkan ke unit-unit geografis pemerintah lokal. Desentralisasi menunjuk pada kemampuan unit pemerintah

yang mandiri dan independen, di mana pemerintah pusat melepaskan fungsi-fungsi tertentu untuk menciptakan unit-unit pemerintahan baru yang otonom dan berada di luar kontrol langsung pemerintah pusat. Cirinya adalah: (a) Unit pemerintahan lokal yang otonom dan mandiri; (b) Kewenangan pemerintah pusat kecil dan pengawasannya tak langsung; (c) Pemerintah lokal memiliki teritorium yang jelas; (d) Pemerintah lokal memiliki status atau legitimasi hukum yang jelas untuk mengelola sumberdaya dan mengembangkan pemerintah lokal sebagai unit yagn mandiri dan independen (Yuwono, 2001).

Di sisi lain, dekonsentrasi merupakan desentralisasi yang bersifat administratif yang mencerminkan proses efisiensi pemerintah pusat di mana daerah tidak lebih hanya kepanjangan tangan pusat. Lebih jauh, desentralisasi menjadi semacam media kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (Fitriyah, 2001). Sehubungan dengan hal ini, pada sejumlah negara berkembang terdapat beberapa faktor yang mengarahkan mereka pada proses desentralisasi. Faktor tekanan etnis Di Asia Selatan serta bekas Yugoslavia dan Rusia; Faktor transisi dari sistem ekonomi terkendali kepada ekonomi pasar di Eropa Timur dan bekas Uni Sovyet; Kemunculan sistem politik multipartai di Afrika; Menguatnya demokratisasi di Amerika Latin; serta Faktor kebutuhan memperbaiki dan memperluas pelayanan kepada penduduk lokal di Asia Timur (Litvack & all., 1998).

Dinamika Pengembangan Kawasan Wisata Situ Bagendit

Situ Bagendit berada di tepi jalan raya, tepatnya di desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Wikipedia, 2017). Batas administratif area wisata tirta dengan luas lahan sekitar 125 hektare ini antara lain, disebelah utara berbatasan dengan Desa Banyuresmi, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Cipicung, disebelah timur berbatasan dengan Desa Binakarya, dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamukti. Berjarak sekitar 4 kilometer dari pusat kota Garut, atau kira-kira 30 menit perjalanan serta dapat ditempuh dengan mudah baik dari arah Bandung via Leles maupun dari arah Balubur Limbangan. Apabila dituju dari arah Singaparna Tasikmalaya maupun wilayah selatan Garut melalui Garut Kota. Aksesibilitas menuju lokasi ini, dapat melalui rute Terminal Guntur Garut – Banyuresmi atau Alun-alun Tarogong - pertigaan STMN Negeri atau SMK 2 Garut –

Banyuresmi (wisatadigarut.com). Dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kependudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, pengelolaan Situ Bagendit berada di bawah kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Situ Bagendit dengan garis komando/pembinaan dan garis koordinasi langsung di bawah kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut (Garut, 2016).

Selain bersifat spesifik, berkunjung ke Situ Bagendit juga bisa masuk dalam paket sejumlah daerah tujuan wisata di Kabupaten Garut yang lain seperti kawasan kawasan Pemandian Air Panas Cipanas Tarogong Kaler, kawasan industri penyamakan, kerajinan dan perdagangan kulit Sukaregang, wisata Taman Satwa Cikembulan Kadungora serta Situ dan Candi Cangkuang Leles. Nilai eksotis yang dimiliki objek wisata alam ini berupa danau yang luas dan dikelilingi gunung-gunung yang menjulang. Ada empat gunung yang dapat dilihat saat berada di kawasan Situ Bagendit, yaitu Gunung Guntur, Gunung Putri, Gunung Papandayan, dan Gunung Cikuray (gunung tertinggi di Garut). Keindahan alam pegunungan yang berjajar mengelilingi kawasan kota Garut semakin lengkap pada saat cuaca cerah dengan pesona bekuan lava bekas letusan Gunung Guntur yang secara artistik membentuk lintasan "tapal kuda" (indonesiakaya.com).

Kualitas pemandangan dan tingkat keamanan sepanjang jalan di kawasan objek dan daya tarik wisata ini cukup baik. Para wisatawan dapat menikmati pemandangan, mengelilingi danau dengan menggunakan perahu atau rakit. Objek wisata ini cocok untuk rekreasi keluarga serta kegiatan bersepeda air. Mengelilingi danau menggunakan rakit yang terbuat dari bambu dan digerakkan dengan cara tradisional akan menjadi pengalaman tersendiri. Posisi ini strategis untuk diabadikan melalui foto, karena sensasi yang dibawakan dalam gelombang air yang menerpa perjalanan rakit. Di tengah-tengah danau, para penduduk juga menyediakan warung terapung di atas rakit. Panorama luar biasa juga terpancar dalam alam lintasan bentangan bibir pesisir danau yang luas dengan aneka ragam hayatinya, Dari arah Taman, keelokan Situ yang terkenal dengan mitos Nyi Endit ini juga menyajikan hamparan ragam jenis vegetasi peneduh sambil menikmati aneka jajanan tersedia pada sejumlah kios di sana. Sementara dari arah pinggiran kawasan Hutan Kota sebelah utara terdapat bangku taman, gazebo, maupun shelter. Di areal Taman juga terdapat fasilitas naik kereta api mini atau kuda tunggangan (garutnews.com, 2017).

Sayangnya, pasokan air dari Situ Bagendit bersifat tadah hujan. Saat kemarau panjang, ketiadaan pasokan air yang memadai membuat eksotisme area wisata tirta ini lenyap seketika. Selain kondisinya sangat memprihatinkan, beberapa area yang kering dipenuhi hamparan rerumputan, eceng gondok, dan teratai. Lama-kelamaan, air pun terus-menerus menyusut dan terjadi kekeringan. Beberapa titik dari lokasi area lalu lintas rakit dan sepeda air berubah menjadi rawa kering yang mulai dipenuhi tanaman liar maupun semak belukar. Kondisi kontras juga dialami kios dan warung terapung yang acap menjadi wahana transit penumpang mulai kosong. Beberapa meter dari sana, rumpon-rumpon perangkap ikan nyaris menyerupai gundukan kayu bakar api unggun. Akibatnya, selain turun drastisnya intensitas kunjungan wisatawan, para nelayan pun tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Padahal sebelumnya ragam aktivitas pencari ikan, baik dengan jala atau dengan alat pancing, setiap harinya begitu marak dan tak pernah sepi (garutnews.com, 2014).

Dalam situasi normal, wisatawan domestik berasal dari Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, Bogor,Bandung dan Jakarta yang datang perbulannya mencapai 400-600 orang. Puncaknya terjadi pada musim libur akhir pekan maupun hari raya. Dalam rentang tiga bulan selama liburan panjang, jumlah ini dapat mencapai 10.000-an. Sejak airnya surut, tingkat kunjungan wisatawan ke Situ Bagendit menurun drastis menjadi hanya berkisar 160 pengunjung setiap pecan atau turun sekitar 20 % dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kendati demikian, kondisi ini tidak membuat para wisatawan merasa kehilangan, karena di beberapa daerah juga bermunculan sejumlah objek wisata tirta baru seperti kawasan Darajat Pass di kecamatan Pasirwangi serta Water Boom Park Layung Sari di kecamatan Sucinaraja.

Musim kemarau mengakibatkan 50 persen air kering. Debit air pada areal danau, rata-rata kedalaman mencapai 0,5 m dari normalnya sekitar 3 m. Itu pun hanya pada beberapa titik lokasi sekitar bibir situ sebelah timur. Selebihnya, hanya daratan yang dipenuhi tanaman eceng gondok dan rumput liar. Praktis, penampakan danau bertransformasi menjadi padang tempat para pencari rumput memenuhi kebutuhan pakan ternak hewan sejenis sapi, domba, atau kuda delman. Selain itu, menjalarnya tanaman air seperti eceng gondok dan teratai mengakibatkan pendangkalan sangat parah yang selain mengganggu panorama situ, juga mengakibatkan terbatasnya radius operasi kendaraan air (garutnews.com, 2015). Kekeringan juga disebabkan pasokan aliran air

irigasi Ciojar bersumber kawasan wisata Cipanas Tarogong Kaler berkurang dipergunakan mengairi areal persawahan, dan pertanian lain di sepanjang aliran irigasi. Sumber mata air Cikabuyutan Banyuresmi yang selama ini memasok air ke Situ Bagendit, sudah lama tertutup. Hal ini diperparah dengan pengendapan lumpur serta membusuknya tanaman air. Saat musim hujan, dengan pasokan air normal, dari luas yang mencapai sekitar 125 ha, hanya sekitar 80 ha dapat terairi. Sayangnya, daerah yang terairi tersebut, masih dipenuhi tanaman eceng gondok dan ribuan rumpon perangkap ikan (garutnews.com, 2015).

PEMBAHASAN

State Sphere

` Pada ranah negara (pemerintah), salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata terutama setelah era otonomi daerah adalah masalah kepemilikan aset. Demikian pula terjadi pada Situ Bagendit. Berdasar Undang Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20/2006 tentang Irigasi, pada mulanya kewenangan pengelolaan Situ Bagendit mulai dari struktur lembaga pengelola, pembiayaan, serta prosedur pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,. Ini disebabkan Situ yang terletak di kecamatan Banyuresmi ini termasuk daerah irigasi dengan luasan lahan diairi di atas 3.000 ha. Berdasarkan prinsip desentralisasi, kewenangan Pemerintah Kabupaten hanya pada daerah irigasi seluas di bawah 1.000 ha, dan Pemerintah Provinsi atas daerah irigasi seluas di atas 1.000 ha namun masih di bawah 3.000 ha.

Karena terbentur kewenangan ini, meski berada di wilayah Kabupaten Garut, pihak pemerintah kabupaten Garut pihaknya tak bisa melakukan program pemberdayaan potensi perairan Situ Bagendit dari APBD Garut. Pemkab sendiri hanya berwenang mengurusi jaringan-jaringan irigasi kecil aliran dari Bagendit. Apabila ada alokasi anggaran untuk kegiatan yang diarahkan ke Situ Bagendit, dapat jadi temuan karena bukan aset pemda melainkan aset Pusat. Pemnfaatan oleh pemkab memungkinkan apabila terdapat semacam kesepahaman kerja sama dengan Pusat (garutnews.com, 2015).

Pada tahun 2016, areal Situ Bagendit di Kecamatan Banyuresmi sudah berpindah tangan dari Pemprov Jawa Barat menjadi milik Pemkab Garut. Adapun

sertifikasi atas kawasan tersebut masih dalam proses. Pihak pemkab melalui Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat terkait dokumen pendukung peralihan status aset Pemprov menjadi aset Pemkab Garut. Pelimpahan aset Situ Bagendit dari Pemprov ke Pemkab Garut dimungkinkan sebagai implikasi politis serta kompensasi atas diserahkannya aset berikut pengelolaan RSU Pameungpeuk dari Pemkab Garut kepada Pemprov Jabar. Penyerahan RSU Pameungpeuk kepada Pemprov berlangsung melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan Asisten Daerah III Provinsi Jawa Barat dengan Wakil Bupati Garut di Gedung Pendopo Garut pada 8 November 2015. Total nilai aset RSU Pameungpeuk mencapai sekitar Rp30 miliar. Selain Bagendit, implikasi politis dan kompensasi ini juga menyertakan 14 titik aset Pemprov yang berada di wilayah Garut dimintakan menjadi aset Pemkab Garut. Di antaranya, bekas kantor Samsat di Jalan Terusan Merdeka (garutnews.com, 2016). Sebenarnya, pengajuan permintaan pengalihan 14 aset itu telah berlangsung sejak era Bupati Garut Agus Supriadi. Namun baru tahun 2015 pemprov memberikan respons positif (garutnews.com, 2016).

Melalui pelimpahan aset tersebut, diharapkan beberapa persoalan terkait ketidakoptimalan penataan pengembangan dan pengelolaan Situ Bagendit, menyusutnya areal situ yang tergenangi air hingga 25% dari total luas akibat pendangkalan yang sangat parah, serta beberapa kendala lainnya, dapat diantisipasi dan diatasi. Karena pengembangan pariwisata merupakan proses dimana pariwisata menjadi penekanan arah suatu wilayah, berhadapan dengan ide pertumbuhan semata-mata yang berfokus pada peningkatan indikator kuantitatif, menyajikan gagasan tentang manfaat bersama pada tingkat kompleks (Ruhanen, 2004). Pemerintah daerah dianggap paling bertanggung jawab atas koordinasi pengembangan pariwisata di tingkat lokal dan dukungan terhadap pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan pengambil keputusan dan perwakilan pemerintah daerah hendaknya dapat mempertimbangkan semua kemungkinan dampak positif dan negatif dari pertumbuhan dan pengembangan pariwisata. Oleh karena itu penting bagi semua kegiatan pengembangan destinasi pariwisata menjadi bagian dari proses perencanaan strategis yang mengarahkan seluruh kegiatan menuju tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Birkic, Pilija, & Šebrek, 2014).

Pada awal April 2014, Bupati Garut, Rudy Gunawan menggalakkan program pembersihan Situ Bagendit dari eceng gondok (Eichhornia Crassipes). Selama pembersihan, Pemda Garut mendapat bantuan perahu airboat dari Hydrosix Airboat Development serta alat berat dari Cipaganti Citra Graha. Sayangnya, kegiatan pembersihan ini tidak dapat dilakukan sampai tuntas. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, dibutuhkan dana sedikitnya Rp 1,5 miliar untuk menuntaskan program. Angka tersebut didapat berdasarkan kalkulasi pembersihan 1 ha eceng gondok yang menelan biaya Rp 10 juta. Karenanya, program pembersihan yang dicanangkan Pemda Garut dengan total alokasi dana Rp. 200 juta hanya mampu menyingkirkan tanaman parasit tersebut dari area seluas 20 ha saja, yakni di bagian timur danau. Sementara sisanya, sekitar 90-100 ha eceng gondok yang tersebar di bagian barat situ masih belum bisa dibersihkan (pikiranrakyat.com, 2014).

Market Sphere

Dari dimensi pasar, dengan beralihnya kepemilikan dari wewenang pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi ke pemerintah daerah (kabupaten), terjadi perubahan signifikan di mana para investor yang akan terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata marina ini yang awalnya harus berurusan dengan pemerintah pusat, kini dapat berhadapan langsung dengan pemerintah daerah dalam hal ini pemkab Garut. Kendati kepemilikan di masa sebelumnya masih berada di kewenangan pusat, bukan berarti pihak pemkab apriori sama sekali dengan kelestarian kawasan wisata tirta ini.

Berbagai fasilitas yang ada di Situ Bagendit, mulai dari wahana permainan, pertamanan, serta sarana rekreasi dikelola dengan dua sistem. Pertama, pengelolaan oleh UPTD seperti sarana permainan kereta api dan beberapa areal lain. Kedua, melibatkan masyarakat untuk tempat rekreasi serta sepeda air. Tiket masuk sebesar Rp. 3.000,- rupiah untuk anak dan Rp. 5.000 ,- untuk dewasa merupakan pemasukan daerah, sementara pembayaran langsung bagi fasilitas permainan sepeda air serta recreation area merupakan pemasukan bagi pengelola lokal dari masyarakat.

Pada bulan Juni 2016, dilakukan kegiatan normalisasi dan pengerukan Situ Bagendit oleh investor PT Banyuresmi Artha. Menurut Direktur PT Banyuresmi Artha, kegiatan mengoperasikan kapal pengeruk pasir dan eksplorasi Bagendit ini telah

mendapat restu melalui instruksi dari Bupati Garut sesuai klaim perjanjian kerja sama dengan Pemkab Garut sebagaimana terlihat dari pemasangan plang identitas kegiatan proyek. Anehnya, klaim ini tidak dibenarkan oleh pihak DPRD Kabupaten dalam hal ini Komisi B yang menyatakan bahwa kerjasama dimaksud dibatasi pada kegiatan eksplorasi, sebab proyek Normalisasi dan Pengerukan dibiayai APBD Provinsi ini masih dalam proses lelang belum ada pemenangnya. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi dengan kapal pengeruk pasir tersebut, dinilai belum jelas perizinannya dan tidak mendapat rekomendasi dari Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP). (garutnews.com, 2016).

Keterlibatan investor dalam pengelolaan pemeliharaan objek wisata tirta Situ Bagendit sebenarnya cukup positif. Hanya saja, setiap jenis kesepakatan personal pimpinan daerah (Bupati) dengan pihak investor yang belum dapat diverifikasi secara legal memperlihatkan salah satu implikasi penyalahgunaan wewenang dalam sistem otonomi daerah. Dalam hal ini, "perjanjian preman" atau kesepakatan liar yang tidak sesuai prosedur antara Bupati dengan investor menerminkan bargaining position di mana kekuatan pasar memiliki peran untuk menginterupsi sebuah kebijakan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi penguatan civil society maupun good governance.

Proses negosiasi kebijakan dengan kepentingan pasar hanya memperlihatkan faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang di antaranya meliputi struktur administrasi publik serta komersialisasi. Kendati prinsip pengembangan pariwisata lestari sangat penting, implementasinya menjadi bagian yang sangat sulit untuk dicapai karena kondisi sosial ekonomi dan politik yang terjadi. Oleh karena itu, setiap operasi prinsip- prinsip pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan ketegasan pilihan politik dan ekonomi serta pengambilan keputusan berdasarkan sosio-ekonomi yang kompleks dan lingkungan industri (Tosun, 2001).

Public Sphere

Pada ranah publik, peran sentral organisasi dan lembaga kemasyarakatan bagi terselenggaranya pemerintahan yang transparan sangat signifikan. Gerakan masyarakat dan sejenisnya hendaknya dapat memberi pressure bagi kesalahan sistem agar kembali memasuki koridor yang seharusnya. Laskar Indonesia Kabupaten Garut, sebuah

lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Garut, menyoroti kasus pengerukan dalam rangka normalisasi Situ Bagendit oleh investor yang dinilai tidak prosedural. Menurut LSM ini, eksplorasi maupun studi awal guna meneliti material di Situ Bagendit, mesti ada izin. Faktanya, tak ada satu pun SKPD terkait yang mengeluarkan rekomendasinya, terlebih lagi izin. Kawasan Bagendit merupakan milik pemerintah, dan bukan milik pribadi Bupati. Karenanya, untuk menjalin perjanjian kerjasama, harus memenuhi tuntutan prosedural seperti adanya kajian dinas teknis, dan tercatat dalam dokumen negara. Apabila tidak terpenuhi, maka, perjanjian tersebut merupakan suatu "perjanjian preman" yang dapat berpotensi dimanfaatkan menjadi sebuah kebohongan publik.

Pihak LSM ini menilai bahwa kegiatan reklamasi yang secara de facto telah dilakukan PT Banyuresmi Artha dalam skala kecil belum memenuhi mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku. Lembaga ini pun menuntut ketegasan DPRD yang dipandang tak peka terhadap persoalan eksplorasi liar atas Situ Bagendit tersebut. Mereka berharap pihak legislatif bukan semata memberi ancaman penutupan kegiatan di lokasi atau sekadar silaturrahim bersama pengusaha bertopeng inspeksi, melainkan turut pula turun ke lapangan mencari fakta-fakta sebenarnya terkait apakah kegiatan tersebut eksplorasi, normalisasi, atau pertambangan (garutnews.com, 2016).

Selain peran kritisnya terutama pada domain struktural, publik pun dapat berperan serta guna terlibat dalam proses pembangunan pariwisata dalam wilayah sosial kultural, seperti diperlihatkan Remaja Pencinta Alam Garut (Repaga) yang bahu membahu bersama Basarnas bersihkan gulma eceng gondok di Situ Bagendit pada bulan Februari 2014. Pada kesempatan itu, Repaga mengundang pihak Basarnas oleh Repaga untuk membantu masyarakat Banyuresmi membersihkan eceng gondok dari Situ Bagendit. Pihak Basarnas mendatangkan Air Boat sebagai teknologi untuk mengangkat tanaman eceng gondok. Dengan keterbatasan waktu yang hanya ditugaskan dua hari, mereka tidak dapat menyelesaikan penarikan eceng gondok ke pinggir. Menurut pihak Basarnas, dalam menyelesaikan persoalan eceng gondok ini, tidak dapat diselesaikan sendiri, tetapi semua pihak harus ikut membantu. Selain itu, penggunaan teknologi sangat disarankan guna mempercepat penarikan eceng gondok ke darat.

Dari kedua peran publik baik di wilayah struktural maupun sosial kultural sebagaimana dipaparkan di atas, memperkuat asumsi bahwa ketika negara dan birokrasi

dengan sifatnya tidak dapat merancang dan memberikan strategi distribusi kesejahteraan, maka negara harus memberi pengakuan dan dorongan kepada inisiatif LSM (Iyengar, 2000).

Private Sphere

Pada dimensi pribadi, saat kondisi penjalaran eceng gondok semakin akut (2014), Camat setempat memotori kegiatan pembersihan eceng gondok secara swadaya oleh masyarakat setempat. Hanya saja, keterbatasan dana, peralatan, personel, dan sukarelawan mengakibatkan hasil yang dicapai menjadi tidak optimal (pikiranrakyat.com, 2014). Selain mengapresiasi keberadaan Air Boat dari Basarnas, Camat Banyuresmi saat itu pun mengupayakan bantuan kendaraan untuk mengatasi eceng gondok itu kepada Pemkab Garut (fokusjabar.com, 2014). Dari sisi akademis, beberapa mahasiswa turut berkontribusi bagi pengembangan teknologi dalam pengelolaan area wisata Bagendit. Salah satunya dengan menerapkan Aplikasi Pengelolaan Data pada sistem pencatatan dan penyimpanan data-data untuk menggantikan sistem manual yang seringkali menghadapi kendala berupa kehilangan data saat dibutuhkan karena tidak tersusun dan penyimpanan berkas masih berserakan (Setiawan & Deddy, 2015).

Peran pribadi ini penting bagi penguatan civil society dalam konteks pembangunan pariwisata karena terdapat hubungan yang kuat antara nilai individu dan kepercayaan (keyakinan, demokrasi, toleransi, tanggung jawab, independensi, imajinasi, tekad, kerja keras, hemat, keyakinan agama) dan pengembangan pribadi, sebagai komponen utama pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, nilai dan keyakinan yang dirangkul mempengaruhi perilaku dan selanjutnya, cara seseorang bertindak berdampak pada perkembangan pribadi dan kinerja sosio-ekonomi masyarakat di mana dia tinggal (Gagea & Iacobuta, t.t.).

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan pribadi, publik yang produktif serta sinergitas negara dan pasar yang efektif dengan dilandasi keinginan kuat demi tercapainya kesejahteraan sosial akan memperkuat dimensi politik

bagi pembangunan pariwisata. Kondisi sebaliknya yang akan terjadi ketika relasi negara dan pasar dipenuhi kepentingan pribadi atau keuntungan tertentu.

Dalam kasus pengelolaan Situ Bagendit, terlihat bahwa permasalahan aset kepemilikan pusat-daerah dapat menjadi kendala serius bagi pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Persoalan ini tentu sangat kental nuansa politisnya sehingga diperlukan negosiasi dan bargaining yang hendaknya dilandaskan pada peningkatan kemakmuran rakyat.

Banyak objek wisata yang memiliki potensi alam luar biasa, hanya menjadi kawasan wisata biasa dan tidak menjadi daya tarik dunia internasional. Padahal, di era teknologi informasi ini. Setiap potensi wisata dapat menjadi ikon daerah yang mampu bersaing dalam skala internasional. Salah satu strateginya ialah:

Pertama, kejelasan kepemilikan aset. Situ Bagendit sampai sejauh ini masih dalam proses pengalihan aset dari pusat yang dikelola pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Setelah itu pemerintah daerah hendaknya mampu mensinergikan berbagai satuan perangkat kerja daerah (SKPD) seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pasar dan UMKM, dan para pemangku kebijakan lainnya untuk melakukan integrasi pengembangan dan pengelolaan pembangunan pariwisata termasuk di lokasi Situ Bagendit.

Kedua, pemerintah daerah perlu melibatkan pasar dalam hal ini para investor terutama terkait proses marketing objek wisata, baik sektor jasa. Selain itu perlu dibangun komunikasi yang lebih intens agar para investor dapat berinvestasi dalam infrastruktur lainnya seperti wahana water park, pengadaan rest room, out bond, dan lain sebagainya. Pada sisi ini, UMKM pun dapat diberdayakan melalui berbagai ekonomi kreatif local yang bisa ditingkat standar produknya oleh pembinaan dari dinas terkait.

Ketiga, publik, dalam hal ini LSM, lembaga kemahasiswaan, maupun lembaga sosial lainnya perlu disupport lebih lagi bagi partisipasinya dalam pengelolaan Situ Bagendit. Partisipasi ini dapat berupa edukasi terhadap masyarakat, advokasi terkait

regulasi tentang kepariwisataan, maupun pelatihan dan upaya pembersihan area Situ Bagendit. Selain itu, publik juga dapat memberikan pressure terhadap setiap kebijakan yang tidak berpihak pada pengembangan potensi lokal.

Terakhir, setiap individu yang memiliki kepedulian terhadap Situ Bagendit, diharapkan dapat menyusun kekuatan guna membangun program dan strategi yang lebih komunal dan berkekuatan hukum, bernilai akademik, serta prospektif sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism development).

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal :

Aas, C., Ladkin, A., & Fletcher, J. (2005). Stakeholder Collaboration and Heritage Management. Annals of Tourism Research Journal, 32(1), 28-48.

Abdillah, M. (2011). Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia (1st ed.). Jakarta: Gramedia.

Adnan, M. (2001). "Otonomi Daerah: Kaya Teori Lemah Praktik". In T. (. Yuwono, Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru (p. 23). Semarang: Diponegoro University.

Bakti, A. F. (2004, December). Paramadina and its Approach to Culture and Communication: An Engagement in Civil Society. Archipel, 68, 315-341.

Bakti, A. F. (2012). Demokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Masyarakat Madani di Indonesia. In A. F. Bakti, dkk, & A. F. Bakti (Ed.), Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi (1st ed., pp. 14-16). Jakarta: Churia Press.

Bakti, A. F. (2012). Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi (1st ed.). (A. F. Bakti, Ed.) Jakarta: Churia Press.

Bakti, A. F. (2017). Komunikasi Politik "Sang Presiden yang Terlupakan". In H. Mustapa, Pemikiran Politik Islam Sjafruddin Prawiranegara (1st ed.). Kuningan: Nusa Litera Inspirasi.

Birkic, D., Pilija, I. C., & Šebrek, J. K. (2014). THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN PLANNING OF SUSTAINABLE TOURISM OF COASTAL DESTINATION. Trends in Tourism and Hospitality Industry, (pp. 16-32). Croatia.

Brokaj, R. (2014, November). Local Government's Role in the Sustainable Tourism Development of A Destination. European Scientific Journal, 10(31), 103-117.

Budiarjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik (Revisi Cet.I ed.). Jakarta: Gramedia.

Eze-Uzoamaka, P. I. (2006). “Tourism and Community Development in Nigeria”. In Okpoko, P. U. Issues in Tourism Planning and Development.

Fitriyah. (2001). "Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". In T. (. Yuwono, Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah dengan Paradigma Baru (p. 94). Semarang: Diponegoro University Press.

Gagea, M., & Iacobuta, A. (t.t.). THE ROLE OF INDIVIDUAL VALUES IN PERSONAL DEVELOPMENT. 451-463.

Garut, B. (2016). Kependudukan dan Sususnan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Peraturan Bupati No. 27.

Ghaderi, Z., & Henderson, J. C. (2012). “Sustainable Rural Tourism in Iran: A Perspective from Hawraman Village”. Tourism Management Perspective, 47 – 54.

Harris, J. M. (2000, June). Basic Principles of Sustainable Development. Global Development And Environment Institute, No. 00-04, pp. 1-24.

Huybers, T., & Bennett, J. (2003). Environtmental Management and the Competitiveness of Nature-Based Tourism Destination. Environtmental and Resource Economics, 213-233.

Iyengar, S. (2000, August 26). Role of Non-Governmental Organisations in Development of Gujarat. Economic and Political Weekly, Vol. 35, No. 35/36, 3229-3236.

Jamieson, W., & Noble, A. (2000). A Manual for Sustainable Tourism Destination Management. Canada: Canadian Universities Consortium.

Janoski, T. (1998). Citizenship and Civil Society: A Framework of Rights and Obligations in Liberal, Traditional and Social Democratic Regims. Cambridge: Cambridge University Press.

Kamil, S. (2013). Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi (1st ed.). Jakarta: Kencana.

Litvack, J., & all., e. (1998). Rethinking Decentralization in Developing Countries. Washington D. C.: The World Bank.

Maryani, E. (2004, August 4). Peluang dan Tantangan Kepariwisataan Jawa Barat. Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Jawa Barat, p. 1.

Ogechi, O. C., & Igbojekwe, P. A. (T.t.). Local Government and Responses to Sustainable Tourism Development in Nigeria: A Studi of Local Government Authorities in Imo State. International Journal of Business Tourism and Applied Science. www.ijbts-journal.com/images/main_1366796758/0053-Ognonna.pdf.

Petersen, L. A. (2010). An examination of integrated rural development in the Goris region of Armenia. dissertation submitted to the Royal Agricultural College in co-operation with Utah State University.

Ruhanen, L. (2004). "Strategic Planning for Local Tourism Destinations: An Analysis of Tourism Plans". Tourism and, 1(3), 239.

Setiawan, B., & Deddy, A. (2015). PENGEMBANGAN APLIKASI PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN OBJEK WISATA SITU BAGENDIT. Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Vol. 12 No. 1, 1-7.

Sharpley, R. (2000). Tourism and Sustainable Development:. Journal Of Sustainable Tourism, Vol. 8, No. 1.

Simpson, K. (2001). ”Strategic planning and community involvement as contributors to sustainable tourism. Current Issues in Tourism, 4(1), 3-41.

Syamsuddin, M. D. (2000). Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani (1st ed.). Tangerang Selatan: Logos.

Tosun, C. (2001). Challenges of Sustainable Tourism Development in. Tourism Management, 22, 289}303.

wisatadigarut.com. (n.d.). Retrieved September 2, 2017, from Situ Bagendit: http://www.wisatadigarut.com/2013/08/peta-lokasi-situ-bagendit-banyuresmi.html

Yuwono, T. (. (2001). Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Diponegoro University Press.

Internet :

fokusjabar.com. (2014, February 10). Retrieved September 6, 2017, from Warga Banyuresmi Perangi Eceng Gondok: http://fokusjabar.com/2014/02/10/warga-banyuresmi-perangi-eceng-gondok/

garutnews.com. (2014, Oktober 1). Retrieved September 6, 2017, from Penyusutan Perairan Situ Bagendit Kandaskan Rakit: http://garutnews.com/penyusutan-perairan-situ-bagendit-garut-kandaskan-rakit.html

pikiranrakyat.com. (2014, October 5). Retrieved September 6, 2017, from Pembersihan Eceng Gondok di Situ Bagendit tidak Tuntas: http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2014/10/05/299656/pembersihan-eceng-gondok-di-situ-bagendit-tidak-tuntas

garutnews.com. (2015, august 3). Retrieved september 6, 2017, from kemarau kian mengancam stu bagendit menjadi daratan: http://garutnews.com/kemarau-kian-mengancam-situ-bagendit-menjadi-daratan.html

garutnews.com. (2016, Januari 13). Retrieved September 2, 2017, from Bagendit Berikut Cangkuang Diakui Menjadi Aset Garut: http://garutnews.com/bagendit-berikut-cangkuang-diakui-menjadi-aset-garut.html

garutnews.com. (2016, January 18). Retrieved September 6, 2017, from Tancapkan Plang Kepemilikan Padahal Belum Resmi Dipindahtangankan: http://garutnews.com/tancapkan-plang-kepemilikan-padahal-belum-resmi-dipindahtangankan.html

garutnews.com. (2016, Mei 5). Retrieved 9 6, 2017, from Investor "keukeuh" Ekslporasi Situ Bagendit: http://garutnews.com/investor-keukeuh-eksplorasi-situ-bagendit.html

garutnews.com. (2016, Mei 26). Retrieved September 6, 2017, from perjanjian eksplorasi situ bagendit terindikasi kuat abal-abal: http://garutnews.com/perjanjian-eksplorasi-situ-bagendit-terindikasi-kuat-abal-abal.html

garutnews.com. (2017, May 1). Retrieved September 2, 2017, from Legenda Bagendit Meretas Wisata Berbasis Edukasi Terlengkap: http://garutnews.com/legenda-bagendit-meretas-wisata-berbasis-edukasi-terlengkap.html

Wikipedia. (2017, September 2). Retrieved from Situ Bagendit: https://id.wikipedia.org/wiki/Situ_Bagendit

Aas, C., Ladkin, A., & Fletcher, J. (2005). Stakeholder Collaboration and Heritage Management. Annals of Tourism Research Journal, 32(1), 28-48.

Abdillah, M. (2011). Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia (1st ed.). Jakarta: Gramedia.

Adnan, M. (2001). "Otonomi Daerah: Kaya Teori Lemah Praktik". In T. (. Yuwono, Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru (p. 23). Semarang: Diponegoro University.

Bakti, A. F. (2004, December). Paramadina and its Approach to Culture and Communication: An Engagement in Civil Society. Archipel, 68, 315-341.

Bakti, A. F. (2012). Demokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Masyarakat Madani di Indonesia. In A. F. Bakti, dkk, & A. F. Bakti (Ed.), Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi (1st ed., pp. 14-16). Jakarta: Churia Press.

Bakti, A. F. (2012). Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi (1st ed.). (A. F. Bakti, Ed.) Jakarta: Churia Press.

Bakti, A. F. (2017). Komunikasi Politik "Sang Presiden yang Terlupakan". In H. Mustapa, Pemikiran Politik Islam Sjafruddin Prawiranegara (1st ed.). Kuningan: Nusa Litera Inspirasi.

Birkic, D., Pilija, I. C., & Šebrek, J. K. (2014). THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN PLANNING OF SUSTAINABLE TOURISM OF COASTAL DESTINATION. Trends in Tourism and Hospitality Industry, (pp. 16-32). Croatia.

Brokaj, R. (2014, November). Local Government's Role in the Sustainable Tourism Development of A Destination. European Scientific Journal, 10(31), 103-117.

Budiarjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik (Revisi Cet.I ed.). Jakarta: Gramedia.

Eze-Uzoamaka, P. I. (2006). “Tourism and Community Development in Nigeria”. In Okpoko, P. U. Issues in Tourism Planning and Development.

Fitriyah. (2001). "Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". In T. (. Yuwono, Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah dengan Paradigma Baru (p. 94). Semarang: Diponegoro University Press.

Gagea, M., & Iacobuta, A. (t.t.). THE ROLE OF INDIVIDUAL VALUES IN PERSONAL DEVELOPMENT. 451-463.

Garut, B. (2016). Kependudukan dan Sususnan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Peraturan Bupati No. 27.

Ghaderi, Z., & Henderson, J. C. (2012). "Sustainable Rural Tourism in Iran: A Perspective from Hawraman Village". Tourism Management Perspective, 47 – 54.

Harris, J. M. (2000, June). Basic Principles of Sustainable Development. Global Development And Environment Institute, No. 00-04, pp. 1-24.

Huybers, T., & Bennett, J. (2003). Environtmental Management and the Competitiveness of Nature-Based Tourism Destination. Environtmental and Resource Economics, 213-233.

indonesiakaya.com. (n.d.). Retrieved September 2, 2017, from Bermula dengan Mitos hingga Menjadi Nama Danau: https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/bermula-dengan-mitos-hingga-menjadi-nama-danau

Iyengar, S. (2000, August 26). Role of Non-Governmental Organisations in Development of Gujarat. Economic and Political Weekly, Vol. 35, No. 35/36, 3229-3236.

Jamieson, W., & Noble, A. (2000). A Manual for Sustainable Tourism Destination Management. Canada: Canadian Universities Consortium.

Janoski, T. (1998). Citizenship and Civil Society: A Framework of Rights and Obligations in Liberal, Traditional and Social Democratic Regims. Cambridge: Cambridge University Press.

Kamil, S. (2013). Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi (1st ed.). Jakarta: Kencana.

Litvack, J., & all., e. (1998). Rethinking Decentralization in Developing Countries. Washington D. C.: The World Bank.

Maryani, E. (2004, August 4). Peluang dan Tantangan Kepariwisataan Jawa Barat. Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Jawa Barat, p. 1.

Ogechi, O. C., & Igbojekwe, P. A. (T.t.). Local Government and Responses to Sustainable Tourism Development in Nigeria: A Studi of Local Government Authorities in Imo State. International Journal of Business Tourism and Applied Science. www.ijbts-journal.com/images/main_1366796758/0053-Ognonna.pdf.

Petersen, L. A. (2010). An examination of integrated rural development in the Goris region of Armenia. dissertation submitted to the Royal Agricultural College in co-operation with Utah State University.

Ruhanen, L. (2004). "Strategic Planning for Local Tourism Destinations: An Analysis of Tourism Plans". Tourism and, 1(3), 239.

Setiawan, B., & Deddy, A. (2015). PENGEMBANGAN APLIKASI PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN OBJEK WISATA SITU BAGENDIT. Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Vol. 12 No. 1, 1-7.

Sharpley, R. (2000). Tourism and Sustainable Development:. Journal Of Sustainable Tourism, Vol. 8, No. 1.

Simpson, K. (2001). ”Strategic planning and community involvement as contributors to sustainable tourism. Current Issues in Tourism, 4(1), 3-41.

Syamsuddin, M. D. (2000). Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani (1st ed.). Tangerang Selatan: Logos.

Tosun, C. (2001). Challenges of Sustainable Tourism Development in. Tourism Management, 22, 289}303.

wisatadigarut.com. (n.d.). Retrieved September 2, 2017, from Situ Bagendit: http://www.wisatadigarut.com/2013/08/peta-lokasi-situ-bagendit-banyuresmi.html

Yuwono, T. (. (2001). Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Diponegoro University Press.

KOMUNIKASI SIMBOLIK RIDWAN KAMIL PADA PEMBANGUNAN *SKYWALK* DI KOTA BANDUNG

Dr. Pitoyo, M.IKom
Dosen Pascasarjana Universitas Gunadarma Jakarta
Email : pit3ismail@gmail.com

Abstrak : Walikota Bandung Mochamad Ridwan Kamil dikenal sebagai Walikota yang gencar melakukan pembanguan fisik, salah satunya pembangunan trotoar di udara yang dikenal dengan skywalk di Jalan Cihampelas Bandung. Pembangunan skywalk ini bertujuan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, sekaligus mengurangi kemacetan di Jalan Cihampelas, akibat dari trotoar yang dikuasai oleh pedagang kaki lima, sehingga pejalan kaki turun ke jalan raya. Ridwan Kamil menggagas mem-bangun skywalk dengan maksud mengurai kemacetan dan merelokasi pedagang kaki lima di trotoar ke skywalk. Ridwan Kamil mengkomunikasikan pesan pembangunan skywalk dari tahap rencana, proses pembangunan dan peresmian skywalk oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat melalui media sosial, instagram dan facebook serta media massa, koran, radio dan televisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses interaksi dan komunikasi Ridwan Kamil dengan masyarakat sehingga muncul gagasan skywalk sebagai simbol solusi mengatasi kemacetan. Penelitian ini menggunakan metode qualitative dengan pendekatan interaksi simbolik Herbert Meat dan Herbert Blummer. Hasil dari penelitian (1) Masyarakat memaknai simbol skywalk melebihi harapan walikota, bahwa skywalk sebagai tujuan wisata baru bukan sekedar tempat bagi pejalan kaki. (2) Simbol skywalk dikomunikasikan secara efektif pada pedagang kaki lima sehingga bersedia direlokasi ke skywalk. (3) Pesan menggunakan trotoar bagi pejalan kaki belum dimaknai secara benar sehingga jalan macet (4) Pesan walikota untuk menggunakan jasa angkutan umum juga belum dimaknai secara sama oleh masyarakat terlihat dari banyaknya kendaraan pribadi yang parkir di sekitar skywalk. (pit)

***Kata Kunci** : skywalk, Ridwan Kamil dan interaksi simbolik*

PENDAHULUAN

Manusia dengan manusia lainnya selalu membutuhkan interaksi. Interaksi manusia inilah awal dari sebuah komunikasi, baik interaksi dengan sesama manusia, atau dengan makhluk lainnya, bahkan interaksi dengan Tuhan, sang Maha Pencipta (Laksmi, 2012 : 52). Dengan saling berinteraksi indi-vidu satu dengan lainnya saling

menukar pesan, dan pesan tersebut diinterpretasikan atau dimaknai oleh masing-masing individu.

Memaknai sebuah pesan memang bukan hal yang mudah. Pesan dapat berupa verbal dalam bentuk kata-kata yang dirangkai dengan bantuan bahasa, pesan juga bisa berupa non verbal berupa isyarat atau simbol. Pesan verbal bisa dipertukarkan saat berkomunikasi sepanjang ada kesamaan dalam pemahaman pada sebuah bahasa. Perbedaan bahasa akan menimbulkan makna berbeda sehingga pesan tidak lagi efektif disampaikan, karena pengirim pesan (komunikator) dan penerima pesan (komunikan) memiliki makna yang berbeda atas sebuah pesan. (Mulyana, 2012 : 231) Pesan yang dikemas dengan bahasa yang sama sekalipun belum tentu pesan tersebut dapat dimaknai secara sa-ma dan bisa diharapkan sesuai keinginan penyampai pesan. Banyak faktor yang mempengaruhi agar pesan disampaikan oleh komunikator dapat diterima dan dimaknai secara baik oleh komunikan.

Setiap saat individu menerima pesan dari berbagai tempat. Pesan-pesan tersebut tentu tidak semua harus dimaknai dan hanya beberapa pesan yang dinilai penting yang dimaknai atau direspon oleh komunikan. Apalagi di perkotaan, setiap jengkal kaki melangkah di jalan ada banyak pesan, baik dalam bentuk media outdoor yang statis maupun audio visual berupa gambar bergerak. Belum lagi pesan berupa suara seperti klakson mobil atau suara lagu. Beragam pesan seolah meminta perhatian tiap individu untuk memaknainya.

Apalagi di era informasi digital, dimana media massa berupa media cetak, audio dan televisi, film, sudah berkurang dominasinya, pesan lebih banyak disampaikan melalui media online dengan jarin-gan internet baik yang menggunakan jaringan kabel maupun tanpa kabel. Hampir setiap individu memiliki perangkat komunikasi berupa handphhone atau smartphone. Perangkat komunikasi digital ini memudahkan individu untuk menerima dan mengirim pesan kepada invidu lainnya. Bahkan, pe-san tidak hanya sebatas suara, teks dan foto, audio visual juga dapat dikirimkan secara cepat kepada komunikan.

Kota Badung sebagaimana kota-kota lainnya, masyarakatnya sudah cukup familiar dengan media online dan media sosial. Setiap aktivitas individu sebagi bagian dari masyarakat digital seringkali mempertukarkan pesan melalui media sosial, ada yang sekedar untuk menunjukkan posisi atau keberadaannya, ada yang secara iseng

untuk mengisi waktu agar tidak melamun, ada juga yang secara serius menggunakan media sosial untuk kegiatan sosial, politik, ekonomi, budaya bahkan religi. (Tubbs, 2008 : 148) Beragam pesan berhamburan di jagad maya media sosial, dan seolah 'memaksa' untuk dibaca. Tidak heran bila di era digital ini banyak individu yang menjadi demikian individualis atau terasing dari lingkungan fisik sekitarnya karena terlalu serius menekuni pesan-pesan di media sosial.

Kang Emil, sapaan akrab Mochamad Ridwal Kamil, yang menekuni media sosial bukan sekedar untuk menghabiskan waktu, namun ada target sosial, dan politik yang ingin dicapai. Emil menekuni media sosial mulai tahun 2008, dengan pesan-pesan yang unik terkait kegiatannya kesehariannya baik sebagai seorang dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), maupun sebagai pegiat kreativitas anak muda Bandung, dan untuk aktivitas sosial serta budaya di Kota Bandung.

Media sosial menjadi saluran bagi Emil dalam menyampaikan pemikiran dan gagasannya untuk mewarnai kanca politik di Kota Bandung, ketika dirinya mencalonkan sebagai Walikota Bandung untuk periode 2013 - 2018. Suami Atalia Praratya Kamil, memperkenalkan diri pada generasi muda melalui media sosial, dan bagi warga yang belum akrab dengan dunia maya, Emil menghabiskan waktu untuk berinteraksi secara langsung. Pola komunikasi melalui media sosial ini, membedakan Emil dengan calon walikota Bandung lainnya, yang masih menggunakan pola komunikasi konven-sional yakni memasang papan reklame luar ruang, dan poster serta mencetak kaos yang dibagi-bagikan secara gratis kepada warga yang akan mengikuti pemilihan Walikota Bandung.

Keberhasilan gemilang Emil mengalahkan pasangan calon walikota lainnya salah satunya adalah pengaruh interaksi Emil melalui media sosial. Interaksi di media sosial ini juga merupakan bentuk interaksi antar manusia dengan bantuan media digital. Kendati interaksi antar manusia biasanya dil-akukan dimana individu satu dengan lainnya kenal secara personal namun di dunia maya hanya mengenal secara nama dan bisa jadi nama samaran, sehingga interaksi di media sosial sebenarnya bukan interaksi secara personal, namun bisa disebut sebagai interaksi antar pikiran atau ide.

Interaksi untuk mempertukarkan ide ini makin tajam ketika Emil terpilih menjadi Walikota Bandung (2013-2018) yang langsung menggalakkan pembangunan di Kota Bandung. Pemikiran Emil dalam menata Bandung tentu merupakan hasil

penajaman dari ide pribadi dengan bekal ilmu dan pengetahuan yang dimiliki kemudian diramu dengan usulan staf di pemerintahan serta masukan masyarakat.

Pesan-pesan pembangunan baik fisik maupun non fisik Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung ini, bila disimak lebih dalam dengan menggunakan teori interaksionis simbolik, karya George Her-bert Mead dan Herbert Blumer, merupakan upaya untuk mengkomunikasikan simbol-simbol pem-bangunan Kota Bandung kepada masyarakat luas baik warga Kota Bandung maupun di luar kota Bandung.

Pesan-pesan yang disampaikan Emil berupa pesan pembangunan ini merupakan simbol yang diper-tukarkan kepada masyarakat (society). Herbert Mead dalam menganalisa interaksi antar manusia melalui pesan berupa simbol ini mendasarkan asumsi bahwa interaksi manusia terdiri atas tiga hal yakni mind, self dan society. Diri (self) teridir atas me yang bertindak berdasarkan pengaruh oleh lingkungan. Pada diri manusia yang bertindak atas kemauan sendiri dan terlepas dari pengaruh lingkungan oleh Meat disebut I. Mead membedakan diri antara me dan I dalam penelitiannya guna memudahkan menganalisasi prilaku manusia ketika mempertukarkan simbol dalam interaksi antar manusia.(Littlejohn, 2008 : 234)

Mind menurut Mead, merupakan pemikiran dari hasil ide secara pribadi yang merupakan hasil merespon kondisi riil di masyarakat. Masyarakat (Society), yang digagas Mead, merupakan sebuah komunitas atau masyarakat yang memberi respon atas penerapan gagasan dan diri seseorang, yang kemudian dipahami secara bersama. (Elbandiansyah, 2014 : 182)

Pesan-pesan yang disampaikan Emil kepada masyarakat pada tulisan ini mengacu pada teori yang dibangun oleh Herbert Mead dan Herbert Blumer. Berawal dari diri (me) Mohammad Ridwan Kamil, seorang putra asli Bandung yang bergaul dengan lingkungan di Kota Bandung dan me-nyelesaikan pendidikan dari SD, SMP dan SMA hingga kuliah Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung. Sebagai warga Bandung, tentu Emil sangat tahu apa yang diinginkan Kota Bandung. Diri pribadinya tentu memiliki sejuta gagasan yag akan ditumpahkan untuk membangun Kota Bandung, namun Emil pun sadar bahwa untuk membangun kota Bandung tidak cukup hanya bermodalkan kemampuan pribadi, Emil perlu mendengar dan memperhatikan norma, undang-undang sebagai pa-gar agar pembangunan sesuai dengan koridor menuju penataan yang lebih baik.

Ide membangun Kota Bandung berdasarkan ide pribadi yang dikolaborasi dengan pertimbangan di luar dirinya untuk masyarakat, inilah yang oleh Mead disebut (me). Emil sebagai seorang arsitek bertaraf internasional tentu tidak diragukan lagi kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan kota secara bertahap. Sentuhan pemikiran (mind) seorang arsitek mulai nampak pada awal pemerintahannya saat membangun skywalk di Jalan Cihampelas Bandung.

Simbol yang dimaksudkan oleh Mead ini adalah pesan yang dipertukarkan kepada masyarakat dan masyarakat merespon serta memahaminya. Pertukaran pesan dimana ada timbal balik inilah yang disebut Mead dengan interaksionis simbolik. Ada banyak pesan yang disampaikan oleh individu namun tidak dapat dipahami oleh masyakarat. Sebuah pesan tidak direspon dan dipahami masyara-kat maka internaksi pesan berupa simbol itu tidak lagi efektif. (West, 2009 : 91)

Ridwan Kamil menggagas pembangunan skywalk atau jembatan di udara yang dibangun di atas Jalan Cihampelas. Skywalk sebagai sebuah simbol untuk solusi mengurangi jumlah pedagang kaki lima yang menempati trotoar sehingga menyita lahan untuk pejalan kaki, akibatnya pejalan kaki menggunakan jalan raya sebagai tempat untuk jalan kaki, kemacetan lalu lintas pun sulit dielakkan. Apalagi kawasan Jalan Cihampelas merupakan sentra bisnis ritail pakaian (fashion) yang sudah dikenal sejak lama, bukan hanya hari libur Sabtu dan Minggu, namun pada hari kerja juga padat pengunjung.

Keberadaan skywalk menjadi alternatif bagi pemerintah Kota Bandung guna memindahkan peda-gang kaki lima dari trotoar dan mengurangi jumlah pejalan kaki yang menggunakan jalan raya. Skywalk selesai dibangun, kemacetan tetap tidak berkurang kendati pedagang kaki lima sudah tidak lagi menguasai trotoar yang berada di depan pertokoan ritail, karena jumlah pengunjung skywalk yang membludak setiap saat, membuat kendaraan jadi mengurangi kecepatan.

Pada beberapa pemikiran (mind) yang dituangkan dalam kebijakan oleh Ridwan Kamil, tidak ter-lepas dari kemampuan diri (me) Ridwan Kamil sebagai seorang putra asli Bandung, yang menempuh pendidikan di bidang arsitek, dan bergaul dengan masyarakat luas dari kalangan bawah hingga elit politik. Perpaduan self, mind dan pengaruh interaksi dengan lingungkan masyarakat (society) ini yang mendorong

pesatnya pembangunan baik fisik berupa insfrastruktur, maupun non fisik di Kota Bandung.

Penelitian tentang komunikasi simbolik Mochamad Ridwan Kamil pada pembangunan skywalk di Bandung ini bertujuan untuk mengkaji:

1. Hal apa yang mempengaruhi pemikiran (mind) Ridwan kamil sehingga menggagas pem-bangunan skywalk di Jalan Cihampelas?
2. Bagaimana Ridwan Kamil mengkomunikasikan pemikirannya kepada masyarakat (society) pedagang kaki lima, dan anggota DPRD Kota Bandung guna mewujudkan pembangunan sky-walk?
3. Mengapa Ridwan Kamil memilih membangun skywalk untuk memberi ruang bagi pejalan kaki di jalan Cihampelas?

METODE PENELITIAN

Penelitian komunikasi simbolik Ridwan Kamil pada pembagunan skywalk di Jalan Cihampelas Kota Bandung ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat empiris, pengamatan atas dasar data bukanlah berdasarkan ukuran-ukuran matematis yang lebih dulu ditetatapkan oleh peneliti dan disepakati oleh pengamat lain, melainkan berdasarkan ungakapan subjek penelitian se-bagaimana dikehendaki dan dimakani oleh subjek penelitian. (Mulyana, 2008 : 11).

Metode penelitian kualitatif melibatkan proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data serta penulisan hasil penelitian (Creswell, 2012 : 274). Peneliti dalam menganalisis data dilakuakn secara bersamaan ketika melukan wawancara dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

Peneliti mengumpulkan data, yakni mencari kesesuaian antara informasi yang ada di media massa, media sosial tentang pembangunan skywalk dengan mewawancarai langsung Walikota Bandung Ridwan Kamil dan jajarannya di pemerintah Kota Bandung guna mendapatkan hasil yang cermat, teliti, orisinal. Hal itu dilakukan juga dengan wawancara mendalam anggota DPRD Kota Bandung, Pedagang Kaki Lima di Jalan Cihampelas serta warga yang mengunjungi skywalk.

Teori yang digunakan penelitia untuk mengkaji secara mendalam subjek penelitian yakni teori in-teraksionis simbolik yang digagas oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Mead mendefin-isikan pikiran (mind) sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dan Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkanpikiran melalui inetraksi dengan orang lain. (West, 2009 : 107)

Mead mendifinisikan diri (self) sebagai kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dan per-spekstif orang lain. Mead berargumen bahwa interaksi mengabil tempat di dalam sebuah struktur yang dinamis - budaya, masyarakat dan sebagainya. Individu - individu lahir ke dalam konteks so-sial yang diciptakan manusia. Individu-individu terlibat dalam masyarakat melalui perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela. (Littlejohn, 2009 : 232)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Bandung memiliki luas 167.7 Km, dengan jumlah penduduk 2.490.622 jiwa berdasar data Ba-dan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2016. Jumlah penduduk Kota Bandung ini kian bertambah pada saat siang hari di hari kerja dan jumlahnya makin bertambah pada hari Sabtu dan Minggu serta libur nasional.

Pertambahan jumlah penduduk di siang hari ini berkaitan dengan kertersediaan lapangan pekerjaan di Kota Bandung sehingga menarik minat pekerja yang tinggal di daerah sekitar Kota Bandung, yakni Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Jumlah jiwa yang berada di Kota Bandung pada siang hari berdasarkan data Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Ban-dung sekitar 3,5 juta jiwa.

Jumlah penduduk itu akan bertambah lagi ketika tiba hari Sabtu dan Minggu atau libur nasional. Dinas Pariwisata Kota Bandung mencatat sebanyak 6,5 juta wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Bandung pada semester pertama (Januari - Juni) 2016. Kunjungan ini terus ber-tambah dengan semakin banyaknya event nasional dan lokal Bandung serta pembangunan tujuan wisata di Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung Mochamad Ridwan Kamil.

Kota Bandung berada di ketinggian rata-rata 700 DPL (di atas permukaan laut) dengan suhu udara sekitar 18 - 23 derajat celcius , termasuk kota sejuk di Jawa Barat. Suhu udara yang sejuk dan ban-yak pohon besar yang berusia ratusan tahun berjajar di pingir jalan menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Bandung, baik untuk wisatawan asing maupun domestik.

Kunjungan wisatawan ini tentu membawa berkah sekaligus masalah bagi Kota Bandung. Roda ekonomi masyarakatbergerak dengan datangnya wisatawan, perdagangan barang ritel dan kuliner, jasa perhotelan, dan jasa transportasi menjadi hidup di Kota Bandung. Selain itu juga tumbuh usaha sektor informal yang dikenal dengan sebutan pedagang kaki lima (PKL). Kehadiran PKL ini se-bagaimana di kota-kota lain di Indonesia, sulit untuk dicegah, sehingga menimbulkan masalah baru.

Mobilitas penduduk dan wisatawan di Kota Bandung juga memicu kemacetan di setiap ruas jalan. Arus lalu lintas makin padat dan macet di lokasi sentra usaha, di Kawasan Jl Cihampelas. Kawasan Cihampelas yang berada di Kecamatan Coblong Kota Bandung dikenal sebagai kawasan perdagangan ritel pakaian. Kawasan ini dikenal sudah sejak lama, sehingga wisatawan domestik setiap berkunjung ke Kota Bandung selalu menjadikan Cihampelas sebagai salah satu tujuan wisata.

Kedatangan wisatawan yang di Cihampelas ini seolah memberi peluang usaha bagi pedagang sektor informal, PKL. Wisatwan dan pedangan kaki lima seolah saling membutuhkan, sehingga menguat-kan alasan PKL untuk bertahan, meski lokasi yang ditempati melanggar Peraturan Walikota Ban-dung tentang PKL yang dituangkan pada Peraturan Walikota Bandung No 888 tahun 2012 . Ken-dati peraturan sudah ditetapkan dengan sanksi-sanki yang jelas bagi para pelannggarnya, namun PKL tetap saja membandel. Kurang tegasnya penegakan hukum pada PKL di Jalan Cihampelas ini memicu bertambahnya jumlah PKL yang menempati di trotoar di sepanjang pertokoan kawasan Cihampelas.

Pemerintah Kota Bandung dari tahun ke tahun hanya melakukan penertiban agar pedagang kaki li-ma tidak mengganggu lalu litas di kawasan Cihampelas. Upaya pemerintah Kota Bandung tersebut tidak menyelesaikan masalah, PKL makin menyita trotoar untuk pejalan kaki. Pejalan kaki pun memilih untuk jalan di ruas jalan kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas menjadi

bertambah parah setelah di kawasan Cihampels ini berdiri mall, Cihampelas Walk dan sedikitnya 63 hotel serta 1.647 apartemen, sedangkan lebar ruas jalan Cihampelas tidak bertambah.

Upaya untuk menyelesaikan kemacetan lalu lintas di Kota Bandung, Ridwan Kamil mengkomu-nikasikan pesan kepada warga Kota Bandung agar menggunakan sepeda atau kendaraan umum baik bus maupun angkutan kota, sehingga mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. Ridwan Kamil bukan hanya menebar pesan kepada warga, namun mengkomunikasikan pesan non verbal dengan memberi teladan dengan selalu bersepeda dari Pendopo Walikota Bandung ke Balai Kota Bandung sekitar 3.5 km. Emil juga sering jalan kaki menuju tempat acara dari Balaikota atau Pen-dopo Kota Bandung.

Pesan agar membiasakan diri berjalan kaki ini disimbolkan dengan membangun skywalk di kawasan Cihampels Kota Bandung. Kawasan Cihampelas yang masih asri dengan pepohonan yang berusia ratusan tahun memang nyaman bagi pejalan kaki. Selain itu, untuk menata trotoar agar kembali pada fungsinya, dan memindahkan PKL ke skywalk.

Skywalk menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary adalah A covered overhead walkway be-tween buildings. (2000:1257) Istilah skywalk belum diserap dalam Bahasa Indonesia, karena itu pemerintah Kota Bandung memberi padan kata skywalk dengan kata Teras Cihampelas. Teras Cihampelas merupakan sebuah bangunan berupa jembatan dengan kerangka baja berada di atas ketinggian 4.6 meter dari permukaan jalan Jalan Cimapelas. Panjang Skywalk 450 meter denga lebar 7,6 meter. Pembangunan skywalk disebut ramah lingkungan karena tiang-tiangnya berdiri tegak ber-jajar tanpa menebang pepohonan besar yang berada di sebelah kanan dan kiri ruas jalan Cihampelas.

Emil yang pernah tinggal di Hongkong mempengaruhi pemikirannya ketika mendesain skywalk. Emil mengaku tertarik dengan skywalk di Hongkong memberi ruang yang leluasa bagi pejalan kaki tanpa terganggu oleh kendaran bermotor. Emil memberi sentuhan beda dengan skywalk di Hongkong, pasalnya Emil ingin menambah fungsi skywalk bukan hanya untuk jembatan udara un-tuk pejalan kaki, namun juga

ruang bagi PKL sebagai upaya untuk relokasi PKL yang menguasi trotoar di Jalan Cihampelas.

Pemikiran Emil ini juga mempertimbangkan kondisi pedagang kaki lima di Cihampelas yang susah dipindahkan atau direlokasi ke tempat lain, dengan alasan rezeki usahanya berada di Cihampelas, sekaligus mengurai kemacetan lalu lintas di Jalan Cihampelas. Gagasan Emil merupakan hasil in-teraksi antara dirinya sebagai pribumi Bandung, pemikirannya dan kondisi riil di Cihampelas. Pemikirannya yang berbasis pada ilmu arsitek yang ditekuni selama di ITB serta pengetahuannya tentang urban design di University of California dalam menata Cihampelas.

Skywalk di Bandung menjadi solusi tanpa menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Guna mewujudkan skywalk, Emil terlebih dahulu menjalin berkomunikasi dengan para PKL, agar mereka bersedia direlokasi dari trotoar di sepanjang pertokoan di Cihampelas ke skywalk. Komunikasi yang intens juga dilakukan dengan masyarakat Cihampelas melalui jaringan kewilayahan Camat, Lurah, RW dan RT di Cihampelas.

Pembangunan skywalk yang menelan dana anggaran pedapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 48 miliar ini merupakan bagian rencana Pemkot Bandung, yang tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bandung tahun 2015 hingga 2035. Ridwan Kamil mendisain skywalk dengan tiga zona, yaitu zona kuliner, zona souvenir dan zona taman, serta memiliki fasilitas, 1 buah lift, 3 buah toilet dan satu musholah, dan fasilitas untuk penyandang disa-bilitas. Tersedia juga 192 kios PKL, yang diharapkan mampu menampung pengusaha kecil yang sebelumnya berada di sepanjang Jalan Cihampelas.

Emil juga berkomunikasi secara intens dengan wakil rakyat Kota Bandung sebagai langkah politis, guna mendapat dukungan politik. Komunikasi dengan wakil rakyat ini bukan hal yang mudah, ka-rena sudut pandang dalam memaknai skywalk sangat beragam. Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suwandaru, memaknai skywalk sebagai pembangunan yang berlebihan bila tujuannya untuk merelokasi PKL di sepanjang jalan Cihampelas. Komisi C DPRD Kota Bandung menyoroti pem-bangunan skywalk pada ketepatan waktu dalam pembangunan. Perbedaan dalam memaknai skywalk di ruang DPRD ini berhasil diselesaikan oleh Ridwan Kamil

berserta jajarannya. Palu persetujuan pembangunan skywalk pun diketok, sebagai momen mewujudkan gagasan baru bagi masyarakat Kota Bandung.

Ridwan Kamil juga secara aktif mengkomunikasikan skywalk melalui media sosial facebook dan instragram, dari saat rencana, pelaksanaan pembagunan hingga selesainya pembangunan skywalk dan menunggu peresmian. Akun facebook dan Instagram Ridwan Kamil direspon positif oleh para pengikutnya (follower) di media sosial. Selain itu, Ridwan Kamil juga mendapat dukungan dari Ba-gian Humas Kota Bandung yang terus menerus mengkomunikasikan skywalk melalui media massa baik cetak, radio dan televisi.

Alhasil, Skywalk yang sebagai simbol ruang bagi pejalan kaki ternyata dimaknai masyarakat melebihi harapan Walikota Bandung. Masyarakat Kota Bandung dan wisatawan domestik maupun manca negara memaknai skywalk bukan sekedar ruang untuk jalan kaki, namun sebagai tempat tujuan wisata baru. Jumlah pengunjung Teras Cihampels sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2017 tidak pernah sepi pengunjung.

Skywalk dinominasikan mendapat anugerah pesona Indonesia 2017 sebagai tepat tujuan wisata baru di negeri ini yang disejajarkan dengan 9 tempat wisata alam di Indonesia. Kini pemerintah Kota Bandung tengah mempersiapkan skywalk untuk mengikuti penilain sebagai distinasi wisata baru yang akna diumumkan pada November 2017. Uniknya skywalk disandingkan dengan wisata alam yakni: Danau Linow–Kota Tomohon, Danau Love–Kabupaten Jayapura, Danau Ugo–Kabupaten Batanghari, Kawasan Pura Batu Kursi–Kabupaten Buleleng, Pantai Mbawana – Kabupaten Sumba Barat Daya, Pulau Bokori – Kabupaten Konawe, Pulau Hatta–Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Kumala–Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Taman Breksi–Kabupaten Sleman.

Pesan Emil menjadi tidak efektif ketika skywalk dikaitakn dengan penyelesaian kemacetan lalu lintas dan tidak adanya lokasi parkir kendaraan, karena keterbatasan anggaran, sehingga pem-bangunan skywalk dibuat secara bertahap. Skywalk tahap kedua akan dilengkapi dengan gedung parkir yang luas dan skywalk diperpanjang hingga menjembatani antara Jalan Cihampelas dengan Taman Sari, kawasan ITB Bandung. Hanya saja, Ridwan Kamil sudah tidak mencalonkan menjadi Walikota

Bandung periode kedua. Teka-teki pun merebak, apakah skywalk akan berlanjut, atau tetap dengan skywalk tahap satu yang masih menyisahkan kemacetan dan ruang parkir yang tidak beraturan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi Walikota Bandung Ridwan Kamil dalam membangun skywalk di kawasan Cihampelas cukup efektif sehingga masyarakat memaknai melebihi tujuan utama pembangunan. Masyarakat memaknai skywalk bukan sekedar tempat untuk pejalan kaki yang nyaman dan aman namun juga sebagai lokasi wisata baru di Kota Bandung.Komunikasi dalam bentuk simbol skywalk juga berhasil dalam merelokasi pedagang kaki lima yang sudah lama menguasai trotoar Jalan Cihampelas. Pedagang kaki lima bersedia pindah lokasi penjualan tanpa reaksi bahkan pedagang kaki lima merasa senang mendapat lokasi baru yang selalu dipadati pengunjung.

Ridwan Kamil mengkomunikasikan agar menggunakan sepeda atau angkutan umum berupa angku-tan kota dan bus untuk mobilitas masih belum efektif, terlihat dari masih banyaknya pengunjung skywalk yang menggunakan kendaraan pribadi dan parkir di ruas jalan sepanjang Cihampelas. Pemerintah Kota Bandung juga belum menyediakan lapangan parkir yang mencukupi, sehingga parkir kendaraan pribadi menghalangi lalu lintas kendaraan di Cihampelas

Pembangunan skywalk yang juga bertujuan mengurai kemacetan juga belum efektif dikomunikasi-kan karena ruang jalan di Cihampelss masih macet akibat dari banyaknya pengunjung yang lalu la-lang di ruang jalan Cihampelas dan banyak kendaraan yang parkir di depan pertokoan bahkan dipinggir Jalan Cihampelas. Kemcetan lalu lintas bukan hanya di Jalan Cihampelas namun juga berdampak pada ruas jalan lainnya yakni di Jalan Cipaganti dan Jalan Sukajadi di Kota Bandung.

Pembangunan tempat parkir kendaraan masih menunggu pembagunan skywalk tahap kedua yang menyambung ke daerah Taman Sari di kawasan Kampus ITB. Ada kekhawatiran proyek skywalk tahap kedua tidak direalisasi karena Ridwan Kamil sudah tidak mencalonkan lagi menjadi walikota, sehingga kemacetan lalu lintas semakin tidak terhindarkan dengan semakin banyaknya wisatawan yang mengunjungi skywalk.

Masyarakat perlu mendorong agar walikota terpilih yang menggantikan Ridwan Kamil melajutkan proyek skywalk.(*)

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W, Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, 2012, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Colendrander, Lutfi, Ridwan Kamil, Sang Arsitek and bandung Eemerging Creative City, 2015, Salaris, Jakarta.

Denzim, Norman K, dan Yvonna S Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 2009, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Elbadiansyah, Umiarso, Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern, 2014, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.

Fashri, Faisal, Piere Bourdieu : Menyingkap Kuasa Simbol, 2014, Jalasutra, Yogyakarta.

Littlejohn, Stephen W dan Karen A Foss, Teori Komunikasi, Theories of Human Communication, 2008, Salemba Humanika, Jakarta.

Hardiman, F Budi, Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas, 2009, Kanisius, Yogyakarta.

Mulyana, Deddy, Komunikasi Efektif, Suatu pendekatan Lintasbudaya, 2008, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

Mulyana, Deddy, Prof, Phd, MA, dan Solatun, Dr, MSi, Metode Penelitian Komunikasi, Contoh- contoh penelitian Kualitatif dengan pendekatan praktis, 2008, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Syam, Nina Winangsih, Sosiologi Komunikasi, 2009, Humaniora, Bandung.

Ruben, Brent D dan Lea Stewart, Komunikasi dan Perilaku Manusia, 2014, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tubss, Steward L, dan Sylvia Moss, Human Communication, Konteks-Konteks Komunikasi, 2005, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

POLA KOMUNIKASI MULTIKULTURAL ETNIS LOKAL DAN ETNIS TIONGHOA DIKALANGAN MAHASISWA KOTA PALEMBANG

Rahma Santhi Zinaida dan Sery Soesanto T
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma
E-mail: rahmasanthi@binadarma.ac.id

Abstrak : Ketika etnis Tionghoa dan etnis Pribumi berkomunikasi mereka termasuk ke dalam komunikasi antarbudaya. Latar belakang penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi antarbudaya etnis Tionghoa dan etnis pribumi dikalangan mahasiswa. Kesalahpahaman akan trauma masa lalu, doktirin orangtua, yang memberikan jarak ketika berinteraksi. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana komunikasi antarbudaya etnis Tionghoa dan etnis Pribumi dikalangan mahasiswa? bertujuan untuk mengetahui komunikasi antarbudaya etnis Tionghoa dan etnis Pribumi dikalangan mahasiswa. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i di salah satu kampus di kota Palembang. Untuk mendapatkan hasil data tersebut, peneliti menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa benar ada trauma masa lalu, doktrin orangtua yang membuat kesenjangan terjadi yang berakhir pada interaksi yang kurang baik. Interaksi yang kurang baik disebabkan adanya hambatan didalam komunikasi antarbudaya, menjadikan antar etnis saling menjaga jarak. Tetapi tidak semua memiliki perspektif yang tidak baik terhadap satu etnis. Melainkan pemaknaan simbol akan memberikan sudut pandang yang baik terhadap interaksi antarbudaya.

***Kata Kunci** : Komunikasi Antarbudaya, Interaksi, Simbol*

PENDAHULUAN

Manusia menggunakan bahasa dan simbol dalam berkomunikasi, tanpa adanya komunikasi suatu etnis tidak akan terbentuk, dan pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya tidak akan terjadi serta tidak akan ditemukan interaksi antarmanusia. Sehingga secara bersama-sama, manusia menciptakan alat-alat bahasa, simbol yang menganut nilai-nilai yang memberikan kemudahaan dalam merealisasikan kehidupan. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Arifin (2009), kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni

zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Dalam perkembangannya kebudayaan Tionghoa semakin menjadi sebuah kebudayaan yang diakui oleh pemerintah dan juga etnis pribumi.

Tionghoa merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia. Kata Tionghoa merupakan dialek dari bahasa Hokkien yaitu zhonghua yang berarti 'Bangsa Tengah'. Kata Tionghoa merujuk pada orang-orang keturunan Cina yang tinggal di luar Republik Rakyat China. Sejarah mengatakan tidak ada negara yang disebut Indonesia atau Malaysia maupun Singapura, masing-masing dari ketiga wilayah tersebut menjadi kesatuan wilayah ekonomi dan budaya. Ketika orang Cina yang ingin datang (merantau) ke wilayah tersebut maka mereka menyebutnya dengan satu istilah yaitu xia nan yang (bahasa mandarin) yang memiliki arti, "turun ke laut selatan" (Pratiwi: 2012).

Etnis Palembang adalah etnis pribumi yang terlebih dahulu tinggal di suatu daerah asal tersebut, sebagai etnis pribumi ketika etnis asing yang datang dengan tujuan untuk berdagang ataupun untuk menetap etnis pribumi pasti akan memiliki persepsi atau pemikiran positif dan negatif. Tidak semua etnis pribumi selalu berpikir buruk, tetapi sebagian mereka menganggap bahwa disini tempat saya dan tidak bisa melakukan sesuka yang anda inginkan. Ada hal yang menarik terjadi pada antarbudaya etnis Tionghoa dan etnis pribumi, yaitu adanya pandangan negatif terhadap etnis Tionghoa dan juga sebaliknya.

Etnis Tionghoa merupakan etnis yang sering menjadi diskriminasi, kambing hitam, serta dihina. Tidak hanya etnis pribumi saja yang menghina, tetapi juga sebaliknya etnis Tionghoa mempersepsikannya hampir sama. Adanya pandangan yang negatif membuat interaksi pada proses komunikasi memiliki jurang pemisah antara kedua budaya ini.

Menurut pengamatan penulis sementara, bahwa komunikasi dari etnis Tionghoa dan etnis pribumi terutama dikalangan mahasiswa sering terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang berpengaruh terhadap interaksi diantara etnis Tionghoa dan etnis pribumi, atau dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, apakah diantara etnis Tionghoa dan etnis pribumi yang berbeda budaya sering menggunakan bahasa yang tidak dapat dimengerti, dan itu yang membuat sebuah interaksi dari etnis

Tionghoa dan etnis pribumi tidak efektif. Dimana seharusnya manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam kehidupan untuk menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Bagaimanakah komunikasi dalam berinteraksi antarbudaya yang sedang terjadi tersebut? Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti akan kebenaran tersebut serta dalam penelitian ini peneliti akan memberikan pemahaman atas kesalahpaham dalam berkomunikasi yang berpengaruh terhadap interaksi, pemahaman tersebut berguna untuk mengurangi persepsi negatif yang terjadi antarbudaya. Sehingga terciptanya interaksi antarbudaya yang harmonis, damai, serta kesejahteraan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebudayaan itu terbentuk karena perilaku manusia, perilaku tersebut merupakan hasil dari persepsi manusia terhadap dunia. Pesepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang menilai sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pengertian ialah bagaimana seseorang memandang dna mengartikan sesuatu. Hubungan budaya dan komunikasi sangat penting dipahami, untuk mengerti komunikasi antarbudaya. Sebab, karena budayalah banyak orang-orang belajar berkomunikasi. Hubungan komunikasi dengan budaya bersifat timbal balik dan keduanya saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Komunikasi yang disampaikan tidak hanya lisan dan tulisan tetapi juga dengan bahasa tubuh, gaya maupun penampilan diri.

Komunikasi antarbudaya terjadi apabila komunikan dan komunikator berasal dari kebudayaan yang berbeda. Komunikasi kebudayaan (*intercultural communications*) yaitu proses komunikasi antar satu orang dengan orang lain bahkan lebih yang berbeda budaya, berbeda ras, etnik, serta bahasa. Komunikasi antarbudaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi, apa makna pesan verbal dan nonverbal menurut budaya-budaya bersangkutan, apa yang layak dikomunikasikan dan bagaimana cara mengkomunikasikanya.

Karakteristik Komunikasi Antarbudaya

Menurut Mulyana (2010: 58), adapun beberapa karakteristik didalam komunikasi antarbudaya antara lain:

a. **Komunikasi dan Bahasa**: Sistem komunikasi verbal dan non verbal, membedakan suatu kelompok dari kelompok lainya. Terdapat banyak "bahasa asing" didunia, sejumlah bahasa komunikasi dalam verbal memiliki lima belas macam atau lebih bahasa utama contohnya: dialek, aksen, logat, jargon, dan lainnya dan komunikasi non verbal seperti gerak-gerik, simbol-simbol, dan bahasa non verbal lainya.
b. **Pakaian dan Penampilan**: dalam hal ini bisa dilihat dengan indera penglihatan secara langsung, pada saat menggunakan baju adat suatu daerah bahkan negara kita bisa mengetahui langsung dari mana asal mereka, jenis pernak-pernik, dan lain-lain.
c. **Makanan dan Kebiasaan**: cara menyiapkan, menyajikan, dan memakan makanan sering berbeda antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, orang Amerika menyukai daging sapi, tetapi daging sapi terlarang bagi orang Hindu. Cara memakannya juga berbeda ada yang menggunakan tanggan saja, ada yang menggunakan sumpit atau seperangkat alat makan yang lengkap.
d. **Waktu dan Kesadaran akan waktu**: Kesadaran akan waktu berbeda antara budaya yang satu dengan budaya lainya. Sebagian orang tepat waktu, dan sebagian orang merelatifkan waktunya. Contohnya, orang Jerman tepat waktu, sedangkan orang Amerika Latin lebih santai. Dibeberapa negeri bahwa orang-orang bawahan diharapkan datang tepat pada waktunya ketika menghadiri rapat staff, tetapi bos adalah orang yang terakhir tiba.
e. **Nilai dan Norma**: sebagaimana prioritas-prioritas yang melekat pada perilaku tertentu dalam kelompok.
f. **Rasa Diri dan Ruang**: kenyamanan yang orang miliki dengan dirinya diekspresikan secara berbeda oleh budaya. Beberapa budaya sangat tertutup dan menentukan tempat seseorang secara persis, sementara budaya-budaya lain lebih terbuka dan berubah.
g. **Proses Mental dan Belajar**: beberapa budaya menekankan aspek pengembangan otak ketimbang aspek lainnya sehingga orang dapat mengalamai perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam cara orang berpikir dan belajar.
h. **Kepercayaan dan Sikap**

Kepercayaan secara umum dapat dipandang sebagai kemungkinan yang diyakini oleh individu. Kepercayaan yang dianut akan menentukan sikap dari diri orang tersebut.

Dari karakteristik yang telah diuraikan diatas merupakan suatu model yang sederhana untuk mengetahui dan menilai suatu budaya, dari karakteristik yang terkait dalam penelitian ini adalah komunikasi dan bahasa, pakaian dan penampilan, nilai dan norma, rasa diri dan ruang, serta kepercayaan dan sikap.

Hambatan Komunikasi Antarbudaya

Dalam Mulyana dan Rakhmat (2010: 75), mempelajari komunikasi antarbudaya ada beberapa hambatan yang sering dijumpai, yaitu :

1. Prasangka Sosial

   Prasangka sosial merupakan suatu sikap yang sangat negatif, yang diarahkan kepada kelompok tertentu dan lebih difokuskan kepada suatu ciri-ciri negatif pada kelompok tersebut.

2. Etnosentrisme

   Dalam sikap etnosentrisme setiap kelompok budaya merasa arah pemikiran tentang budaya yang dianut lebih baik daripada arah pemikiran kelompok budaya lainnya, sehingga meremehkan budaya kelompok lain dan memutlakkan kebudayaan sendiri.

3. Stereotype

   Etnosentrisme sangat dekat dan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan apa yang disebut dengan Stereotype atau stereotip. Stereotype adalah generalisasi tentang sikap, keyakinan, atau opini tentang irang yang berasal dari budaya yang berbeda. Pelaku stereotype adalah seseorang yang memiliki informasi sangat sedikit tentang budaya lain, yang didasarkan fakta dan fiksi tentang orang dari budaya tertentu, seringkali memiliki konsepsi yang terlalu sederhana, kaku dan tidak akurat. Ketidakakuratan itu terjadi karena overgeneralisasi dari pengalaman yang dialami seseorang (Kusherdyana, 2011: 70).

Dimensi-Dimensi Komunikasi Antarbudaya

Menurut Kim (1984: 17-20) dalam Lubis (2002), ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan pada pemahaman tentang kebudayaan konteks dalam penelitian komunikasi antarbudaya antara lain:

1. Tingkat etnis kelompok budaya dari partisipan

   Yang dimaksudkan adalah bahwa istilah kebudayaan yang meruju pada macam-macam tingkat lingkup dan kompleksitas dari organisasi sosial.

2. Konteks sosial

   Dimensi yang kedua, komunikasi dalam konteks sosial yang dimaksud adalah dalam dasar proses komunikasi menyangkut penyampaian, penerimaan dan proses komunikasi. Adanya pengaruh dalam latar belakang pengalaman individu dalam pola-pola persepsi pemikiran, penggunaan bahasa verbal dan non verbal.

3. Saluran dalam penyampaian pesan-pesan baik itu bersifat verbal maupun non verbal meliputi saluran media massa dan antarpribadi dari orang-orang yang berbeda budaya.

Teori Interaksi Simbolik

Menurut Mulyana (2010: 59) interaksi simbolik adalah salah satu model penelitian budaya yang berusaha mengungkapkan realitas perilaku menusia. Falsafah dasar interaksi (interaksionisme) simbolik adalah fenomenologi. Teori interaksi simbolik pertama kali dipelopori oleh George Herbert Mead (1863-1931) di Amerika.

Etnis Pribumi

Menurut Abdillah (2002: 108), mengatakan bahwa orang sering mengidentifikasikan diri mereka pada suatu fakta atau wilayah atas klaim-klaim dari mana etnis pribumi berasal. Klaim yang dimaksud adalah sejarah atas nenek moyang dan warisan dari kebudayaan. Native atau pribumi mengacu pada perorangan atau kelompok yang mengklaim diri sebagai orang penduduk asli suatu daerah atau wilayah tertentu (indigenous people). Kata pribumi (Abdillah, 2002: 109) muncul dikarenakan adanya interaksi dengan orang luar yaitu orang non pribumi, serta kata pribumi juga muncul setelah adanya faktor dari perorangan atau sekelompok orang bermigrasi.

Etnis Pribumi adalah kelompok etnis yang mempunyai daerah mereka sendiri (Suryadinata, 1986: xxii). Bahwa pribumi sama dengan istilah bumiputera yang banyak digunakan padanannya sebelum perang, tetapi sekarang tak pernah terdengar digunakan kecuali sebagai nama perusahaan asuransi. Maksudnya ialah penduduk asli di suatu daerah. Pengertian asli di Indonesia sebenarnya agak sulit dirumuskan, mengingat menurut para ahli, penduduk kepulauan Nusantara ini semuanya juga berasal dari daratan Asia yang datang bermigrasi beberapa ribu tahun yang lalu.

Etnis Tionghoa

Pada abad ke-7 yaitu pada tahun 414 M, orang China yang datang ke Indonesia bernama Fa Xian seorang biksu Buddha yang dimana dalam perjalananya dari India ke China yang berlayar melalui rute laut, namun dalam perjalanya kapal Fa Xian hanyut dan singgah di Yapoti (Jawa), kemudian fan Xian merantau lima bulan disana. Akhir abad 9 yaitu pada dinasti Tan orang China bermigrasi dengan tujuan untuk berdagang dan menetap di Indonesia yaitu di pulau Jawa. Etnis Tionghoa perantauan (Overseas Chines) selama kurang lebih 600 tahun telah tersebar di Asia Tenggara. Mereka banyak masuk ke daerah-daerah di Asia Tenggara terutama pada masa-masa negara-negara di Asia Tenggara ketika masih diperintah oleh raja-raja dari pemerintahan asli.

Menurut Iskan (2009), ketika orang Cina pergi ke “nan yang”, maka yang akan kita tanyakan ke mana? Xia nan yang bukanlah menunjukan suatu tempat tertentu atau suatu nama kesatuan daerah tertentu. Tetapi ketika mereka menyebut xia nan yang kemana? barulah menunjukan satu nama tempat yang lebih spesifik, misalnya, ke Ji Gang (maksudnya Palembang). Pada saat itu mereka belum tahu nama Palembang itu sendiri, tapi nama Ji Gang terkenalnya sekali pada masa tersebut. Karena Ji Gang (artinya pulau besar) dimana pulau besar adalah tempat tujuan utama bagi negara manapun termasuk orang Tionghoa yang cocok untuk berdagang.

Tidak hanya di Ji Gang (Palembang) saja tetapi juga ada beberapa tempat yang mereka sebut dengan istilah mereka pada saat itu dengan menggunakan bahasa mandarin antara lain: Mereka memilih ke San Bao Long yang bearti Semarang, Singkawang yang disebut dengan istilah mandarinya San Guo Yang, Yen Chen yang berarti Jakarta dan Wan Long yang maksudnya Bandung.

Mereka memberi istilah tersebut karena pada saat itu orang asli Tionghoa tidak tahu nama asli dari tempat-tempat tersebut dan juga mempermudah mereka untuk menjawab pada saat ditanya mau kemana? Tanpa harus selalu menunjukan dan menjelaskan. Migrasi selalu meningkat dari tahun ke tahun, bahkan sudah banyak orang Tionghoa sudah tinggal ratusan tahun di wilayah xia nan yang, ada juga yang puluhan tahun. Pada waktu kedatangan orang Tionghoa yang datang tidak bersamaan itu membuat mereka membedakan antara orang Tionghoa satu dengan yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Tylor mengatakan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong 2000: 3). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi lapangan (Field Research) dengan teknik pengumpulan data dari Wawancara

Abdurrahman dan Muhidin (2011: 89), mengemukakan bahwa teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (personal face to face interview) dengan sumber data (responden) dan Observasi yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap subjek yang diteliti (Abdurrahaman dan Muhidin2011: 85). Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa dan mahasiswi etnis Tionghoa dan mahasiswa pribumi pada program studi Akuntansi di STIE-Musi Palembang, yang beralamat Jl. Bangau 60 RT.18C RW. 007 Kelurahan Ilir, Ilir Timur II, Palembang 30113, Sumatera Selatan.

PEMBAHASAN

Interaksi Antar Etnis Tionghoa dan Etnis Pribumi dikalangan Mahasiswa

Dalam proses interaksi hambatan yang terjadi pada komunikasi antarbudaya dikalangan mahasiswa adanya sebagian etnis Tionghoa yang masih mengkonsep dirinya bahwa mereka adalah orang Cina (Tionghoa) membuat mereka sedikit sulit untuk bergaul, maupun berinteraksi dengan etnis Pribumi, banyak faktor yang menghambat

terjadinya interaksi mereka. Antaralain konsep waktu mengenai masa lalu, dimana etnis Tionghoa menjadi bulan-bulan massa pada saat kejadian di tahun 1998 (krisis ekonomi), menjadikan etnis Tionghoa truma untuk berbaur maupun berteman dengan etnis Pribumi, interaksi yang terjalin dari hasil observasi adalah mereka lebih terlihat adanya jarak, pola pikir yang kurang baik ketika berinteraksi.

Dimana pada masa lalu yang membuat semua etnis Tionghoa trauma pada kejadian krisis ekonomi yang melanda, yang membuat etnis Tionghoa memiliki persepsi bahwa semua etnis Pribumi jahat, namun saat ini setiap manusia saling membutuhan dan berkerjasama satu dengan yang lainnya menjadikan kesenjangan sosial itu sendiri tidak terlihat dengan sangat jelas memberikan sebuah kontribusi dan toleransi-toleransi yang dimana etnis tionghoa dan etnis Pribumi saling membutuhkan, dan saling mengisi satu sama yang lainnya.

Kesenjangan memberikan batasan-batasan ketika berinteraksi, doktrin dari orangtua juga merupakan salah satu faktor terjadinya kesenjangan dimana perbedaan tersebut masuk kedalam nilai-nilai, perilaku, adat istiadat serta agama yang lebih menggambarkan memiliki sedikit kesulitan berinteraksi. Merujuk kepada ketidakpahaman terhadap suatu budaya dengan orang yag berbeda budaya dan berbeda pengalaman.

Disisi lain tidak semua orang dan tidak semua masyarakat di Palembang yang berbeda budaya memiliki pemikiran yang kurang baik kepada orang yang berbeda budaya. Tidak dipungkiri setiap interaksi maupun komunikasi pasti akan ada kesalahpahaman yang menimbulkan sebuah interaksi yang tidak baik, bahkan interaksi yang sering dihindari. Kesalahpahaman yang selalu ada tanpa dipahami, dipelajari, dan dihormati, akan sering menimbulkan ancaman dan ketidak nyamanan bagi siapapun. Semua orang menginginkan kedamai, tanpa ada kecemasan yang berlebihan dari pihak yang terdiskriminasi oleh pihak manapun.

Semakin pintarnya orang-orang dalam pemahamannya, semakin bijak dalam penerapan komunikasi antarbudaya, menjadikan budaya satu dengan yang lainnya yang bisa dihormati, dan dihargai antara satu dengan lainnya, contohnya ketika berjalan di Lingkaran tepatnya di jalan Semeru 17 Ilir akan terlihat tiga tempat ibadah yang berbeda latarbelakang dibangun dalam satu jalan sebagai berikut:

Prasangka Sosial

Liliweri dalam Kusherdyana (2011: 72), mengemukakan bahwa prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat dalam melakukan komunikasi, karena orang yang berprasangka sebelum memulai komunikasi lebih dulu memiliki prasangka yang negatif, menentang ketika komunikator pada saat berkomunikasi. Dari hasil wawancara pembentukan prasangka yang negatif akan memberikan dampak yang negatif terhadap interaksi.

Dalam Prasangka, emosi memaksa seseorang untuk menarik kesimpulan atas dasar syakwasangka, tanpa menggunakan pikiran dan pandang terhadap fakta yang nyata. Seringkali prasangka berkenaan dengan ketidaktoleransian atau permusuhan tehadap orang-orang dari ras, agama dan kelompok tertentu (Kusherdyana, 2011: 72).

Etnosentrisme budaya Tionghoa dan pribumi

Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk melihat dunia melalui filter budaya sendiri. sering dipandang negatif, etnosentrisme memilki kecenderungan untuk menilai orang dari kelompok, masyarakat atau gaya hidup yang lainnya seringkali melihat kelompok tersebut sebagai inferior (lebih rendah). Masing-masing budaya akan saling menolak, merendahkan, dan membenarkan budayanya sendiri, sehingga sangat berpotensi terjadinya konflik dalam (Kushedyana, 2011: 70).

Ada sebagian etnis Pribumi yang cenderung menilai budaya etnis Tionghoa sebagai budaya yang “vulgar”, kasar, tidak tahu sopan santun, perkataannya asal tanpa melihat atau menjaga perasaan etnis Pribumi. Budaya etnis Pribumi sebagai budaya yang paling baik, unggul, dan paling bermoral. Jadi terkadang etnis Pribumi membatasi komunikasi dengan etnis Tionghoa (Kushedyana, 2011: 70).

Ada sebagian etnis Pribumi yang cenderung menilai budaya etnis Tionghoa sebagai budaya yang “vulgar”, kasar, tidak tahu sopan santun, perkataannya asal tanpa melihat atau menjaga perasaan etnis Pribumi. Budaya etnis Pribumi sebagai budaya yang paling baik, unggul, dan paling bermoral. Jadi terkadang etnis Pribumi membatasi komunikasi dengan etnis Tionghoa begitu juga sebaliknya (Kushedyana, 2011: 70).

Stereotype

Etnosentrisme sangat dekat dengan Stereotype dan tidak dapat dipisahkan. Stereotype merupakan generalisasi tentang sikap, keyakinan, maupun opini tentang orang yang berasal dari budaya yang bebeda. Stereotype bisa didasarkan atas fakta atau non fakta tentang orang dari budaya tertentu, tetapi seringkali menjadikan konsepsi yang terlalu sederhana, kaku dan tidak akurat. Ketidakakuratan ini terjadi karena overgeneralisasi dari pengalaman yang dialamai atau tentang informasi yang masuk sangat sedikit Kushedyana (2011: 70).

Salah satu contoh yang diungkapkan Frankowskin-Braganza (1983) yang dikutip Reisinger (2009:239) dalam Kushedyana (2011: 71) Stereotype memiliki positif dan negatif antara lain: "semua orang kulit putih sukses, semua orang Jepang dan Cina pekerja keras, kalem, dan berorientasi prestasi". Contoh yang negatif adalah "semua orang kulit putih rasis, semua orang Asia tidak bisa terus terang, distereotypekan bahwa orang Cina kaya, berbicara keras (gaduh)". Contoh lainnya adalah kita melakukan persepsi stereotype terhadap orang Padang bahwa orang Padang itu pelit. Lewat stereotype itu maka kita cenderung akan memperlakukan semua orang Padang sebagai orang yang pelit tanpa memandang pribadi atau keunikan masing-masing individu.

KESIMPULAN

Proses menghilangkan hambatan komunikasi antarbudaya etnosentrisme dan stereotype adalah suatu hal yang sulit, karena sejak lahir kita telah menginternalisasi baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Namun sesulit apapun orang-orang akan selalu berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya karena suatu kepentingan ataupun keharusan untuk berinteraksi, caranya berusaha semaksimal mungkin menghindari interpretasi (mengartikan) yang salah agar tidak menimbulkan konflik yang tak kunjung selesai.Terdapat Maha Vihara Matreya Duta tempat ibadah umat Tionghoa beragama Buddha, ada juga Masjid Sabililhaq merupakan tempat beribadah umat Muslim, serta Gerja Fukimthong tempat ibadah etnis Tionghoa yang beragama Kristen dalam satu jalan yang sama, bersebelahan dan tidak saling mengganggu satu sama lain.

Dari ke-tiga tempat ibadah yang berbeda ajaran ini, terhadap umatnya tetapi tetap memiliki satu tujuan yang sama mengajarkan kebaikan. Membuktikan bahwa

antar etnis yang terjadi di Palembang harmonis, yang saling memahami, menghargai setiap ibadah dan setiap kegiatan antara satu dengan yang lainnya. Tidak akan ada lagi diskriminasi yang merugikan di salah satu etnis. Memahami kesalapahaman karena ketidakpahaman terhadap kebudayaan yang lain akan membuat hidup menjadi damai.

Dari hasil wawancara dan observasi, simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, mengenai komunikasi antarbudaya etnis Tionghoa dan etnis Pribumi dikalangan mahasiswa, hambatan yang terlihat karena perbedaan dan pemaknaan bahasa. Sehingga berpengaruh pada ke-efektifitasan penyampaian pesan komunikasi. Pada salah kasus di STIE-Musi peneliti melihat usaha dari mahasiwa/i yang berbeda budaya untuk mengurangi kesalahpahaman (miss communication) pemaknaan dengan mengoptimalkan kekuatan komunikasi nonverbal mereka yang menunjang komunikasi yang efektif. Simbolik lebih menekankan perilaku manusia pada hubungan interpersonal antar etnis Tionghoa dan etnis Pribumi. Ketika simbol yang diartikan positif, maka akan menghasilkan interaksi yang positif juga.

Adanya kesenjangan ketika etnis Tionghoa dan etnis Pribumi berinteraksi yang disebabkan trauma masa lalu, doktrin orangtua, yang mengakibatkan pada etnosentrisme, serta stereotype. Menjadi hambatan yang berpengaruh kepada interaksi etnis Tionghoa dan etnis Pribumi sehingga menimbulkan feedback yang diterima menjadi kurang optimal.

Manusia tidak dapat dikatakan berinteraksi kalau tidak berkomunikasi. Terlihat bahwa interaksi antarbudaya yang efektif tergantung dari proses komunikasi antarbudaya tersebut. Komunikator, komunikan, pesan dan feedback, merupakan komponen penting ketika kita berkomunikasi. Apabila salah satu dari komponen tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka pesan dan hasilnya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan. Disini komunikasi nonverbal membantu keberhasilan komunikasi yang sifatnya berupa pemaknaan dari pesan yang disampaikan komunikator pada komunikan dalam bentuk simbol.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Ubed. 2002. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Yayasan Indonesiatera.

Abdurrahaman, Maman dan Ali Muhdin Sambas. 2011. Panduan Praktis Memahami Penelitian. Bandung: CV Pustaka Setia.

Kusherdyana. 2011. Pemahaman Lintas Budaya dalam Konteks Pariwisata dan Hospitalitas. Bandung: Alfabeta

Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. PT Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Dedy dan Rakhmat Jalaluddin. 2010. Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____ Dedy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Suryadinata, Leo. 1986. Dilema Minoritas Tionghoa. PT. Jakarta Pusat: Grafiti Pers.

Jurnal :

Lubis, Lusiana Andriani. 2002. *Komunikasi Antarbudaya*. Digitized by USU Digital Library

Internet :

Arifin, Masyhuri. 2009. Definisi Kebudayaan Menurut Para Ahli. Diakses dari http://exalute.wordpress.com/2009/03/29/definisi-kebudayaan-menurut-para-ahli/ pada tanggal 14 Oktober 2016.

Iskan, Dahlan. 2009. Tionghoa, Dulu dan Sekarang. Diakses dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23488/3/Chapter%20II.pdf pada tanggal 8 Oktober 2016.

Pratiwi, Aprilianti. 2012. Konstruksi Sosial Etnis Tionghoa Palembang. Diakses dari http://blog.binadarma.ac.id/april/?p=25 pada tanggal 1 November 2016

Rosidi, Ajib. 2010. "Pribumi" — Apa Artinya?. Diakses dari http://rubrikbahasa. com/2010/10/30/pribumi-apa-artinya/ pada tanggal 2 Oktober 2016.

PENGARUH RADIO DAN TELEVISI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENJAGAAN LINGKUNGAN DAN ALAM SEKITAR BAGI TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dr. Ratu Mutialela Caropeboka
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma
Email : mutialela@binadarma.ac.id

Abstract : Environment also called as the surrounding natural environment is a phenomenon that exists all around than human life, both biotic or abiotic. The phenomenon around which affect humans are not limited to the purely physical factors, social factors helped reverse an important role to explain how human activities can affect the environment and natural surroundings. The nature and development Falasafah is a change, growth and equality in all areas and dimensions towards a better state. Communication development is a major portion of the process that requires a change in social, economic, political and cultural purposes in line with the requirements of the local community. Formula simultaneity of information dissemination is done through radio, no longer be the only option the community, because it is society has been designing and determine what information they need. Broadcast television has an effect on the pattern of community action to imitate, mimic the information obtained through impressions. Community participation protecting the environment to achieve a harmonious and balanced development is the driving and steering for social change to achieve sustainable development.

Keywords*: communication, participation, sustainable development.*

Abstrak: Lingkungan disebut juga alam sekitar adalah fenomena yang wujud di sekeliling kehidupan daripada manusia,baik biotik ataupun abiotik. Fenomena sekeliling yang mempengaruhi manusia tidak terbatas kepada faktor fisikal semata-mata, sebaliknya faktor sosial turut berperanan penting bagi menerangkan bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan dan alam sekitar. Hakikat dan Falasafah pembangunan ialah suatu perubahan, pertumbuhan dan pemerataan dalam segala bidang dan dimensinya menuju keadaan yang lebih baik. Komunikasi pembangunan merupakan bahagian dari proses besar yang menghendaki adanya perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sejalan dengan persyaratan keperluan masyarakat lokal. Formula keserentakan penyebaran informasi yang dilakukan melalui radio, tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan masyarakat, karena masyarakatlah telah merancang dan menentukan informasi apa yang mereka perlukan. Siaran televisi mempunyai pengaruh pada pola tindakan masyarakat untuk mencontoh, meniru informasi yang didapat melalui tayangan. Partisipasi masyarakat menjaga lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang serasi dan seimbang adalah penggerak dan pengarah bagi perubahan sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci *: Komunikasi ,partisipasi, pembangunan berkelanjutan .*

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik, pembangunan itu sendiri ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja dalam arti kata bahawa pembangunan yang disengaja adalah suatu pembangunan yang semula tidak ada, tetapi karena adanya suatu proses perubahan, pembangunan tersebut menjadi ada, sedangkan pembangunan yang tidak disengaja adalah pembangunan yang dikeranakan proses alam diharuskan menjadi ada.

Masalah pembangunan tidak saja dihadapi oleh

Negara-negara yang sedang berkembang , tetapi bagi negara-negara maju juga masih melakukan pembangunan , hanya penekanan pembangunan pada negara maju dan negara berkembang berbeda. Perbedaan tersebut diantaranya ialah , pada negara maju pembangunan diartikan sebagai peningkatan kemajuan di bidang teknologi dan ekonomi, sedangkan pada negara berkembang umumnya memberikan perhatian pembangunan yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di bidang ekonomi dan spiritual,walaupun pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi pada tingkat tertentu telah terpenuhi, namun sesungguhnya kondisi sosial ekonomi sebahagian masyarakatnya mengalami keterbelakangan.

Bagi mendukung lajunya pembangunan diperlukan mengerahkan segenap sumber daya dan potensi serta kekuatan yang terdapat dalam masyarakat dan daerah sebagai komponen pendukung awal dalam proses peningkatan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah tidaklah dapat bekerja sendiri, tetapi perlu dapat sokongan dan partisipasi dari seluruh kekuatan yang ada pada masyarakat supaya pembangunan yang berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.

TINJAUAN TEORITIS

Sebagai “agen pembaharu” media massa sangat berperan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam menyokong pembangunan di daerahnya. Hasil penelitian di AS, menyimpulkan bahawa 85% penduduk mendapatkan informasi terutama dari media elektronik dan surat kabar, yang terdiri dari 31% penduduk sangat tergantung dengan media televisi, dan 21% dari surat kabar, selebihnya iaitu 33% dari radio.

Diassumsikan bahawa media televisi telah menjadi sarana penting dalam kehidupan masyarakat sebagai media "pandang dengar", ianya lebih akrab dan menarik daripada media massa lainnya. Televisi mempunyai pengaruh pada pola tindakan masyarakat untuk mencontoh, meniru informasi yang didapat melalui tayangan. Namun dari berbagai media massa tersebut maka radio adalah media yang paling cepat dalam menyampaikan pesan penerangan serta dapat menjangkau seluruh pelosok, kerana dengan daya jangkau siaran yang tidak mengenal geografis , waktu siaran yang tidak terbatas, dan daya beli pun dapat terjangkau oleh masyarakat.

Lingkungan alam sekitar adalah fenomena yang wujud di sekeliling kehidupan daripada manusia, sama ada biotik ataupun abiotik. Fenomena sekeliling yang mempengaruhi manusia memang tidak terbatas kepada faktor fisikal saja, sebaliknya faktor sosial turut berperanan penting bagi menerangkan bagaimana aktivitas kemanusiaan boleh mempengaruhi alam sekitar.

Hakikat dan falsafah pembangunan ialah suatu perubahan, pertumbuhan dan pemerataan dalam segala segi dan dimensinya menuju keadaan yang lebih baik. Komunikasi pembangunan merupakan bahagian daripada proses besar yang menghendaki adanya perubahan sosial , ekonomi, politik dan budaya yang selaras dengan persyaratan keperluan masyarakat.

Membangkitkan partisipasi masyarakat yang masih rendah pendidikan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, pengenalan media ataupun pengaruh media massa adalah merupakan suatu keharusan bagi keinginan untuk merubah sikap masyarakat di pelbagai bidang. Pembaharuan yang disebarkan kepada masyarakat tidaklah dapat segera mempengaruhi pola pikir yang diterima dan dirasakan masyarakat , melainkan melalui proses dimana salah satunya adalah terpaan daripada media massa yang dapat meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan perilaku opini dalam kecepatannya menanggapi masalah-masalah aktual.

Partisipasi masyarakat menjaga lingkungan alam sekitar untuk mewujudkan pembangunan yang serasi dan seimbang adalah penggerak dan pengarah tujuan bagi perubahan sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Fenomena sekeliling yang mempengaruhi manusia tidak terbatas kepada faktor fisikal semata-mata, sebaliknya faktor sosial turut berperanan.

PERMASALAHAN:

Pembangunan selalumembawa perubahan, tentulah perubahan yang diinginkan adalah perubahan yang menuju keadaan lebih baik menurut ukuran manusia. Semua mahluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya atau dengan perkataan lain berinteraksi dengan alam sekitar dimana saling mempengaruhi lingkungan hidup dan sebaliknya dipengaruhi juga oleh lingkungannya.

Pada akhir kurun waktu abab 20 yang lalu , masalah –masalah yang berkaitan dengan alam sekitar banyak timbul sebagai akibat banyak pembangunan,manakala kesadaran ini muncul dan dibicarakan dikarenakan betapa penting pemeliharaan lingkungan alam sekitar demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri, dimana diperlukan menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam sekitar supaya terhindar dari kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi penghuni bumi. Berasaskan daripada hal tersebut maka yang menjadi persoalan adalah : Strategi apa yang dapat membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi menjaga lingkungan alam sekitar melalui dapatan informasi yang disampaikan melalui media massa iaitu radio dan televisi.

PEMBAHASAN

Wawasan dalam penyelenggarakanpembangunan nasional untuk mencapai tujuannya hingga saat ini bersumber kepadaPanca Sila, Undang-Undang 1945, Wawasan Nusantara, hal terrsebut adalah merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dengan mengutamakan penyelengaraan kehidupan dalam satu kesatuan politik , ekonomi sosial dan budaya .

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menselaraskan laju pertumbuhan antara daerah, kota, percepatan daerah tertinggal, daerah terpencil, perbatasan, yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah tersebut dalam mewujudkan suatu pola pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu

Pada model awal pembangunan ditekankan adalah perlunya suatu modal material, tetapi kemudian dalam model distribusi sosial timbul perubahan iaitu suatu kesedaran akan keadaan marginalitas yang dihasilkan oleh konsep pembangunan dengan arti pertumbuhan. Konsep tersebut sebagai perkembangan dan tinjauan dari tekanan historis mengenai hubungan antara Negara maju dan Negara berkembang, yang mana menjadi masalah ialah bukan terletak pada kuantitas pertumbuhan ekonomi, seperti yang diukur dengan persentase tingkat pertumbuhan pertahun, ataupun kualitas pertumbuhan sosial, melainkan pada kualitas dari proses pencapaian pertumbuhan itu sendiri.

Pembangunan dan ketertinggalan suatu daerah harus dilihat sebagai suatu proses yang saling berhubungan dan berterusan (interrelated and continous process), dan merupakan aspek dari suatu proses yang sudah ada dari suatu keadaan ekosistem yang original dan pembangunan itu sendiri adalah sesuatu proses perubahan sosial yang menghendaki partisipasi secara luas dari masyarakat untuk mewujudkan keadaan sosial masyarakat.

Lingkungan dan alam sekitar adalah suatu perkataan yang amat biasa digunakan oleh manusia bagi menggambarkan fenomena yang wujud disekelilingnya. Secara lebih khusus lingkungan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang merangkumi sesuatu organisme, termasuk fenomena yang berkaitan dengan iklim dan cuaca, antara fenomena sekeliling tersebut ada yang bukan fizikal ialah fenomena sosial yang meliputi suasana budaya, ekonomi mahupun politik. Dan dalam pendekatan system bila ditinjau dari bidang Geografi fisikal maka dikatakan sebagai suatu system dimana terdiri dari komponen-komponen biosfera, atmosfera , hidrosfera yang mempunyai komponen yang lebih kecil lagi dan saling berkaitan.

Baldwin, James M. mengatakan bahawa alam sekitar boleh di definisikan sebagai lingkungan dan keadaan luar keseluruhan yang memberi pengaruh serta berinteraksi dengan organisme di dalam apapun juga peringkat kedudukannya. Hal ini menjelaskan bahawa secara umum alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yang boleh mempengaruhi kehidupan mahluk hidup.

Gilphin, A. menyatakan juga bahawa fenomena sekeliling bila berkaitan dengan manusia maka tidak terbatas kepada faktor fisikal semata-mata, sebaliknya faktor sosial

turut berperan ianya menerangkan bahawa bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan alam sekitar dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

Peranan media massa dalam pembangunan adalah sebagai agen pembaharu seyogyanya mempercepat proses peralihan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern, sebagai agen penyampai informasi yang cepat, ianya mencadangkan informasi yang praktis , mudah dimengerti oleh masyarakat dan memenuhi keperluan dan minat masyarakat bagi peningkatan kehidupannya dan menjadikan media massa sebagai sumber informasi utama masyarakat. Siaran radio mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lainnya , dimana ianya dilakukan dengan lisan dan formula keserentakan penyebaran informasi .

Perkembangan teknologi informasi ini dapat dilihat dari penggunaan satelit komunikasi yang semakin canggih. Perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi pada Negara-negara maju sedang memasuki zaman informasi yang disebabkan oleh revolusi komunikasi itu sendiri.

Arus komunikasi dari atas ke bawah (top down) dan sebaliknya berlaku relatif antara kelompok kecil anggota masyarakat yang terlibat dalam perencanaan mahupun pelaksanaan program pembangunan dimana perkembangan media massa menyebabkan jarak psikologis mendekatkan daripada jarak geografis.

Di dalam menyampaikan sesuatu informasi tidaklah mudah dalam pelaksanaannya, dikarenakan banyak tantangan dari segi sosiologis, psikologis, geografis, politik dan lainnya yang perlu dipecahkan, apalagi jika informasi tersebut ditujukan untuk masyarakat yang terpisah-pisah dan anonym, dimana pesan atau informasi yang ditujukan diterima hanya melalui pendengaran sahaja. Seorang komunikator melalui media massa akan dikatakan “pakar” apabila ianya berhasil menyiarkan pesan informasi untuk membangun “emphaty” dan apabila ianya berhasil mengetahui (1) apa yang ia sampaikan (2) bagaimana ianya harus menyampaikan , sehingga berhasil mencapai “ penetration” kepada pola pikir komunikan/masyarakat.

Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan penggagas sesuai dan berkenaan dengan kerangka pikir (frame of mind) serta kerangka pengalaman (frame of referance) iaitu suatu pengalaman dan pengertian (collection of experience and meanings), yang diterima oleh penerima informasi.

Bahwa khalayak /audience yang menjadi target dari media massa bersifat heterogen, yang berarti antara pendengar , pemirsa dan pembaca satu sama lain dalam perbedaan objek wanita maupun pria, usia , pendidikan, tingkat sosial, pandangan hidup dan lainnya dan menyebabkan para penggagas informasi daripada media massa harus menyediakan dan menetapkan acara tertentu, rubrik secara khusus bagi pelbagai kelompok dengan tujuan setiap individu berbeda dapat merasa puas serta dapat membangkitkan minat.

Telah diketahui keadaan kini telah terjadi pemanasan global di bumi ini, iaitu suatu peningkatan suhu akibat efek rumah kaca, efek rumah kaca tersebut terjadi sebagai akibat pemakaian energi fosil yang berkelebihan sehingga gas CO2 yang terbentuk dipantulkan kembali oleh atmosfeer, akibatnya suhu/ temperatur dibumi meningkat, mencairkan gunung es dan terjadi gelombang air pasang yang menenggelamkan pulau serta menimbulkan banjir. Selain daripada itu juga telah terjadi dimana-mana tempat, pembangunan yang tidak mengikuti perancangan yang benar dimana banyaknya daerah-daerah aliran sungai (DAS) yang ditimbun untuk keperluan pembangunan dan menjadi sempit daripada aliran sungai. Lahan-lahan hijau peruntukan sawah, perladangan, telah dialih fungsikan menjadi pembangunan-pembangunan mercusuar . Kesemua ini adalah memberikan dampak kepada manusia dan hal ini sebagai akibat ulah manusia yang tidak menyadari akan kepentingan lingkungan dan alam sekitar .

Sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang menekankan kesepaduan antara alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi (growth), " konsep pertumbuhan" lebih kepada pertambahan kuantitas sedangkan dalam arti "konsep pembangunan "ianya mencakup juga dari segi kualitas . Hal inilah yang dimaksudkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan, melibatkan semua aspek dan dilihat dari prespektif yang komprehensif tidak saja menekankan dari segi pembangunan ekonomi tetapi dari segi kebutuhan asas manusia , dapat memenuhi keperluan untuk masa sekarang dan generasi yang akan datang, dimana kemapanan sesuatu sumber lingkungan dan alam sekitar tersedia amat tergantung kepada kaedah penggunaa .

Konsep kebutuhan manusia adalah relative Yaituberbeda mengikut budaya dan nilai masyarakat setempat, disamping itu juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan tuntutan keperluan manusia. Manusia pada hakikatnya hari ini masih tergantung kepada sektor pertanian sebagai sektor utama kepada pengeluaran makanan,sebagian daripada penduduk di dunia masih tergantung pada sektor pertanian. Pencemaran lingkungan dan alam sekitar, perubahan cuaca serta pengurangan sumber alam sekitar yang tersedia disebabkan oleh aktivitas manusia pada masa kini secara langsung mempengaruhi potensi penghasilan makanan. Ini termasuk aktivitas manusia yang menyebabkan berlakunya proses pengikisan tanah, proses penggurunan serta beberapa proses yang telah mengakibatkan ketidak suburan tanah yang dapat mengakibatkan sektor pertanian tidak lagi menjadi sektor yang diutamakan.

Manusia hidup di bumi ini saling berinteraksi dengan komponen-komponen lingkungan dan alam sekitar yang lain, yang akan menghasilkan keseimbangan di dalam ekosistem. Populasi penduduk dunia mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan penggunaan sumber alam sekitar yang tersedia. Diketahui begitu pesat jumlah penduduk dunia kini yang mencapai 3 billion orang,dimana kadar pertumbuhan dunia mencapai 1.8 % dan diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 11 bilion orang pada tahun 2033 (Said, 2009).

Perubahan cuaca, pencemaran lingkungan dan alam sekitar serta pengurangan sumber alam sekitar yang tersedia, disebabkan aktivitas manusia pada masa kini secara langsung boleh mempengaruhi potensi hasil makanan. Fenomena kekurangan persediaan makanan ini telah terjadi di beberapa Negara, dan telah mengancam penduduk dunia seperti di Afrika bahkan di Amerika Selatan mahupun di Asia. Untuk memenuhi ketersediaan pangan tersebut maka sektor pertanian masih merupakan tumpuan utama dalam kehidupan manusia.

Pembangunan yang menjamin kehidupan manusia merupakan suatu perjuangan, dimana dimensi manusia menempatkan bahawa manusia pembangunan sebagai subjek, dan bukan semata-mata sebagai objek daripada pembangunan yang pasif. Peran sebagai subjek pembangunan dipandang sebagai sumber daya yang harus dikembangkan dan mengandung arti yang luas iaitu meliputi pengembangan kebiasaan bekerja yang baik, konsumsi yang rasional, pola kehidupan yang serasi dengan sikap hidup yang bertujuan untuk memperbaiki nasib atau sikap yang partisipatif.

Partisipasi masyarakat menjadi unsur komplementer penting dalam proses pembangunan, terutama dalam pembangunan manusia dan masyarakat lokal dimana partisipasi masyarakat semakin berkembang baik, apabila kuantitas dan kualitas masyarakat memiliki kesamaan persepsi.

Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong perkembangan media massa menjadi sumber informasi utama di dalam masyarakat. Dalam studi yang dilakukan oleh UNESCO yang dikenal sebagai UNESCO MINIMAL STANDART bahawa penduduk dunia menggunakan media massa untuk mendapatkan informasi adalah : setiap 100 orang penduduk menggunakan 50% akhbar, 35% radio. 15% televisyen., hal ini membuktikan bahawa adanya media massa, khalayak dapat menerima informasi dan inovasi dengan cepat dan bersamaan, dan dapat memotivasi untuk dirinya.

Begitu revolusioner peradaban baru masa kini dengan teknologi tinggi, informasi akan mudah didapat oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun tempat keberadaanya. Wawasan serta pengetahuan yang diterima masyarakat baik segi positif mahupun negatif dapat berubah dengan cepat, sehingga dapat menolak asumsi-asumsi lama, cara berpikir lama, dogma dan ideologi lama yang dianggap tidak bersesuaian lagi dengan masa kini, dengan fakta masa kini , dalam hal ini media massa mempunyai pengaruh langsung dan segera .

Membangkitkan partisipasi masyarakat untuk keperluan membangun dan penjagaan lingkungan dan alam sekitar yang dapat mempengaruhi kehidupannya masih perlu dipertingkatkan , hal ini bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Pembaharuan yang disebarkan kepada masyarakat tidak dapat segera merubah pola pikir, melainkan harus melalui proses iaitu dengan suatu cara penerangan informasi yang berterusan melalui penyebaran media massa.

Pembangunan masyarakat berkaitan dengan penggunaan berbagai pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu, terutama pada masyarakat yang masih jauh dari tingkat kecukupan, dengan pendapatan yang rendah serta kemampuan untuk memiliki media massa masih sukar di dapatkan dan mereka masih mementingkan untuk kehidupan sehari-hari.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang di satu sisi berhasil mengatasi dimensi ruang dan waktu, namun pada sisi lain ternyata mempertajam ke tidak seimbangan arus informasi antara Negara-negara maju dan Negara berkembang, antara

wilayah perkotaan dan perdesaan, yang tetap masih tidak memiliki alat dan struktur yang baik bagi pancaran dan penerimaan informasi. Padahal media massa modern, seperti radio, televisi, film, video dan surat kabar mempunyai peranan penting sebagai prasarana perubahan dan pembaharuan masyarakat.

Penyampaian pesan atau informasi untuk merubah pendapat masyarakat harus disesuaikan dengan sikap, pengetahuan, situasi, kondisi dan pengalaman masyarakat yang akan menerima informasi tersebut, ianya harus bersesuaian dengan minat dan keperluan daripada masyarakat tersebut. Tujuan daripada pemberian pesan tentulah untuk merubah sikap dan perilaku seseorang agar berkeinginan dan mampu untuk melakukan sesuai dengan apa yang diterimanya . Yang dimaksudkan dengan pesan adalah informasi/ material yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada kepada penerima pesan melalui saluran tertentu dalam hal ini adalah radio dan televisi.

Supaya pesan atau informasi tersebut mempunyai pengaruh ,berkesan dan dapat menimbulkan minat maka strategi yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu pesan atau informasi kepada masyarakat supaya dapat membangkitkan minat dalam berpartisipasi dalam pembangunan ,hususnya dalam penjagaan lingkungan dan alam sekitar bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan ialah :

1. Pesan tersebut harus direncanakan dan disampaikan serta dapat menarik, menimbulkan minat pribadi, serta memberikan saran, cara untuk mencapai keperluan tersebut,
2. Pesan harus disesuaikan atas keperluan masyarakat bagi meningkatkan kehidupannya,
3. Pesan harus menimbulkan perhatian, memotivasi dan memberikan solusi bagi perubahan dengan memberikan nilai-nilai moral, sikap, mental dan bentuk perilaku yang mendukung daripada orientasi untuk bertindak nyata,
4. Untuk menimbulkan rasa memiliki (self belonging) masyarakat seharusnya diikut sertakan dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembangunan.

KESIMPULAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu masyarakat, bangsa, adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, ianya berkaitan dengan perubahan sosial, sistem sosial, sikap dan perilaku. Perubahan sosial dapat terjadi apabila sistim yang terdiri dari bahagian-bahagian yang saling mendukung dalam proses suatu pencapaian pembangunan dapat terintergritas dengan baik.

Peranan media massa dalam pembangunan adalah sebagai agen pembaharu harus dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya dan dapat membantu percepatan peralihan proses dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat maju. Media massa menghasilkan tambahan pengetahuan, wawasan dan pandangan hidup bagi masyarakat dan secara umum, media massa merupakan faktor penting dalam memodernisasikan masyarakat. Komunikasi mempunyai peranan dan potensi yang sangat besar dalam mencapai tujuan keberhasilan pembangunan dengan sokongan masyarakat dan membangkitkan partisipasi masyarakat

Partisipatisi masyarakat menjadi unsur komplementer penting dalam proses pembangunan, terutama dalam pembangunan manusia dan masyarakat lokal dimana partisipasi masyarakat semakin berkembang baik, apabila kuantitas dan kualitas masyarakat memiliki kesamaan persepsi. Partisipasi masyarakat menjaga lingkungan dan alam sekitar untuk mewujudkan pembangunan yang serasi dan seimbang adalah penggerak dan pengarah tujuan bagi perubahan sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berterusan. Fenomena sekeliling yang mempengaruhi manusia tidak terbatas kepada faktor fisikal semata-mata, sebaliknya faktor sosial turut berperanan.

DAFTAR PUSTAKA

Said, Gumbira.E. (2009). Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Media Sarana Press. Jakarta . Indonesia.

KOMPETENSI KEMAMPUAN KRITIKAL TERHADAP MEDIA SOSIAL PADA SISWA SMAN 1 PATUK GUNUNG KIDUL

Reisita Monica Astrid Chinta
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma
Email : chinta.monte@gmail.com

Abstrak : SMAN 1 Patuk adalah SMA yang berada di pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendukung kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, dengan menyediakan wifi di sekolah dan fasilitas komputer untuk siswanya pihak sekolah mengharapkan agar siswa lebih dekat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan visinya untuk Menghasilkan lulusan berkualitas dalam IMTEK. Namun banyak informasi yang disediakan di internet tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kredibilitas, serta Sulitnya pengawasan terhadap konten yang tersebar dalam internet mengharuskan pengguna internet untuk memiliki kemampuan literasi khususnya pada kemapuan kritikal pemahaman media sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi atau pengamatan lapangan, FGD, dan studi pustaka. Teknik analisis data adalah dilakukan melalui reduksi data/data reduction, penyajian data/Data Display dan penarikan kesimpulan/Conclusion.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada tahap pemahaman kritikal siswa menunjukan, bahwa mayoritas dari informan memiliki sikap kritis pada permukaannya saja, hal ini dikarnakan sikap malas, tidak peduli, dan ketertarikan untuk mengulik lebih dalam mengenai media, konten, dan regulasi.sikap kritis siswa karena faktor 1) kecemasan, 2) intelektual.

***Keyword**: Kompetensi, Kemampuan, Kritikal, Media*

PENDAHULUAN

Remaja dewasa merupakan salah satu kelompok yang dikategorikan sebagai digital native, yaitu generasi internet, digital generation, atau para millenials. John Palfrey dan Urs Gasser (2008) lebih jauh menjabarkan karakteristik digital natives sebagai sosok-sosok yang lahir setelah tahun 1980 (era digital), ketika teknologi digital seperti usenet dan bulletin board system hadir secara daring. Generasi ini mengakses teknologi jejaring digital, serta memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang komputer (YPMA, 2011).

Situs yang sering diakses oleh para digital natives adalah Facebook, Twitter, Youtube, Google, dan situs-situ games online. Namun, yang menjadi favorit mereka

adalah Twitter. Melalui situs jejaring sosial ini para digital natives mengaku sering melakukan aktivitas seperti: update status (tweeting), re-tweet, mention, direct message, dan follow. Situs kedua yang menjadi favorit para digital natives ini adalah Facebook. Aktivitas yang sering mereka lakukan di situs jejaring sosial ini antara lain memantau newsfeed, berkomunikasi melalui fitur wall to wall atau comment, mengunggah foto dan melakukan photo tagging, bermain game, dan mengisi permainan dalam bentuk kuis seperti 'interview friend'.

Salah satu lembaga pendidikan yang berada di daerah pedesaan yang mendukung kemajuan TIK (Teknologi Informasi dan komunikasi) adalah SMAN 1 Patuk Gunung Kidul. SMAN 1 Patuk adalah SMA yang berada di pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendukung kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, dengan menyediakan wifi di sekolah dan fasilitas komputer untuk siswanya pihak sekolah mengharapkan agar siswa lebih dekat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan mendekatkan siswa dengan internet juga terlihat dari beberapa tugas yang diberikan kepada siswa untuk mencari informasi melalui internet serta aktifitas siswa menggunakan internet sebagai wahana pencari informasi, berita, dan komunikasi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi literasi media baru siswa SMAN 1 Patuk Gunung Kidul. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana kemampuan literasi media baru yang dimiliki oleh siswa SMAN 1 Patuk Gunung Kidul khususnya pada kompetensi kemampuan kriikal.

KERANGKA TEORI

Literasi Media Baru

Literasi media menjadi isu yang sangat di perhatikan dalam dekade terakhir, hal tersebut mengingatkan pada pesatnya pertumbuhan media. Seperti yang di ungkapkan oleh William Christ dan W. james Porter (Baran, Davis. 2014: 420) bahwa media terkonstruksi, media mengkonstruksi realitas, audiens menegosiasikan makna, pesan memiliki dampak komersial, media memuat pesan ideologis dan nilai-nilai, media memuat implikasi sosial politik, bentuk dan isi merepresentasikan pesan media, serta setiap media memiliki bentuk estetika yang unik memberikan alasan mengapa konsep literasi media ini lahir.

Literasi media adalah "A set of perspectives that we actively expose ourselves to the media to interpret the meaning of the messages we encounter. We build our perspectives from knowledge structures" (Potter. 2011:19), yang artinya adalah satu set perspektif yang aktif kita gunakan untuk membuka diri kepada media untuk menafsirkan makna pesan yang kita hadapi. Kita membangun perspektif kita dari struktur pengetahuan, Untuk membangun struktur pengetahuan kita, kita perlu alat dan bahan baku. Alat-alat adalah keterampilan kita.

Pemahaman Komprehensif untuk Media Baru

Pemahaman yang lebih komprehensif untuk media baru “internet” diusulkan oleh Celot and Pérez Tornero untuk European Commission (2009). Dalam konsep tersebut dipaparkan dua dimenensi yakni; kemampuan individual dan faktor lingkungan. Kemampuan individual yaitu mengacu pada kapasitas individual untuk mengembangkan kemampuan proses kognisi, menganalisis dan komunikasi. Kemudian kemampuan individual dibagi menjadi tiga indikator kunci yaitu penggunaan media, pemahaman kritikal (disebut juga kompetensi personal), dan kemampuan berkomukasi dan partisipasi (kompetensi sosial). Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. kemampuan teknikal, yaitu kemampuan teknik dalam menggunakan media. Artinya, seseorang mampu mengoperasikan media atau alatnya (komputer, dll) dan memahami semua jenis instruksi yang ada didalamnya. Didalam Kemampuan teknikal ini mencakup kemampuan dalam berinternet dan menggunakan komputer. Keseimbangan menggunakan media, dan penggunaan internet pada tingkat lanjut.

2. Pemahaman Kritikal, dalam bagian ini mengisyaratkan sebuah aspek yang berkaitan dengan pemahaman dan evaluasi konten dan media. Bagian ini terbagi lagi menjadi tiga bagian pemahaman mengenai konten media dan fungsinya, pengetahuan mengenai media dan regulasi media, dan prilaku pengguna. Pada bagian pertama, yaitu pemahaman mengenai media dan fungsinya ini berisikan memahami isi dari informasi, Pemahaman mengenai konten dan konteksnya

menunjukan kemampuan individu membaca dan memahami pesan atau isi media. Hal ini mengisyaratkan mencakup proses kognitif yang mempengaruhi praktek pengguna dalam menghadapi informasi yang mereka dapatkan. Bagian kedua, pengetahuan mengenai media dan regulasi media yaitu diamana posisi peraturan-peraturan mengenai media atau peraturan jurnalistik serta peraturan UU ITE menjadi pinjakan untuk mengevaluasi system media dan fungsinya, hal Ini mencakup pengetahuan tentang konvensi, peraturan dan norma-norma yang berdampak pada media, dan hukum, pihak berwenang, pengetahuan tentang pemangku kepentingan. Ketiga prilaku pengguna, pada bagian ini didasarkan pada kemampuan semiotik dan linguistik, dan memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi, mendapatkan dan menggunakan informasi, untuk kontekstualisasi itu, untuk mengevaluasi, menganalisis dan menyadari validitas dan utilitas dalam kaitannya dengan menetapkan tujuan. Meta pengetahuan diperlukan dalam pemahaman kritikal, yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi aspek media dengan cara membandingkan jenis dan sumber informasi yang berbeda, dan tiba pada kesimpulan tentang kebenaran dan kesesuaian, serta membuat pilihan informasi (Tornero, Paredes, Giraldo, Tejedor, Fernandez. 2010).

3. kemampuan berkomukasi dan partisipasi (kompetensi sosial) merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi dan membangun relasi sosial melalui media internet serta mampu memproduksi konten pada media internet. Adapun tiga komponen dalam bagian ini yaitu, hubungan sosial yaitu kemampuan untuk membangun relasi sosial, berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui media sosial, dan kreasi konten yaitu kemampuan membuat dan memproduksi konten pada media internet.

Pemahaman Kritikal dalam Informasi

Pada penelitian ini hanya meneliti seputar point ke dua yaitu pemahaman kritikal terhadap penggunaan media sosial untuk siswa SMAN 1 Patuk Gunung Kidul. Kemampuan Kritikal dalam informasi, terdiri dari tiga komponen yaitu memahami konten dan fungsinya, memiliki pengetahuan mengenai media dan regulasi, dan prilaku

pengguna. memahami konten dan fungsinya peneliti menginterpretasikan kemampuan siswa menganalisis kelengkapan informasi artinya siswa mengamati atau membaca keseluruhan teks, memperhatikan unsur 5w+1 h, mengetahui genre tulisan apakah tulisan tersebut editorial, berita, fiksi, real, opini, informasi, narasi, deskripsi selain itu siswa mengetahui jenis berita berita dan memperhatikan faktualitas berita.

Kemudian dapat mengetahui klasifikasi sumber informasi (web) atau mengetahui segmentasi media atau sistus yang menjadi sumber informasi dan dapat mengkalsifikasi system interaksi seperti media sosial. kedua, pengetahuan mengenai media dan regulasi artinya siswa dapat menganalisis media dengan mengetahui pemilik media, kepentingan media, dan mengetahui proses produksi berita dan informasi (produksi, distribusi, dan konsumsi) kemudian siswa dapat menilai informasi berdasarkan regulasi artinya siswa mengetahui undang-undang ITE dan kode etik jurnalistik serta mengetahui UUG ITE. Ketiga, prilaku pengguna, prilaku adalah sebuah tindakan nyata dari siswa dalam menggunakan internet. Dalam penelitian ini diartikan siswa dapat menguji realibilitas informasi, dan menilai kredibilitas informasi, dapat menilai relevansi dengan kebutuhan mereka.

METODOLOGI

Penelitian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kompetensi Literasi Media Baru Siswa SMAN 1 Patuk Gunung Kidul, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi- informasi mengenai keadaan yang ada (Mardalis. 1999: 26) . Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki (Cevilla, dkk. 1993:73).

Penentuan informan dalam penelitian ini Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri 10 orang siswa jenis laki-laki dan perempuan, rentan usia 15-17 tahun, dan siswa

yang duduk di bangku SMA. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Miles dan Huberman, 1992:15-20).*Focused Group Discussion* (FGD) digunakan sebagai metode penelitian, maka FGD adalah sebuah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi Proses dalam pelaksanaan FGD telah dilakuakan pada tanggal 6 Februari 2016 terhadap remaja wilayah pedesaan yaitu siswa SMAN 1 patuk, yang terdiri dari 10 peserta dan tim FGD yang terdiri dari satu moderator, satu notulen, satu dokumentasi, dan satu orang bagian konsumsi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman kritikal dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa memahami konten dan fungsi media, regulasi media dan perilaku siswa ketika berinteraksi dengan internet. Terkait dengan pemahaman siswa terhadap konten dan fungsi media, dalam hal ini dapat dilihat dari empat hal yaitu: siswa memperhatikan teks yang dibaca di internet; mampu menganalisis konten media; mampu mengklasifikasikan website yang dikunjungi; dan mampu mengklasifikasikan platform media dan sistem interaksi yang digunakan media.

Bagian kedua dari pemahaman kritikal adalah pengetahuan tentang media dan regulasi, pada bagian ini siswa memahami tentang media yang diakses maksudnya adalah siswa mengetahui latar belakang kemilikan media tersebut, kepentingan media tersebut, serta mengetahui proses proses prodksi berita dan informasi, selanjutnya siswa juga mengetahui regulasi media dalam hal ini siswa mengetahui kode etik jurnalistik dan mengetahui UUD ITE untuk melihat bagaimana prilaku positif dan negatif siswa dalam menggunakan internet.

Bagian ketiga, dalam pemahaman kritikal adalah prilaku pengguna. Dalam prilaku pengguna ini melihat bagaimana kepercayaan siswa terhadap informasi yang mereka temukan, artinya siswa mengejar kebeneran sebuah informasi misalnya dengan membandingkan dengan situs atau sumber lainnya, mempertimbangkan realibilitas informasi, dan melihat kredibilitas informasi dengan menganalisis penulis informasi, serta siswa juga dapat menilai relevansi informasi dengan kebutuhan mereka.

Tabel 1

TABEL PEMAHAMAN KRITIKAL

KRITERIA	KOMPONEN	INDIKATOR
Kemampuan Kritikal	Memahami konten dan fungsi media	• Siswa dapat membaca teks • Menganalisis konten • Mampu mengklasifikasikan website • Mampu mengklasifikasikan platform media dan sistem interaksi
	Pengetahuan tentang mediadan regulasi media	• Siswa memahami tentang media yang diakses. • Siswa mengetahui regulasi media • Siswa mengetahui kepemilikan media • Siswa mengetahui regulasi internet
	perilaku pengguna (realibilitas, kredibilitas, dan relevansi informasi)	• Siswa dapat menguji realibilitas informasi • Siswa membandingkan satu situs dengan situs lainnya • Siswa mengetahui latar belakang penulis • Siswa dapat menilai relevansi informasi

Kemampuan Kritikal Siswa

Kemampuan kritikal terhadap media dan fungsinya mencakup pemahaman terkait dengan isi dari informasi; pengetahuan mengenai media dan regulasi media; dan perilaku yang ditunjukkan oleh pengguna dalam menghadapi isi dari informasi yang disediakan media baru. Pemahaman mengenai konten dan fungsi media menunjukan kemampuan individu membaca dan memahami pesan atau isi media. Hal ini mencakup proses kognitif yang mempengaruhi praktek pengguna dalam menghadapi informasi yang mereka dapatkan.

Siswa SMAN 1 Patuk memiliki struktur pengetahuan yang cukup baik tentang konten-konten internet. Mereka dapat menyebutkan beberapa konten-konten yang terdapat di media internet sesuai konten media menurut sebagaimana disebutkan Potter (2008), diantaranya adalah berita, artikel, hiburan, periklanan. Siswa SMAN 1 Patuk mengatahui tentang konten-konten tersebut karena konsumsi mereka yang tinggi terhadap media internet dan terbiasa menggunakan konten-konten tersebut untuk keperluan mengerjalan tugas sekolah maupun yang lainnya.

Dalam menganalisis konten, tidak serta merta dilakukan oleh seluruh peserta FGD karena faktor "malas". Fakta lainnya, sikap kritis dalam kemampuan memahami konten dan fungsi media tergantung pada minat siswa terhadap suatu informasi atau pesan yang mereka temui, sayangnya meskipun dapat menemukan informasi yang mereka inginkan, para siswa cenderung tidak memperdulikan klasifikasi sumber informasi atau ketepatan sumber tersebut terhadap isi atau konten yang mereka sajikan.

Pengetahuan siswa SMAN 1 Patuk tentang industri media dan regulasi media masih sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat oleh hasil penelitian yang ditunjukkan oleh penjelasan informan terkait industri media internet. Walaupun mereka saat ini sudah akrab dengan dunia internet dan situs-situs yang dibaca setiap hari, akan tetapi siswa SMAN 1 Patuk ini tidak mengetahui siapa nama pemilik situs-situs di internet. Demikian juga mereka tidak mengetahui penulis dan latar belakang penulisnya. Walaupun sebenarnya mereka telah mengetahui prosedur untuk mengetahui penulis dan latar belakangnya. Akan tetapi informan mengatakan bahwa butuh ketertarikan tersendiri agar ia meneliti penulis dan latar belakangnya apalagi pemiliknya. Dalam kenyataannya informan cenderung hanya menggunakan situs internet beserta kontennya tanpa memperhatikan siapa pemiliki situs tersebut. Ketidak tahuan mereka terhadap pemilik situs lebih didasari atas kepentingan mereka dalam menggunakan internet. Kurangnya pengetahuan siswa SMAN 1 Patuk tentang industry media internet juga disebabkan oleh kurangnya pengalaman mereka tentang industri

Bagi mereka, ketika menggunakan internet ia lebih mendahulukan kegunaan yang diberikan oleh internet ketimbang mengetahui siapa pemilik situs-situs internet. Selain tidak memperhatikan penulis dan latar belakang serta pemilik situs internet, Siswa SMAN 1 Patuk juga tidak mengetahui dengan jelas mengenai aturan-aturan yang

mengatur tentang internet kecuali Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pers, namun mereka yakin ada aturan yang mengatur tentang itu. Mereka mengakui pernah mendengar tentang aturan-aturan tentang internet, tetapi mereka mengakui tidak memahami dan tidak pernah terlibat langsung dengan aturan

Pengetahuan yang sangat minim mengenai regulasi media terutama pengetahuan tentang UU ITE tidak menjadikan siswa tidak memahami tentang aturan ber internet. Siswa SMAN 1 Patuk menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakuakan ketika beraktifitas di dalam dunia baru adalah pornograpi, postingan berbau SARA, menghina orang lain, dan melihat dari observasi pada jejaringan sosial media mereka, tergambar bahwa unggahan mereka sangat baik yaitu menampilkan foto pariwisata daerah sekitar.

Perilaku Siswa Dalam Bermedia Sosial

Kemudian prilaku pengguna, pada bagian ini didasarkan pada kemampuan semiotik dan linguistik, dan memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi, mendapatkan dan menggunakan informasi, untuk kontekstualisasi itu, untuk mengevaluasi, menganalisis dan menyadari validitas dan utilitas dalam kaitannya dengan menetapkan tujuan. Meta pengetahuan diperlukan dalam pemahaman kritikal, yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi aspek media dengan cara membandingkan jenis dan sumber informasi yang berbeda, dan tiba pada kesimpulan tentang kebenaran dan kesesuaian, serta membuat pilihan informasi (Tornero, Paredes, Giraldo, Tejedor, Fernandez. 2010).

Mereka tidak terima begitu saja apa yang disampaikan media namun mencari tahu dan membandingkan berbagai media lainnya. Seperti yang dilakukan beberapa narasumber pada saat melihat berita yang menarik perhatian, mereka tidak akan hanya percaya dari satu sumber media saja namun akan mencari dari berbagai media lainnya tidak hanya yang online tetapi juga media cetak. Misalnya saja, informasi yang mereka peroleh di Detik.Com akan dibandingkan juga di Kompas, twitter, televisi, dan sebagainya.

Mereka akan melakukan secara terus menerus sampai keingintahuan mereka terpuaskan. Hal ini menunjukkan remaja khususnya siswa dapat bersikap kritis akan informasi yang dikonsumsinya; tidak menerima begitu saja informasi tersebut. Walaupun begitu, terdapat pula beberapa dari mereka yang belum sepenuhnya memiliki

sikap kritis. Dalam hal ini tentunya setiap individu memaknai pesan tergantung dari pemahamannya atas pesan yang ditangkapnya dari media. Kebiasaan siswa dalam memanfaatkan konten internet menyebabkan terbentuknya kognitif mereka sehingga ketika ditanya tentang konten internet yang diketahui maka siswa SMAN 1 Patuk mengambil informasi dari kognitifnya tersebut. Menurut Baran & Davis (2010) banyak hal yang terjadi di otak tanpa disadari, namun aktivitas ini sering mempengaruhi pikiran sadar kita. Struktur pengetahuan yang kuat membuat orang jauh lebih sadar selama mengolah informasi sehingga mampu membuat keputusan dalam mencari informasi, menggunakan informasi, dan membangun makna yang berguna untuk tujuan individu.

Terbentuknya Kognitif

Kebiasaan siswa dalam memanfaatkan konten internet menyebabkan terbentuknya kognitif mereka sehingga ketika ditanya tentang konten internet yang diketahui maka siswa SMAN 1 Patuk mengambil informasi dari kognitifnya tersebut. Menurut Baran & Davis (2010) banyak hal yang terjadi di otak tanpa disadari, namun aktivitas ini sering mempengaruhi pikiran sadar kita. Struktur pengetahuan yang kuat membuat orang jau lebih sadar selama mengolah informasi sehingga mampu membuat keputusan dalam mencari informasi, menggunakan informasi, dan membangun makna yang berguna untuk tujuan individu.

Informan juga tidak menganggap penting mengetahui penulis dan latar belakang penulis serta pemilik dari situs yang dikunjungi. Demikian juga, mengenai kepemilikan situs, informan menilai hal tersebut tidaklah penting. Bagi mereka, yang penting adalah kredibelitas dari situs yang dibaca. Selain itu, kebabasan dalam menggunakan media baru, terlebih lagi sajian yang di tawarkan begitu beragam mengulik tentang hal apa saja yang relevan bagi remaja saat ini dalam mengakses media baru. Siswa SMA Negeri 1 patuk sangat memahami akan hal apa saja yang relevan untuk mereka, mereka sebagai siswa SMA menilai bahwasannya hal mengenai pelajaran adalah halyang paling relevan untuk mereka dalam mengakses informasi yang di sediakan dalam media baru, kemudian di ikuti oleh kebutuhan informasi lainnya, hiburan, dll.

Taraf pengetahuan siswa terhadap internet baru sebatas pada pembaca, dan atau pengambil manfaat dari informasi yang disediakan oleh internet. Mereka berpendapat bahwa siswa atau remaja yang berpotensi untuk terkena dampak negatif internet,

sedangkan pengguna dewasa dianggap sudah mampu untuk memilah konten internet yang baik dan layak untuk diakses. Akses konten negatif oleh pengguna internet dewasa adalah pilihan mereka dan hanya agama yang dapat membatasi mereka.

Menurut Potter (2008), setiap orang memiliki perbedaan secara substansial pada keterampilan dan pengalamannya sehingga akan bervariasi pada jumlah dan kualitas struktur pengetahuan yang dimilikinya. Begitu juga dengan siswa SMAN 1 Patuk , walaupun mereka memiliki latar belakang pendidikan yang sama yaitu pendidikan yang terkait dengan komputer dan jaringan internet, masing-masing mereka tetap memiliki struktur pengetahuan yang berbeda baik dalam jumlah maupun kualitas pengetetahuanya. Namun demikian dari hasil penelitian dapat diketahui bagaimana gambaran struktur pengetahuan siswa SMAN 1 Patuk tanpa memandang tinggi rendahnya, namun cukup memadai untuk terlibat dalam penggunaan internet.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa siswa SMAN 1 Patuk sebagai individu memiliki pemahaman dan penafsiran yang berbeda terkait media internet. Walaupun latar belakang profesi dan pengalaman mereka yang sama menyebabkan banyaknya kesamaan penafsiran dan pemahaman mereka terhadapinternet, namun masing-masing memiliki perbedaan pada cara menyampaikan, sehingga literasi media baru siswa merupakan kompetensi yang tidak dapat diukur, kita hanya bisa melihat literasi media dalam bentuk proses siswa dalam berinteraksi dengan media.

Triyono (2010) mengemukakan bahwa tidak ada seseorang yang benar-benar tidak memiliki literasi media, begitu juga tidak ada yang mengenal media secara sempurna sehingga literasi media tidak bisa dikelompokkan dalam sebuah pengkotakan mengerti atau tidak. Menurutnya, tingkatan literasi media seseorang lebih mirip dengan tingkatan dalam termometer yaitu tingkatan level dalam literasi media. Semakin tinggi tingkat literasi media seseorang maka semakin kuat dalam memahami makna pesan yang disampaikan media, semakin rendah tingkat literasi media seseorang maka akan semakin sulit untuk menilai ketidakakuratan media, keberpihakan media, memahami kontroversi media ataumengapresiasi ironi yang ditampilkan media, bahkan berkemungkinan besar akan menerima begitu saja pesan-pesan dan pengaruh media tanpa mau mengkritisinya.

Literasi media tidak harus dianggap sebagai kemampuan mengobrak abrik media, namun merupakan kesadaran konten media sehingga literasi media tidak mengurangi ketertarikan kepada media melainkan mengenali tujuan dan membantu mengambil langkah alternatif agar pesan media menjadi alat untuk mencapai tujuan sehingga dapat mengapresiasi konten media. Hal ini terjadi pada siswa SMAN 1 Patuk. Hasil keterampilan menganalisis dan mengevaluasi media internet tidak menyebabkan siswa mengurangi ketertarikannya kepada media melainkan menjadi panduan dan tameng bagi mereka dalam menggunakan internet. Siswa dapat menganalisis

konten media menjadi beberapa elemen yang penuh makna. Siswa memahami bahwa media internet memiliki banyak konten yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap pengguna internet. Selain itu mereka juga paham bahwa internet memiliki dampak positif dan dampak negatif. Mereka menjelaskan bahwa manfaat, dampak positif dan negative internet bagi setiap pengguna internet tergantung pada sejauh mana pengguna mampu memilah konten yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, dan memanfaatkan konten yang tersedia di internet dengan baik.

Menurut Baran & Davis (2010) banyak hal yang terjadi di otak tanpa disadari, namun aktivitas ini sering mempengaruhi pikiran sadar kita. Hal tersebut tidak secara langsung mempengaruhi proses kognitif. Kesadaran dapat bertindak sebagai pengawas tertinggi dari aktivitas kognitif ini, tetapi hanya mampu mengontrol secara terbatas dan secara tidak langsung. Hal ini terjadi pada siswa SMAN 1 Patuk, mereka kurang paham tentang literasi media internet dan menyadari hal itu, namun karena adanya proses kognitif ketika berhadapan dengan internet membuat siswa SMAN 1 Patuk menggunakan keterampilan yang sesungguhnya berupa analisis dan evaluasi media internet.

Potter (2008) menyebutkan bahwa literasi media tidak dapat dikategorikan tetapi merupakan suatu kontinum atau suatu rangkaian. Tingkat literasi media tidak ada yang tinggi atau sempurna, karena merupakan suatu tahapan yang selalu ada perbaikan. Individu diposisikan dalam suatu rangkaian berdasarkan kekuatan perspektif mereka secara keseluruhan pada media. Keterampilan berkomunikasi dan partisipasi di media internet dapat diketahui melalui aktifitas siswa SMAN 1 Patuk dalam memproduksi pesan media dan keaktifan di dalam media internet

KESIMPULAN

tahap pemahaman kritikal pada informan cenderung terjadi tergantung pada minat siswa terhadap suatu informasi atau pesan yang mereka temui artinya ini berkaitan dengan ketertarikan. Ketika seseorang tertarik dengan artikel atau menginginkan sesuatu dari sebuah informasi yang di bacanya maka hal inilah yang merujuk pada motivasi prilaku kritis siswa. Motivasi timbul pada setiap informan beragam, Bagus, Eksa, dan Retno misalnya, mereka akan membaca dan memperhatikan sebuah konten jika informasi tersebut menarik baik dari sisi gambar maupun kontennya, namun informan yang lainnya Eka, Lisia, Annas, Berlin, dan Ika akan memperhatikan sebuah konten jika menyangkut pelajaran. Selain pemahaman kritikal pada tahapan pemahaman mengenai konten dan media, siswa juga cukup kritis dalam mempercayai sebuah informasi yang di dapat oleh mereka. Faktor yang mempengaruhi sikap kritis dalam mempercayai informasi yang mereka dapatkan adalah faktor kecemasan,

DAFTAR PUSTAKA

Baran, Stanley J. dan Dennis K. Davis. (2014). *Teori Komunikasi Massa : Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan*, Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Humanika

John Palfrey and Urs Gasser, (2008). *Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Native*s, Basic Books.

Potter,W.J. (2011). *Media Literacy*; 5th Edition. SAGE.

Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi. Aksara

Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

TENAGA KERJA PROSUMSI DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL DAN REZIM WAKTU KAPITALIS : ESENSI DAN IMPLIKASI

Ruzqiyah Ulfa
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid, Jakarta
Email : ruzqiyahulfa@gmail.com

Abstrak : Keberadaan media sosial memunculkan konsepsi-konsepsi baru mengenai ketenagakerjaan seperti tenaga kerja digital dan pekerja-konsumen (prosumen) yang bekerja tanpa sadar dan mendapatkan imbalan berupa konsumsi atas produk media sosial. Adanya fenomena ekonomi ini memungkinkan perspektif kritis Marxian diangkat dalam relevansinya dengan media sosial. Dari perspektif Marx, dapat dilihat bahwa perkembangan media sosial kembali menekankan peran kapitalisme dalam mengubah hubungan-hubungan kaku menjadi hubungan yang cair dan menguap. Penumpukan modal dilakukan dengan menggunakan uang untuk menggaji tenaga kerja digital pegawai media sosial untuk menghasilkan platform media sosial, yang pada gilirannya dijadikan modal untuk merekrut prosumen sebagai komoditas, untuk bekerja menghasilkan data personal sebagai komoditas baru bagi media sosial. Komoditas data kemudian dijual pada pemasang iklan sebagai penghasilan bagi media sosial. Semakin besar waktu yang digunakan prosumen untuk mengakses media sosial, semakin besar produksi data yang dihasilkan. Pengguna media sosial sendiri dapat dipandang sebagai sistem penumpuk modal pula, namun bukan modal ekonomi, melainkan modal kultural, sosial, dan simbolik yang berfungsi sebagai modal input bagi modal ekonomi yang diinginkan media sosial. Fenomena ini berimplikasi pada orientasi kapitalistik media sosial untuk mengutamakan bisnis besar yang membayar untuk memasang iklan, ketimbang bisnis-bisnis kecil seperti UMKM. Selain itu, fenomena prosumsi juga dapat membawa pada merebaknya konten-konten kontroversial dan hoax yang mampu melibatkan lebih banyak pengguna dan menghasilkan lebih banyak waktu di media sosial guna memproduksi data yang dapat dikomodifikasi untuk kepentingan ekonomi. Pemerintah perlu mendorong media sosial untuk mengendalikan konten apa yang boleh dan apa yang terlarang untuk diproduksi oleh tenaga kerja prosumsi. Penelitian-penelitian perlu dilakukan untuk mencari jalan bagaimana agar media sosial dapat digunakan untuk menumpuk modal politik yang positif, dalam artian meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat kampanye-kampanye positif.

Kata kunci: media sosial, prosumsi, waktu, kapitalisme, digital

1. Pendahuluan

Media sosial telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Media sosial terbesar, Facebook, saat ini menjadi situs

internet ketiga paling banyak dikunjungi sementara Youtube berada pada urutan kedua setelah Google (Alexa, 8 September 2017). Pada bulan Juni 2017, tercatat terdapat 2,01 milyar pengguna aktif Facebook yang selalu login setiap bulan, 17% lebih banyak daripada bulan yang sama pada tahun 2016 (Zephoria, Agustus 2017).

Sejalan dengan hal ini, muncul konsep tenaga kerja digital (Burston et al, 2010), yang mencerminkan adanya pekerjaan khusus untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kapitalisme digital. Tenaga kerja digital bekerja untuk menghasilkan produk yang kemudian dikonsumsi oleh pengguna media sosial guna mendapatkan keuntungan, sama halnya dengan tenaga kerja biasa yang bekerja di luar platform digital.

Selain konsep tenaga kerja digital, Kücklich (2005) memperkenalkan konsep pekerja pemain (playbour). Playbour adalah seorang yang bekerja sebagai pemain, menikmati permainan sebagai imbalan pekerjaan yang ia lakukan. Konsep playbour pertama muncul dalam permainan online, dimana pemain berpartisipasi sebagai pencipta permainan yang kemudian dinikmati oleh pengguna biasa. Mereka dapat dipandang tenaga kerja, karena membantu produksi komoditas, tetapi di sisi lain, bukan tenaga kerja, karena secara sukarela menciptakan produk. Kita dapat melihat dengan mudah bahwa playbour juga berlaku pada konteks media sosial, dimana pengguna dengan sukarela dan senang hati menciptakan konten yang kemudian disenangi dan dinikmati oleh pengguna lainnya, bersama dengan iklan-iklan yang ditempatkan oleh kapitalis pada konten tersebut.

Adanya konsepsi ketenagakerjaan digital dan ketenagakerjaan permainan (playbour), membawa pada kajian kritis, khususnya perspektif Marxian, dalam mengamati fenomena ekonomi yang terjadi di media sosial. Marx (1848) telah mengamati bahwa kapitalisme mampu menghilangkan hubungan-hubungan kaku dan konservatif menjadi berubah cair dan akhirnya menguap. Gambaran ini sepenuhnya teramati pada apa yang terjadi lewat fenomena media sosial yang menghasilkan perubahan pada bagaimana orang-orang asing berkomunikasi satu sama lain dan kemunculan dari konsep-konsep tenaga kerja digital dan playbour.

Tetapi apa yang kemudian menjadi komoditas di media sosial yang diproduksi dan diperdagangkan oleh tenaga kerja digital? Arvidsson (2005:270) melihat bahwa nilai dari media sosial bagi kapitalis terletak pada hubungan yang memiliki makna afektif

antara para pengguna media sosial. Walau demikian, tidak semua pengguna media sosial memandang pembentukan hubungan afektif sebagai sesuatu yang bernilai. Banyak pengguna media sosial tetap nyaman dengan identitas pseudonim dalam mengakses media sosial. Nilai ekonomi bagi kapitalis kemudian adalah bagaimana pengguna media sosial dapat lebih terikat pada merek yang dibentuk oleh kapitalis di media sosial, baik lewat iklan ataupun komunikasi mulut ke mulut.

Thompson (1967:93) mengamati bahwa nilai yang lebih mendasar adalah waktu. Masyarakat kapitalis sangat menghargai waktu karena waktu menjadi penanda penting antara kerja dan istirahat, mencari uang dan bersama keluarga, dan sebagainya. Frasa "waktu adalah uang" merupakan sebuah frasa yang memiliki makna literal dalam masyarakat kapitalis. Kapitalis menjaga agar waktu diberikan oleh para pekerja mereka secara disiplin sehingga absensi akan dihukum dengan berkurangnya gaji. Fenomena waktu sebagai uang semakin intensif di era modern ketika kapitalisme akhirnya menemukan teknologi informasi seperti ponsel dan laptop. Kapitalis dapat menelpon pegawainya di rumah untuk membicarakan masalah pekerjaan yang seharusnya hanya dibicarakan di kantor. Dengan adanya laptop, seorang pekerja dapat membawa pekerjaannya ke rumah, tanpa mendapatkan bonus dari atasan, sementara ketika mereka membawa urusan rumah di kantor, mereka mendapatkan teguran.

Keberadaan media sosial di era teknologi informasi saat ini telah memberikan perubahan pada bagaimana manusia menghabiskan waktunya, terutama waktu-waktu luang yang ada. Banyak pengguna media sosial memilih menggunakan waktu luang untuk mengakses dunia digital ketimbang menggunakan waktunya untuk urusan-urusan yang secara tradisional telah dipakai untuk berbagai aktivitas seperti bercanda bersama keluarga atau melakukan refleksi terhadap kegiatannya dalam hidup. Pengguna media sosial begitu menikmati waktu saat mereka online, sehingga sangat pantas bahwa waktu dipandang sebagai komoditas yang diperdagangkan di media sosial.

Hal ini dimungkinkan jika para pengguna facebook menikmati waktu mereka di media sosial untuk melakukan apa yang disebut sebagai 'ko-kreasi' dimana mereka secara sukarela menjadi playbour. Jelas, semakin lama seorang pengguna facebook menjadi playbour, semakin besar kapital yang dapat diperoleh kapitalis karena volume konten yang semakin besar.

Fuchs (2014) secara khusus menyorot isu ini dengan membahas mengenai tenaga kerja prosumsi digital dalam relasinya dengan waktu. Tenaga kerja prosumsi adalah tenaga kerja yang memproduksi sekaligus mengkonsumsi. Konsep ini dipandang sebagai lanjutan dari tenaga kerja digital yang semata bekerja dan playbour yang bermain dan bekerja. Prosumsi adalah mengkonsumsi dan bekerja, karena kurang pas jika media sosial dipandang sebagai kegiatan bermain. Ia bukanlah permainan online tetapi sesuai namanya, lebih pada sebuah pemenuhan kebutuhan sosial manusia dan banyak dari proses konsumsi di media sosial tidak dapat dipandang sebagai komunikasi yang 'main-main'.

Esensi Artikel

Fuchs (2014) menggunakan teori sosial seperti teori modernitas kritis dan teori nilai ketenagakerjaan Marx untuk membedah konsep waktu dalam masyarakat kapitalis dan ekonomi kapitalis. Fuchs (2014) membangun kategori waktu untuk dapat menyusun teori nilai ketenagakerjaan dan teori nilai ketenagakerjaan digital.

Teori modernitas kritis menekankan adanya percepatan sebagai esensi dari modernitas. Modernitas dipandang memiliki tiga dimensi percepatan dasar yaitu (a) teknologi, (b) perubahan sosial, dan (c) derap kehidupan. Semakin modern, teknologi, perubahan sosial, dan derap kehidupan semakin cepat berubah. Ketiganya membentuk siklus dimana perubahan teknologi membawa pada perubahan sosial dan perubahan sosial membawa pada perubahan derap kehidupan dan seterusnya. Ketiga jenis percepatan ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu akumulasi ekonomi, diferensiasi fungsional, dan keberlangsungan hidup kultural (Fuchs, 2014).

Pada gilirannya, percepatan pada teknologi, perubahan sosial, dan derap kehidupan memberikan dampak pada persepsi terhadap waktu. Terdapat tiga persepsi waktu yang muncul pada masyarakat modern, yaitu waktu adalah uang, waktu adalah kekuatan dan kekuasaan, dan usia itu singkat. Persepsi waktu adalah uang merupakan logika akumulasi ekonomi dimana ketiga percepatan tersebut berdampak pada ekonomi. Individu dengan persepsi waktu adalah uang akan berusaha mencapai produksi, sirkulasi, dan konsumsi lebih banyak komoditas dalam waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, semakin banyak produksi, sirkulasi, dan konsumsi dihasilkan dalam satu satuan waktu. Sementara itu, persepsi waktu adalah kekuatan dan kekuasaan

merupakan logika akumulasi politik, dimana ketiga percepatan membawa dampak pada politik. Individu dengan persepsi waktu adalah kekuatan dan kekuasaan akan berusaha memproduksi dan mengelola lebih banyak keputusan dan hubungan sosial dalam waktu yang lebih singkat. Di sisi lain, persepsi waktu/usia itu singkat merupakan logika akumulasi kultural dimana ketiga percepatan berdampak pada budaya. Individu dengan perspeksi usia itu pendek, akan berusaha memproduksi dan mengelola lebih banyak pengalaman dalam lebih sedikit waktu. Ketiga jenis kekuasaan ini, ekonomi, politik, dan kultural, saling berhubungan satu sama lain, sehingga satu kekuasaan dapat dikonversi ke kekuasaan lainnya.

Sementara itu, teori nilai ketenagakerjaan Marx melihat bahwa kelas dominan (kapitalis) akan berusaha melakukan eksploitasi pada kelas yang didominasi (tenaga kerja) dengan mendapatkan waktu-waktu yang tidak tergaji guna menumpuk modal. Teori ini melihat adanya dua level penumpukan modal yaitu nilai dan harga. Proses penumpukan modal dimulai pada level harga dimana uang M digunakan untuk membeli komoditas C, termasuk di dalamnya komoditas tenaga dan waktu yang dijual buruh kepada majikan. Selanjutnya, komoditas C dari berbagai jenis digunakan untuk proses produksi P. sebagai contoh, komoditas seperti bahan baku dan tenaga kerja digunakan untuk menghasilkan produk. Disini, level penumpukan modal bergeser ke level nilai. Nilai yang diutamakan adalah menghasilkan sebanyak mungkin komoditas baru C0 lewat proses produksi P dalam waktu seminimum mungkin. Disini, aspek waktu mulai memegang peranan penting. Tentu saja, semakin sedikit waktu untuk menghasilkan satu unit komoditas baru, semakin besar nilai yang diperoleh kapitalis. Komoditas baru kemudian dijual untuk mendapatkan uang M0 yang lebih besar dari sebelumnya. Uang ini kemudian digunakan untuk investasi dalam keuangan untuk memperbaiki krisis yang mungkin terjadi, finansialisasi, dan akselerasi keuangan. Disini terjadi transfer dari M0 di posisi akhir menjadi posisi awal siklus M1 dalam bentuk kredit, modal ventura, ataupun pasokan uang. Uang kemudian digunakan kembali untuk mempercepat sirkulasi dengan membeli komoditas selanjutnya. Dengan cara ini, modal menjadi semakin menumpuk lewat sebuah proses siklis yang tiada henti membawa pada M1, M2, dan seterusnya. Proses akumulasi ini digambarkan sebagai proses M --> C --> P --> C0 --> M0.

Karena percepatan pada dasarnya adalah peningkatan waktu secara non-linier, maka kedua teori kemudian menjadi berhubungan erat. Teori modernitas kritis menegaskan karakter akseleratif dari modernitas dan teori nilai ketenagakerjaan Marx menunjukkan bahwa waktu adalah nilai bagi upaya penumpukan modal. Karenanya, modernitas tidak lain adalah sebuah upaya penumpukan modal. Teknologi, perubahan sosial, dan derap kehidupan modern adalah faktor-faktor yang dipercepat guna penumpukan modal yang semakin besar.

Apa kemudian hubungan kedua teori ini dengan ketenagakerjaan prosumsi digital di media sosial? Kapitalis di media sosial telah melakukan investasi dalam bentuk uang M dengan menciptakan media sosial yang semenarik mungkin untuk menarik para pengguna media sosial C. Para pencipta ini adalah tenaga kerja digital berupa insinyur piranti lunak bergaji milik media sosial tersebut. Para pegawai ini menghasilkan komoditas berupa platform piranti lunak media sosial. Platform ini kemudian diberikan pada pengguna yang tidak dibayar. Mereka adalah tenaga kerja prosumsi digital media sosial tersebut.

Para pengguna media sosial kemudian melakukan aktivitas online dengan memproduksi konten, likes, jaringan, afeksi, hubungan sosial, dan sebagainya. Terdapat tiga jenis komoditas yang dihasilkan oleh pengguna media sosial bagi korporat. Pertama, nilai dari platform itu sendiri, misalnya ketenaran dari facebook dan sebagainya. Kedua, nilai dari data personal yang dimiliki oleh pengguna, seperti alamat, usia, hobi, dan sebagainya. Ketiga, nilai dari aktivitas online seperti komentar, foto, kata-kata kunci, laman yang sering dikunjungi, dan sebagainya. Ketiga jenis komoditas ini menjadi komoditas baru yang siap dijual oleh pengelola media sosial. Pengelola media sosial menjual komoditas ini pada perusahaan yang ingin memasang iklan. Komoditas data ini kemudian pada gilirannya menjadi komoditas C0 bagi para kapitalis setelah ditempeli dengan iklan yang merupakan produksi dari jalur yang berbeda yang membawa komoditas nyata seperti misalnya produk shampoo. Ketika pengguna media sosial tertarik dengan iklan, mereka akhirnya membeli produk dan membayarkan sejumlah uang M0 pada kapitalis korporat pemasang iklan. Dengan cara ini, maka siklus akumulasi modal telah tercapai. Sementara itu, bagi pengelola media sosial, mereka telah mendapatkan uang sejak perusahaan memutuskan untuk memasang iklan di media sosial tersebut. Data ini kemudian dipasok kembali ke dalam laman media

sosial pengguna dalam bentuk update terhadap profil pengguna. Siklus kemudian kembali berulang.

Waktu pada gilirannya menjadi faktor penting dalam proses akumulasi modal kapitalis di media sosial. Semakin lama pengguna berada di media sosial, semakin besar produksi yang terjadi, dan semakin besar pula keuntungan yang dapat diperoleh dari mekanisme penumpukan modal. Untuk memantau hal ini, media sosial menjual produk premium bagi para kapitalis pemasang iklan berupa indikator-indikator berbasis waktu dari statistik pengguna.

Bagaimana mungkin para pengguna mau sukarela menisbahkan waktunya untuk kapitalis? Penumpukan modal merupakan fitur utama dari kapitalisme sebagai sebuah sistem kelas, tetapi modal dapat berbentuk modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Kapitalis berupa perusahaan bisnis yang beroperasi di media sosial hanya terfokus pada modal ekonomi. Tetapi para pengguna media sosial, sebagai bagian dari masyarakat kapitalis, juga memiliki siklus penumpukan modal mereka sendiri, hanya saja mereka tidak tertarik dengan modal ekonomi (kecuali bagi mereka yang memang memiliki motif ekonomi). Pengguna media sosial memakai media sosial untuk menumpuk modal sosial, kultural, dan simbolik. Penumpukan modal sosial dapat dilihat dari upaya untuk membangun jaringan sosial dengan para pengguna media sosial lainnya. Penumpukan modal kultural terlihat dengan kegiatan mencari informasi dan berita di media sosial. Penumpukan modal simbolik terlihat dengan upaya melakukan manajemen kesan untuk menumpuk reputasi dan identitas di media sosial. Para pengguna, pada gilirannya, juga merupakan kapitalis yang menikmati proses menumpuk modal di media sosial.

Proses produksi pengguna media sosial digunakan oleh kapitalis korporat untuk menjadi modal ekonomi. Artinya, modal sosial, kultural, dan simbolik yang ditumpuk oleh pengguna media sosial ditransformasi menjadi modal ekonomi bagi para kapitalis korporat. Semakin intensif pengguna media sosial melakukan produksi modal yang mereka inginkan, semakin tinggi pula penumpukan modal ekonomi yang diperoleh kapitalis korporat.

Mengapa kemudian pengguna media sosial tidak menyadari terjadinya komodifikasi atas waktu yang mereka nisbahkan pada media sosial? Hal ini dapat terjadi karena pengguna media sosial dan kapitalis korporasi bekerja pada mode waktu

yang berbeda. Terdapat dua jenis mode waktu, yaitu waktu konkrit dan waktu abstrak. Waktu konkit adalah waktu yang diukur berdasarkan peristiwa, seperti siang-malam, satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, dan sebagainya. Waktu abstrak sebaliknya, diukur secara mental sebagai sebuah rentang yang tidak berubah dan seragam serta tidak mungkin dapat divariasikan. Waktu abstrak adalah waktu yang ditunjukkan oleh instrumen pengukur waktu seperti jam, baik mekanis maupun digital. Para pengguna media sosial bekerja dalam waktu konkrit. Mereka mempersepsi waktu sebagai urutan kegiatan seperti membuat komentar, mengunjungi laman pengguna lain, memposting foto, menonton video, dan sebagainya. Mereka sulit berhenti jika waktu terpotong oleh sesuatu yang lain. Sering proses untuk satu kali prosumsi dapat dipersepsi dari perspektif waktu abstrak sebagai 'lupa waktu'. Mereka sebenarnya tidak lupa waktu, mereka hanya bekerja dalam mode waktu berbeda. Di sisi lain, korporasi bekerja dalam waktu abstrak. Mereka mengukur jumlah unit produk yang dihasilkan per detik. Agar produksi terus berjalan, mereka akan menambahkan fitur-fitur yang membuat para pengguna memiliki tambahan aktivitas yang memperpanjang jam konkrit mereka di media sosial, yang berarti memperpanjang pula jam abstrak yang digunakan oleh korporasi. Karenanya, kita akan terus melihat adanya fitur-fitur baru di media sosial di update secara berkala untuk meningkatkan lama waktu abstrak maupun konkrit pengguna di media sosial. Korporasi akan memberikan lebih banyak waktu konkrit pada pengguna media sosial guna mendapatkan lebih banyak lagi komoditas, sama seperti korporasi di dunia nyata yang memberikan lebih banyak gaji untuk para pegawainya untuk memacu produksi mereka.

Implikasi

Implikasi Praktis

Media sosial pada dasarnya mendapatkan keuntungan dari kontribusi intensif dari para pengguna mereka. Tanpa pengguna, media sosial tidak mengandung apapun. Hal ini berbeda dengan situs web non media sosial yang ada atau tidak pengunjung, tetap mengandung informasi dan informasi ini dipasok oleh pemilik situs semata. Sementara situs non media sosial berjuang untuk mencari kata-kata kunci yang dapat memicu iklan lewat Search Engine Optimization (SEO), media sosial berjuang untuk menarik pengguna baru guna menjadi para prosumen mereka.

Karakteristik seperti ini berimplikasi pada media sosial itu sendiri yang pada gilirannya akan berjuang untuk semakin menenggelamkan pengguna lebih lama ke dalam platform yang mereka buat. Makna dari upaya penumpukan modal yang semakin besar ini tentunya relatif tergantung dari bagaimana setiap pengguna media sosial memberikan nilai pada kehidupannya di luar media sosial dan di dalam media sosial. Tetapi seringkali, beberapa hal yang patut disayangkan terjadi: pramusaji yang mengabaikan tamu karena asyik bermain media sosial atau penyebaran konten hasutan dan kebencian di media sosial yang mengakibatkan konflik yang tidak semestinya terjadi di dunia nyata, serta penyebaran perilaku berisiko di media sosial. Akan sangat bijak jika media sosial selain meningkatkan aktivitas pengguna juga turut meningkatkan makna positif dari media sosial. Untuk itu, perancang media sosial jangan sampai menyentuh aspek-aspek primordial negatif yang tidak diinginkan dari manusia dalam upaya meningkatkan waktu pengguna di media sosial. Perdebatan dan perkelahian wacana di media sosial akan sangat menyita waktu pengguna facebook dan hal ini dapat menggoda bagi pemilik media sosial untuk melestarikan konten kontroversial, bahkan hoax, di media sosial. Pengelola media sosial yang bermoral dan peduli dengan kedamaian semestinya membangun fitur-fitur yang menyaring konten yang tidak diinginkan tersebut. Hal ini demi kelangsungan hidup media sosial itu sendiri karena jika terlalu ekstrim, pemerintah dapat terpaksa menutup akses pengguna ke media sosial, sehingga membawa pada kerugian finansial bagi media sosial itu sendiri.

Peran waktu sebagai kategori penting dalam proses akumulasi modal media sosial korporat membawa implikasi pula pada dunia ekonomi, khususnya bagi UMKM. Selama ini, media sosial mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan born-digital atau perusahaan tradisional. Banyak UMKM tidak mampu membayar iklan personal bertarget dan mereka hanya mampu meraih pasar lewat pengembangan jaringan secara manual, ketimbang dibantu oleh sistem akumulasi modal media sosial. Para pengguna dengan motif ekonomi ini secara manual memodifikasi profil dan gambar, mencari konsumen satu persatu dengan kata kunci yang muncul di benak mereka, berteman dengan calon-calon konsumen potensial, lalu membuat hubungan dengan harapan teman baru mereka dapat menjadi konsumen mereka.

UMKM bukanlah sumber uang yang menarik bagi media sosial dan karenanya, dibiarkan saja berkembang tanpa bantuan di media sosial. Dalam besarnya hasrat

penumpukan modal di media sosial, sulit berharap kalau media sosial akan membantu para pelaku bisnis kecil untuk mendapatkan konsumen yang mereka inginkan dari sistem pentargetan iklan media sosial. Tetapi UMKM tidak perlu berkecil hati. Walau bagaimanapun, iklan bertarget dikritik telah menginvasi privasi dari pengguna media sosial karena berusaha mendapatkan data sebanyak mungkin untuk dikomodifikasi. Banyak pengguna media sosial yang kurang peduli atau bahkan menjadi 'buta' dengan adanya iklan-iklan sehingga efektivitas iklan bertarget menjadi dipertanyakan dalam mendapatkan konsumen. Akibatnya, media sosial menjadi rentan pada krisis keuangan dan akhirnya dapat bertopang pada UMKM untuk menunjang hidupnya.

Walau demikian, akselerasi teknologi dapat membawa pada situasi dimana media sosial memiliki algoritma yang begitu canggih sehingga mampu menyentuh keinginan tersembunyi dari setiap pengguna. Dengan kata lain, mereka dapat menciptakan sebuah mekanisme produksi komoditas yang begitu efisien sehingga iklan-iklan yang dihasilkan memiliki nilai yang sangat personal sehingga tentu saja, akan menjadikan pengguna sangat terikat dan bahkan adiktif pada media sosial. Akan sangat menarik jika saat seorang pengguna menginginkan, katakanlah, mesin jahit, iklan mesin jahit langsung hadir, datang dari UMKM atau perusahaan yang berada sangat dekat dengan kediamannya dengan produk yang ditawarkan sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi yang ia inginkan.

Implikasi Akademis

Waktu sosial konkrit yang ingin diperpanjang media sosial guna memenuhi kebutuhan mereka akan modal uang juga akan memberikan implikasi pada kalangan akademis dengan memicu penelitian-penelitian terkait fenomena prosumsi digital di media sosial. Bidang penelitian ini adalah bidang penelitian baru yang dapat dieksplorasi lebih mendalam dengan berbagai pendekatan. Pendekatan Marxis dalam karya Fuchs (2014) dapat ditandingkan dengan pendekatan-pendekatan lainnya seperti sosio-kultural, sibernetik, dan sebagainya.

Salah satu bidang yang dapat diangkat adalah bagaimana prosumsi digital dapat menyumbang pada hubungan internasional dan kampanye pemerintah. Dengan semakin terlibatnya warga negara pada media sosial, akan menjadi penting untuk meneliti dan mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara sistematis lewat media

sosial. Dengan kata lain, media sosial dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat untuk menumpuk modal politik, sebagaimana diteorikan oleh teori modernitas kritis.

Selain itu, teori nilai ketenagakerjaan yang dikembangkan dalam penelitian Fuchs (2014) dapat diangkat untuk menyusun model akumulasi modal pada fenomena sejenis. Konsep playbour dan prosumsi telah dimunculkan belakangan. Apakah mungkin akademisi kemudian akan menghasilkan konsep-konsep baru di masa depan, seiring perkembangan teori ketenagakerjaan yang ada. Kita dapat menjajaki kemungkinan misalnya, adanya persilangan antara bekerja dan mengurus anak pada hubungan antara pengguna media sosial yang memiliki relasi keluarga, bagaimana model akumulasi modal sosial yang terjadi, dan bagaimana peran media sosial dalam hal ini. Dengan kata lain, fokus penelitian Fuchs (2014) pada modal ekonomi dapat digeser oleh penelitian selanjutnya ke modal lainnya baik itu modal simbolik, kultural, atau modal sosial, atau domain politik.

Peristiwa terbaru saat ini terkait penangkapan jasa penyebar konten kebencian, Sarasen, juga dapat menjadi topik menarik untuk penelitian model akumulasi modal ketenagakerjaan di media sosial. Para peneliti misalnya dapat mempelajari bagaimana para tanaga kerja Sarasen membuat hasutan dan bagaimana dampaknya di media sosial. Modal apa yang ditumpuk oleh berbagai pihak terlibat serta bagaimana proses terbentuknya kebencian di media sosial akibat penyebaran konten tersebut. Tentu saja, arah penelitian yang sebaliknya dapat dibuat, misalnya terkait penyebaran kampanye larangan merokok atau hal-hal positif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alexa (8 September 2017) Top Sites. https://www.alexa.com/topsites

Arvidsson, A. (2005). Brands: A critical perspective. Journal of consumer culture, 5(2), 235-258.

Burston, J., Dyer-Witheford, N., & Hearn, A. (2010). Digital labour: Workers, authors, citizens. Special issue, ephemera: theory and politics in organization, 10(3/4), 214-221.

Fuchs, C. (2014). Digital prosumption labour on social media in the context of the capitalist regime of time. Time & Society, 23(1), 97-123.

Kücklich, J. (2005). Precarious playbour: Modders and the digital games industry.

fibreculture, 5(1).

Marx, K., Engels, F (2013[1848]). Manifesto of the communist party. Simon and Schuster.

Thompson, E. P. (1967). Time, work-discipline, and industrial capitalism. Past & Present, (38), 56-97.

Zephoria (Agustus 2017) Top 20 Valuable Facebook Statistics: Updated August 2017. https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/

KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU TERHADAP KESADARAN MEREK

Salman
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Industri Kreatif Kalbis Institute
Jalan Pulomas Selatan Kav 22, Jakarta Timur 13210
Email : salman.naning@kalbis.ac.id

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pesan iklan dapat meningkatkan kesadaran merek. Menghadapi persaingan yang sangat kompetitif, tentunya perusahaan pemegang merek punya strategi – strategi khusus agar keberhasil membaangun mereknya. Merek merupakan nyawa dari suatu produk, merek memiliki kelebihan dibandingkan produk itu sendiri, dimana produk bisa saja mati, sedangkan merek memiliki daur hidup yang panjang. Merek secara riil berhubungan dengan konsumen secara langsung, dalam merek mengandung berbagai macam makna, karena dia memiliki keampuhan dalam menarik minat beli konsumen.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada informan, dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pesan iklan yang ditayangkan diyoutube memiliki unsur rasa takut. Pada produk yang tidak memiliki merek yang dikenal dapat menimbulkan ketakutan menggunakannya, dalam hal ini menunjukkan bahwa pengguna ojek pangkalan akan beralih ke ojek berbasis aplikasi seperti Grab yang dapat menimbulkan kepercayaan terhadap merek Grab tersebut, karena lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan.

Kata Kunci: komunikasi pemasaran terpadu, iklan youtube, kesadaran merek, Grab

PENDAHULUAN

Kehadiran merek dibenak khalayak, sangat dibutuhkan agar dapat diketahui dan digunakan. Banyak cara yang dilakukan dalam mengenalkan merek kebenak khalayak, salah satunya dengan kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan yang sangat kompetitif. Kegiatan komunikasi pemasaran terpadu merupakan kegiatan yang sangat efektif dalam membangun merek di benak khalayak, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam komunikasi pemasaran terpatu, seperti periklanan, periklanan merupakan salah satu aspek dari komunikasi pemasaran perusahaan. Komunikasi pemasaran terpadu

merupakan upaya untuk menjadikan seluruh kegiatan promosi dan pemasaran perusahaan dapat menghasilkan citra atau image yang bersifat satu dan konsisten bagi konsumen (Morrisan, 2014:9). Keputusan–keputusan yang menyangkut periklanan selalu berkaitan dengan aspek komunikasi pemasaran lainnya seperti: penjualan perseorangan, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat. Karakteristik dari kegiatan komunikasi pemasaran terpadu adalah: (1). Menciptakan satu pesan "*One Voice"*; (2). Sinergis. Integrasi atau gabungan dari berbagai elemen komunikasi pemasaran yang dilakukan harus menghasilkan suatu sinergi. Artinya, efek yang dihasilkan dari gabungan jauh lebih besar dari penjumlahan efek masing-masing; (3). IMC bersifat *strategic* adalah program IMC yang *consumer-oriented* atau berbasis konsumen.; (4). IMC harus holistic atau merupakan sebuah proses yang lintas-fungsional dan melibatkan serangkaian dinamika langkah yang progresif dan saling-tergantung; (5). Program IMC harus terukur, program IMC harus didasarkan pada outcome-based daripada hanya sekedar output-based.

Karakteristik dari kegiatan komukasi pemasaran terpadu tersebut bertujuan agar merek melekat dibenak khalayak. Merek secara riil berhubungan dengan konsumen secara langsung, dalam merek mengandung berbacam makna, karena dia memiliki keampuhan dalam menarik minat beli konsumen. Menurut Aaker(1997:9), Merek adalah nama dan atau simbol yang bersifat membedakan, seperti: logo, cap atau kemasan dengan maksud mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu, serta membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan para pesaing. Merek memberikan tanda mengenai sumber produk serta melindungi konsumen maupun produsen dari pesaing yang berusaha memberikan produk-produk yang menyerupai.

Menghadapi persaingan dalam industri transportasi yang sangat kompetitif, tentunya punya strategi – strategi khusus, agar keberhasil promosi yang dilakukan berhasil membangun kesadaran mereknya, seperti yang dilakukan oleh Grab industri transportasi berbasis aplikasi. Grab banyak melakukan kegiatan promosi dengan menggunakan komunikasi pemasaran terpadu, salah satunya adalah beriklan dimedia sosial berbagi Video atau yang biasanya disebut dengan Youtube.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana kegiatan komunikasi pemasaran terpadu terhadap kesadaran merek.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan komunikasi pemasaran terpadu terhadap kesadaran merek

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Komunikasi Kognitif

Teori kognitif dan tingkah laku (*behavior*) cenderung memusatkan perhatian pada individu dan karenanya, ilmu psikologi menjadi sumber utama teori ini. Menurut pendukung teori kognitif, psikologi tingkah laku (*psychological behaviorism*) memiliki fokus perhatian pada hubungan antara stimuli (*input*) dan respons (*output*) yang terwujud dalam bentuk tingkah laku (Morissan, 2013:10).

B. *Integrated Marketing Communication* (IMC)

Menurut Four As (*the American Associaton of Advertising Agency*) dalam Hermawan (2012:52), IMC (*Integrated Marketing Communication*) adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari perencanaan komprehensif yang mengkaji peran strategis masing-masing bentuk komunikasi misalnya iklan, promosi penjualan, penjualan langsung, dan humas (hubungan masyarakat) serta memadukannya untuk meraih kejelasan pesan, konsistensi dan dampak komunikasi maksimal melalui keterintegrasian pesan.

C. Iklan (*Advertising*)

Menurut Kotler, periklanan didefinisikan sebagai bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Dimana periklanan adalah sebuah alat promosi yang disebarkan secara luas dalam menyampaikan sebuah pesan dan informasi produk, baik barang maupun jasa yang ingin di tawarkan, iklan tersebut disebarluaskan untuk dapat menarik target konsumen.

Pesan yang baik didesain dengan mempertimbankan beberapa hal seperti : (1). Isi pesan; (2). Sruktur Pesan; (3). Format pesan (Kotler, 2008:125).

1. Isi Pesan

   Menentukan daya tarik atau tema hal ini bertujuan untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Ada tiga tipe tema yaitu: (1). Rasional; (2). emosional dan (3). moral. Setiap pesan iklan mampu menjadikan produk sebagai barang yang menjadikan konsumennya percaya akan informasi yang ada dalam iklan.

2. Struktur Pesan

Terdapat tiga hal mnejadi permasalahan dalam membuat struktur pesan. Pertama, apakah pemasar akan menarik kesimpulan atau menyerahkannya kepada pemirsa. Kedua, apakah pemasar akan menghadirkan argumen terkuat lebih dahulu atau terakhir. Ketiga, apakah pemasar akan menghadirkan argumen satu sisi atau argumen dua sisi.

3. Format Pesan

Ketika pesan disiarkan melalui tayangan berupa video seperti pada tayangan iklan di televisi ataupun pada media baru seperti youtube, maka semua elemen seperti kata-kata, bunyi dan suara beserta bahasa tubuh harus direncanakan. Dari pernyataan tersebut bahwa, didalam sebuah pesan iklan terdapat elemen yang dapat menjadi susunan iklan untuk menghidupkan sebuah pesan iklan.

D. Menampilkan Pesan Iklan

Menurut Abdullah (2017:120), ada beberapa konsep daya tarik yang bisa dipilih dalam menampilkan pesan iklan, diantaranya:

1. Daya tarik pesan iklan rasional.

Ada beberapa tipe pesan iklan yang dapat membangkitkan daya tarik rasional sehingga mendapat perhatian dari konsumen. Diantara tipe penampilan iklan yang dapat menimbulkan daya tarik rasional yang sudah dikenal misalnya:

a. Faktual, daya tarik tipe ini umumnya berhubungan dengan pengambilan keputusan high involvement, yaitu penerima pesan dimotivasi untuk dapat memproses informasi. Iklan yang menampilkan sisi manfaat produk dan keunggulan produk sekaligus menampilkan argumentasi yang masuk akal termasuk kedalam tipe daya tarik faktual.
b. Potongan kehidupan, penonton disuguhi pesan iklan dalam bentuk kegiatan sehari-hari yang sering dialami oleh banyak orang. Dimana, iklan dapat dibuat berdasarkan kehidupan sehari-hari para konsumen yang sesuai dengan produknya.
c. Demonstrasi, pesan iklan yang ditampilkan dengan demonstrasi ini menggambarkan kemampuan produk secara instrumental untuk menyelesaikan masalah. Iklan dapat menampilkan sebuah percobaan untuk mendemonstrasikan kegunaan produk tersebut. demonstrasi tersebut tentunya

bertujuan untuk meyakinkan konsumen terhadap kegunaan produk yang diiklankan. Demonstrasi tersebut mengaitkan produk dengan permasalahan yang dialami oleh konsumen dikehidupan sehari-hari.

d. Iklan perbandingan (comparative advertising), iklan ini berusaha membandingkan keunggulan produk yang ditawarkan dengan produk lain yang sejenis. Pemasar berusaha meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkannya lebih baik dari produk lain.

2. Penggunaan daya tarik perasaan dan emosi banyak digunakan baik untuk produk yang berharga mahal maupun untuk produk berharga murah. Beberapa contoh iklan yang menggunakan daya tarik perasaan dan emosi antara lain:

a. Rasa takut (fear), tampilan iklan yang menggunakan rasa takut biasanya menampilkan aspek-aspek negatif atau hal-hal yang berbahaya yang berhubungan dengan perilaku atau penggunaan produk yang tidak tepat.

b. Humor, penggunaan humor sebagai daya tarik emosional, sangat menarik karena hal itu sangat menarik perhatian dan dapat menimbulkan daya tarik humor adalah bahwa humor dapat membuat penerima pesan memperoleh mood positif. Ketika pemirsa memperoleh mood positif maka probabilitas penerimaan pesan secara baik dan lebih besar.

c. Animasi, juga merupakan cara menampilkan daya tarik iklan. Animasi banyak digunakan untuk menampilkan produk-produk yang konsumennya anak-anak.

d. Seks, penggunaan sindiran seksual atau tema seksual. Penggunaan tema seksual dalam iklan sangat kontroversial. Banyak juga iklan yang menggunakan tema seksual diprotes oleh masyarakat. Penampilan iklan dengan seksual nampaknya memang ampuh, sehingga banyak iklan produk tertentu yang tidak berhubungan dengan seksual juga menggunakan tema seksual.

e. Musik, penggunaan musik sebagai pengiring iklan sering digunakan. Musik dalam iklan dapat berfungsi sebagai deferensiator, artinya penggunaan musik dalam iklan akan menimbulkan karisma, wibawa, kesan tersendiri.

f. Fantasi, merupakan salah satu cara untuk menimbulkan daya tarik tampilan iklan. Penggunaan fantasi sebagai daya tarik iklan dapat menimbulkan perhatian penonton.

E. Merek

Menutut *American Marketing Association* (AMA), merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi diantaranya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang dan jasa para pesaingnya. Jati diri produk berada dalam sebuah merek, untuk memberikan kesan pembeda dari pesaing lainnya. (Abdullah, 2017:61).

Sedangkaan menurut Swasty (2016:4), merek adalah entitas yang mudah dikenali dan menjanjikan nilai–nilai tertentu. Entitas adalah sesuatu yang memiliki eksistensi yang khas dan berbeda serta dengan mudah memisahkan satu barang serupa dengan yang lainnya melalui beberapa cara. Cara tersebut berupa memberikan janji dari produsen kepada konsumen yaitu dengan keramahan, pelayanan, daya tahan produk, dan sebagainya. Sebuah cara tersebut tentunya dapat menimbulkan rasa ketertarikan yang tinggi kepada konsumen terhadap suatu produk agar dapat lebih selektif kembali dalam memilih produk sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Swasty (2016:8), merek yang baik dapat menyampaikan jaminan kualitas, dengan enam tingkatan makna, yaitu sebagai berikut:

1. Atribut; dimana sebuah merek membawa ke dalam pikiran tertentu.
2. Manfaat; atribut harus dapat diterjemahkan ke dalam manfaat fungsional dan emosional.
3. Nilai; merek mengatakan sesuatu tentang nilai yang dimiliki suatu perusahaan pemegang merek.
4. Budaya; merek mewakili budaya tertentu.
5. Personality; merek dapat memproyeksikan kepribadian atau sifat tertentu.
6. Pengguna; merek menyarankan jenis pelanggan yang membeli atau menggunakan produk atau jasa.

METODE

A. Paradigma, Jenis, dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivist, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan

objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan presepsi sasaran penelitian (Gunawan, 2013:79-81).

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer peneliti menggunakan wawancara mendalam kepada informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau infomasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Sedangkan data sekunder dengan studi literatur.

C. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Interaktif Miles dan Huberman, teknik ini terdiri dari tiga komponen yaitu: (1). reduksi data (*data reduction*); (2). penyajian data (*data display*); (3). Penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap.Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data.Pada tahap kedua, peneliti-menyusun kode-kode dan catatan-catatan (*memo*) mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.Catatan yang dimaksdukan di sini adalah gagasan-gagasan atau ungkapan-ungkapan yang mengarah pada teorisasi data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat atau mungkin beberapa paragraf. Pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok-kelompok data yang bersangkutan (Pawito, 2007:104-105)

PEMBAHASAN

Grab adalah moda transportasi berbasis online, merek yang berdiri dari Singapura. Perusahaan ini, sebelum masuk ke Indonesia Grab yang bermarkas di Singapura merupakan penyedia transportasi taksi berbasis aplikasi. Untuk menyesuaikan dengan pasar Indonesia, dan juga menghadapi gencarnya perusahaan asal Indonesia yaitu Gojek, maka Grab pun menyediakan sarana transportasi roda dua atau yang lazimnya disebut dengan Ojek motor. Sebelum adanya Gojek dan Grab,

transportasi Ojek Motor cukup dapat diandalkan dalam menempuh perjalanan yang sangat pada di kota besar seperti Jakarta.

Selain bersaing dengan Gojek, yang menjadi tantangan juga bagi Grab adalah masih banyaknya masyakarat menggunakan ojek konvensional atau yang biasa disebut dengan Ojek Pangkalan (Opang). Untuk itu Grab banyak merekrut tukang ojek pangkalan untuk bergabung sebagai pengembudi mereka, tapi walaupun sudah dilakukan perekrutan besar-besaran masih banyak juga pada tukang ojek tidak bergabung pada Grab ataupun perusahaan lainnya yang berbasis aplikasi, hal tersebut dikarenakan para tukan ojek tersebut tidak persyaratan, seperti kebanyakan dari tukang ojek pangkalan tidak memiliki Sim C, kendaraan yang masih menyewa yang bukan milik sendiri. Karena mereka tidak dapat bergabung pada perusahaan yang berbasis aplikasi, tukang ojek tersebut masih menjalankan profesinya sebagai tukang ojek pangkalan (Opang). Tentunya hal inilah yang menyebabkan pesaing dari Grab tidak hanya perusahaan berbasis aplikasi lainnya, tetapi juga para tukang ojek pangkalan tersebut.

Untuk menghadapi persaingan yang sangat kompetitif dalam industri transportasi diIndonesia, khususnya Jakarta. Grab banyak melakukan kegiatan promosi dengan menggunakan komunikasi pemasaran terpadu, salah satunya adalah menggunakan media sosial berbagi Video atau yang biasanya disebut dengan Youtube. Banyak sekali promosi iklan yang dilakukan oleh Grab, salah satunya adalah iklan yang menampilkan wanita cantik yang menggunakan ojek selain Grab, yang menyebabkan wanita tersebut merubah menjadi sangat menyedihkan, dengan tampilan yang penuh darah dan luka sekujur tubuhnya. Maksud dari iklan tersebut tentunya ingin menyampaikan kepada penggunanya adalah untuk memilih transportasi yang mendukung keamanan dan keselamatan, jadi pilihlah yang benar-benar terpercaya seperti Grab.

Terkait hal tersebut, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, bahwa apa yang ditampilkan dari iklan yang tayang di youtube tersebut kadang-kadang membuat kengerian dan ketakutan dalam menggunakan moda transportasi roda dua seperti motor. Seperti yang di kemukakan oleh Yuyun salah satu narasumber “Kadang-kadang naik motor itu harus punya nyali ganda dan nyawa cadangan seperti kucing, he..he..he..” ditanya lebih mendalam maksud jawaban tersebut, masih menurut Yuyun “kalo naik motor itu harus siap segala resiko dan kejadiannya, nah kalo terkait iklan

Grab yang di Youtube,memang sangat ngeri jika naik ojek sembarangan karena kadang-kadang tukang ojeknya ngebut, tidak memikirkan keselamatan penumpangnya."

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ridwan salah satu pengguna transportasi online dan pengguna Grab, menurutnya "sah-sah saja iklan seperti itu, namanya juga menarik penumpang beralih ke Grab, tapi bagi saya ada atau tidak ada iklan tersebut saya tetap akan menggunakan aplikasi, karena lebih mudah, gak capek jalan".

Iklan yang ditampilkan pada tanyangan Grab di Youtube mengandung unsur rasa takut (f*ear*), Seperti yang dikemukakan oleh informan Sandi. "Saya takut melihat iklan yang ada di Youtube, jadi gak berani naik ojek yang mangkal, tapi kadang-kadang saya takut juga naik Grab". Menurut Sandi bahwa apa yang ditampilkan dalam iklan tersebut lebih menyebabkan rasa takut ketika akan menggunakan kendaraan roda dua, baik yang biasa ataupun yang sudah berbasis aplikasi. Namun karena alternatif pilihan tidak ada terlalu banyak, informan sandi tetap menggunakan Grab.

Terkait pesan yang ingin disampaikan Grab di Youtube tersebut, bagi informan isi pesan nya sangat mengandung unsur rasa takut sebagai daya tarik iklannya. Jadi dengan ditampilkan iklan tersebut diharapkan para pemakai jasa ojek motor pangkalan berubah menggunakan Grab, seperti yang dikemukakan oleh Ridwan "menurut saya, iklan tersebut untuk menarik pengguna jasa ojek pangkalan, ataupun yang lain di luar Grab, dan juga mungkin ingin memberi tahu kepada pengguna lain bahwa Grab itu lebih aman dalam hal keselamatan, sehingga mereka tahu bahwa Grab memang mengutamakan keselamatan dan ke-nyamanan penumpangnya."

SIMPULAN

Pesan Iklan yang ditampilkan melalui youtube yang dilakukan oleh Grab Indonesia mengandung unsur rasa takut, sehingga dampaknya menimbulkan rasa kengerian bagi pengguna ojekn pangkalan maupun bagi ojek yang berbasis aplikasi seperti Grab. Walaupun demikin iklan tersebut memiliki dampak yang cukup positif bagi Grab, karena pengguna jadi lebih mengenal Grab karena mereka menganggap bahwa menggunakan Grab lebih aman. Dalam hal ini masyarakat yang beranggapan bahwa semua kendaraan beroda dua sama saja, dengan adanya iklan ini jadi mereka memahami untuk aman adalah menggunakan Grab transportasi berbasis aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aaker, D. A. (1997). *Manajemen Ekuitas Merek, alih Bahasa; Aris Ananda.–*. Jakarta: Mitra Utama

Abdullah, M. M. (2017). *Manajemen Komunikasi Periklanan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek. Jakarta: PT Bumi Aksara

Hermawan, A. (2012). Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Erlangga.

Kotler dan A. (2008). Prinsip-prinsip Pemasaran. Jilid 1 dan 2.Edisi 12. Jakarta: Erlangga.

Morrisan. (2013). Teori Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Morrisan. (2014). Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Pawito. (2007). Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara

Swasty, W. (2016). Branding: Memahami dan Merancang Strategi Merek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

SENI SEBAGAI MEDIA PEMBAURAN BUDAYA TIONGHOA DAN SUNDA DI KOTA BANDUNG

Santi Susanti, Dian Sinaga, Fitri Perdana
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
Email : santisusanti2202@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran seni atau kesenian sebagai media pembauran budaya antara etnis Tionghoa dengan Sunda di Kota Bandung. Seni merupakan salah satu hasil budaya yang bersumber dari pengolahan rasa dan karsa manusia yang mewujud dalam bentuk karya yang bisa dilihat, diraba, didengar dan dirasakan. Walaupun dihasilkan oleh masyarakat yang hidup dalam suatu budaya tertentu, akan tetapi, seni memiliki sifat universal, yakni dapat dinikmati oleh siapapun tanpa harus berasal dari kelompok masyarakat asli yang menciptakan kreasi seni tersebut. Rasa estetika mendorong seseorang tidak hanya menjadi penikmat, juga menjadi pelaku, bahkan merasa sebagai pemilik dari kesenian tersebut. Beberapa individu Tionghoa di Kota Bandung merasakan hal tersebut. Mereka menjadi pelaku dari seni yang tercipta dari tanah Pasundan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka diperoleh hasil bahwa kesenian Sunda menjadi media pembauran budaya Tionghoa dan Sunda di Kota Bandung. Seni karawitan (musik), seni tari dan seni sastra menjadi pilihan bagi individu Tionghoa untuk berbaur dengan masyarakat Sunda, sesuai dengan peminatan mereka. Selain dilakukan secara personal, apresiasi individu Tionghoa terhadap budaya Sunda, juga dilakukan secara kelompok dengan membentuk perkumpulan atau kelompok seni yang beranggotakan individu Tionghoa yang mencintai budaya Sunda. Mereka pun kerap melakukan pementasan di kalangan internal maupun atas undangan dari pihak penyelenggara. Bagi individu Tionghoa, mencintai seni budaya Sunda tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan apresiasi juga sebagai media pembauran antara budaya Tionghoa dan Sunda.

Kata kunci: *Tionghoa, Sunda, seni budaya, pembauran.*

PENDAHULUAN

Orang-orang Tionghoa telah sejak lama datang ke Bandung dengan tujuan berdagang. Sejak tahun 1800-an, orang-orang Tionghoa sudah memiliki kawasan tersendiri di Bandung, yang disebut Pecinan, yang terdapat di sekitar wilayah Pasar Baru sekarang (Kunto, 1984: 168). Sebagian besar mata pencaharian mereka adalah berdagang. Mereka beradaptasi dengan penduduk setempat, salah satunya melalui

bahasa (Skober: 2006). Orang-orang Tionghoa di Bandung ketika itu sudah fasih berbahasa Sunda.

Melalui aktivitas perdagangan pula, hubungan antara orang Sunda dengan orang Tionghoa di Bandung terjalin. Kawasan pecinan di Bandung tidak memiliki batasan wilayah, karena hubungan warga Tionghoa dan orang Sunda (pribumi) sekitar abad ke-19 dekat sekali. Hubungan dengan orang Tionghoa menyebabkan orang pribumi sejak tahun 1881 mengenal berbagai jenis makanan Tionghoa, antara lain bacang, bakmi, bapau, kecap, sekoteng, takoah (tahu), tauco, taoge, bihun dan soun. Orang pribumi kemudian menyerap pengetahuan tentang membuat makanan tersebut. Sebaliknya, orang-orang Tionghoa berangsur-angsur mengenal dan menyerap sebagian budaya Sunda, antara lain bahasa (Kunto, 1986: 508). Akulturasi budaya antara orang Sunda dengan Tionghoa terjadi pula melalui perkawinan. Sejumlah orang Tionghoa laki-laki menikah dengan wanita pribumi, Sunda atau Jawa (Catur dalam Hardjasaputra, 2002: 184).

Beberapa individu Tionghoa yang mencintai dan menjalani budaya Sunda secara terbuka mengadakan kegiatan yang terkait dengan kasundaan dan mereka pun berbaur dengan warga Bandung dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial maupun budaya. Beberapa individu Tionghoa tersebut menjadi informan dalam penelitian ini.
Pemilihan individu Tionghoa sebagai informan penelitian ini didasarkan pada kenyataan adanya individu keturunan Tionghoa yang mencintai dan menjalani hidup nyunda dalam beragam bentuknya sesuai pemaknaan yang mereka berikan terhadap kasundaan. Apa yang mereka lakukan dapat menjadi contoh bagi orang Sunda pituin (asli) pada umumnya untuk ngamumule (melestarikan) budayanya sendiri agar bertahan dari gerusan budaya luar.

Masuknya nilai-nilai kasundaan kepada individu Tionghoa, disadari atau tidak disadari, memengaruhi cara pandang mereka terhadap budaya Sunda dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini adalah bagaimana individu Tionghoa memaknai kasundaan melalui kesenian serta menjadikan kesenian sebagai media peleburan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Sunda.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pemaknaan kasundaan oleh individu Tionghoa dan pengalaman individu Tionghoa dalam menjadikan kesenian sebagai media peleburan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Sunda.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teoretis

Teori Tindakan Sosial Max Weber

Teori Tindakan Sosial (social action theory), dicetuskan Max Weber, seorang perintis sosiologi di Jerman. Menurut Weber, tindakan sosial merupakan semua perilaku individu yang memiliki makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Weber dalam Ritzer, 1975). Tindakan di sini bisa terbuka atau tersembunyi, bisa merupakan intervensi positif dalam suatu situasi atau sengaja berdiam diri sebagai tanda setuju dalam situasi tersebut.

Bagi Weber, perilaku manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berpikir dan disengaja, baik orang lain maupun bagi sang aktor sendiri, yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lain, berkomunikasi satu sama lain dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai maksud komunikasinya.

Teori yang dikembangkan oleh Max Weber ini merupakan dasar bagi munculnya teori-teori subjektif yang pendekatannya berdasarkan interaksi sosial, salah satunya teori fenomenologi.

Teori Fenomenologi

Teori fenomenologi termasuk kelompok teori subjektif. Teori ini memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman sadar seorang individu. Menurut teori ini, realitas dikonstruksi sesuai sudut pandang individu yang dijadikan informan penelitian. Peneliti sebagai instrumen penelitian, tidak berasumsi apapun terhadap orang yang ditelitinya, melainkan mencoba merangkai pengalaman informan yang diteliti menjadi realitas yang ditemukan sesuai sudut pandang mereka (Bajari, 2009: 74)

Menurut Polkinghorne dalam Creswell (1998: 51), penelitian fenomenologi menjelaskan atau mengungkap makna pengalaman yang disadari sejumlah individu mengenai konsep atau fenomena. Penelitian dilakukan dalam situasi alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Dengan demikian, interpretasi informan terhadap fenomena yang sama akan beragam. Konstruksi kebenaran yang dibangun peneliti, harus memegang teguh prinsip bahwa peneliti hanya menemukan realitas, bukan membuktikannya. Kunci penemuan

kebenaran ada pada informan yang ditelaah atau orang yang ditemukan masalahnya. Makna tentang sesuatu dikonstruksi menurut sudut pandang individu informan.

Teori fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikembangkan Edmund Husserl dan Alfred Schutz. Edmund Husserl adalah seorang ahli matematika Jerman, yang dikenal sebagai Bapak Fenomenologi. Husserl meletakkan dasar-dasar fenomenologi sebagai aliran filsafat dengan menyatakan bahwa kebenaran fenomena seperti tampak apa adanya. Husserl mengkhususkan pembahasannya pada fenomenologi sebagai ilmu mengenai pokok-pokok kesadaran. Husserl dalam Kuswarno (2009: 10) berpendapat, dengan fenomenologi dapat dipelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri.

Masih menurut Husserl dalam Kuswarno (2009: 6), fenomena harus dipertimbangkan sebagai muatan objektif yang disengaja dari tindakan sadar subjektif. Pengalaman sadar individu adalah jalan yang tepat untuk menemukan realitas. Hanya melalui 'perhatian sadar' (conscious attention), kebenaran dapat diketahui. Untuk dapat melakukan itu, kita harus menyingkirkan bias yang ada pada diri kita. Kita harus meninggalkan berbagai kategori berpikir dan kebiasaan kita melihat sesuatu agar dapat merasakan pengalaman sebagaimana adanya. Melalui cara ini berbagai objek di dunia dapat hadir dalam kesadaran kita.

Alfred Schutz adalah seorang filsuf fenomenologi kelahiran Viena, Austria, tahun 1899. Ia mengembangkan teori fenomenologi yang digagas Husserl dengan menerapkannya pada penelitian ilmu sosial. Inti pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Schutz menyebut manusia yang berperilaku tersebut sebagai aktor. Ketika seseorang melihat atau mendengar yang dikatakan atau diperbuat aktor, dia akan memahami makna dari tindakan tersebut. Dalam dunia sosial, hal demikian disebut realitas interpretif atau interpretive reality.

Dalam setiap situasi fenomenologis, yakni konteks ruang, waktu, dan historis yang secara unik menempatkan individu, kita memiliki dan menerapkan persediaan pengetahuan (stock of knowledge) yang terdiri dari semua fakta, kepercayaan, keinginan, prasangka dan aturan yang kita pelajari dari pengalaman pribadi serta

pengetahuan siap-pakai yang tersedia bagi kita di dunia tempat kita dilahirkan (Mulyana, 2004:62). Berbekal pengetahuan yang dimilikinya, seorang individu dapat berbagi perspektif serta melakukan berbagai bentuk hubungan dengan individu lain. Persediaan pengetahuan memungkinkan manusia mengenali satu situasi dan mengetahui cara untuk menghadapinya secara tepat.

Dalam melakukan suatu tindakan, menurut Schutz, manusia dilandasi oleh motif. Motif dalam perspektif fenomenologi menurut Schutz (1972:86). adalah konfigurasi atau konteks makna yang tampak pada aktor sebagai landasan makna perilakunya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualiatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006: 4) metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan sejumlah data deskriptif, baik yang tertulis maupun lisan, dari orang-orang serta tingkah laku yang diamati. Moleong menambahkan, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh informan penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2006: 6).

Tujuan utama dari penelitian dengan menggunakan metode kualitatif sebagaimana dikatakan Moleong (1996:270), Alwasilah (2008:101-102), Faisal (2001:29) adalah untuk melakukan deskripsi, verstehen (pemahaman dan pemaknaan terhadap fenomena sosial) dari perspektif informan atau informan penelitian itu sendiri. (Susanti, 2016:78).Menurut Moleong (2006: 14), penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, merupakan suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang melalui pengungkapan pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal yang berhubungan dengan suatu objek.

Menurut Collin dalam Basrowi dan Sukidin (2002:32), fenomenologi sebagai tradisi penelitian kualitatif berusaha memahami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya, serta fenomena yang dialaminya sebagai entitas-sesuatu yang ada dalam dunia. Jadi fenomenologi sebagai salah satu tradisi

penelitian kualitatif akan berusaha untuk mengungkapkan dan memahami realitas penelitian berdasarkan perspektif informan penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (1975:2), bahwa ”The fenomenologist is concerned with understanding human behaviour from the actor’s own frame of reference”.

Studi fenomenologi mencakup perasaan, pemikiran dan pengalaman seseorang, karena yang digali adalah pengalaman individu yang disadarinya terkait suatu fenomena. Littlejohn (1996: 204) menyebutkan "phenomenology makes actual lived experience the basic data of reality". Jadi, fenomenologi menjadikan pengalaman hidup sesungguhnya sebagai data dasar dari realitas. Dengan mengutip pendapat Richard E. Palmer, Littlejohn menjelaskan bahwa fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu menjadi nyata sebagaimana aslinya tanpa memaksakan kategori-kategori peneliti terhadapnya.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fenomenanya adalah pengalaman unik yang disadari dan dimaknai individu Tionghoa dalam menjalani kasundaan melalui caranya masing-masing.

Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Creswell (1998: 55), dalam pelaksanaan penelitian studi fenomenologi, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh seorang fenomenolog di antaranya adalah pemilihan informan yang benar-benar memiliki pengalaman dalam fenomena yang diteliti, Subjek penelitian dipilih secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses dan kesediaan individu Tionghoa menjadi subjek penelitian dan kemampuannya untuk mengartikulasikan kesadarannya. Hal ini sesuai dengan penyataan Creswell (1998: 111-114):

> *“Most important, they must be individuals who have experienced the phenomenon being explored and can articulate their conscious experiences. Because of the in-depth nature of expensive and multiple interviews with participants, it is convenient for the researcher to obtain people who are easily accessible… The access issue is limited to finding, individuals who have experienced the phenomenon and gaining their permission to be studied”.*

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk menjelaskan kasundaan dari sudut pandang individu Tionghoa sebagai informan penelitian. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti ingin memperoleh gambaran mendalam mengenai penggunaan kesenian Sunda sebagai bagian dari upaya meleburkan diri dengan masyarakat Sunda, yang disampaikan berdasarkan sudut pandang mereka sendiri.

Subjek penelitian ini adalah individu Tionghoa di Bandung yang menjalani kasundaan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dipilih karena relevansinya dalam menunjang penelitian yang dilakukan, yaitu dapat menjelaskan mengenai pengalaman dalam menjalani kasundaan serta mengonstruksi makna kasundaan dari sudut pandang individu sebagai pelaku melalui kegiatan yang dilakukannya, yaitu kesenian. Adapun pemilihan subjek penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Moleong (2006: 224) menyampaikan, dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan atau purposive sample. Pemilihan subjek penelitian dilakukan berdasarkan kebutuhan peneliti disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Pemilihan orang yang tepat sebagai subjek penelitian yang benar-benar memiliki pengalaman dalam fenomena yang diteliti merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Mereka dipilih dengan pertimbangan memiliki objek penelitian dan dapat memenuhi tujuan penelitian untuk menggambarkan realitas yang dikonstruksi dari sudut pandang masing-masing individu. Subjek penelitian ini adalah individu Tionghoa di Bandung yang menjalani kasundaan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki pemahaman, kemampuan, keahlian serta wawasan yang luas mengenai kasundaan dan mampu menyampaikan pemikiran dan pengalamannya mengenai kasundaan dengan baik.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria yang relevan dan dapat mendukung proses penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa kriteria umum yang dijadikan acuan dalam strategi penentuan pemilihan informan penelitian ini adalah:

- Mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Syarat ini mendukung sifat otentisitas penelitian fenomenologi.

- Mampu menggambarkan kembali fenomena yang dialaminya, terutama sifat alamiah dan maknanya.
- Bersedia terlibat dalam kegiatan penelitian.
- Bersedia diwawancara secara mendalam dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau selama penelitian berlangsung
- Memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian. (Kuswarno, 2009: 60-61)

Penelitian ini dilakukan di Bandung. Pemilihan lokasi didasarkan pada kenyataan bahwa Bandung merupakan ibukota Jawa Barat yang penduduknya heterogen, tidak hanya suku Sunda, juga masyarakat pendatang yang menetap sementara atau permanen untuk suatu alasan.

Dalam penelitian ini, objeknya adalah seni atau kesenian yang dipraktikkan individu Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari, serta upaya yang dilakukan oleh individu informan dalam menjadikan kesenian sebagai media untuk menyalurkan apresiasi terhadap budaya Sunda serta sebagai media pembauran antara kelompok masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Sunda di Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan non partisipatif serta studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan tiga komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 19-20) dalam Salim (2006: 20-24). Hubungan ketiga komponen tersebut digambarkan sebagai berikut:

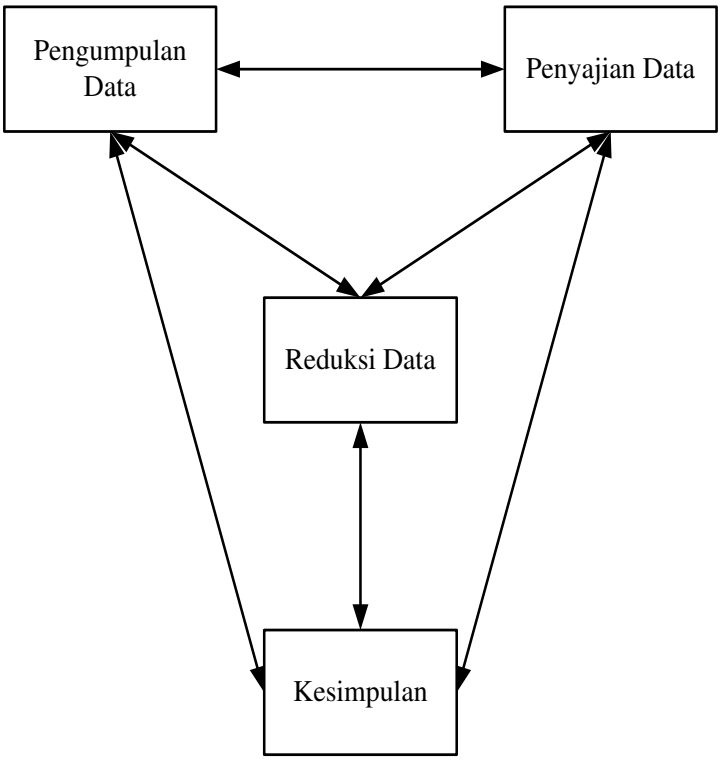

Gambar 1. Analisis Data Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman

(dalam Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Kualitatif, 2006: 22).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perilaku Berkesenian Informan

Tan Deseng

Tan Deseng adalah seniman musik tradisional Sunda keturunan Tionghoa. Semula namanya ditulis Tan De Seng, kemudian cara penulisannya diubah menjadi Tan Deseng. Bahkan, setelah masuk Islam, nama depannya ditambah dengan Mohammad. Pria yang akrab disapa Deseng tersebut lahir di Gang Tamim, Bandung, 22 Agustus 1942, dari pasangan Tan Tjing Hong dan Yo Wah Kie. Ayahnya adalah seorang Tionghoa totok dari Zhangpu, Hokkian Selatan dan ibunya seorang peranakan. Deseng adalah anak keenam dari delapan bersaudara, yaitu Tan De Kun, Tan De Bin, Tan Dju Nan, Tan Dju Lam, Tan De Tjeng, Tan De Seng, Tan De Kong, Tan Dju Lim.

Bakat seninya diturunkan dari sang ayah, seorang sinshe atau tabib yang menyukai kesenian, terutama sastra dan seni musik Tiongkok. Dia sastrawan amatiran

yang menulis dalam bahasa dan huruf Cina, juga terampil memainkan instrumen musik tradisional Cina dan melukis kaligrafi. Bakat seni Tan Tjin Hong juga menurun pada kakak Deseng, Tan De Tjeng, yang kini berkiprah sebagai guru musik dan vokal di Dandong (Tiongkok Timur Laut) dan adik Deseng, Tan De Kong, yang pandai memainkan yangqin (semacam kacapi, tapi dimainkan dengan cara diketuk), dan ehru (rebab Tionghoa berdawai dua).

Budaya Sunda telah dikenal Deseng sejak kecil. Secara alami ia sudah langsung bersentuhan dengan alam sekitarnya, adat istiadatnya atau budaya dan masyarakat Sunda di lingkungan tempatnya lahir. Dalam keluarganya, bahasa Sunda lebih banyak digunakan daripada bahasa Mandarin. Sehari-hari, ia terbiasa mendengarkan musik tradisional Sunda yang didengarnya dari radio tetangga dan hidup di lingkungan kebudayaan Sunda. Deseng kecil sangat suka menonton wayang golek, terutama saat dalangnya adalah Abah Sunarya dari Padepokan Giri Harja. Abah Sunarya di kemudian hari menjadi guru berkesenian Deseng sekaligus orang yang dianggap ayah oleh Deseng. Deseng pun berhubungan baik dengan putra-putra Abah Sunarya yang juga dalang, yaitu Ade Kosasih dan Asep Sunandar.

Saat remaja, Deseng lebih sering bergaul dengan orang Sunda daripada orang Tionghoa. Menurutnya, Sunda ada dalam rasa dan darah yang mengalir dalam dirinya sejak kecil. Di Bandung, Deseng memperdalam seni Sunda dalam berbagai bentuknya. Ia sering menyendiri di kamarnya sambil memutar piringan hitam lagu-lagu Sunda karya Mang Koko. Deseng pun banyak belajar kepada orang-orang yang menguasai seni Sunda. Siapapun yang terampil bermain seni musik Sunda, Deseng akan belajar padanya. Deseng pernah belajar kecapi kepada tukang kecapi pinggir jalan, belajar meniup suling kepada tukang tembok yang sedang merenovasi rumah ayahnya, juga kepada para seniman yang ahli di bidangnya.

Deseng adalah orang yang sangat peka dengan nada. Ia dapat dengan mudah menyerap pengetahuan nada dengan sekali mendengar. Dengan kemampuannya tersebut, Deseng mampu belajar dan menguasai alat musik tradisional dan modern dengan cepat. Usia di bawah 10 tahun, Deseng sudah menguasai nada kres dan mol dan terampil meminkan beberapa alat musik modern dan tradisioinal, seperti harmonika, suling, guzheng (kecapi Tiongkok) dan biola.

Kemudian pada umur 11 tahun, Deseng sudah menguasai teknik bermain gitar dengan baik, bahkan pada usia 12 tahun sudah bergabung dengan salah satu band di Bandung, Young Brother. Ia pun pernah mendapat julukan Setan Melodi pada tahun 1960-an. Deseng belajar pada banyak guru, antara lain Rudy Karamoy (gitar), Ajat Sudrajat/ Atun, Ebar Sobarna dan Sutarya (kecapi), Nyi Mas Saodah (nembang Cianjuran), dan lainnya.

Deseng belia rajin bergabung dengan grup band untuk mempertontonkan kebolehannya, di antaranya bergabung dengan grup Hemming Youth, Paramor, Maria Musica, Inti Nada (khusus lagu Mandarin dan Jazz), Blue Diamond (khusus lagu Barat). Khusus untuk musik kacapi suling, ia mendirikan grup Bhakti Siliwangi, nama pemberian dari almarhum Bing Slamet.

Deseng memang seniman serba bisa. Dengan gitar ia memainkan nada dan irama kacapi yang pentatonis, dengan kacapi ia bisa memainkan nada dan irama gitar yang diatonis. Ia bisa memainkan pelbagai instrumen musik, dari ehru hingga samisen, kacapi juga rebab, keyboard dan gitar, menabuh drum atau kendang, dan masih banyak lagi. Ia juga menguasai karawitan Sunda, musik pop Barat, Mandarin, jazz, blues, bosanova, hingga lagu-lagu klasik Mozart atau Beethoven, serta fasih nembang Cianjuran dan degung. Ia juga dianggap sebagai salah satu pelopor tari Jaipongan, yang menurutnya merupakan pengembangan dari tarian ketuk tilu versi Karawang. Deseng juga piawai memainkan instrumen musik Tionghoa guzheng (kacapi), dizi (suling) dan ehru.

Sejak tahun 1970-an, Deseng sering manggung ke berbagai tempat di dalam dan luar negeri. Daerah di Indonesia yang belum pernah dikunjungi adalah wilayah Irian dan Sulawesi. Beberapa negara yang pernah dikunjunginya untuk pementasan musik tradisional Sunda antara lain, Jepang, Tiongkok dan Malaysia. Deseng pun mengaransemen musik untuk film Misteri Jaipongan (1983). Bersama Gugum Gumbira, Tan Deseng menyusun aransemen lagu-lagu pengiring jaipongan. Selain itu, ia juga memberikan les karawitan. Bersama kedua putrinya, Fitri dan Tanti, Deseng sering tampil membawakan Cianjuran dengan sebutan Trio Tan. Fitri memetik kecapi, Tantri menembang dan Deseng meniup Suling.

Adapun konsepsi Deseng tentang musik Sunda adalah sebuah musik yang irama dan nadanya berasal dari tatacara dan pakem Sunda, bukan hanya syairnya berbahasa

Sunda. Sebab itu, bagi Deseng, lagu pop Sunda yang berbasis pada nada diatonis, hanyalah musik pop Barat yang diberi syair Sunda. Seniman musik diatonis juga pernah direkamnya, antara lain Fenti Effendi dan grup Paramor, yang didirikan Deseng bersama Jajat Paramor.

Deseng memiliki hobi mengumpulkan rekaman seni Sunda sejak 1950-an. Ia pun membuat studio mini untuk rekaman. Ratusan kaset yang pernah direkamnya tersimpan rapi. Ada jaipong, ketuk tilu, kliningan Sunda, Rampak Sekar, kendang penca, calung dan bentuk kesenian Sunda lainnya.

Deseng tak meninggalkan sama sekali seni budaya leluhurnya, Tiongkok. Hingga kini, dia bahkan selalu menjadi rujukan para seniman Indonesia yang akan mengkolaborasi musik dan tari etnik lokal dengan Tionghoa. Menurut Remy Silado, Deseng sangat memahami sejarah Tionghoa dan bisa membedakan setiap dinasti sesuai dengan peristiwa sejarah. Dia juga menguasai tulisan Cina sampai tingkat kaligrafi.

Kecintaan Tan Deseng terhadap budaya Sunda sangat besar. Jiwanya sudah sangat nyunda dan seluruh pola kehidupannya dilaksanakan dengan cara Sunda. Deseng tidak sendirian, karena masih banyak keturunan Tionghoa lainnya di Bandung yang mencintai budaya Sunda dan ingin menunjukkan rasa cintanya tersebut melalui seni. Untuk mewujudkan hal tersebut, tahun 2000, Tan Deseng mendirikan Padepokan Pasundan Asih bersama Ibu Ade Cahyadi, keturunan Tionghoa yang sangat mencintai budaya Sunda. Pasundan Asih merupakan wadah bagi keturunan Tionghoa di Bandung yang mencintai seni budaya Sunda melalui berkesenian. Mereka berasal dari latar belakang profesi yang beragam. Ada dokter, insinyur, pengusaha, tukang sayur atau seniman murni. Di padepokan tersebut, Tan Deseng menularkan kepiawaian bermusiknya dengan melatih keturunan Tionghoa yang mencintai seni budaya Sunda . Inohong Sunda, Popong Otje Djundjunan atau Ceu Popong, menjadi salah satu pembina Padepokan Pasundan Asih.

Deseng sudah istiqomah pada bidang yang ditekuninya. Meskipun dalam segi materi tidak begitu bisa diharapkan. Selain penguasaan alat musik, Deseng juga memahami filosofis serta sejarah dari setiap kesenian atau alat musik Sunda yang dimainkannya. Deseng bersama Titim Fatimah pun pada tahun 1960-an mendapat penghargaan dari Jenderal Nasution berupa pisau komando. Penghargaan tersebut diberikan, karena Jenderal Nasution terkesan dengan Deseng, yang mampu

membawakan seni tradisional Sunda dengan baik, meskipun ia seorang Tionghoa. Hingga kini, Tan De Seng tetap hidup dari dan untuk kesenian Sunda.

Soeria Disastra

Soeria Disastra dikenal sebagai individu Tionghoa yang gigih menyatukan perbedaan antara warga "pribumi" dengan warga keturunan melalui seni, terutama seni sastra dan seni musik sehingga tercipta hubungan yang harmonis di antara keduanya. Lahir di Bandung pada 28 Mei 1943 dengan nama Fu Ju Liang. Saat remaja, nama tersebut harus diganti dengan nama Indonesia, karena adanya kebijakan politik anti Tionghoa yang membuat orang-orang Tionghoa merasa diperlakukan secara diskriminatif. Tahun 60-an, Fu Ju Liang berganti nama menjadi Soeria Disastra. Nama tersebut dipilih oleh Soeria, karena ia menyenangi dunia sastra sejak kecil.

Perlakuan diskriminatif yang diterimanya sejak kecil, tidak lantas menjadikan anak ke 8 dari 9 bersaudara tersebut berperilaku eksklusif terhadap orang-orang Sunda di lingkungan sekitar tempat tinggalnya waktu kecil di daerah Cicadas. Soeria malah akrab bergaul dengan orang-orang Sunda, yang membuatnya kerap menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Bagi Soeria, Sunda sudah menjadi bagian hidupnya. Sejak kecil, ia menggemari komik, buku-buku sastra Sunda dan kesenian Sunda salah satunya wayang golek.

Kecintaan Soeria akan sastra terus bertambah, seiring dengan kegemarannya membaca buku sastra Sunda atau sastra Indonesia. Kecakapannya berbahasa Indonesianya pun semakin terasah, seiring kecintaannya yang semakin besar terhadap bahasa Tionghoa dan Bahasa Sunda.Setelah lulus SMA pada 1961, ia mengajar di sekolah menengah selama beberapa tahun, kemudian beralih profesi menjadi usahawan. Sambil berbisnis, ia belajar di Akademi Bahasa Asing, dan selanjutnya menyelesaikan program S1 Jurusan Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Bahasa Asing, Yayasan Pariwisata Indonesia, Bandung (1987). Di sela-sela itu, Soeria menuangkan pemikiran dan perasaannya ke dalam bentuk karya sastra.

Soeria aktif menulis puisi sejak akhir 1990-an hingga sekarang. Prosa dan puisinya dapat dibaca di surat kabar berbahasa Mandarin, Harian Indonesia, beberapa majalah sastra dalam bahasa Mandarin, dan beberapa buku antologi prosa dan puisi bahasa Mandarin dan Indonesia.Soeria pun mendorong warga Tionghoa untuk aktif di

Klub Pecinta Sastra Bandung. Klub ini merupakan salah satu bagian dari Perhimpunan Penulis Tionghoa Indonesia (Yin Hua), yang bertujuan menggugah apresiasi masyarakat terhadap hasil karya sastra baik di antara masyarakat Tionghoa maupun antara masyarakat Tionghoa dengan komunitas lainnya. Bagi Soeria, karya sastra Sunda memiliki daya tarik dari segi cerita, yang menurutnya bisa mengugah imajinasi sehingga ia senang membacanya maupun mendengarkannya dalam dongeng di radio.

Selain menulis karya sastra, Soeria pun menyenangi dunia tarik suara. Ia yang senang menyanyi lagu Sunda sejak SMA, mendirikan Paduan Suara Kota Kembang Bandung pada 1995. Beranggotakan sekitar 100 orang, yang sebagian besar adalah teman-teman SMA-nya saat bersekolah di Sekolah Tionghoa Chiao Cong. Sekolah yang didirikan pada 1947 ini ditutup pada 1966 dalam gelombang anti-Tionghoa setelah G-30-S. Kelompok kesenian ini merupakan cara Soeria membuka pintu dengan etnis Sunda dan yang lainnya. Dalam kelompok seni tersebut, Soeria berperan sebagai dirigen.

Pada setiap pagelaran, Paduan Suara Kota Kembang Bandung yang dipimpinnya selalu berusaha berkolaborasi dengan kelompok atau komunitas kesenian Sunda lainnya. Lewat panggung terjalin rasa kebersamaan. Melalui berbagai pagelaran tersebut, Soeria lebih dikenal di kalangan para pegiat dan pelaku seni dan budaya Sunda.Hingga kini, kelompok paduan suaranya sering diundang untuk mengisi acara-acara kesenian di Bandung dan sekitarnya dengan membawakan lagu dari Nano S. yang pernah melatih mereka, juga Mang Koko. Soeria sangat menikmati ketika mendengarkan lagu-lagu Sunda.

Di penghujung 1990, reformasi politik Indonesia yang mendorong keterbukaan turut membantu meringankan langkah Soeria. Bersama sejumlah budayawan Bandung, dia mulai berani menggelar sejumlah pertunjukkan yang memadukan kesenian Sunda dan Tionghoa, misalnya, pada 17 Agustus 2001, Soeria memadukan musik tradisional Tionghoa dan Sunda dalam satu pagelaran. Kegiatan ini didukung oleh sejumlah pengusaha dan budayawan.

Kemudian pada Juli 2002, bersama pengusaha Karmaka Suryaudaya, Soeria mendirikan Lembaga Kebudayaan Mekar Parahyangan yang salah satu kegiatannya adalah menggelar lomba menulis Carpon Mini Sunda (Cerita pendek mini Sunda) yang dibukukan menjadi "Ti Pulpen tepi ka Pajaratan Cinta" pada 2002.

Soeria terus gencar menyebarkan pemikiran yang mendorong pembauran di kalangan warga Tionghoa - Indonesia. Tulisannya diramu dalam prosa dan puisi yang sebagian di antaranya sudah dibukukan dengan judul "Senja di Nusantara, Antologi Prosa dan Puisi" pada 2004. Menurut Soeria, menyatukan sastra Tiongkok dan Sunda merupakan upaya yang bersifat timbal balik. Menyerap budaya sastra luar dapat memperkaya diri kita sendiri, mengenalkan budaya Sunda, merupakan upaya untuk memajukan budaya Sunda. Upaya Soeria Disastra menyatukan budaya Tionghoa dengan Sunda melalui seni, mengantarkannya meraih Danamon Award sebagai tokoh yang berjasa dalam menyatukan masyarakat Sunda dan Tionghoa melalui seni budaya. Melalui seni, Soeria Disastra telah membuktikan bahwa perbedaan antara Tionghoa dan Indonesia bisa disatukan.

Berkesenian sebagai Suatu Tindakan Sosial

Dalam konsep Max Weber, tindakan sosial diartikan sebagai suatu tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Weber dalam Ritzer 1975). Tindakan sosial merupakan tindakan yang diarahkan kepada orang lain bukan benda mati. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu (Weber dalam Turner 2000).

Kegiatan cipta mencipta dan menyajikan seni seperti musik, tari, seni rupa, seni drama, dan puisi menurut konsep Max Weber telah masuk dalam kategori suatu tindakan sosial sebab dalam mencipta dan menyajikan seni tersebut, seseorang atau kelompok orang pasti meminta respon atau tanggapan orang lain sekalipun menurut Max Weber istilahnya adalah membatin atau mungkin hanya diucapkan dalam hati. (Wadiyo, 2007: 1)

Berkesenian dikatakan sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manusia sebab sebenarnya orang yang melakukan kegiatan seni itu meminta tanggapan atau respon orang lain atas seni yang diciptakan atau disajikan (Soekanto 1995). Dalam pemahaman komunikasi umum (lihat Devito 1978; Dominick 1983; dan Effendy 1995), berkesenian merupakan bentuk tindakan sosial seseorang atau kelompok orang

dalam hubungannya dengan penyampaian gagasan dan pesan kepada orang lain. Ketika seseorang melakukan kegiatan bernyanyi, sesungguhnya orang tersebut telah melakukan tindakan sosial sebab menyanyi merupakan ekspresi diri yang diungkapkan menggunakan lambang atau simbol dalam bentuk suara dan ditujukan kepada orang lain, siapa pun orang lain yang menjadi sasarannya atau yang dituju. Begitu pula ketika seseorang melukis, menari, membaca puisi, atau pun bermain drama, ditujukan pada orang lain atau meminta tanggapan orang lain, siapa pun orang lain tersebut. Dalam pengertian ini permintaan tanggapan atau respon tersebut tidak harus diucapkan dengan lisan secara blak-blakan melainkan bisa hanya dengan dibatin atau hanya diucapkan dalam hati. (Wadiyo, 2007:2)

Dalam konteks penelitian ini, perilaku berkesenian yang dilakukan oleh individu Tionghoa informan merupakan suatu bentuk ekspresi rasa estetika yang didasari oleh rasa cinta akan budaya Sunda. Kreasi seni yang ditampilkan merupakan suatu bentuk komunikasi kepada khalayak bahwa rasa cinta itu ada dalam diri individu informan dan menjadi penanda bahwa individu informan merupakan bagian dari masyarakat Sunda yang ingin melestarikan budaya Sunda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Individu Tionghoa yang berkasundan merupakan realitas yang ada di Bandung dan menjadi bagian dari masyarakat Sunda. Berkesenian merupakan salah satu bentuk perwujudan rasa cinta individu Tionghoa terhadap budaya Sunda. Bagi individu informan penelitian, budaya Sunda telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Konstruksi makna kasundaan mereka bangun melalui proses literasi, komunikasi dan interaksi, serta diolah melalui proses berpikir sesuai referensi, nilai dan kepercayaan yang diyakini para informan. Kasundaan dimaknai sebagai perwujudan nilai-nilai filosofis Sunda dalam keseharian melalui karya seni, berbahasa, maupun berperilaku.

Keberakaran dan lokalitas merupakan landasan individu informan menjalani kasundaannya. Prinsip dimana bumi dipijak, langit dijunjung diterapkan dengan baik oleh individu informan penelitian ini. Bagi para informan penelitian ini, lokalitas merupakan wujud pengakuan akan wilayah informan berada dengan menerapkan nilai-nilai kasundaan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan kontribusi bagi

masyarakat dan budaya tempat individu berada, yaitu tanah Sunda melalui berkesenian yang mereka jalani.

Selain itu, mereka pun menjadi mediator bagi warga keturunan Tionghoa lainnya di Kota Bandung yang mencintai budaya Sunda dan ingin mengapresiasikan kecintaannya kepada budaya Sunda melalui kesenian yang mereka jalani.

Keberadaan individu Tionghoa yang mencintai budaya Sunda melalui berkesenian seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat Sunda asli untuk turut memelihara seni budaya leluhurnya, agar tidak lekang oleh waktu dan perlahan tergeser oleh masuknya budaya baru akibat perkembangan teknologi informasi. Bentuk apresiasi itu memang tidak harus persis sama seperti penampilan aslinya, melainkan bisa juga diadaptasikan dalam bentuk kekinian, sesuai dengan referensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Alwasilah, A. Chaedar. 2008. Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya.

Bajari, Atwar. 2009. Konstruksi Makna dan Perilaku Komunikasi pada Anak Jalanan di Cirebon. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Basrowi & Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif; Perspektif Mikro. Surabaya: Insan Cendikia.

Creswell, John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. USA: Sage Publication Inc.

DeVito, Joseph A. 1978. Communicology: An Introduction to the Study of Communication. New York: Harper & Row Publisher.

Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia.

Kunto, 1986. Semerbak Bunga di Bandung Raya. Bandung: Granesia.

Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi. Bandung: Widya Padjadjaran.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif. Terjemahan, Rohidi, Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ritzer, George. 1975. Sociology: A Multiple Paradigma Science. Boston: Allyn and Bacon.

Skober, Tanti Restiasih. Orang Tionghoa Di Bandung, 1930-1960: Merajut Geliat Siasat Minoritas Tionghoa. Konferensi Nasional Sejarah VIII, 14 s.d 17 November 2006 di Hotel Millenium Jakarta. Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran.

Soedarsono. 1991. Perkembangan Kesenian Kita. Dalam Soedarso, SP. (ed.). Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta.

Susanti, Santi. 2016. Konstruksi Makna Berbudaya Sunda pada Individu Jawa dan Tionghoa di Bandung. Disertasi. Jatinangor: Universitas Padjadjaran.

Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif. Jakarta: Tiara Wacana.

Wadiyo. Berkesenian: Tindakan sosial menurut Max Weber. Imajinasi Vol 3, No 2 (2007) hal. 1.

(http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=136251)

PROSES ADAPTASI BUDAYA SUKU WALESI DALAM MENGHADAPI KEJUTAN BUDAYA DI KOTA JAYAPURA PAPUA

Tatik Nuryanti
Dosen STIKOM JAYA PURA
Email : Nuryanti9tatik@gmail.com

Abstrak : Kejutan budaya ditimbulkan oleh rasa gelisah sebagai akibat dari hilangnya semua tanda dan simbol yang biasa kita hadapi dalam hubungan sosial. Tanda dan petunjuk ini terdiri atas ribuan cara dimana kita mengorientasikan diri kita sendiri dalam kehidupan sehari- hari. Kejutan budaya juga dialami suku Walesi Jayapura sehingga dibutuhkan proses untuk beradaptasi dengan kejutan budaya tersebut. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis, dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori etnosentrisme dengan Tujuan dari penelitian deskriptif sendiri adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan wawancara dan observasi. Dalam wawancara, informan yang di gunakan ada 2 Orang yang berasal dari suku walesi. Unit analisis yang digunakan terdiri dari adaptasi dan culture shock.Kesimpulannya adalah bahwa proses adaptasi yang di alami oleh indivudu terdiri dari fase perencanaan, fase honeymoon, fase frustation, fase readjeustment, dan fase resolution. Culture shock di tandai dengan masuknya seseorang pada fase frustation dikarenakan pada fase ini seseorang mulai mendapatkan berbagai kesulitan.

Kata Kunci:*Adaptasi, Budaya, Walesi, Jayapura*

PENDAHULUAN

Pertukaran simbol dan makna yang dilakukan oleh satu individu ke individu lain merupakan salah satu aktifitas komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, salah satu aksioma yang terkenal dalam ilmu komunikasi adalah “we can’t not to communicate” (Ruben &Stewart,2006).Banyak orang yang menganggap bahwa proses komunikasi hanyalah sekedar pertukaran informasi yang sederhana dan bisa dilakukan semua orang. Sebagian orang yang lain menganggap aktifitas pertukaran informasi tersebut sekedar percakapan sederhana yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan siapa pun. Namun berdasarkan berbagai literatur yang membahas tentang aktifitas komunikasi, ternyata proses komunikasi yang dilakukan antar individu

merupakan sebuah aktifitas yang membutuhkan berbagai langkah dan proses yang tidak mudah, bahkan dalam beberapa kondisi menjadi sebuah aktifitas yang rumit.

Gangguan-gangguan (noise) yang dapat muncul dalam komunikasi antar budaya secara umum karena adanya perbedaan bahasa daerah yang selama ini digunakan selain bahasa Indonesia. Ketidakpahaman akan bahasa yang biasa digunakan oleh lawan bicara sangat menyulitkan para pelaku komunikasi antar budaya. Perbedaan simbol-simbol dan nilai-nilai yang selama ini dianut dan dipercaya juga merupakan gangguan (noise) dalam komunikasi antar budaya.

Komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu- individu dalam suatu hubungan, kelompok, orgaisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengn lingkungan satu sama lain. Manusia sbagai makhluk sosial, sengaja atau tidak, selalu dan akan terus berkomunikasi sesuai dengan motif dan tujuannya masing- masing.

Dalam berkomunikasi, banyak faktor yang dapat mempengaruhi sebuah proses komunikasi sehingga dapat berjalan dengan mulus, salah satunya adalah latar belakang budaya atau suku bangsa. Menurut smith (1987). Kelompok etnis atau suku bangsa adalah golongan manusia yang anggota- anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya. biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku pun ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut dan oleh kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri- ciri biologis.

Pemahaman tentang berbagai budaya, terutama budaya yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari- hari menjadi penting karena akan mampu meminimalisir persoalan yang terkait dengan interaksi antarbudaya tersebut. Salah satu masalah yang berkaitan dengan budaya adalah ketika seseorang berhadapan dengan situasi yang disebut dengan kejutan budaya atau culture shock.Istilah kejutan budaya ini diperkenalkan oleh antropolog kalvero oberg pada tahun 1960, mengungkapkan bahwa kejutan budaya ditimbulkan oleh rasa gelisah sebagai akibat dari hilangnya semua tanda dan simbol yang biasa kita hadapi dalam hubungan sosial. Tanda dan petunjuk ini terdiri atas ribuan cara dimana kita mengorientasikan diri kita sendiri dalam kehidupan sehari- hari. Bagaimana memberikan petunjuk, bagaimana membeli sesuatu, kapan dan di mana untuk tidak berespon.

Petunjuk ini dapat berupa kata- kata, gerakan, ekspresi wajah, kebiasaan atau norma, diperlukan oleh kita semua dalam proses pertumbuhan dan menjadi bagian dari budaya kita sama halnya dengan bahasa yang kita ucapkan atau kepercayaan yang kita terima. Kita semua menginginkan ketenangan pikiran dan efisiensi ribuan petunjuk tersebut yang kebanyakan tidak kita sadari. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui tentang adaptasi budaya masyarakat suku walesi dalam menghadapi kejutan budaya di kota Jayapura Papua.

KERANGKA TEORI

Komunikasi antarbudaya secara harafiah bisa kita artikan sebagai komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Menurut porter dan samovar dalam mulyana,2006 komunikasi antarbudaya terjadi bila pengirim pesan adalah anggota dari suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota dari suatu budaya lain. Menurut Hall (2014;25) mengungkapkan bahwa tidak ada batasan antara budaya dan komunikasi, budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Seseorang tidak dapat memperbaiki kemampuan komunikasi antarbudayanya tanpa memiliki pemahaman jelas tentang apa yang kita sebut dengan budaya. Oberg penting karena merupakan definisi yang pertama, namun definisi tersebut tidak menyebutkan bahwa kejutan budaya yang juga melibatkan gangguan yang hebat dari rutinitas, ego, dan gambaran diri, perasaan ini tidak hanya dialami oleh pengunjung, pebisnis, pelajar, pegawai pemerintah dan imigran, namun seperti dituliskan oleh brislin, “dapat dialami oleh individu yang mengalami hubungan tatap muka dengan anggota kelompok luar dalam budaya mereka sendiri.

Pemahaman serupa seperti yang disampaikan Youn Yun Kin dalam Gudykunst (ed), (1984:15-16) komunikasi antarbudaya tidak seperti studi komunikasi yang lain dan yang membedakannya dari kajian komunikasi lain adalah tingkat perbedaan yang relative tinggi pada latar belakang pengalaman pihak- pihak yang berkomunikasi karena adanya perbedaan- perbedaan budaya. Dalam komunikasi antarbudaya sering melibatkan perbedaan- perbedaan ras dan etnik, namun komunikasi antarbudaya juga berlangsung ketika muncul perbedaan- perbedaan yang mencolok tanpa harus disertai perbedaan ras dan etnik.

Selanjutnya Gudykunst menjelaskan bahwa komunikasi antarbudaya sebagai proses transaksional, proses simbolik yang melibatkan atribusi makna antara individu-individu dari budaya dari dua atau lebih komunitas budaya yang berbeda menegosiasikan makna yang dipertukarkan dalam sebuah interaksi yang interaktif. Selanjutnya Samovar dan Porter juga mengungkapkan untuk mengkaji komunikasi antarbudaya perlu dipahami hubungan antara kebudayaan dengan komunikasi. Melalui pengaruh budayalah manusia belajar komunikasi dan memandang dunia mereka melalui kategori- kategori, konsep- konsep dan label- label yang dihasilkan kebudayaan. Kemiripan budaya dalam persepsi memungkinkan pemberian makna yang mirip pula terhadap suatu objek sosial atau peristiwa. Cara- cara manusia berkomunikasi, keadaan komunikasi, bahkan bahasa dan gaya bahasa yang digunakan, perilaku- perilaku non verbal merupakan respons terhadap dan fungsi budaya (Liliweri,2001:160).

Komunikasi yang berjalan dengan baik menjadi suatu tantangan dalam berlangsungnya komunikasi antarbudaya. Namun seringkali dalam komunikasi antarbudaya persepsi sosial individu kemudian mempengaruhi proses pemberian makna pada berbagai aspek dalam proses komunikasi yang terjadi dalam masyarakat.
Berkaitan dengan persepsi sosial, samovar dan porter 2006 dalam mulyana mengungkapkan bahwa mereka mungkin berbicara bahasa yang sama, menganut agama yang sama, pergi ke sekolah- sekolah yang sama dan tinggal di daerah geografis yang sama. Namun kelompok- kelompok masih memiliki budaya yang agak berbeda;mereka tidak memiliki pengalaman- pengalaman yang sama dan tidak pula memiliki persepsi- persepsi yang sama. Mereka memandang dunia dengan cara yang berbeda. Gaya hidup mereka mungkin berbeda dan kepercayaan- kepercayaan, nilai-nilai dan sikap- sikap mereka tak semua sama.

Dengan demikian, walupun dalam budaya yang hampir bisa dikatakan mirip, namun ketika persepsi sosial dalam komunikasi antarbudaya mengalami perbedaan maka pesan yang disampailan bisa saja tidak sampai atau menjadi berbeda maksudnya. Selain itu akan terjadi perbedaan hasil dalam mengelola komunikasi antarbudaya.
Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menjadi pengghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif (Chaney&Martin 2004:11). Beberapa hambatan dalam komunikasi adalah stereotip, prasangka dan etnosentrisme. Dalam sebuah

komunikasi antarbudaya seringkali menghadapi hambatan yang akan mengurangi efektifitasnya sebuah proses komunikasi.

Streotip merupakan masalah ketika kita menempatkan orsng di tempat yang salah, ketika kita menggambarkan norma kelompok dengan tidak benar, ketika kita mengevaluasi suatu kelompok dibandingkan dengan menjelaskannya. (Adler dalam porter dan samovar 2014 : 205.) ada bebrapa alasan mengapa stereotip ini menghambat komunikasi antarbudaya. Pertma, stereotip menadi sejenis penyaring; menyediakan informasi yang konsisten dengan informasi yang dipercayai oleh seseorang. Dengan itu, suatu hal yang benar tidak memiliki kesempatan untuk diketahui. kedua, bukan pengelompokan tersebut yang menyebabkan masalah antarbudaya, namun asumsi bahwa semua informasi spesifik mengenai suatu budaya diterapkan pada semua orang dari kelompok tertentu. Ketiga stereotip menghalangi keberhasilan anda sebagai seorang komunikator, karena stereotip biasanya berlebih- lebihan, terlalu sederhana dan terlalu menyamaratakan.keempat stereotip jarang berubah.

Selanjutnya prasangka merupakan suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda adalah prasangka, suatu konsep yang sangat dekat dengan stereotip. Prasangka adalah sikap yang tidak adil terhadap seseorang atau suatu kelompok. Seperti juga stereotip, meskipun dapat bermakna positif atau negatif, prasangka umumnya bersifat negatif. Prasangka ini bermacam-macam, yang populer adalah prasangka rasial, prasangka kesukuan, prasangka gender, dan prasangka agama. Prasangka terjadi ketika seseorang memiliki generalisasi terhadap sekelompok orang atau hal- hal, seringkali didasarkan pada sedikit atau tidak adanya pengalaman faktual. Prasangka dapat menjadi positif (menyukai kelompok tertentu atau suatu hal) atau negatif (tidak menyukai kelompok tertentu atau suatu hal. (samovar dan porter,2014:206)

Etnosentrisme

Dalam samovar dan Porter (2014: 214) nanda dan warm menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan etnosentrisme adalah pandangan bahwa budaya seseorang lebih unggul dibandingkan budaya yang lain. Pandangan bahwa budaya lain dinilai berdasarkan standar budaya kita. Kita menjadi etnosentrisme ketika kita melihat budaya lain melalui kacamata budaya kita budaya kita atau posisi kita. Dengan memiliki sikap etnosentrisme, seringkali orang akan menganggap bahwa budaya orang lain lebih

rendah daripada budayanya sendiri, sehingga itu juga berpengaruh pada cara seseorang memandang serta bersikaf pada orang lain. Maka tidak mengherankan ketika seseorang memiliki sikap etnosentrisme ini maka seseorang akan merasakan kegelisahan sebagai akibatnya. Gamble dan gamble dalam samovar dan Porter (2014:216) mengungkapkan alasan orang menjadi gelisah karena sikap etnosentrismenya karena,"semakin etnosentris anda, semakin gelisah anda dalam berhubungan dengan budaya lain; ketika kita takut, kita jadi memiliki sedikit harapan positif dari suatu hubungan dan kurang mempercayai orang dari budaya lain.

METODOLOGI

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis, dengan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan wawancara dan observasi. Dalam wawancara, informan yang di gunakan ada 2 Orang yang berasal dari suku walesi. Unit analisis yang digunakan terdiri dari adaptasi dan culture shock.

PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, peneliti kemudian menjabarkan penelitian untuk menjawab proses adaptasi dalam menghadapi culture shock serta factor-faktor yang mempengaruhi culture shock. Kejutan budaya ini ternyata juga dialami oleh berbagai suku yang ada di papua, salah satunya adalah individu- individu yang berasal dari suku walesi yang sebelumnya menetap di kabupaten Jayawijaya menuju kota Jayapura Papua. Banyak alasan yang membuat warga suku walesi melalukan perpindahan tempat tinggal, diantaranya untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Suku walesi ini juga adalah salah satu suku yang terkenal yang berasal dari daerah pegunungan yang menjadi pemeluk agama islam dari sekitar 250 suku bangsa yang mayoritas beragama nasrani dan katolik di wilayah papua. Dengan kemusliman mereka dan keluarnya mereka menuju wilayah jayapura yang berada di daerah pesisir maka kejutan budaya tidak dapat terelakkan.

Melalui pertanyaan mengenai culture shock, penulis memperoleh informasi bahwa informan kurang mengetahui tentang culture shock. Mereka hanya mempahami tentang kaget dengan budaya baru, mereka mengalama hal ini ketika mereka datang dan melihat sesuatu hal yang baru atau sama sekali belum dikenal. Mereka mengalami hal tersebut ketika mereka masih berada di daerah mereka sendiri. Kejutan budaya ini menjadi gejala awal yang dirasakan oleh para perantau seperti beberapa individu dari suku walesi.

Perasaan takut, tidak nyaman serta kekhawatiran berlebihan tentang pendapat orang mengenai dirinya menjadikan beberapa individu tersebut mengalami kesulitan saat berinteraksi dengan orang lainMenurut peneliti hal tersebut merupakan sesuatu masih dalam taraf wajar. Ke 2 informan mempunyai cerita tentang teman-temannya yang terkena culture shock yang mengakibatkan mereka dan teman-teman harus berhati-hati dan penuh curiga terhadap siapapun yang datang. Berbicara mengenai adaptasi, dua informan menyatakan kalau adaptasi itu mempelajari satu hal, dan belajar bagaimana kita bisa sesuai dengan suatu tempat tertentu. Satu informan mengatakan kalau adaptasi itu penyesuaian diri dengan budaya baru, dan satu informan lainnya mengatakan kalau adaptasi adalah proses pertama untuk belajar suatu hal.

Masyarakat suku walesi adalah salah satu suku yang berasal dari pegunungan jayawijaya. Membicarakan suku walesi yang tinggal di jayapura akan terlihat jelas pada masyarakat yang berdomisili di wilayah Angkasa kota Jayapura. Suku walesi ini walaupun berasal dari propinsi Papua juga, namun ketika mereka merantau ke kota Jayapura mereka menjadi perantau yang tidak terlepas dari proses kejutan budaya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya di kota jayapura. Menurut informan 1 ketika awal merantau ke kota Jayapura, mereka sudah merasakan perasaan yang kurang nyaman, perasaan itu mulai terasa ketika mereka meninggalkan kampong walesi menuju kota wamena di pegunungan jayapura. Perasaan takut bertemu dengan orang asing serta menyadari kemampuan bahasa yang terbatas yang mereka miliki membuat mereka memilih untuk diam serta mengisolir diri di masjid dekat wilayah Abe.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Gamble dan gamble dalam samovar dan Porter yang mengungkapkan alasan orang menjadi gelisah karena sikap etnosentrismenya, yaitu karena,"semakin etnosentris anda, semakin gelisah anda dalam berhubungan dengan budaya lain; ketika kita takut, kita jadi memiliki sedikit harapan

positif dari suatu hubungan dan kurang mempercayai orang dari budaya lain. (2014:216). Perasaan takut tersebut timbul karena kekhawatiran terhadap ketidakpahaman mereka terhadap orang sedang mereka hadapi. Menurut Ponto Yelipele kekhawatiran itu timbul karena pengalaman mereka berhadapan dengan orang asing semasa di kampung serta ketidakmampuan mereka menjelaskan maksud dan keinginan mereka karena terkendala kemampuan bahasa serta kepahaman mereka pada informasi yang disampaikan oleh pihak lain.

Salah satu hambatan yang menghalangi seseorang melakukan komunikasi yang efektif adalah keterbatasan dari kemampuan bahasa, hambatan komunikasi ini dikategorikan sebagai hambatan yang berbentuk fisik. Menurut Chaney&martin (2004:11-12) hambatan fisik tersebut adalah hambatan komunikasi yang berikut ini terjadi apabila pengirim pesan (sender) dan penerima pesan (receiver) menggunakan bahasa yang berbeda atau penggunaan kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan. Informan yang ke 2 mengungkapkan pula bahwa banyak individu suku walesi yang berasal dari gunung dan baru tiba di kota Jayapura menampakkan kekurang nyamanan mereka dengan lingkungan baru dari postur tubuh yang agak bungkuk. Hal in menurut informan ke 2 timbul karena persepsi mereka tentang diri sendiri yang kurang percaya diri. Seiring perjalanan waktu, dengan pola interaksi dan adaptasi budaya dengan orang lain maka kepercayaan diri mereka semakin baik sehingga postur tubuh mereka lebih tegak.

Fenomena terhadap hambatan komunikasi tersebut memiliki beberapa penyebab dalam ketidak efektifan komunikasi antarbudaya. Menurut Chaney&marti (,2004:11-12) yaitu; 1) fisik ((Physical). 2) Budaya (Cultural). 3) Hambatan yang berasal dari etnik yang berbeda agama dan juga perbedaan sosial yang ada antara budaya yang satu dengan yang lainnya. 3) Persepsi (Perceptual). 4) Motivasi (Motivational). 5) pengalaman (experiential). 6) Emosi (Emotional). 7) Bahasa (Linguistic)\

Proses adaptasi menjadi suatu kejadian yang alami tetapi dalam prakteknya ternyata hambatan serta dinamika yang harus dilalui menjadi tidak mudah meskipun proses adaptasi tersebut terjadi di lingkungan mereka yang berasal dri rumpun suku yang sama yaitu melanesia. Dengan demikian dibutuhkan sebuah komunikasi yang bisa menjembatani perbedaan yang timbul akibat perbedaan budaya yan terjadi dalam suatu masyarakat, seperti halnya mereka yang sedang menempati daerah baru karena

pendidikan maupun bekerja seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat muslim suku walesi yang bertempat tinggal daerah angkasa di kota jayapura papua.

Menurut schram ada empat syarat agar individu dapat berkomunikasi antarbudaya secara efektif. Yaitu : pertama menghormati budaya lain sebagai manusia; kedua, menghormati budaya lain apa adanya, bukan sebagaimana yang kita kehendaki; ketiga menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak; keempat, komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya yang lain (dalam mulyana dan Rakhmat 2000:6).

Variasi budaya mempengaruhi terjadinya culture shock pada masyarakar suku walesi, ke dua informan menyatakan bahwa budaya asli informan dengan budaya pendatang cukup berbeda. Perbedaan ini lah yang membuat informan sulit untuk beradaptasi, dan variasi budaya ini merupakan faktor terjadinya culture shock. Faktor yang terakhir adalah manifestasi sosial politik, ke dua informan menyatakan kalau faktor ini tidak mempengaruhi informan. karena masyarakat yang datang ramah-ramah dan baik. Sehingga mereka merasa nyaman dengan lingkungannya. Dari hasil wawancara dari ke dua informan, peneliti mendapatkan bahwa keamanan menjadi faktor terjadinya culture shock.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses adaptasi yang di alami oleh indivudu terdiri dari fase perencanaan, fase honeymoon, fase frustation, fase readjeustment, dan fase resolution. Culture shock di tandai dengan masuknya seseorang pada fase frustation dikarenakan pada fase ini seseorang mulai mendapatkan berbagai kesulitan. Kesulitan beradaptasi dengan bahasa, makanan, dan lingkungan teman-teman. Dan pada fase resolution, seseorang mulai membuka diri nya untuk beradaptasi dan mencari jalan keluar dari kesulitannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi nya culture shock individu adalah faktor intrapersonal dan variasi budaya. Faktor intrapersonal seperti cara berkomunikasi, usia, dan gender merupakan salah satu faktor terjadi nya culture shock.

Dan untuk manifestasi sosial politik, itu tidak terlalu berpengaruh, tergantung mayarakat di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Chaney, Lilian,Martin, Jeanette.2004. Intercultural business communication. New Jersey: Pearson Education.Inc.

Devito, Joseph, A. 2011. Komunikasi Antar manusia. Tanggerang Selatan:Karisma Publishing Group

Mulyana, Deddy & Jalaludin Rakhmat. 202006. Komunikasi Antar Budaya.Bandung : Remaja Rosda Karya

Ruben Brent.D. Lea P. Stewart. 2005. Communication and Human Behavior-5.ed. USA. Allan&Bacon A viacom Company

Samovar, Porter, McDaniel. 2014. Komunikasi Lintas Budaya (Edisi 7). Jakarta :Salemba Humanika.

KOMUNIKASI TERAPEUTIK KONSELOR DALAM MENANGANI ORANG DENGAN LUPUS (ODAPUS) (Studi Kasus di Syamsi Dhuha Foundation Bandung)

Nurly Meilinda
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik,
Universitas Sriwijaya
Email : nurlymeilinda@unsri.ac.id

Abstrak : Lupus merupakan penyakit baru yang mematikan setara kanker. Tidak sedikit penyandang penyakit ini tidak tertolong lagi. Selain rentan dengan terhadap gangguan fisik, Lupus juga rentan terhadap gangguan psikologis. Oleh karena itu, konseling yang menerapkan prinsip komunikasi terapeutik akan sangat berguna dalam membantu penyandang Lupus dalam melewati masa-masa krisis dalam kehidupan, serta membantu mereka untuk hidup dengan Lupus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana proses komunikasi terapeutik konselor dalam menangani Orang Dengan Lupus (ODAPUS). Bagaimana penggunaan simbol dalam komunikasi terapeutik konselor dan ODAPUS, Bagaimana kompetensi komunikasi konselor dalam komunikasi terapeutik dengan ODAPUS, dan Bagaimana model komunikasi yang terbentuk dari komunikasi terapeutik konselor dengan ODAPUS. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui bagaimana proses dan model komunikasi terapeutik konselor dalam menangani ODAPUS. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh konselor dan ODAPUS yang tergabung di Yayasan Syamsi Dhuha Bandung melibatkan penggunaan simbol verbal dan non verbal. Simbol verbal dapat berupa bahasa dan istilah yang digunakan, sedangkan simbol nonverbal seperti mencondongkan tubuh, melakukan kontak mata, menganggukkan kepala, tersenyum dan mengernyitkan alis, melakukan sentuhan pada tubuh ODAPUS, menggunakan pakaian yang sederhana, parfum yang tidak menyengat, menggunakan intonasi yang rendah, serta mencari lokasi dan waktu yang nyaman. Sedangkan kompetensi yang dimiliki konselor dalam menangani ODAPUS yaitu mau menceritakan pengalaman dan kehidupan pribadi, menerima kritik dan saran, tidak membatasi topik pembicaraan, memberikan solusi dan nasihat positif, menyampaikan pesan kebaikan, menunjukkan sikap tenang, tidak pernah memaksakan pendapat, dan tidak memotong pembicaraan ODAPUS.

***Kata kunci** : Konselor, Studi Kasus, Komunikasi Terapeutik*

PENDAHULUAN

Lupus merupakan penyakit baru yang mematikan setara dengan kanker. Tidak sedikit pengidap penyakit ini tidak tertolong lagi. Lupus memang belum sepopuler gangguan kesehatan lainnya seperti osteoporosis, asma, diabetes, ataupun penyakit

jantung koroner. Padahal dampak penyakit ini bagi penyandang dan keluarganya sangatlah nyata. Keadaan ini disebabkan karena Lupus lebih sering menyerang wanita usia muda yang seharusnya aktif dalam berbagai fungsinya sebagai pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga wanita karir. Begitu terkena Lupus, sebagian dari mereka harus menjadi beban bagi keluarganya dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Orang Dengan Lupus (ODAPUS), selain rentan dengan serangan Lupus terhadap fisik mereka, juga rentan terhadap gangguan psikologis yang muncul seiring dengan munculnya penyakit ini. Penyakit ini merupakan pertarungan seumur hidup dan karena jangka waktu yang cukup lama, banyak ODAPUS maupun anggota keluarga yang menjadi stres menghadapinya. Oleh karena itu, penyandang Lupus harus dibantu melalui pemberian dukungan dalam bentuk perhatian agar mereka lebih membuka pikiran dan tidak menjadi takut berlebihan yang dapat memperburuk keadaan ODAPUS. Lupus sesungguhnya dapat dihadapi, karena banyak ODAPUS yang terbukti telah berhasil menghadapi penyakit Lupus. Dalam menghadapi Lupus diperlukan dukungan dari berbagai pihak, ODAPUS harus selalu berkomunikasi dengan dokter mengenai penyakit ini serta mendapatkan pengobatan khusus baik di bidang konseling maupun medis secara teratur.

Konseling dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang mengidap penyakit Lupus, karena konseling dapat membantu mengurangi kegelisahan, memperbaiki persepsi dan meningkatkan pengetahuan tentang penyakit Lupus, serta mengembangkan perubahan perilaku. Uniknya, Apabila konseling dilakukan secara benar, maka akan muncul kemungkinan bahwa ODAPUS akan berhasil melewati masa-masa krisis dalam kehidupan, dan bahkan tertarik untuk membagikan pengalamannya kepada rekan ODAPUS lainnya. Situasi ini dapat ditemukan di salah satu yayasan pemerhati penyakit Lupus yang ada di kota Bandung, yaitu Syamsi Dhuha Foundation (SDF). Syamsi Dhuha Foundation (SDF) merupakan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) nirlaba yang bergerak dibidang kesehatan, terutama Lupus. Syamsi Dhuha Foundation (SDF) memiliki beberapa program yang memiliki tujuan untuk membantu ODAPUS dalam menerima penyakitnya dan untuk menyesuaikan diri mereka baik secara mental, psikologis, sosial, dan ekonomis. Salah satu program yang dijalankan di SDF adalah program pendampingan yaitu program dimana satu orang ODAPUS akan didampingi oleh sukarelawan yang bertugas mengupdate keadaan ODAPUS tersebut.

Dalam menjalankan program pendampingan, Syamsi Dhuha memiliki koordinator wilayah yang masing-masing membawahi 3-4 orang sukarelawan. Koordinator wilayah ini mengarahkan para sukarelawan untuk melakukan kontak dan berinteraksi langsung dengan ODAPUS. Jika ODAPUS mengalami masalah dan kesulitan terutama mengenai penyakit Lupus, maka penanganan, termasuk konseling, akan diserahkan kepada koordinator wilayah yang sekaligus bertindak sebagai konselor. Proses konseling dilakukan dengan mempraktekkan pengalaman yang mereka dapat dari proses konseling yang telah dijalani, dan menerapkan nilai-nilai yang mereka yakini dengan tujuan agar dapat membantu rekan sesama ODAPUS untuk keluar dari masa-masa krisis.

Proses konseling yang dilakukan oleh para konselor Syamsi Dhuha Foundation tersebut berarti melibatkan konselor yang bersifat nonprofesional, yaitu konselor yang tidak menjalani pendidikan formal dalam tujuannya untuk menjadi konselor, melainkan konselor yang memberikan bantuan berdasarkan pengalaman pribadi yang dialaminya, baik sebagai ODAPUS maupun sebagai orang yang berhubungan dekat dengan ODAPUS. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena konselor yang telah memiliki pengalaman hidup di bidang tersebut dan berhasil bertahan melalui fase-fase yang rawan akan guncangan emosional, justru akan memiliki kekayaan pengetahuan praktis dalam menangani ODAPUS dengan berbekal pengalaman pribadinya. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Brammer (Mappiare, 2004:4), bahwa para helper nonprofesional, walaupun kurang canggih latar belakang ilmu tingkah laku yang dimilikinya dan sedikit latihan keterampilan, kerapkali dapat menerapkan prinsip-prinsip helping berdasarkan intuisi, penghayatan, dan seni mereka. Adapun jenis komunikasi yang digunakan oleh konselor dalam proses konseling dengan ODAPUS adalah komunikasi terapeutik dengan konteks antarpribadi yang termasuk dalam ranah komunikasi kesehatan. Konseling merupakan salah satu contoh penerapan komunikasi terapeutik secara antarpribadi dalam sebuah hubungan.

Komunikasi terapeutik dapat diartikan sebagai proses untuk menciptakan hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan hubungan terapeutik merupakan hubungan dimana seorang anggota dengan sengaja menggunakan keterampilan interaksi untuk memberi semangat dan mendukung

perubahan-perubahan diri anggota lainnya. Dalam hubungan semacam itu kita menggunakan interaksi diri kita sendiri supaya mempengaruhi diri orang lain (Abraham, 1997; 141). Devito dalam Infante (1993: 463) memasukkan komunikasi terapeutik sebagai salah satu tujuan utama komunikasi antarpribadi. Penggunaan komunikasi antarpribadi dalam proses konseling perlu diperhatikan, karena konselor disini berfungsi untuk menciptakan suasana nyaman bagi ODAPUS untuk bercerita sehingga memungkinkan konselor dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh ODAPUS serta meningkatkan rasa percaya diri mereka yang akan berpengaruh kepada pergerakan Lupus dalam diri ODAPUS. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana komunikasi dilakukan oleh konselor dalam menangani ODAPUS, melalui cara konselor berkomunikasi dan tindakan konseling yang dilakukan agar pasien dapat menerima penyakitnya serta menjalani kehidupannya layaknya orang-orang yang tidak menderita Lupus lainnya.

KERANGKA TEORI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. Metode penelitian kualitatif digunakan di dalam penelitian ini karena dianggap lebih sesuai untuk mendapatkan data mengenai aspek-aspek yang akan diteliti, selain itu karena metode penelitian kualitatif juga berfungsi untuk mengetahui secara mendalam tentang fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, baik itu perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretif. Sehingga bias, nilai, dan penilaian peneliti dinyatakan secara tegas dalam laporan penelitian. Keterbukaan seperti itu dianggap bermanfaat dan positif (Locke, Spirduso, &Silverman,1987) (dalam Creswell, 2002: 138).

Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme Simbolik diawali oleh pemikiran George Herbert Mead yang berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain, demikian pula perilaku orang tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa

simbol, maka kita dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain. Sesuai dengan pemikiran-pemikiran Mead, definisi singkat dari tiga ide dasar dari interaksi simbolik adalah : (a.) Mind (pikiran) - kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. (b.) Self (diri pribadi) - kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (the-self) dan dunia luarnya. (c.) Society (masyarakat) - hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya. Bila kita melihat dalam tataran komunikasi antarpribadi, maka pada saat tatap muka dialogis timbal balik dinamakan interaksi simbolik. Terdapat simbol yang dipertukarkan dalam setiap komunikasi antarpribadi yang dilakukan. Begitu pula yang terjadi pada proses komunikasi antarpribadi yang dilakukan konselor dan ODAPUS.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Syamsi Dhuha Foundation Bandung yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.369 Komplek DDK 1 Bandung. Lokasi penelitian ini ditentukan karena Syamsi Dhuha Foundation merupakan lokasi yang paling tepat dan representatif untuk digunakan sebagai lokasi penelitian ini. Adapun subjek dari penelitian ini adalah 5 konselor koordinator wilayah SDF, selain itu penelitian ini juga akan melibatkan ODAPUS, Dokter Pengamat Lupus, dan Pendiri Syamsi Dhuha Foundation untuk menjadi sumber data tambahan pada penelitian, agar dapat memperkaya data dan memperbanyak informasi pada penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap para informan pada penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh konselor dalam menangani ODAPUS melibatkan proses pertukaran simbol dan dalam

proses komunikasinya diperlukan kompetensi komunikasi dari para konselor agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara mereka, dalam hal ini ODAPUS.

Dalam berkomunikasi dengan ODAPUS, masing-masing informan tidak dapat terlepas dari penggunaan simbol. Simbol sendiri dalam pengertiannya adalah suatu rangsangan yang mengandung makna dan nilai yang dipelajari bagi manusia, dan respons manusia terhadap simbol adalah dalam pengertian maknanya alih-alih dalam pengertian stimulasi fisik dari alat-alat inderanya. Suatu simbol disebut signifikan atau memiliki makna bila simbol itu membangkitkan pada individu yang menyampaikannya respons yang sama seperti juga akan muncul pada individu yang dituju (Mulyana, 2010: 77).

Adapun penggunaan bahasa verbal dan nonverbal dalam komunikasi terapeutik antara konselor dan ODAPUS dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Penggunaan Simbol

SIMBOL	
Verbal	**Nonverbal**
Bahasa : ➢ Bahasa sehari-hari ODAPUS - Bahasa Indonesia Informal - Bahasa Sunda **Isi Pembicaraan :** ➢ Membicarakan bukan hanya tentang Lupus tetapi juga hal pribadi lainnya **Istilah Khusus :** ➢ Menggunakan beberapa istilah medis ('*flare*', "remisi", "protein", dll) ➢ Menggunakan panggilan kesayangan ("say", "bebep", "cinta") ➢ Terdapat slogan dan simbol khusus bagi ODAPUS dan pemerhati Lupus secara universal yaitu "Care for Lupus" yang diteriakkan serta dapat dilambangkan dengan membentuk huruf "C", angka "4", dan huruf "L" dengan menggunakan jemari tangan.	**Bahasa Tubuh :** ➢ Melakukan kontak mata yang intens, mencondongkan tubuh, menganggukkan kepala, tersenyum, mengerenyitkan alis **Penampilan Fisik :** ➢ Tidak mencolok (pemilihan warna pakaian yang sederhana, menggunakan t-shirt, kemeja berkerah, blouse, aksesoris sederhana, make up natural/tipis, sepatu flat) **Bau-bauan :** ➢ Menggunakan parfum dengan aroma lembut dan tidak menyengat ➢ Tidak bermasalah dengan bau badan/mulut **Sentuhan :** ➢ Menggenggam tangan, mengelus punggung, merangkul, membelai rambut, dll **Para bahasa :** ➢ Berbicara dengan lemah lembut ➢ Menggunakan intonasi yang lambat dan nada suara yang rendah **Orientasi Ruang dan Jarak Pribadi** ➢ Proses konseling dilakukan di Sekretariat, Rumah, dan Rumah Sakit ➢ Jarak duduk tidak lebih dari setengah meter ➢ Dilakukan di sofa, kursi, kamar tidur, dan tempat nyaman lainnya **Waktu :** ➢ Waktu konseling disesuaikan dengan masing-masing konselor dan ODAPUS

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa para konselor di Syamsi Dhuha menerapkan penggunaan simbol baik verbal maupun nonverbal dalam proses

komunikasinya dengan ODAPUS. Berdasarkan simbol yang digunakan tersebut dapat dikatakan bahwa proses komunikasi terapeutik dalam konteks antarpribadi antara konselor dan ODAPUS ini telah menerapkan konsep-konsep serta esensi dari interaksi simbolik yang menekankan pada keunggulan tindakan dan interaksi manusia, dan analisisnya terhadap kehidupan sosial.

Hubungan interpersonal adalah hubungan yang kita kembangkan dengan orang lain sebagai hasil dari komunikasi interpersonal dengan mereka. Karakter dan kualitas hubungan interpersonal dipengaruhi juga oleh suasana hubungan yang dijalin oleh pelaku-pelaku komunikasi. Dalam membangun sebuah proses komunikasi yang baik dan timbal balik dengan ODAPUS, konselor harus memiliki kompetensi-kompetensi komunikasi. Jika konselor ingin menjadi komunikator yang kompeten, maka ia harus mengetahui bagaimana melakukan lima hal berikut secara benar, yaitu Menetapkan makna dunia disekeliling kita, Menentukan tujuan secara strategis, Mengambil peran sosial yang sesuai, Menunjukkan nilai diri kepada dunia, dan Menghasilkan pesan yang bisa dimengerti. Adapun hasil penelitian mengenai kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh konselor dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Kompetensi Komunikasi Konselor

KOMPETENSI				
Keterbukaan (*Openess*)	**Empati (*Empathy*)**	**Dukungan (*Suportiveness*)**	**Sikap Positif (*Positiveness*)**	**Kesetaraan (*Equality*)**
➢ Mau menceritakan pengalaman dan kehidupan pribadi ➢ Menerima kritik dan Saran ➢ Tidak terbatasnya topik pembicaraan	➢ kontak mata, badan, sikap, kedekatan fisik, serta sentuhan (menggenggam tangan, jarak duduk, merangkul)	➢ Menjadi Pendengar yang baik ➢ Berusaha memberikan solusi ➢ Mengingatkan ODAPUS bahwa ia tidak sendiri ➢ Memberikan nasihat positif	➢ Menyampaikan pesan kebaikan ➢ Meyakinkan semua akan baik-baik saja ➢ Menunjukkan sikap yang mengayomi dan tenang	➢ Tidak pernah memotong pembicaraan ➢ Tidak memaksakan kehendak ➢ Menghindari perbedaan pendapat

Konselor yang melakukan komunikasi dengan ODAPUS memiliki kompetensi-kompetensi tersebut diatas yang dapat membantu guna menciptakan komunikasi yang

efektif. Kompetensi-kompetensi konselor ini dapat mendorong ODAPUS agar menjadi terbuka sehingga mau berbagi cerita baik mengenai Lupus ataupun hanya seputar kehidupan sehari-harinya. Ini dimaksudkan agar kesehatan psikologi ODAPUS tetap terjaga sehingga membantu mengurangi kemungkinan Lupus untuk kambuh.

Keadaan yang dikehendaki dalam berlangsungnya komunikasi antarpribadi antara konselor dan ODAPUS adalah pengungkapan diri dari ODAPUS, yaitu mereka mengungkapkan informasi tentang diri mereka sendiri yang biasanya disembunyikan. Pengungkapan diri ini akan bermanfaat untuk mendapatkan perspektif baru tentang diri dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku diri ODAPUS. Hal ini berkaitan dengan *Johari Window* pada Teori Pengungkapan Diri (*Self Disclosure Theory*) yang menjelaskan mengenai pengungkapan diri seseorang yang diwakilkan oleh empat daerah yaitu daerah terbuka, daerah tertutup, daerah gelap, daerah buta, dan daerah tertutup. Konselor disini bertugas untuk menyeimbangkan daerah ini, agar ODAPUS tidak menjadi orang yang terlalu terbuka (*overdisclosure*) atau juga sebaliknya terlalu tertutup (*underdisclosure*). Dengan seimbangnya daerah ini, maka diharapkan kondisi psikis ODAPUS juga akan menjadi stabil, disinilah kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh konselor tersebut memainkan peranannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka di dapatlah sebuah model komunikasi yang mewakili proses komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh Konselor di Syamsi Dhuha dalam menangani ODAPUS. Model komunikasi ini menggambarkan bahwa komunikasi terapeutik antara konselor dan ODAPUS melibatkan melibatkan terjadinya pertukaran simbol yang dapat dilihat dari sikap, tindakan, dan tingkah laku konselor dalam menangani ODAPUS. Simbol-simbol yang dimaksudkan disini adalah simbol verbal yaitu bahasa dan simbol nonverbal yaitu termasuk bahasa tubuh, penampilan fisik, bau-bauan, sentuhan, orientasi ruang dan jarak pribadi, diam, dan warna. Hal tersebut merupakan bagian dari teori interaksi simbolik yang menggambarkan bahwa proses pertukaran simbol merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia.

Selain melibatkan proses pertukaran simbol, komunikasi terapeutik yang terjadi antara konselor dan ODAPUS yang dijelaskan pada model juga melibatkan unsur-unsur kompetensi komunikasi yang layaknya dimiliki oleh konselor agar dapat meeningkatkan efektifitas komunikasinya dengan ODAPUS. Seorang konselor harus memiliki kompetensi komunikasi supaya ia dapat menjalankan tugasnya untuk

menciptakan suasana komunikatif sehingga membuat ODAPUS merasa nyaman dan mendorongnya untuk mengungkapkan diri mereka. Berikut adalah model komunikasi terapeutik konselor dalam menangani ODAPUS :

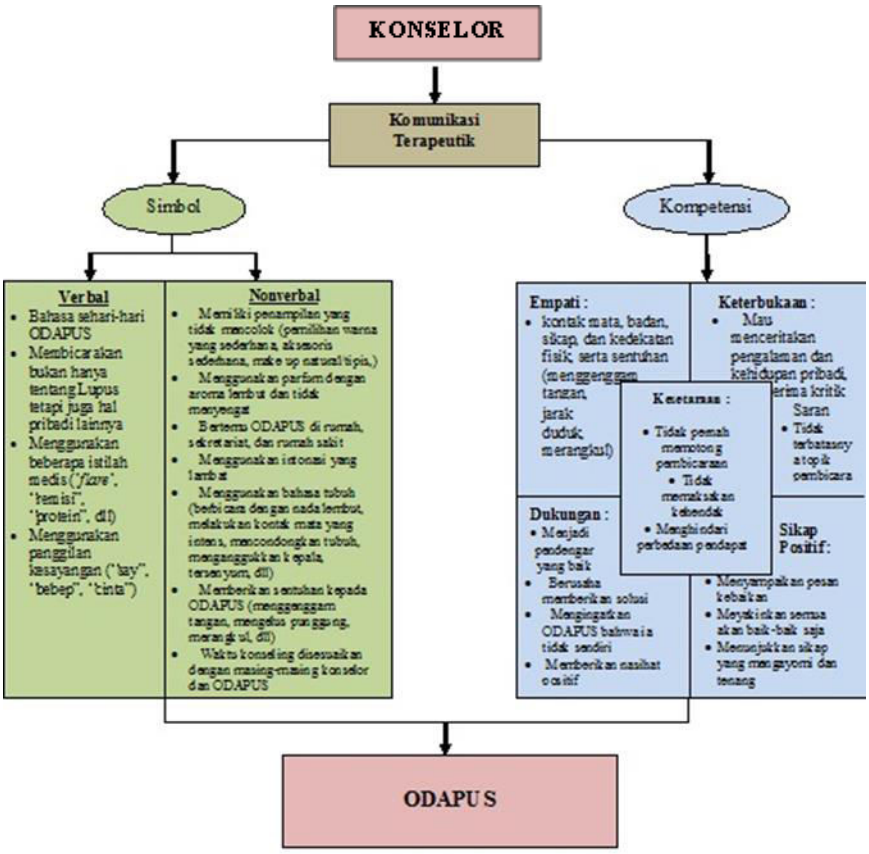

Bagan 1. Model Komunikasi Terapeutik Konselor dan ODAPUS

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi Terapeutik yang dilakukan oleh konselor dalam menangani ODAPUS menunjukkan bahwa terdapat penggunaan simbol-simbol yang beragam, baik itu isyarat verbal maupun nonverbal. Isyarat vokal yang dimaksudkan disini adalah penggunaan bahasa dan kata-kata, sedangkan isyarat fisik adalah simbol nonverbal seperti bahasa tubuh, penampilan fisik, bau-bauan, sentuhan, parabahasa, orientasi ruang dan jarak pribadi, waktu, diam, dan warna.

2. Konselor yang melakukan komunikasi dengan ODAPUS memiliki kompetensi-kompetensi yang dapat membantu guna menciptakan komunikasi yang efektif. Kompetensi yang dimiliki oleh konselor Syamsi Dhuha tersebut meliputi keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan.

3. Model komunikasi yang terbentuk dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam komunikasi terapeutik antara konselor dengan ODAPUS terdapat pertukaran simbol yang meliputi simbol verbal dan nonverbal serta kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh konselor di Syamsi Dhuha.

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi, yaitu :

1. Kajian penelitian tentang komunikasi terapeutik konselor dalam menangani ODAPUS ini masih sangat terbuka untuk dilakukan pendalaman-pendalaman bagi penelitian yang lebih lanjut.

2. Kepada konselor Syamsi Dhuha diharapkan untuk mengalokasikan waktu yang lebih banyak untuk proses konseling dan semakin memperkaya wawasan terutama dalam hal berkomunikasi.

3. Kepada Syamsi Dhuha Foundation untuk merekrut lebih banyak konselor, dapat memberikan kompensasi sebagai bentuk apresiasi dari hal yang sudah mereka lakukan.

4. Kepada ODAPUS untuk tetap berjuang dalam hidup dengan Lupus serta medaftarkan dirinya kepada support group seperti Syamsi Dhuha karena dapat memberikan pengaruh yang positif dalam menjalani hidup.

5. Untuk pemerintah, agar dapat lebih memperhatikan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial masyarakat, dan memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. 2002. Desain Penelitian:Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif Terjemahan. Jakarta: KIK Press

Damaiyanti, Mukharipah. 2008. Komunikasi Terapeutik dalam Praktik Keperawatan. Bandung: PT. Refika Aditama

Enjang. 2009. Komunikasi Konseling: Dari Wawancara, Seni Mendengar, sampai Soal Kepribadian. Bandung: Nuansa

Infante, Dominic A., Andrew S. Rancer, dan Deanna F. Womack. 1993. Building Communication Theory, Research, and Practice. London: Lawrence Erbaum Associates

Mulyana, Deddy. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

GASTRODIPLOMACY KULINER DAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KREATIF PADA MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

Dr. Desy Misnawati, M.I.Kom
Prof. Isnawijayani. Ph.D
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma Palembang
Email : desymisnawati98@gmail.com / isnawijayani23@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini mengkaji fenomena kuliner sebagai representasi, regulasi, konsumsi dan produksi masyarakat. perkembangan media dan teknologi telah mengubah aktivitas makan dan budaya makan. Kebutuhan akan makan bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, kini menjadi "tanda" yang ingin diperlihatkan kepada publik. Teori perubahan sosial dan teori hiperrealitas dari Jean Baudrillard untuk mengkaji fenomena fenomena perilaku budaya makan pada masyarakat di Kota Palembang. Metode etonografi sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian Makanan bukan sekedar dibuat dan dimasukan ke dalam perut, tapi ada makna di dalamnya, kebiasaan makan, seperti semua kebiasaan, hanya dapat dimengerti dalam konteks budaya yang menyeluruh, maka studi mengenai makanan dalam konteks budayanya, yang menunjuk kepada masalah-masalah yang praktis ini, jelas merupakan suatu peranan para ahli antropologi. Sifat psikologis makanan tercermin melalui perilaku-perilaku individu, hal itu merupakan implikasi dari pembelajaran akan sistem nilai/gagasan yang berlaku. Dengan demikian, dimensi psikologis bukanlah suatu dimensi tunggal dan terpisah dalam diskursus kebudayaan masyarakatnya. Proses pergeseran perilaku komunikasi budaya melalui makanan sebagai terminologi diri untuk mengkonstruksikan subjek melalui aturan-aturan, nilai, ideal-ideal. Makan merupakan cara untuk mereproduksi pengetahuan, yang pada akhirnya melahirkan peradaban. pemanfaatan kuliner pun merupakan bagian dari pengembangan potensi ekonomi kreatif bagi masyarakat Palembang. Implementasi dari pelaksanaan pemanfaatan potensi kuliner ini disebut gastrodiplomacy atau diplomasi kuliner.

***Kata Kunci**: Diplomasi Budaya, Gastrodiplomacy, dan Ekonomi Kreatif.*

PENDAHULUAN

Peradaban budaya terus berkembang. Perkembangan kemajuan zaman menghasilkan perubahan dalam budaya makan pada masyarakat. Makanan saat ini mengalami proses adaptasi yang bukan dianggap tradisional. Variasi makanan akan membentuk karakter makanan serta cara makan yang berbeda. Perilaku masyarakat memilih tempat makan dan jenis fast food menjadikan menu dan tujuan mereka

mengaktualisasikan dirinya menarik untuk diteliti. Mengingat perilaku dan pola makan individu pada dasarnya dipengaruhi oleh pengalaman budaya yang dimiliki oleh perubahan sosial budaya yang terjadi (gaya hidup, ekspresi simbolik, masuknya ideologi).

Perkembangan makanan itu sendiri sekarang sudah berubah menjadi suatu budaya. Variasi makanan akan membentuk karakter makanan serta cara makan yang berbeda. Kuliner (makanan) memiliki peranan dalam diplomasi, yaitu dalam bentuk gastrodiplomacy. Hubungan diplomasi pada dasarnya fokus kepada komunikasi budaya dan nilai-nilai publik asing sedangkan gastrodiplomacy adalah tindakan memenangkan hati dan pikiran melalui perut. Praktek inovasi berdiplomasi hadir melalui kuliner yang disebarkan ke seluruh penjuru dunia dinilai lebih efektif daripada diplomasi pada umumnya.

State actor ataupun non-state actor sebagai praktik penyebaran tradisi kuliner yang bertujuan menyebarkan nilai, budaya, dan juga tradisi. Diplomasi kuliner dalam acara festival kuliner di Indonesia maupun Summer Fancy Food Show yang diadakan di New York, sebagai perwakilan daerah maupun negara yang mengubah arti diplomat. Kuliner tidak terlepas dari budaya. Karena budaya merupakan landasan komunikasi sehingga bila budaya beraneka ragam maka beraneka ragam pula praktek-praktek komunikasi yang berkembang. Adapun budaya itu sendiri berkenaan dengan cara hidup manusia. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktek komunikasi, tindakan-tindakan sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik dan teknologi semuanya didasarkan pada pola-pola budaya yang ada di masyarakat.

Pada masa sebelumnya masyarakat Palembang menyajikan makanan lokal atau dengan khasnya untuk di konsumsi. Kini kuliner lokal tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Kota Palembang tetapi telah berubah menjadi proses produksi. Proses produksi tidak luput dari budaya. Budaya merupakan landasan komunikasi sehingga bila budaya beraneka ragam maka beraneka ragam pula praktek-praktek komunikasi yang berkembang. Adapun budaya itu sendiri berkenaan dengan cara hidup manusia. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktek komunikasi, tindakan-tindakan sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik dan teknologi semuanya didasarkan pada pola-pola budaya yang ada di masyarakat.

Berkembangnya budaya fast food dan western food Kota Palembang menjadi rujukan masyarakat saat ini. Trend dan kebanggaan tersendiri ketika menyantap kuliner asing, hingga pada akhirnya membentuk identitas kepribadian dan pengalaman dalam diri individu di masyarakat Palembang menjadi sebuah diplomasi. Gastrodiplomacy menggunakan kuliner yang ditujukan untuk menarik selera konsumen publik secara global, serta membantu meningkatkan brand awareness dan reputasi suatu bangsa (Made 2013).

culinary diplomacy ataupun gastrodiplomacy mampu berdampak terhadap keberlangsungan hubungan suatu daerah atau Negara. Seperti diantaranya sebagai wadah untuk mempromosikan kerjasama bilateral maupun multilateral, perdamaian, menunjukkan karakter suatu daerah atau negara, persahabatan antar negara, dan pengembangan komunitas. Interaksi yang terjadi dengan dilakukannya gastrodiplomacy baik secara disengaja maupun tidak disengaja, dapat menaikkan level empati dan level pengertian antara aktor-aktor negara yang saling berinteraksi.

TINJAUAN PUSTAKA

Hiperealitas menciptakan kondisi kepalsuan yang berbaur dengan keasliannya. Masa lalu berbaur dengan masa kini. Fakta yang bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas. Masyarakat postmodern adalah sebuah masyarakat yang mengutamakan konsumsi (Featgerstone dalam Ritzer, 2003: 372). Masyarakat postmodern tidak lagi mengkonsumsi objek berdasarkan manfaat atau fungsi dari objek, melainkan konsumsi didasarkan atas tanda, simbol dan prestise. Melalui objek, setiap individu dan setiap kelompok menemukan tempat masing-masing pada sebuah tatanan, masyarakat terstratifikasi, sehingga setiap orang terus pada tempat tertentu (Baudrillard dalam Ritzer, 2003: 137-138).

Makan, termasuk budaya makan, tiba-tiba menjadi bahan perbincangan yang ramai bagi mayoritas orang. Hasrat untuk memfoto makanan kemudian mengunggah foto makanan ke media sosial dapat dibaca sebagai suatu gejala kehidupan yang baru, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Fenomena foodstagramming merupakan contoh fenomena konsumerisme. Konsumsi tidak dapat dipahami sebagai konsumsi nilai guna, tetapi terutama sebagai konsumsi tanda (Sarup, 2003: 287). Nilai guna digantikan nilai tanda. Ketika kita mengkonsumsi objek, maka

kita mengkonsumsi tanda, dan sedang dalam prosesnya kita mendefinisikan diri kita (status sosial kita).

Baudrillard (1970) memandang bahwa dalam masyarakat konsumen, orang tidak hanya mengonsumsi barang, tetapi juga mengonsumsi jasa dan hubungan antarmanusia. Masyarakat konsumen diidentikkan dengan masyarakat pertumbuhan yang dalam prosesnya merupakan lingkaran setan pertumbuhan. Dalam hal ini, kelimpahruahan masyarakat kaya dihubungkan dengan pemborosan. Hal ini dianalogikan dalam analisis sosiologi keranjang sampah, yakni "Katakan padaku apa yang kamu lontarkan, akan kukatakan siapa kamu!" Dalam hal ini, muncul pertanyaan mendasar, "Apakah kelimpahruahan adalah pangkal arah pemborosan?" Terkait konteks tersebut, pandangan moral pemborosan sebagai disfungsi diambil kembali menurut fungsi-fungsi yang sebenarnya (Baudrillard, 2009: 31–32).

Dalam pandangan Baudrillard, konsumsi dipahami secara holistik. Dengan kata lain, konsumsi adalah integrasi sosial meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik materiil, spiritual, jasmani, rohani, bahkan konsumsi dapat juga bersifat semu atau palsu. Pandangan tersebut yang membedakan perspektif Baudrillard dengan para ekonom sebelumnya yang hanya memandang konsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan berdasarkan manfaat (utility) suatu objek/barang. Dengan mengacu pada pandangan Baudrillard dalam melihat realitas kehidupan manusia di abad kontemporer tersebut, analisis masyarakat konsumen tidak dapat dilepaskan dari analisis budaya.

Gaya konsumsi masyarakat saat ini adalah mengkonsumsi makanan tidak hanya berdasarkan kebutuhan biologis tetapi juga untuk memuaskan kebutuhan sosialnya dan hasratnya. Ritzer dalam Baudrillard (2009:xxxv) memberikan penekanan bahwa dalam masyarakat konsumsi modern, manusia tidak saja mengkonsumsi barang tetapi juga jasa manusia dan hubungan antar manusia. Bahkan Piliang (2006: 389-390) memperjelas kembali bahwa masyarakat memakan sesuatu tidak hanya sekedar sebuah aktivitas biologis memindahkan makanan ke dalam tubuh, tetapi aktivitas yang melibatkan berbagai relasi psikologi, bahasa, simbolik, gender, sosial, teknologi, spiritual, ekonomi, politik dan kultural.

Bagi Piliang (2006:390) makan adalah salah satu wujud utama kebudayaan (culinary culture). Maka tepatlah ketika masyarakat Bali memahami fenomena ini, mereka mengemas makanan tradisionalnya tidak saja pada penciptaan rasa yang bisa

diterima secara luas, namun juga disajikan dengan pelayanan yang baik dan tempat yang bagus bahkan berkelas/elit sehingga keuntungan pun dapat diraih melalui bisnis kuliner.

Kuliner lokal dikategorikan sebagai salah satu produk budaya yang bernilai ekonomis. Dalam hal ini makanan yang diolah oleh masyarakat Palembang secara tradisional kini tidak lagi digunakan sebagai konsumsi sehari-hari bagi masyarakat, melainkan dikemas sedemikian rupa sehingga mampu memberikan nilai tambah berupa penghasilan. Bahkan orang yang memiliki ide kreatif dan modal yang memadai, akhirnya menjadi pebisnis kuliner melalui pengolahan masakan tradisional dari tangan-tangan terampil yang dipekerjakannya. Kondisi seperti ini dapat dipahami masyarakat Palembang sebagai industri budaya yang kapitalistik.

Beralihnya pola produksi makanan tradisional yang tadinya digunakan sebagai konsumsi sendiri menjadi barang produksi, inilah aktivitas yang ada dalam industri budaya, yakni kebudayaan masyarakat dikemas sedemikian rupa untuk menghasilkan nilai jual. Penelitian di lapanganpeneliti terhadap kedua belas informan beberapa diantaranya menyatakan bahwa salah satu produk budaya mampu menghasilkan nilai ekonomi.

Mpek-mpek merupakan makanan khas Kota Palembang yang berkategori panganan lokal atau makanan tradisional sebagai salah satu produk budaya yang bernilai ekonomis. Mpek-mpek berupa makanan yang diolah oleh masyarakat secara tradisional, kini tidak lagi digunkana sebagai konsumsi semata, makanan ini dikemas dan di produksi sehingga menghasilkan varians dan bentuk yang berbeda dari aslinya, mampu memberikan nilai tambah berupa penghasilan kepada masyarakat Kota Palembang. Iden kreatif dan memiliki modal yang memadai sehinga mereka dapat menjadi pebisnis kuliner yang terkenal. Industri budaya tercipta dari tangan-tangan terampil yang mampu mempekerjakan masyarakat Palembang sehingga mampu membuka lapangan kerja di Kota Palembang.

Potensi bisnis kuliner lokal pada masyarakat Palembang semakin meningkat, pengolahan makanan dan minuman semakin ditingkatkan. Namun tidak dapat hindarkan bahwa ancaman terhadap pelestarian nilai-nilai budaya pada kuliner lokal harus dipertahankan. Pengembangan kuliner dalam rangka meningkatkan citra dan

kelesatian makanan tradisional agar masyarakat Palembang menghargai dan mencintai serta dikembangkan sebagai sumberdaya dalam potensi nasional dalam era globalisasi.

Perubahan sosial pada kuliner lokal di Palembang memiliki nilai yang eksotis. Nilai eksotis kuliner mempunyai ciri khas yang bernilai ekonomi, sosial dan budaya. Pernan kuliner sebagai nilai jual guna peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga pada masyarakat Palembang di ea globalisasi. Bergesernya nilai-nilai dan fungsi makanan tidak lagi dipandang sebagai nilai-nilai adat dan religi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis untuk memahami gambaran pergeseran perilaku budaya kuliner lokal ke fast food pada masyarakat di Kota Palembang dengan menggunakan metode penelitian etnografi. Etnografi merupakan pendekatan mengenai fenomena yang ada sebuah kelompok sosial. Seorang etnograf tidak hanya terfokus pada deskripsi tingkah laku anggota kelompoknya, tetapi lebih kepada untuk mengerti budaya yang ada dalam kelompok sosial secara lebih mendalam. (Edgar & Sedgwick, 2004, hlm. 133). Chris Barker menyebutkan bahwa etnografi mencoba untuk merepresentasikan subjektivitas makna, perasaan, dan kebudayaan orang lain. (Barker, 2006, hlm. 29).

Inti dari etnografi adalah upaya untuk memperhatikan makna-makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami. James P. Spradley, menyebutkan beberapa makna tersebut terekspresikan secara langsung dalam bahasa; dan di antara makna yang diterima, banyak yang disampaikan hanya secara tidak langsung melalui kata-kata dan perbuatan. (2007:5) Tugas dari seorang etnografer adalah mengamati tingkah laku, dan menyelidiki makna dari tingkah laku itu. Etnografer juga melihat berbagai artefak dan objek alam, dan menyelidiki makna yang diberikan oleh orang-orang terhadap berbagai objek itu. Etnografer mengamati dan mencatat berbagai kondisi emosional, dan menyelidiki makna rasa takut, cemas, marah, dan berbagai perasaan lainnya.

Tahap awal pada penelitian ini, peneliti melakukan participant observation, yaitu salah satu metode penelitian etnografi yang melibatkan diri dengan aktivitas kelompok masyarakat yang diteliti. Tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara (Interview) dengan informan. (Spradley, 2007:39). Sesuai dengan masalah dalam

penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah masyarakat Palembang yang bertempat tinggal di Kota Palembang yang berada pada pemukiman kelompok masyarakat Palembang Asli, Masyarakat Palembang Keturunan Arab, Masyarakat Palembang pedatang yang sudah lama menetap dan tinggal di Kota Palembang. Tempat kuliner yang dijadikan objek penelitian adalah gerai kuliner lokal dan gerai fast food yang menjadi lokasi penelitian.

Data-data yang dikumpulkan berbentuk pengamatan, gambar-gambar dari tempat makan tersebut, dan hasil wawancara terhadap beberapa informan yang menjadi pengunjung gerai kuliner lokal dan fast foodt. Selain itu, untuk menambah informasi mengenai tempat-tempat makan yang menjadi lokasi penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan pengelola dan pemilik tempat-tempat makan tersebut. Data-data tersebut akan dianalisis, dan kemudian akan diuraikan secara deskriptif-interpretatif, yaitu data-data disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan ucapan informan lalu direproduksi dengan melihat hubungan secara logis dengan berbagai fakta yang ada. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan pemahaman dan penjelasan secara kompehensif terhadap fakta atau kenyataan objek yang dikaji.

PEMBAHASAN

Istilah gastro diplomasi atau diplomasi kuliner ini mulai populer semenjak tahun 2000an yakni diplomasi yang dilakukan melalui makanan. Terdapat satu istilah "the easiest way to win hearts and minds is through the stomach.". gastrodiplomasi yang disponsori pemerintah resmi telah didirikan di Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Peru, dan Amerika Serikat.

Jika dikaitkan dengan kuliner lokal Palembang seperti mpek-mpek telah digunakan semenjak dahulu sebagai salah satu oleh – oleh atau buah tangan yang menjadi kekhasan daripada daerah Palembang. Kecenderungan memberi buah tangan di Indonesia merupakan bagian dari sopan santun dan juga bagian dari ungkapan terimakasih kepada seseorang, dan dengan kayanya kebudayaan Indonesia menjadikan kebiasaan memberi kuliner khas sebagai penghargaan dan identitas budaya. Sedangkan gerai – gerai kuliner lokal dalam gastrodiplomasi digunakan hanya untuk memperkenalkan dan menciptakan pengenalan terhadap identitas seseorang.

Munculnya kuliner fast food di Palembang, kuliner ini memang tidak dijadikan buah tangan atau sebagai perlambang terimakasih akantetapi menjadi alat dalam meningkatkan hubungan. Kenyamanan tempat menjadi alasan orang berdiskusi atau mengajak rekan bisnis dalam berdiskusi sembari makan. Terjadi perluasan makna dalam penggunaan gerai kuliner. Beberapa tempat bahkan menyediakan ruangan khusus untuk meeting dan mengadakan acara baik acara kantor maupun acara pribadi.

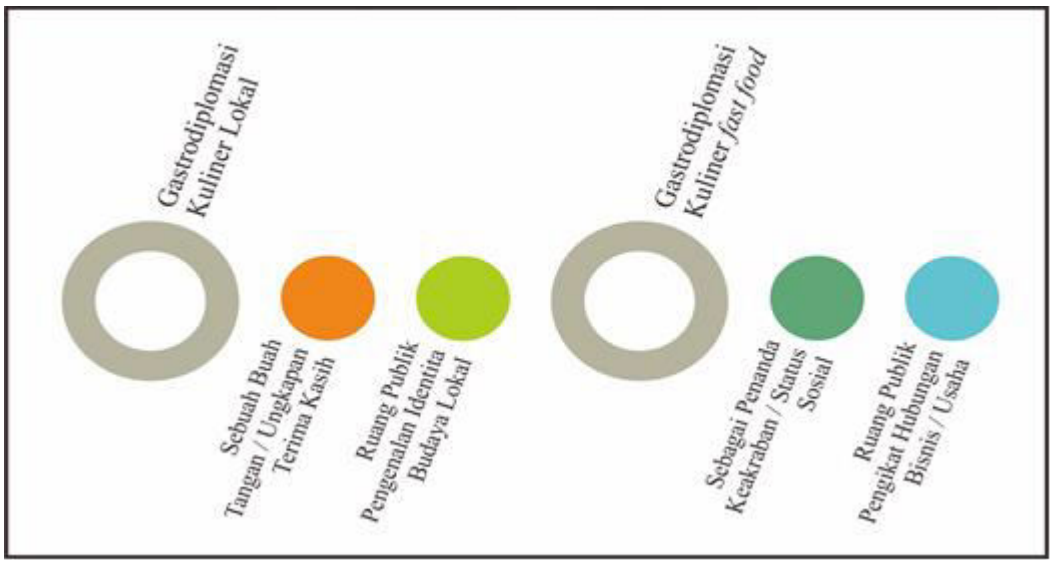

Gambar 1. Kuliner sebagai Gastrodiplomasi

Pembentukan citra dan simbolisasi budaya mewah dalam makanan dan penyajiannya dilakukan melalui penciptaan ruang-ruang dan acara-acara yang diinginkan. Makanan merupakan media penting dalam upaya manusia berhubungan satu sama lain. Di dalam rumah tangga kehangatan hubungan antar anggotanya terjadi pada waktu makan bersama. Begitupun di antara rumah tangga besar diupayakan pertemuan secara berkala dengan makan untuk memelihara dan mempererat hubungan silaturahmi. Antar tetangga, sering dilakukan tukar menukar makanan (Almatsier, 2001).

Dalam bisnis, kesepakatan sering diperoleh dalam suatu jamuan makan di restoran atau di tempat makan lain. Pesta-pesta makan sering diselenggarakan untuk menghormati seseorang, sekelompok orang atau untuk merayakan suatu peristiwa penting. Banyak waktu dan uang digunakan untuk mengusahakan agar makanan yang disajikan memenuhi selera tamu yang diundang (Almatsier, 2001).

Perubahan selera dan motif konsumsi masyarakat Palembang dalam mengunjungi ruang gerai fast food dari sebagai ruang publik yang membuka segala mungkin percakapan. Berisi orang-orang yang saling kenal atau saling berhubungan satu sama lain karena kesamaan minat atau topik pembahasa telah bergeser dan digantikan oleh masyarakat sebagai penikmat suasana baru yang mengkonsumsi ruang keberadaan mereka untuk kepentingan yang sifatnya lebih personal.

Pergeseran makna gerai fast food dari sebuah ruang dimana segala lapisan sosial bisa bertemu dan membicarakan berbagai hal kini secara tidak langsung telah 'memilih' siapa saja yang dapat menjadi konsumen mereka melalui akses dan harga yang ditentukan oleh fast food. Ruang fast food dalam posisinya sebagai panggung sosial telah menggambarkan mengenai kecenderungan pola konsumsi pengguna ruangnya, dapat dilihat dalam pemilihan ruang duduk, tempat duduk maupun sikap yang ditunjukkan kepada sesama pengguna ruangnya.

Makna pesan juga tergantung pada konteks fisik dam ruang (termasuk, tempat, iklim, suhu, intensitas cahaya dan sebagainya) waktu sosial dan psikologi. Ruangan atau tempat juga mempengaruhi makna terhadap suatu pesan. Misalnya seorang tamu yang diterima dihalaman rumah menunjukkan tingkat penerimaan yang berbeda bila dibandingkan dengan penerimaan diteras, diruang tamu, ruang tengah dan dikamar pribadi. (Mulyana, 2008:227)

Ruangan, sebagai konteks sosial juga mempengaruhi orang-orang yang berkomunikasi. Lanskap, eksterior dan interior gedung atau ruangan fast food, begitu juga dengan lokasinya, menimbulkan efek tertentu pada perasaan manusia. Oleh karena manusia hidup dalam suatu ruang fisik, mereka terikat atau dipengaruhi oleh ruang. Tempat dapat menjadi bagian identitas dirinya dan juga bagian dari kenangan hidupnya baik yang indah ataupun yang menyedihkan.

Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun non verbal ruangan disesuaikan dengan tempat, dimana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim dan kapan komunikasi itu berlangsung. Seperti yang dikemukakan Kusumowidagdo (2005: 18-19), peran penting penggunaan ruang bagi sebuah perusahaan adalah menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, dapat mengkomunikasikan citra ruang, dan dapat mengundang reaksi emosi konsumen.

Setiap meja membangun batasan tentang mereka masing-masing tentang apa yang akan mereka lakukan, bicarakan dan amati tanpa perlu melibatkan orang yang berada di sisi meja lainnya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa keberadaan seseorang dalam sebuah ruang turut menentukan sikap serta peran yang diambil. Tubuh sebagai 'space' atau 'selves' yang bertindak sebagai figur, menjadi rangkaian dalam proses konsumsi. Ruang atau tempat yang ada telah memiliki identitas di mana ketika tubuh berada disana akan menjadi bagian daripada nya maka juga menjadi seperti ruang atau tempat tersebut. (Goodman, 2010)

Pengertian sederhananya, ruang publik merupakan arena debat publik yang mendiskusikan isu-isu umum dan pada akhir lebih jauh akan membentuk opini publik. Konsep ini lahir dari tradisi sekitar abad 18, yang dilahirkan dari kebudayaan diskusi para borjuis di salon dan cafe di London, Paris danbeberapa kota di Eropa. Dalam arena tersebut orang-orang bertemu dan mendiskusikan isu yang sedang berkembang di masyarakat, topik pembicaraan tersebut biasanya berasal darimedia massa ataupun isu yang didapat dari situasi riil dalam masyarakat. Seberapa banyakorang yang terlibat dalam diskusi dalam ruang publik ini bukan menjadi esensi, tetapi debatpolitik menjadi proses penting dan substansi yang penting dalam ruang publik. (Habermas, 2001:462)

KESIMPULAN

1) Jika dikaitkan dengan kuliner lokal Palembang seperti mpek-mpek telah digunakan semenjak dahulu sebagai salah satu oleh – oleh atau buah tangan yang menjadi kekhasan daripada daerah Palembang. Kecenderungan memberi buah tangan di Indonesia merupakan bagian dari sopan santun dan juga bagian dari ungkapan terimakasih kepada seseorang, dan dengan kayanya kebudayaan Indonesia menjadikan kebiasaan memberi kuliner khas sebagai penghargaan dan identitas budaya. Sedangkan gerai – gerai kuliner lokal dalam gastrodiplomasi digunakan hanya untuk memperkenalkan dan menciptakan pengenalan terhadap identitas seseorang.

2) Semenjak munculnya kuliner fast food di Palembang, kuliner ini memang tidak dijadikan buah tangan atau sebagai perlambang terimakasih akantetapi menjadi alat dalam meningkatkan hubungan. Kenyamanan tempat menjadi alasan orang berdiskusi atau mengajak rekan bisnis dalam berdiskusi sembari makan. Terjadi

perluasan makna dalam penggunaan gerai kuliner. Beberapa tempat bahkan menyediakan ruangan khusus untuk meeting dan mengadakan acara baik acara kantor maupun acara pribadi.

a) Glokalisasi

Budaya makan mpek-mpek di Palembang sudah banyak dipengaruhi oleh budaya global. Sekarang makan mpek-mpek tidak perlu datang ke Kota Palembang cukup dengan pesan dan dianter melalui agen pengiriman. Dengan globalisasi dimana suatu proses dimana masyarakat dunia menjadi semakin terhubungkan (interconnected) satu sama lain. Kemudian budaya makan mpek-mpek dahulunya menggunakan tangan sekarang mengunakan garpu. Kemudian dalam produksinya mpek-mpek telah banyak menggunakan nama-nama yang baru seperti mpek-mpek rainbow, mpek-mpek isi keju, mpek-mpek isi kentang. Makanan ini dibuat dengan menyesuaikan dengan zaman. Glokaslisasi yang terjadi pada setting tempat dan pada proses konsumtif ke produktif ini bisa dikatakan menjadi perkembangan positif ke arah kreatif di masyarakat Palembang.

Simpulan dari uraian di atas adalah Makanan mengalami pergeseran makna, bukan lagi sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, namun lebih mengacu kepada gaya hidup yang diciptakan oleh masyarakat Kota Palembang. Pergeseran perilaku komunikasi budaya kuliner lokal mengalami penyesuaian dengan kultur dan masyarakat di Kota Palembang. Tujuannya agar dapat terus bertahan seiring dengan peradaban dunia kuliner. Lingkaran konsumerisme terjadi karena lima hal yaitu makanan, masyarakat, gaya hidup, bisnis dan media. Dalam penelitian ini perilaku komunikasi masyarakat dan produsen yang telah mengubah nilai guna dari sebuah makanan.

DAFTAR PUSTAKA

Baudrillard. Jean P.. 2004. Masyarakat Konsumsi. Penj. Wahyunto. Yogyakarta: Kreasi Wacana.Samovar, Porter, McDaniel. 2014. Komunikasi Lintas Budaya (Edisi 7). Jakarta :Salemba Humanika.

Huberman. A. M..& Miles. M. B. 2009. Manajemen Data dan Metode Analisis. Denzin. N. K dan Lincoln. Y. Handbook of Qualitative Research: 591-632. Diterjemahkan oleh Dariyatno. Terbitan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ritzer. George. 2002. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Spradley. James P.. 2007. Metode Etnografi. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.

METODE KUALITATIF DALAM PENELITIAN HUKUM

Derita Prapti Rahayu
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Email : deritapraptir@yahoo.com

Pandangan Dasar Metode Kualitatif dalam Penelitian Hukum

Saat ini telah terjadi banyak pergeseran dalam penelitian hukum, seperti yang dikemukakan oleh Esmi Warassih Pujirahayu bahwa sudah saatnya penelitian hukum dapat mencakup dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, hukum tidak terasing dari konteks sosialnya dan tidak mengabaikan persoalan nilai-nilai etika, moral dan spiritual (hati nurani). Hal itu dipertegas pula oleh pandangan Anthon F. Susanto bahwa penelitian hukum harus beorientasi pada budaya, nilai-niai, moralitas, konsep, asas yang hidup dalam realitas kemasyarakatan Indonesia.

Oleh karena itu, melalui penggunaan metode kualitatif yang berpijak pada ilmu-ilmu perilaku dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Esensinya adalah sebagai sebuah metode pemahaman atas keunikan, dinamika dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Penelitian kualitatif bersifat kompleks dan luas, yang bermaksud memberikan makna atas fenomena secara holistik dan peneliti merupakan instrumen kunci sehingga harus berperan aktif dalam keseluruhan proses penelitian. Metode kualitatif bermaksud untuk melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.

Metode penelitian kualitatif, analisisnya bersifat induktif dengan tujuan dapat memperoleh pemahaman atau pemaknaan, mengembangkan teori dan menggambarkan realitas yang kompleks sehingga mencakup pandangan-pandangan mengenai realitas dari objek yang diteliti.

Memahami Makna Hukum; Metode Kualitatif Sebagai Konsekuensi.

Hingga sekarang belum ditemukan suatu pengertian hukum karena hukum itu banyak seginya serta meliputi segala lapangan kehidupan manusia menyebabkan orang membuat suatu definisi hukum yang memadai dan komprehensif. Pengertian hukum memiliki banyak dimensi yang sulit untuk disatukan mengingat masing-masing dimensi yang sulit untuk disatukan mengingat masing-masing dimensi memiliki dimensi yang berbeda, secara garis besar pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian dasar, pertama, hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai yang abstrak, kedua hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang bersifat abstrak, ketiga hukum dipahami sebagai sarana untuk mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.

Suatu peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya berisi harapan-harapan yang hendaknya dilakukan oleh subyek hukum sebagai pemegang peran. Namun, bekerjanya harapan itu tidak ditentukan hanya oleh kehadiran peraturan itu sendiri, melainkan juga oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor yang turut menentukan bagaimana respon yang akan diberikan oleh pemegang peran, antara lain : (1) sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya, (2) aktivitas dari lembaga pelaksana hukum, dan (3) seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lainnya yang bekerja atas diri pemegang peranan itu.

Hukum bukan hanya dipahami sebagai bangunan peraturan, melainkan bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai peraturan dan prosedur semata yang semuanya bermakna bebas nilai. Hukum dilihat secara fungsional berkaitan dengan upaya untuk menjaga kelangsungan kehidupan sosial, seperti mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa-sengketa, meniadakan penyimpangan-penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Apabila dikaitkan dengan proses pembuatan sampai pelaksanaan, hukum hendaknya dilihat dalam hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, dengan demikian pembuatan dan pelaksanaan hukum dilihat sebagai fungsi masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai. Hukum dalam hal ini mempunyai peran yang sangat besar dalam melindungi hak-hak masyarakat.

Menurut Seidman, kekuatan-kekuatan sosial sangat mempengaruhi proses bekerjanya hukum yang dimulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya, dan sampai pada peran yang diharapkan. Kekuatan sosial mulai bekerja pada tahap pembuatan dan akan terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Adapun peraturan yang dikeluarkan akan menimbulkan hasil yang diinginkan, tapi efeknya sangat bergantung pada kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya.

Hukum sebagai lembaga yang bekerja dalam masyarakat minimal memiliki tiga perspektif dan fungsinya. Pertama, perspektif kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regularitas sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu Berger secara tepat mengemukakan tidak ada masyarakat yang hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Agar hukum dapat megemban fungsi kontrol tersebut, ada 4 persyaratan fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu (1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut idiologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum, (2) masalah dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya, (3) masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, (4) masalah kewenangan penegakan hukum. Kedua, pespektif social engineering merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (the officials perspektif law) untuk mengali sumber-sumber kekuasaan yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Ada 4 syarat agar suatu aturan hukum tergolong enginer , yakni, penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi, analisa terhadap penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai, verifikasi dari hipotesa-hipotesa, adanya pengukuran terhadap efek dari undang-undang yang berlaku. Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat terahadap hukum (the bottom up view of law). Hukum dalam perspektif ini meliputi banyak studi seperti misalnya kemampuan hukum sebagai sarana penampung aspirasi masyarakat, budaya hukum, penegakan hukum dan lain-lain.

Berkenaan dengan fungsi hukum khususnya fungsi rekayasa sosial, maka dewasa ini yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat, agar

bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang diciata-citakan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kesadaran hukum masyarakat, di dalamnya mengandung nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum yang menurut Lawrence M. Friedman disebut sebagai budaya hukum.

Hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan pejabat. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha-usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi. Tindakan-tindakan pejabat penerap sanksi merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif dalam masyarakat dengan penggunaan hukum sebagai sarana. Untuk tiap pejabat ini terdapat serangkaian tujuan-tujuan untuk kedudukan mereka masing-masing dan terdapat pula norma-norma yang menentukan bagaimana mereka harus bertindak.

Hukum tertulis dibuat untuk diterapkan dalam masyarakat, karena itu adalah menjadi suatu cita hukum agar hukum dapat semaksimal mungkin diwujudkan dalam kenyataan atau antara hukum dalam buku (law in books) dan hukum dalam kenyataan (law in action) mestinya tidak jauh berbeda meskipun keinginan agar hukum dalam buku dengan hukum dalam kenyataan yang sama persis hanya merupakan angan-angan. Dengan asumsi hukum tertulis merupakan hukum yang ideal, adanya jurang perbedaaan antara hukum tertulis dan dalam kenyataan merupakan indikasi adanya masalah dalam penegakan hukum (law enforcement) atau efektifitasnya yang merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan serta dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan aparat-aparatnya atau pada pihak yang didelegasikan. Hukum yang tidak efektif tentunya akan berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai. Hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias mengajukan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan hukum, yaitu ;

a. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami.

b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan

c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum

d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa

e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan hukum itu berdaya kemampuan yang efektif.

Sementara itu dengan mengadaptasi pendapat dari Chambliss/Seidman, ada unsur-unsur dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Unsur Pembuatan Undang-Undang
2. Unsur Penegakan Hukum
3. Unsur Lingkungan

Menurut Phillip Selznick, fase-fase perkembangan penegakan hukum adalah;

1. Tahap Primitif/penyebaran, hukum sudah mulai ditembus dan diusik dari isolasinya oleh perspektif sosiologis yakni dengan mengetahkan pembenaran-pembenaran sosiologis yang bersifat dasar dan umum ke dalam studi tentang hukum.
2. Tahap ketrampilan sosiologis, tindakan yang bersifat sosiologis tidak hanya sekadar upaya demonstrasi dan teoritis tapi sudah mulai masuk ke dalam pejajakan dan penelitian-penelitian secara mendalam dengan metode-metode sosiologis.
3. tahap otonomi dan Kematangan intelektual, para ahli kembali berbicara tentang teori-teori sosiologis tetapi pada tingkat yang sangat mendalam.

Kemudian agar suatu hukum efektif dan dapat mencapai sasarannya, beberapa elemen dasar dalam hukum haruslah berjalan atau berfungsi dengan baik, yaitu :

a. Aturan hukum harus lengkap dan up to date

b. Penegakan hukum harus berjalan baik dan fair

c. Penegakan hukum harus bekerja dengan asungguh-sungguh, imajinatif dan tidak memihak.

d. Budaya hukum dan kesadaran masyarakat harus mendukung pelaksanaan hukum.
e. Reward/hukuman harus efektif, prefentif dan represif

Charles E. Reasons and Robert M. Rich sebagaimana yang dikutip Suteki mendefinisikan hukum dalam perspektif sosial sebagai berikut:

"law can be seen as a thing like any other in empirical world. It is crucial to be clear that from a sociological standpoint, law consists in observable acts, not rules as the concept of rule or norm is employed in both the literature of jurisprudence and in every day legallanguage. From a sociologoical point of view, law is not what lawyers regard as binding or obligatory precepts, but rather, for example, the observable dispositions of judges, policemen, prosecutors, or administrative officials"

Dengan demikian, hukum dapat dikatakan bukan hanya rules, melainkan juga behavior, teks hukum yang hidup (the living law) dalam realitas masyarakat berupa sikap dan perilaku. Oleh karena itu selain hukum dikonsepsikan sebagai aturan - aturan yang bersifat logis semata maka agar dapat menangkap realitas simbolik yang terdapat dalam perilaku, sikap, dan pemikiran aktor (pelaku sosial) terhadap fenomena hukum, maka dalam konteks penelitian ini, hukum juga dikonsepsikan sebagai manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dipermukaan.

Jadi bila disimpulkan bahwa penelitian hukum kini berada pada wilayah-wilayah interpretasi, mengaitkan penelitian hukum dengan perubahan sosial, mengkaji karakteristik ras, gender, usia dan kebudayaan dalam memahami hubungan antara peneliti dengan yang diteliti, yang seluruh kecenderungan itu termasuk dalam kategori penelitian kualitatif.

Metode kualitatif dalam penelitan hukum, dari suatu fenomena sosial yang diteliti, peneliti dapat menemukan alasan-alasan (reasons) yang tersembunyi di balik tindakan para pelaku sosial atau menemukan makna sosial (social meaning). Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian hukum, memungkinkan peneliti dapat memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dunianya. Selain itu pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal adanya sampel, yang dikenal adalah studi kasus. Objek yang

diteliti berupa domain-domain atau situasi sosial tertentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan. Domain tersebut bisa terdiri dari: (1) lembaga pembuat hukum, (2) pemegang peran, (3) lembaga penerap hukum nasional sampai di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Bodgan Robert dan Teven J. Taylor, Kualitatif, Dasar-Dasar Penelitian, Terjemahan A. Khozin Afandi, Usaha Nasional, Surabaya, 1993

Danim Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, 2002
Esmi Warassih, Hukum Dalam perspektif Sosial, Alumni, Bandung, 1981

----------, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005

----------, Ilmu Hukum Kontemplatif (Surgawi & Manusiawi) dalam Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, Thafa Media, Yogyakarta, 2016

F. Susanto Anthon, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum, Setara Press, Malang, 2015

Faisal Sanapiah, " Varian-Varian Kontemporer Penelitian Sosial" dalam Burhan Bungin (ed), Metodologi Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Hanitijo Soemitro Ronny, Studi Hukum Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007

Parsudi Suparlan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Program Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

Rahardjo Satjipto, Pemanfaaatan Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. 1977

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan pencerahan, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004

Suteki, "Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber

Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial: Studi Terhadap Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2008

Wiknyosoebroto Soetandyo, Keragaman dalam Konsep Umum, Butir Pemikiran Dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 2008

IQRA

Indonesia Qualitative Researcher Association

Diterbitkan oleh :
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas BIna Darma

Didukung Oleh :

ASPIKOM
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ILMU KOMUNIKASI
Koordinator Wilayah Sumatera Selatan

ISBN 978-979-3877-37-2